



EMBARGO

Sampati tanggal 24 Agustus 2022



KAJIAN TERAPAN TAHUN 2022

Indeks Survey Ekonomi Indonesia (ISEI)

Tim Kajian Terapan Bidang I



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuh

Alhamdulillah, segala puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas Rahmat-Nya **“Laporan Kajian Terapan dalam Rangka Pleno ISEI Ke-XXII Tahun 2022”** dapat diselesaikan dengan baik. Kajian terapan ini disusun atas kerjasama antara PP-ISEI Bidang 1 dengan ISEI Cabang aktif seluruh Indonesia dengan mengambil tema **“Indeks Survei Ekonomi Indonesia (ISEI) dalam Menghadapi Normalisasi Kebijakan”**.

Laporan kajian terapan merupakan bentuk bukti upaya kontribusi ISEI terhadap dinamika kondisi perekonomian nasional. Kajian terapan ini bertujuan untuk menganalisis ekspektasi kondisi ekonomi, persepsi dampak tantangan ekonomi, serta persepsi peranan pemerintah baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah. Kajian terapan ini menggunakan metode survei. Survei dilakukan secara daring (*google survei*) dengan target responden adalah anggota ISEI di seluruh Indonesia untuk memberikan respons terhadap kuisioner yang diberikan. Penyusunan analisa dan laporan hasil survei dilakukan oleh tim di tingkat cabang menggunakan pendekatan yang seragam yang disusun oleh Pengurus ISEI Pusat bersama dengan para Koordinator Wilayah (WILAYAH).

Laporan kajian terapan ini diharapkan dapat memperkuat posisi ISEI sebagai mitra strategis dalam kebijakan ekonomi di daerah masing-masing. Selain itu, laporan kajian terapan ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi atau masukan dan pertimbangan kepada pemerintah pusat.

Kami menghaturkan terima kasih kepada Bank Indonesia khususnya Gubernur Bank Indonesia selaku Ketua Umum ISEI yaitu Bapak Perry Warjiyo, Ph.D dan Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia selaku Sekretaris Umum ISEI yaitu Bapak Dr. Solikin M. Juhro, yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan laporan kajian terapan ini, Kami juga tak lupa menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada seluruh Pengurus Inti, Para Ketua Bidang, Anggota ISEI Pusat dan Daerah serta berbagai pihak yang turut serta dalam seluruh proses penyusunan laporan kajian terapan ini.

Tidak ada gading yang tidak retak, oleh karena itu kami Tim Kajian terbuka lebar atas saran dan kritik yang membangun. Demikian disampaikan, semoga Kajian Terapan ini memberikan manfaat untuk berbagai pihak baik Pemerintah Pusat, Daerah, masyarakat, maupun *stakeholder*.

Jakarta, 20 Agustus 2022

Ketua Bidang 1-PP -ISEI

Dr. Anggito Abimanyu







Tim Penyusun Kajian Terapan Bidang 1 PP-ISEI

Ketua:

Amalia Adininggar Widyasanti, PhD

Deputi Bidang Ekonomi

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas

Anggota:

1. Dr. Wasiaturrahma
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga
2. Dr. Nasrudin Djoko Surjono
Kepala Bappeda, Provinsi DKI Jakarta
3. Bhayu Purnomo, MSc, MA
Economist, Indonesia Resident Representative Office, IMF
4. Akbar Suwardi, SE
Senior Manager, Credit Portfolio Risk, PT Bank Rakyat Indonesia
5. Satriyo Dwicahyo, M.Sc.
Sekolah Vokasi, Universitas Gajah Mada







RINGKASAN EKSEKUTIF

Di tengah kondisi ekonomi makroekonomi Indonesia yang relatif baik dan kondisi ketidakpastian global yang terus menyebabkan fluktuasi perekonomian global, Indonesia memerlukan tinjauan ilmiah untuk mengetahui ekspektasi indikator makro ekonomi berdasarkan persepsi pengamat dan pelaku ekonomi. Kondisi perekonomian Indonesia tentunya tidak dapat dipisahkan dari persepsi pelaku ekonomi karena kondisi perekonomian ke depan dapat berubah berdasarkan ekspektasi pelaku ekonomi saat ini.

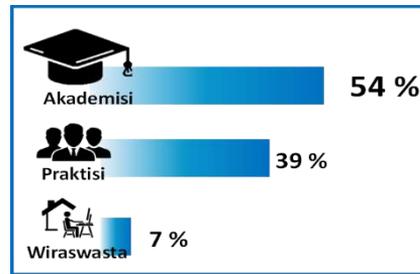
Hingga saat ini indeks persepsi yang tersedia hanya pada tingkat nasional. Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) dapat membantu menjembatani pemahaman pemangku kebijakan pusat terhadap persepsi pelaku ekonomi di daerah. Hal ini dapat memberdayakan pemikiran para anggota ISEI mengingat anggota ISEI yang tersebar di seluruh Indonesia dan dengan tingkat pemahaman terhadap teori-teori ekonomi yang cukup baik mulai dari pengajar, ekonom, hingga penyusun kebijakan.

Pelaksanaan survei Indeks Indikator Survei Ekonomi Indonesia (Indeks ISEI) guna untuk mengukur pandangan, optimisme, serta ekspektasi para ekonom, akademisi dan praktisi yang tergabung sebagai anggota ISEI baik di tingkat pusat maupun daerah. Secara umum pertanyaan survei mencakup informasi persepsi ekspektasi kondisi ekonomi, tantangan kondisi ekonomi, dan peranan pemerintah terhadap perekonomian Indonesia.

Survei yang diselenggarakan oleh Tim Kajian Bidang I Pengurus Pusat (PP)–ISEI telah dilaksanakan dengan **jumlah responden yang mencapai 3.472 orang yang tersebar pada seluruh cabang wilayah ISEI.** Responden terbanyak berasal dari pulau Jawa, yaitu 1.087 responden atau 31,31% dari total keseluruhan responden. Responden lainnya terdiri dari 806 responden yang berasal dari Sumatra (23,20%), 538 responden berasal dari Sulawesi (15,50%), 522 responden berdomisili di Kalimantan (15,04%), 431 responden berasal dari Bali, Maluku, Nusa Tenggara, dan 92 responden berasal dari Papua (2,65%).



Sementara itu apabila dilihat Pekerjaan responden yang dikelompokkan menjadi akademisi, praktisi, dan wiraswasta, maka berdasarkan pengelompokkan tersebut, diperoleh bahwa 1.893 responden atau 54% merupakan akademisi, 1.353 responden atau 39% bekerja sebagai praktisi, dan 226 atau 7% responden adalah wiraswasta



Secara umum, berdasarkan hasil survei Indeks ISEI, 49% responden menyatakan kondisi perekonomian Indonesia saat ini lebih baik dibandingkan sebelumnya. Jika dilihat dari tiga indikator makroekonomi, 51,9% responden menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia akan menjadi lebih baik. Namun mayoritas responden menyatakan bahwa tingkat pengangguran dan inflasi di Indonesia akan lebih buruk daripada sebelumnya.

	Pertumbuhan Ekonomi Indonesia	Tingkat Pengangguran Indonesia	Tingkat Inflasi
Lebih Baik	51.9%	22.5%	15.7%
Lebih Buruk	13.7%	42.1%	59.2%
Sama Saja	34.4%	35.4%	25.1%

Sedangkan untuk kondisi perekonomian daerah saat ini, 45% responden menyatakan bahwa kondisinya sama saja atau tidak terlalu ada perubahan yang signifikan. Mayoritas responden memiliki persepsi bahwa Indikator pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran daerah sama saja dibandingkan sebelumnya. Namun untuk tingkat inflasi, mayoritas responden menganggap bahwa inflasi akan menjadi lebih buruk atau meningkat.

	Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Tingkat Pengangguran Daerah	Tingkat Inflasi
Lebih Baik	39.5%	19.7%	14.7%
Lebih Buruk	14.6%	37.4%	54.0%
Sama Saja	45.9%	42.9%	31.3%

Hasil survei menunjukkan bahwa tiga tantangan terbesar dari perekonomian nasional untuk saat ini dan 3 bulan ke depan adalah: (i) kenaikan suku bunga kredit; (ii) pertumbuhan investasi yang melambat; serta (iii) volatilitas nilai tukar. Indikator tersebut menunjukkan bahwa investasi dan ekspor masih diharapkan sebagai sumber aktivitas perekonomian nasional, sehingga suku bunga, perkembangan investasi, dan



nilai tukar menjadi indikator utama yang menjadi perhatian para anggota ISEI. Sementara itu, tantangan terbesar perekonomian daerah saat ini berdasarkan hasil survei adalah: (i) volatilitas nilai tukar; (ii) kenaikan suku bunga kredit; serta (iii) kondisi politik di dalam negeri.

Anggota ISEI memiliki persepsi positif terhadap kemampuan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dalam hal: (i) peningkatan kualitas sumber daya manusia dan masyarakat (termasuk: Pendidikan dan kesehatan); (ii) perbaikan sistem logistik untuk kelancaran distribusi; serta (iii) menciptakan rasa aman dan tenteram.

Hasil survei Indeks ISEI ini diharapkan dapat bermanfaat dan digunakan pemangku kepentingan di tingkat daerah maupun nasional serta dapat rutin dilaksanakan setiap 6 bulan sekali, sehingga indeks ISEI dapat berkontribusi kepada perumusan kebijakan ke depannya. Di dalam laporan ini juga akan terdapat laporan yang lebih detail dan mendalam dari setiap wilayah untuk mengetahui persepsi dari masing-masing wilayah hingga cabang.







DAFTAR ISI

COVER	1
KATA PENGANTAR	1
RINGKASAN EKSEKUTIF	5
DAFTAR ISI.....	9
DAFTAR TABEL	11
DAFTAR GAMBAR	13
BAB I PENDAHULUAN.....	15
BAB 2 HASIL SURVEI NASIONAL	23
BAB 3 HASIL SURVEI WILAYAH BARAT	31
BAB 4 HASIL SURVEI WILAYAH TENGAH.....	39
BAB 5 HASIL SURVEI WILAYAH TIMUR.....	53
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	65
LAMPIRAN	71







DAFTAR TABEL

Tabel 1. Lima Tantangan Ekonomi Terbesar Nasional	27
Tabel 2. Persepsi Kemampuan Pemerintah berdasarkan Survei Nasional	29
Tabel 3. Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi di Wilayah Barat	34
Tabel 4. Perkembangan Laju Inflasi di Wilayah Barat	35
Tabel 5. Lima Dampak Terbesar dari Tantangan Ekonomi Berdasarkan Survei Wilayah Barat	36
Tabel 6. Top 5 Persepsi Kemampuan Pemerintah Berdasarkan Survei Wilayah Barat	38
Tabel 7. Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi di Wilayah Indonesia Tengah	43
Tabel 8. Perkembangan Survei Indeks Keyakinan Konsumen	55
Tabel 9. Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Sulawesi, Maluku, dan Papua	56
Tabel 10. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi di Wilayah Timur	58
Tabel 11. Lima Dampak Terbesar dari Tantangan Ekonomi Berdasarkan Survei Wilayah Timur	60
Tabel 12. Top 5 Persepsi Kemampuan Pemerintah berdasarkan Wilayah Timur	62







DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Ekspektasi Kondisi Ekonomi Nasional	23
Gambar 2. Pertumbuhan Komponen PDB, Retail Sales Index & Konsumsi RT, dan Tingkat Mobilitas	24
Gambar 3. Perkembangan Inflasi Nasional	26
Gambar 4. Perkembangan Indeks Keyakinan Konsumen Nasional dan Wilayah Barat	32
Gambar 5. Kondisi Ekonomi Secara Umum Wilayah Indonesia Bagian Tengah	40
Gambar 6. Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Indonesia Bagian Tengah	41
Gambar 7. Tingkat Pengangguran	44
Gambar 8. Tingkat Inflasi Wilayah Indonesia Bagian Tengah (Jawa-Bali)	45
Gambar 9. Top 5 Tantangan Ekonomi Nasional Terbesar Saat Ini	47
Gambar 10. Top 5 Tantangan Ekonomi Nasional 3 Bulan Kedepan	47
Gambar 11. Tantangan Ekonomi Daerah Saat Ini	49
Gambar 12. Top 5 Tantangan Daerah 3 Bulan Kedepan	50
Gambar 13. Top 5 Persepsi Kemampuan Pemerintah Pusat	51
Gambar 14. Top 5 Persepsi Kemampuan Pemerintah Daerah	52
Gambar 15. Ekspektasi Kondisi Ekonomi Wilayah Timur	54
Gambar 16. Ekspektasi Kondisi Ekonomi Berdasarkan Survei 3 Provinsi Terbesar	55
Gambar 17. Ekspektasi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia di 3 Provinsi Terbesar	56
Gambar 18. Ekspektasi Tingkat Pengangguran di 3 Provinsi Terbesar	57







BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang

Seiring dengan pemulihan aktivitas ekonomi global, kondisi ekonomi makro nasional juga mengalami perbaikan. Berbagai indikator perekonomian Indonesia saat ini telah menunjukkan pemulihan dan bergerak dengan cukup baik. Namun demikian, dengan adanya normalisasi kebijakan, persepsi pelaku ekonomi domestik perlu dikelola dengan baik. Persepsi serta ekspektasi atas aktivitas ekonomi domestik adalah faktor penting dalam upaya pemulihan ekonomi Indonesia. Pemerintah telah berkomitmen mengembalikan defisit anggaran ke tingkat 3 persen terhadap PDB tahun depan dengan tidak melanjutkan pembiayaan anggaran oleh bank sentral. Dari sisi kebijakan moneter, Bank Indonesia juga telah menyampaikan bahwa kebijakan moneter longgar akan mulai dikurangi tahun ini.

Sebagai negara dengan perekonomian terbuka, Indonesia tidak dapat lepas dari pengaruh persepsi pelaku ekonomi terhadap perekonomian. Oleh karena itu, memahami persepsi terkini dapat membantu mempersiapkan kebijakan yang tepat. Berbagai negara di dunia telah melakukan normalisasi kebijakan, termasuk Indonesia. Namun, ketidakpastian global masih menjadi tantangan utama yang memungkinkan terjadinya pergerakan yang dinamis dalam kondisi perekonomian dan pengambilan kebijakan.

Oleh sebab itu, sebagai negara yang terbuka dalam berpendapat, persepsi pelaku ekonomi terhadap perekonomian nasional masih perlu untuk dicermati guna mendukung akselerasi perbaikan ekonomi nasional dan normalisasi kebijakan. Indeks persepsi ekonomi yang tersedia saat ini masih bersifat nasional dan belum melingkupi kondisi di daerah.

Dalam hal ini, ISEI berusaha menjembatani pemahaman para pemangku kebijakan di tingkat pusat terhadap persepsi pelaku ekonomi di tingkat daerah. Anggota ISEI tersebar di seluruh Indonesia dengan tingkat pemahaman terhadap teori-teori ekonomi yang cukup baik (pengajar, ekonom, penyusun kebijakan).





Persepsi dan ekspektasi dari anggota ISEI di daerah akan memberikan gambaran yang lebih jelas terkait kondisi terkini sehingga diharapkan dapat membantu menyediakan informasi terkait persepsi pelaku ekonomi di tingkat daerah melalui survei ini. Selain bermanfaat untuk pemangku kebijakan, survei ini juga dapat memberdayakan tenaga dan pemikiran anggota ISEI di daerah. Survei ISEI diadakan oleh dari Bidang 1 Pengurus Pusat (PP)-ISEI yang bertujuan untuk mengukur pandangan, optimisme, serta ekspektasi ekonom, akademisi dan praktisi yang tergabung sebagai anggota ISEI baik di tingkat pusat maupun di daerah.

Penelitian ini bertujuan mengukur pandangan, optimisme, serta ekspektasi akademisi dan praktisi yang tergabung sebagai anggota ISEI terkait aktivitas ekonomi di daerahnya. Dengan ruang Lingkup kegiatan dalam penelitian ini mencakup:

1. Penyusunan kuesioner terkait persepsi dan ekpektasi kondisi perekonomian, tantangan dan kemampuan pemerintah Pusat dan Daerah.
2. Penyebarluasan kuesioner kepada anggota ISEI di seluruh Indonesia.
3. Pengumpulan hasil kuesioner sebagai data primer.
4. Distribusi hasil kuesioner kepada tiap-tiap cabang melalui Koordinator Wilayah (WILAYAH).
5. Analisis hasil survei oleh cabang menggunakan motodologi tertentu.
6. Pembahasan hasil laporan cabang di tingkat WILAYAH.
7. Penyusunan laporan WILAYAH untuk hasil survei tingkat nasional dan rekomendasi kebijakan.

Metodologi

Survei dilakukan secara daring (*google survei*) dengan target responden anggota ISEI di seluruh Indonesia untuk memberikan respon terkait kondisi nasional dan kondisi daerah. Lalu Proses pembuatan analisa data dengan menggunakan average Index dari setiap parameter untuk setiap propinsi atau cabangang ISEI yang selanjutnya diagregasi ke Wilayah dan menjadi Nilai Nasional. Penyusunan analisa dan laporan hasil survei dilakukan oleh tim di cabang menggunakan





pendekatan yang seragam yang disusun oleh pengurus ISEI Pusat bersama dengan para Koordinator Wilayah (WILAYAH).

Analisis survei dapat dilakukan dalam tiga tingkat yang berbeda yaitu pada tingkat nasional, wilayah, dan cabang-cabang di dalam masing-masing wilayah. Pada tingkat nasional dan wilayah semua data akan dianalisis namun untuk data di tingkat cabang hanya dianalisis jika memenuhi threshold (batas minimum) sampel.



Berdasarkan data cabang terbaru, berikut daftar cabang yang memenuhi batas minimum untuk dapat dianalisis. Jumlah sampel minimum yang dibutuhkan adalah 27 responden. Dari 54 cabang yang terdaftar, hanya 34 yang memenuhi jumlah minimum sampel sehingga ada 20 cabang yang tidak dapat dianalisis.

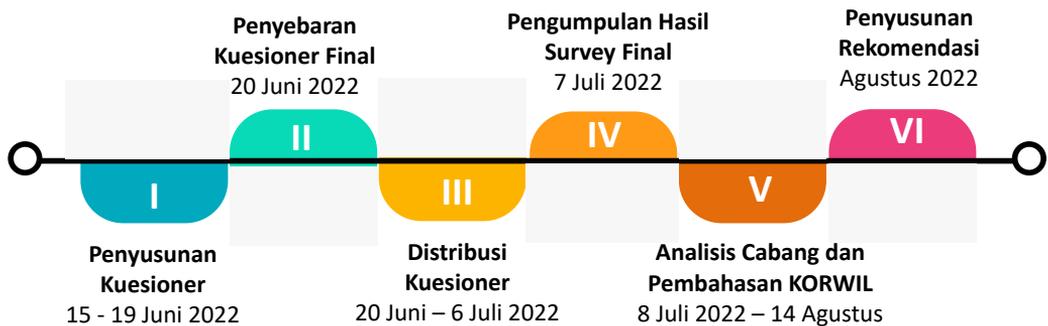




Adapun Output yang didapatkan dari penelitian ini, yaitu:

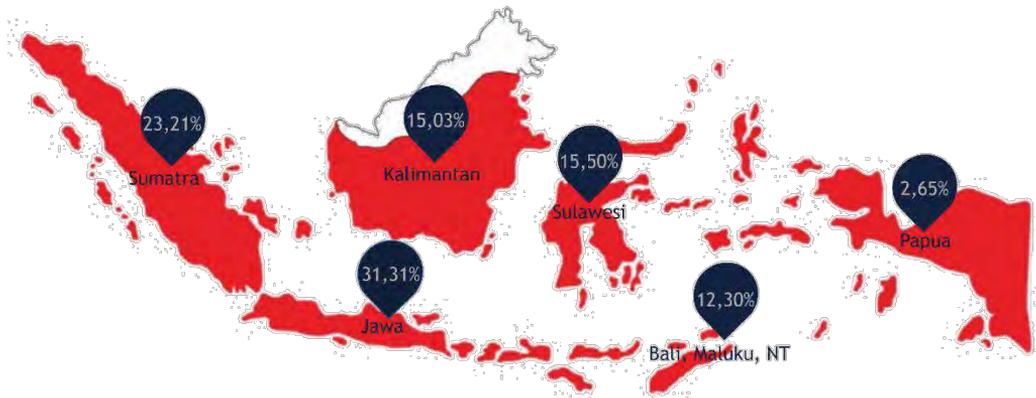
- (1) Laporan Kajian Terapan di tingkat Propinsi (ISEI Cabang Koordinator)
 - a. Tujuan dan Fokus Kajian
 - b. Metode dan Hasil Kajian
 - c. Kesimpulan dan Rekomendasi
- (2) Ringkasan Klaster Dampak dan Kebijakan yang memuat hasil kajian dan rekomendasi kebijakan ekonomi daerah kepada seluruh *stakeholders* terkait (Tim Kajian oleh Koordinator Wilayah ISEI Bidang Organisasi).
- (3) Webinar metodologi dan diskripsi kajian untuk memperoleh *feedback* sehingga rekomendasi memperoleh klarifikasi, informasi, dan justifikasi kuat dari *stakeholders* di daerah masing-masing (Koordinator Wilayah ISEI Bidang Organisasi).
- (4) Presentasi Klaster, matriks kebijakan dan rekomendasi dari masing-masing Wilayah yaitu Barat, Tengah dan Timur pada saat Sidang Pleno ISE Ke XXI berlangsung (Wakil Tim Kajian).

Linimasa





Profil Responden Survei

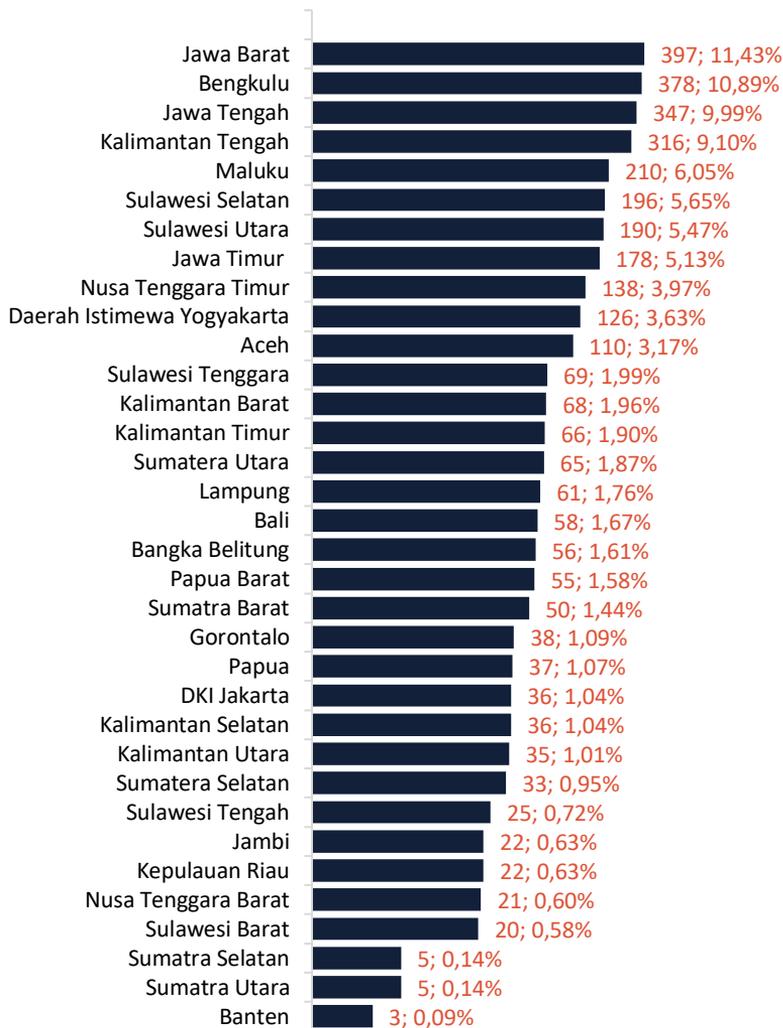


Pada Survei Q2-2022, tercatat 3.472 responden yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia berpartisipasi dalam pengisian survei ini. Responden terbanyak berasal dari pulau Jawa, yaitu 1.087 responden atau 31,31% dari total keseluruhan responden. Responden lainnya terdiri dari 806 responden yang berasal dari Sumatra (23,20%), 538 responden berasal dari Sulawesi (15,50%), 522 responden berdomisili di Kalimantan (15,04%), 431 responden berasal dari Bali, Maluku, Nusa Tenggara, dan 92 responden berasal dari Papua (2,65%).

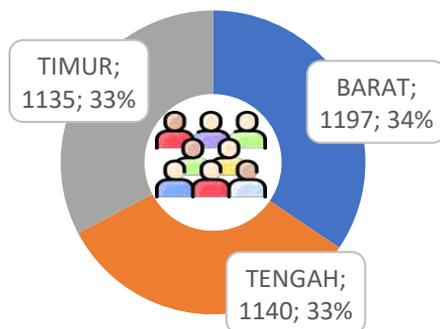
Dimana Provinsi Jawa Barat merupakan wilayah dengan responden terbanyak, yaitu 397 responden (11,43%), sedangkan responden paling sedikit berasal dari provinsi Banten, yaitu 3 responden (0,09%).

Jika dilihat dari persebaran wilayah, secara umum responden tersebar secara merata pada masing – masing wilayah (terlihat dari presentase responden). Masing – masing cabang menyumbang sekitar 33% - 34% terhadap total responden. Wilayah barat memiliki jumlah responden yang tertinggi dibanding wilayah lainnya.



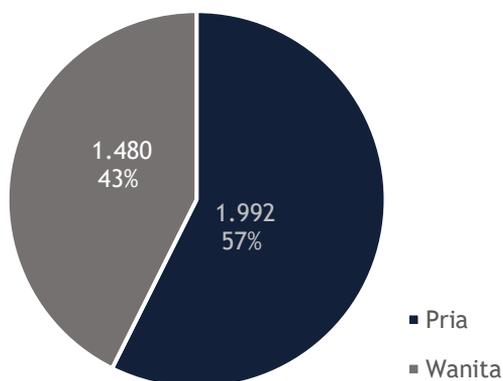


Persebaran Responden Berdasarkan Wilayah

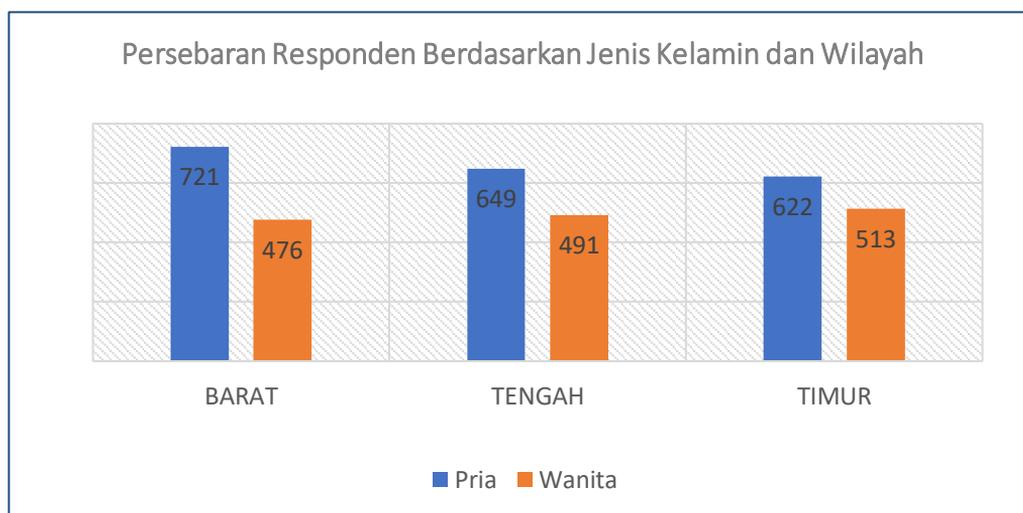




Selain itu, apabila dilihat responden dari Jenis kelamin, maka terdapat sebanyak 1.992 responden pria atau 57,37% dari total responden, dimana jumlah ini lebih banyak dari jumlah responden wanita. Total responden wanita adalah 1.480 responden (42,63%).

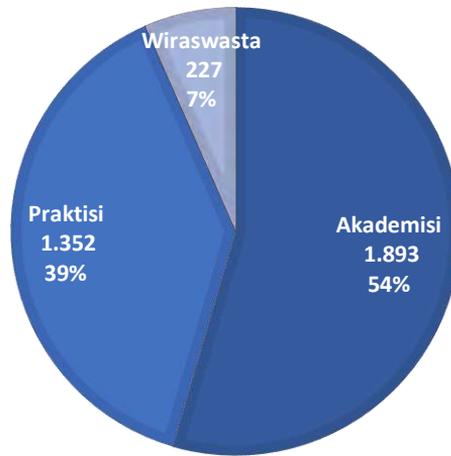


Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin dan wilayah, secara umum responden tersebar secara merata dan tidak terlalu menunjukkan ketimpangan jumlah responden laki – laki dan perempuan yang terlalu tinggi meskipun secara presentase ditemukan lebih banyak responden laki – laki.





Sementara itu apabila dilihat Pekerjaan responden yang dikelompokkan menjadi akademisi, praktisi, dan wiraswasta, maka berdasarkan pengelompokan tersebut, diperoleh bahwa 1.893 responden atau 54% merupakan akademisi, 1.353 responden atau 39% bekerja sebagai praktisi, dan 226 atau 7% responden adalah wiraswasta.





BAB 2 HASIL SURVEI NASIONAL

Ringkasan Survei

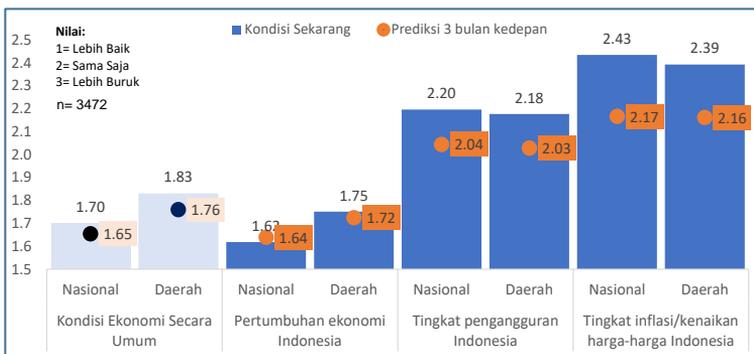
Terdapat 3,472 respon sebagai dasar sampel. Responden berasal dari 52 cabang ISEI di seluruh Indonesia. 2 (dua) cabang tidak menyampaikan respon. Secara umum, responden melihat bahwa kondisi ekonomi nasional saat ini masih cukup baik dan memiliki potensi untuk lebih baik dalam 3 (tiga) bulan kedepan. Potensi isu yang muncul dari hasil survei pendahuluan ini adalah bahwa persepsi kemampuan terbaik pemerintah, pusat dan daerah, dalam mengatasi isu-isu ekonomi belum sejalan dengan persepsi sumber risiko yang akan dihadapi dimasa depan.

Ekspektasi Kondisi Ekonomi Nasional dan Daerah

Kondisi Ekonomi Secara Umum

Hasil survei secara nasional menunjukkan bahwa, kondisi perekonomian nasional dan daerah akan membaik untuk saat ini hingga tiga bulan ke depan. Hal ini didasarkan dari rata-rata nilai indeks terhadap kondisi perekonomian nasional sebesar 1,70 untuk saat ini dan 1,65 untuk tiga bulan ke depan, serta terhadap perekonomian daerah sebesar 1,83 untuk saat ini dan 1,76 untuk tiga bulan ke depan. Hasil survei ISEI Index nasional ini mengindikasikan optimisme keyakinan terhadap kondisi perekonomian secara umum baik saat ini maupun tiga bulan ke depan.

Gambar 1. Ekspektasi Kondisi Ekonomi Nasional



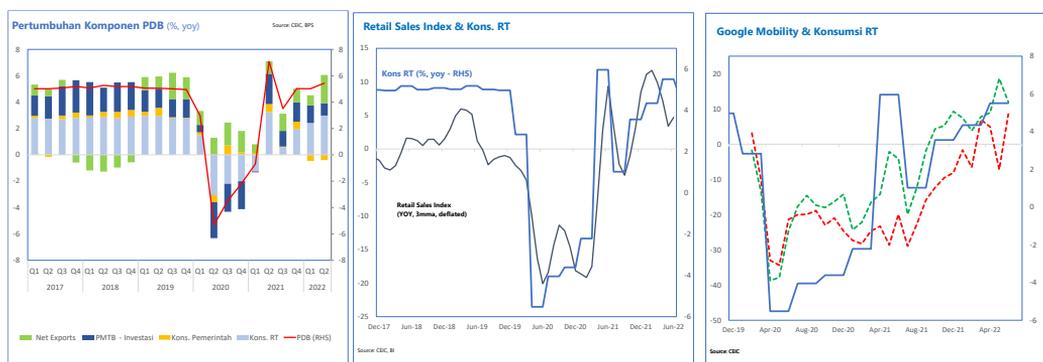


Hasil ISEI Index di tingkat nasional, jika dibandingkan dengan Survei Keyakinan Konsumen Bank Indonesia yang juga dilakukan untuk tingkat nasional, mengindikasikan hal yang sejalan. Bank Indonesia (BI) mencatat indeks keyakinan konsumen (IKK) terhadap ekonomi RI pada tingkat 123,2 pada Juli 2022. Hal ini menunjukkan bahwa optimisme konsumen terhadap kondisi ekonomi tetap terjaga dengan hasil survei yang berada pada area optimistis (atau lebih dari 100). Pada Index ISEI, angka ekspektasi yang berada pada tingkat dibawah 2 (dua) menunjukan hal yang sama, adanya optimisme terhadap kondisi ekonomi kedepan.

Pertumbuhan Ekonomi

Hasil survei secara nasional menunjukkan bahwa, pertumbuhan ekonomi nasional membaik saat ini, namun sedikit melambat pada tiga bulan ke depan. Hal ini didasarkan dari rata-rata nilai indeks terhadap pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 1,62 untuk saat ini dan 1,64 untuk tiga bulan ke depan. Hasil ini sejalan dengan kondisi perekonomian saat ini yang membaik dan prediksi Bank Indonesia mengenai pertumbuhan ekonomi nasional kedepan.

Gambar 2. Pertumbuhan Komponen PDB, Retail Sales Index & Konsumsi RT, dan Tingkat Mobilitas



Sumber: CEIC, BPS, BI, dan Google Mobility, 2022

Hasil survei ISEI Index relatif sejalan dengan perkembangan indikator-indikator makro nasional, dimana perbaikan aktivitas ekonomi dan tingkat konsumsi





rumah tangga yang mulai meningkat pada paruh pertama tahun 2022 telah mendorong optimisme masyarakat terhadap perekonomian, sehingga pertumbuhan ekonomi pada kondisi saat ini membaik. Selain itu, pertumbuhan ekonomi nasional yang membaik saat ini juga disebabkan oleh (1) mobilitas masyarakat Indonesia yang telah relatif kembali seperti pada saat sebelum pandemi, (2) tingkat konsumsi rumah tangga yang mulai meningkat pada paruh pertama tahun 2022, dan (3) penjualan retail yang telah tumbuh dan menunjukkan daya beli masyarakat pulih pasca-pandemi.

Namun, berdasarkan hasil survei ISEI Indeks, pada tiga bulan ke depan pertumbuhan ekonomi nasional sedikit melambat. Hasil ini sejalan dengan dengan proyeksi Bank Indonesia bahwa pertumbuhan ekonomi 2022 diperkirakan bias ke bawah dalam kisaran 4,5-5,3 persen¹. Hal ini utamanya dikarenakan oleh perlambatan ekonomi global yang dapat berpengaruh pada kinerja ekspor, sementara kenaikan inflasi dapat menahan konsumsi swasta².

Hasil survei secara nasional menunjukkan bahwa, pertumbuhan ekonomi daerah akan membaik pada saat ini dan tiga bulan ke depan. Hal ini didasarkan dari rata-rata nilai indeks terhadap pertumbuhan ekonomi daerah sebesar 1,75 untuk saat ini dan 1,72 untuk tiga bulan ke depan. Hasil ini sejalan dengan capaian indikator utama pembangunan yaitu pertumbuhan ekonomi Triwulan-II 2022 di sebagian besar provinsi di Indonesia yang telah berhasil melampaui target Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2022².

Tingkat Pengangguran

Hasil survei nasional menunjukkan bahwa tingkat pengangguran nasional dan daerah akan membaik untuk saat ini dan tiga bulan ke depan. Hal ini didasarkan dari rata-rata nilai indeks terhadap tingkat pengangguran nasional sebesar 2,20 untuk saat ini dan 2,04 untuk tiga bulan ke depan serta terhadap tingkat pengangguran daerah sebesar 2,18 untuk saat ini dan 2,03 untuk tiga bulan ke depan. Hasil ini sejalan dengan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik bahwa

¹ Laporan Kebijakan Moneter Triwulan II-2022, Bank Indonesia, Juli 2022. <https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/Pages/Laporan-Kebijakan-Moneter-Triwulan-II-2022.aspx#:~:text=Dengan%20perkembangan%20tersebut%2C%20pertumbuhan%20ekonomi%202022%20diprakirakan%20bias%20ke%20bawah,meningkatnya%20tekanan%20terhadap%20arus%20modal>. Diakses pada 21 Agustus 2022.

² Capaian Indikator Utama Pembangunan, Bappenas, 2022. <https://simreg.bappenas.go.id/home/pemantauan/lpe>. Diakses pada 21 Agustus 2022.





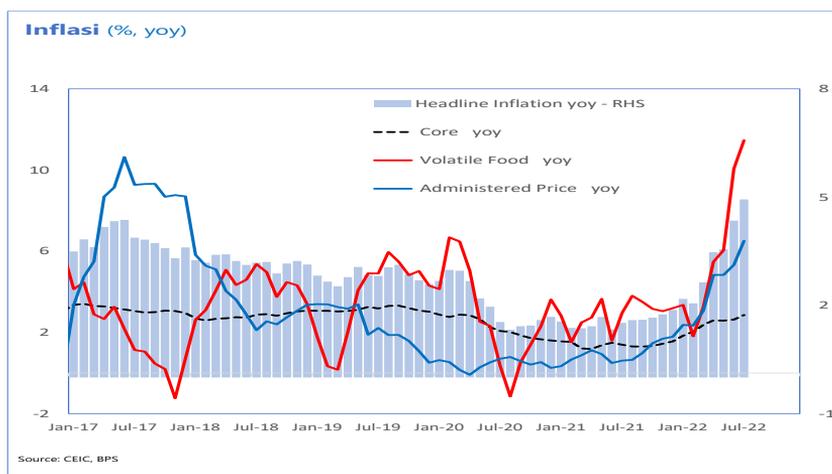
TPT menurun sebesar 350 ribu orang pada Februari 2022 dibandingkan periode sebelumnya.

TPT pada tiga bulan ke depan akan mengalami penurunan sejalan dengan perbaikan ekonomi nasional dan daerah. International Labor Organization (ILO) juga melaporkan bahwa pola pemulihan kondisi ketenagakerjaan di dunia akan bervariasi di seluruh wilayah, negara, dan sektor. Perbaikan pasar tenaga kerja untuk wilayah Asia Pasifik, Eropa, dan Asia Tengah akan mengalami penurunan tingkat pengangguran meskipun masih berada di atas angka pra pandemi yang disebabkan oleh ketidakpastian global yang berakibat pada ketidakpastian dunia usaha.

Tingkat Inflasi

Hasil survei nasional menunjukkan bahwa tingkat inflasi nasional dan daerah memburuk untuk saat ini dan akan semakin membaik pada tiga bulan ke depan. Hal ini didasarkan dari rata-rata nilai indeks terhadap tingkat pengangguran nasional sebesar 2,43 untuk saat ini dan 2,17 untuk tiga bulan ke depan serta terhadap tingkat inflasi daerah sebesar 2,39 untuk saat ini dan 2,16 untuk tiga bulan ke depan. Laju perbaikan ekonomi setelah pandemi yang diiringi kenaikan harga-harga komoditas menjadi penyebab kenaikan inflasi secara merata di seluruh Indonesia. Sampai paruh pertama tahun 2022, inflasi dari bahan makanan (*volatile food*) telah mencapai tingkat yang cukup tinggi.

Gambar 3. Perkembangan Inflasi Nasional





Inflasi Indonesia secara umum lebih baik dibandingkan dari negara lainnya. Pengendalian inflasi ini perlu menjadi perhatian karena akan berdampak pada berbagai sektor ekonomi. Pemerintah telah menyatakan akan fokus pada pengelolaan harga energi dan pangan. Sementara, Bank Indonesia tetap fokus pada pengelolaan moneter. Beberapa kebijakan dalam pengendalian inflasi yang dapat diambil adalah (1) memastikan pasokan pangan yang melibatkan pemerintah pusat dan daerah serta (2) memberikan subsidi energi tambahan agar tidak ada kenaikan harga yang memberatkan masyarakat. Berbagai kebijakan ini sangat membantu dalam membangun ekspektasi positif untuk menurunkan inflasi lebih jauh lagi khususnya pada tiga bulan ke depan.

Persepsi Dampak Tantangan Ekonomi

Dampak dari Tantangan Ekonomi Nasional

Hasil survei nasional berpersepsi bahwa kenaikan suku bunga kredit menjadi yang paling terdampak bagi perekonomian nasional saat ini dari berbagai tantangan yang akan dihadapi baik nasional maupun global. Setelah itu, disusul oleh pertumbuhan investasi yang melambat, volatilitas kurs, deficit APBN, serta gejala dan kondisi politik dalam negeri. Sedangkan untuk tiga bulan ke depan, suku bunga kredit masih menjadi yang paling terdampak dari tantangan yang dihadapi, disusul oleh pertumbuhan investasi yang melambat, deficit APBN, volatilitas kurs, serta gejala dan kondisi politik dalam negeri.

Tabel 1. Lima Tantangan Ekonomi Terbesar Nasional

Di Tingkat Nasional		Di Tingkat Daerah	
Kondisi Saat ini	Prediksi 3 Bulan Kedepan	Kondisi Saat ini	Prediksi 3 Bulan Kedepan
1. Kenaikan suku bunga kredit	1. Kenaikan suku bunga kredit	1. Volatilitas kurs	1. Volatilitas kurs
2. Pertumbuhan investasi yang melambat	2. Pertumbuhan investasi yang melambat	2. Kenaikan suku bunga kredit	2. Kenaikan suku bunga kredit
3. Volatilitas kurs	3. Volatilitas kurs	3. Gejala dan kondisi politik dalam negeri	3. Pertumbuhan investasi yang melambat
4. Defisit APBN	4. Defisit APBN	4. Defisit APBN	4. Defisit APBN
5. Gejala dan kondisi politik dalam negeri	5. Gejala dan kondisi politik dalam negeri	5. Pertumbuhan investasi yang melambat	5. Gejala dan kondisi politik dalam negeri

Sumber: Hasil Survei Ekonom ISEI, 2022





Tantangan ekonomi nasional terbesar baik saat ini maupun tiga bulan ke depan adalah “kenaikan suku bunga kredit”. Kenaikan suku bunga kredit sebagai tantangan terbesar di tingkat nasional relatif sejalan dengan (1) kondisi pasar keuangan global, (2) tekanan sektor moneter domestik, (3) permintaan kredit yang telah meningkat seiring dengan perbaikan ekonomi. Kenaikan suku bunga acuan di Amerika Serikat (AS) diperkirakan akan memicu pergerakan arus modal keluar dari pasar Indonesia sehingga mendorong kenaikan suku bunga domestik. Namun demikian, Bank Indonesia (BI) telah menyatakan tidak akan terburu-buru dalam menaikkan suku bunga acuan. Walaupun suku bunga acuan global telah beranjak naik, suku bunga acuan domestik (BI *7-day reverse repo rate*) masih berada pada level yang rendah yaitu posisi 3,5 persen.

Dampak dari Tantangan Ekonomi Daerah

Hasil survei nasional berpersepsi bahwa volatilitas kurs menjadi yang paling terdampak bagi perekonomian daerah saat ini dari berbagai tantangan yang akan dihadapi baik nasional maupun global. Setelah itu, disusul oleh kenaikan suku bunga kredit, gejolak dan kondisi politik dalam negeri, deficit APBN, serta pertumbuhan investasi yang melambat. Sedangkan untuk tiga bulan ke depan, volatilitas kurs masih menjadi yang paling terdampak dari tantangan yang dihadapi, disusul oleh kenaikan suku bunga kredit, pertumbuhan investasi yang melambat, deficit APBN, serta gejolak dan kondisi politik dalam negeri.

Volatilitas kurs akan menjadi yang paling terdampak bagi perekonomian daerah. Volatilitas kurs utamanya disebabkan oleh tantangan dan faktor eksternal yang berdampak cukup signifikan terhadap perekonomian nasional dan daerah seperti tingginya ketidakpastian di tingkat global dikarenakan pembalikan kebijakan moneter dari AS dan risiko geopolitik Russia-Ukraina menimbulkan kekhawatiran. Kekhawatiran terhadap volatilitas kurs ini kemungkinan juga didorong atas kekhawatiran pelemahan Rupiah yang dapat meningkatkan harga barang-barang konsumsi dan produksi.





Persepsi Peranan Pemerintah

Keyakinan terhadap Kemampuan Pemerintah Pusat

Hasil survei nasional menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah pusat terbesar adalah peningkatan *human capital* (termasuk peningkatan sumberdaya manusia berkualitas dan peningkatan kesehatan masyarakat), disusul oleh perbaikan system logistic untuk kelancaran distribusi, menciptakan rasa aman dan tenteram, menyediakan infrastruktur, serta akselerasi pertumbuhan investasi. Hasil survei nasional menunjukkan kepercayaan responden terhadap peningkatan *human capital telah* sesuai dengan upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam memberikan prioritas pada pengembangan SDM.

Tabel 2. Persepsi Kemampuan Pemerintah berdasarkan Survei Nasional

Pemerintah Pusat	Pemerintah Daerah
1. Peningkatan human capital (termasuk peningkatan sumberdaya manusia yang berkualitas dan peningkatan kesehatan masyarakat)	1. Menciptakan rasa aman dan tenteram
2. Perbaikan sistem logistik untuk kelancaran distribusi	2. Perbaikan sistem logistik untuk kelancaran distribusi
3. Menciptakan rasa aman dan tenteram	3. Peningkatan human capital (termasuk peningkatan sumberdaya manusia yang berkualitas dan peningkatan kesehatan masyarakat)
4. Menyediakan dan merawat infrastruktur	4. Menciptakan lingkungan hidup hijau, meningkatkan ketahanan bencana, dan meminimalisir dampak perubahan iklim.
5. Akselerasi pertumbuhan investasi	5. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan menciptakan lapangan kerja

Sumber: Hasil Survei Ekonom ISEI, 2022

Human Capital menjadi faktor penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional sehingga Indoensia diharapkan dapat mencapai Visi 2045 dan keluar dari *middle income trap* pada 2036. Kesehatan masyarakat yang terjamin dapat memperlancar masyarakat dalam bekerja dan mengenyam Pendidikan. Pendidikan secara indirect memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Peningkatan pendidikan masyarakat dapat berdampak pada penurunan kemiskinan dan ketimpangan sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi³.

³ : Goodspeed (2000): Education Spending, Inequality, and Economic Growth: Evidence from US State. Diakses pada 1 Agustus 2022.





Keyakinan terhadap Kemampuan Pemerintah Daerah

Hasil survei nasional menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah daerah terbesar adalah menciptakan rasa aman dan tentram, kemudian disusul oleh perbaikan system logistic untuk kelancaran distribusi, peningkatan *human capital* (termasuk peningkatan sumberdaya manusia berkualitas dan peningkatan kesehatan masyarakat), menciptakan lingkungan hijau, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan menciptakan lapangan kerja. Pemerintah daerah telah dianggap sangat mampu dalam menciptakan rasa aman dan tentram bagi masyarakat.

Menciptakan rasa aman dan tentram dapat mendorong kegiatan masyarakat yang lebih produktif, meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat, serta menciptakan iklim usaha yang sehat. Hal ini dapat memicu peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan. Hasil studi empiris juga menunjukkan bahwa keamanan yang tercipta akan meningkatkan kestabilan kondisi social sehingga mengurangi tingkat kejahatan yang berdampak dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi⁴.

⁴ Zhang, M., Zou, X., & Sha, L. (2019). Social Security and Sustainable Economic Growth: Based on the Perspective of Human Capital. *Sustainability*, 11(3), 662. doi:10.3390/su11030662. Diakses pada 17 Agustus 2022.





BAB 3 HASIL SURVEI WILAYAH BARAT

Ringkasan Survei

Terdapat 1,197 respon sebagai dasar sampel di Wilayah Barat. Secara umum, responden melihat bahwa kondisi ekonomi saat ini masih cukup baik ditunjukkan dengan rataan index yang lebih kecil dari angka 2 (dua) baik untuk tingkat Nasional (1.77) maupun tingkat Daerah (1.9). Selanjutnya, angka index yang mengecil menunjukkan bahwa responden di Wilayah Barat juga mempunyai adanya ekspektasi perbaikan bagi kondisi perekonomian, baik Nasional maupun Daerah, dalam 3 (tiga) bulan kedepan. Persepsi tantangan ekonomi di Wilayah Barat relatif belum sejalan dengan persepsi kemampuan terbaik pemerintah dalam mengelola perekonomian. Secara umum, penanganan kenaikan suku bunga dan pengelolaan volatilitas kurs menjadi tantangan terbesar sementara pengelolaan human capital dan penciptaan rasa aman adalah kekuatan tertinggi terkait kemampuan pemerintah.

Ekspektasi Kondisi Ekonomi Indonesia Bagian Barat

Kondisi Ekonomi Secara Umum

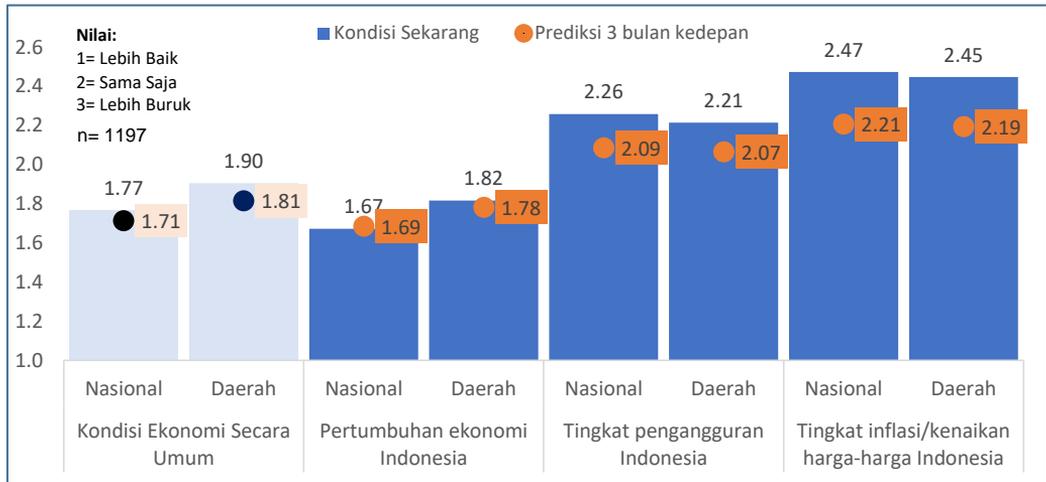
Berdasarkan hasil survei dapat dianalisis bahwa terdapat ekspektasi perbaikan persepsi kondisi ekonomi diantara anggota ISEI Wilayah Barat. Hal ini konsisten pada kondisi ekonomi nasional maupun di kondisi daerah yang secara umum sudah menunjukkan perbaikan dari kondisi pandemi. Index “Kondisi Ekonomi Secara Umum” untuk 3 (tiga) bulan kedepan memberikan adanya perbaikan ekspektasi sejalan dengan kondisi di tingkat nasional.

Hasil survei wilayah barat menunjukkan bahwa, kondisi perekonomian nasional akan membaik untuk saat ini hingga tiga bulan ke depan. Hal ini didasarkan dari rata-rata nilai indeks terhadap kondisi perekonomian nasional sebesar 1,77 untuk saat ini dan 1,71 untuk tiga bulan ke depan. Hasil survei ISEI Index di wilayah barat mengindikasikan optimisme keyakinan terhadap kondisi perekonomian secara umum baik saat ini maupun tiga bulan ke depan yang sejalan jika dibandingkan dengan hasil Survei Keyakinan Konsumen Bank Indonesia khususnya komponen Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) dan Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) nasional. IKE dan IEK ditingkat nasional tercatat



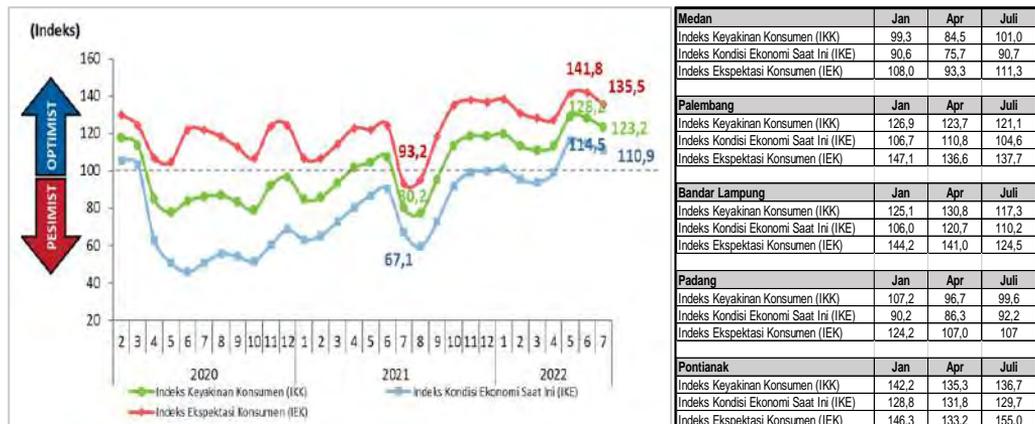
berada di atas 100 yang berarti bahwa terdapat optimisme kondisi perekonomian saat ini dan di periode selanjutnya akan pulih dan membaik⁵.

Grafik 1. Ekspektasi Kondisi Ekonomi Wilayah Barat



Sumber: Hasil Survei Ekonom ISEI, 2022

Gambar 4. Perkembangan Indeks Keyakinan Konsumen Nasional dan Wilayah Barat



Sumber: Survei Keyakinan Konsumen, Bank Indonesia, Juli 2022.

Ditingkat daerah hasil survei ISEI indeks menunjukkan bahwa perekonomian akan membaik namun berada di bawah tingkat nasional. Hal ini didasarkan dari rata-rata nilai indeks terhadap kondisi perekonomian daerah sebesar 1,90 untuk

⁵ https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/Documents/SK_Juli_2022.pdf



saat ini dan 1,81 untuk tiga bulan ke depan. Kondisi ini sesuai pula dengan hasil Survei Keyakinan Konsumen bahwa di beberapa daerah di wilayah barat menunjukkan hasil IKE di atas 100 (seperti di Palembang, Bandar Lampung, dan Pontianak), namun di daerah lainnya menunjukkan IKE di bawah 100 (seperti di Medan dan Padang)¹. Di lima daerah yang termasuk dalam wilayah barat tersebut, tercatat seluruhnya memiliki angka IEK di atas 100, yang berarti bahwa kondisi perekonomian untuk periode selanjutnya akan semakin membaik sesuai dengan hasil survei ISEI Indeks¹.

Pertumbuhan Ekonomi

Hasil survei wilayah barat menunjukkan bahwa, pertumbuhan ekonomi nasional saat ini akan membaik, namun akan mengalami perlambatan pada tiga bulan ke depan. Hal ini didasarkan dari rata-rata nilai indeks terhadap pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 1,67 untuk saat ini dan 1,69 untuk tiga bulan ke depan. Hasil survei ISEI Indeks untuk pertumbuhan ekonomi nasional ini sesuai dengan proyeksi Bank Indonesia bahwa pertumbuhan ekonomi 2022 diperkirakan bias ke bawah dalam kisaran 4,5-5,3 persen⁶. Hal ini utamanya dikarenakan oleh perlambatan ekonomi global yang dapat berpengaruh pada kinerja ekspor, sementara kenaikan inflasi dapat menahan konsumsi swasta².

Disisi lain, pertumbuhan ekonomi wilayah barat akan semakin membaik pada tiga bulan ke depan. Hal ini didasarkan rata-rata nilai indeks terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah barat sebesar 1,82 untuk saat ini dan 1,78 untuk tiga bulan ke depan. Hasil survei ini sejalan dengan capaian indikator utama pembangunan yaitu pertumbuhan ekonomi Triwulan-II 2022 di sebagian besar provinsi wilayah barat yang telah berhasil melampaui target Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2022 diantaranya Aceh, Riau, Jambi, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, dan Kalimantan Tengah⁷.

⁶ Laporan Kebijakan Moneter Triwulan II-2022, Bank Indonesia, Juli 2022. <https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/Pages/Laporan-Kebijakan-Moneter-Triwulan-II-2022.aspx#:~:text=Dengan%20perkembangan%20tersebut%2C%20pertumbuhan%20ekonomi%202022%20diprakirakan%20bias%20ke%20bawah,meningkatnya%20tekanan%20terhadap%20arus%20modal>. Diakses pada 21 Agustus 2022.

⁷ Capaian Indikator Utama Pembangunan, Bappenas, 2022. <https://simreg.bappenas.go.id/home/pemantauan/lpe>. Diakses pada 21 Agustus 2022.





Tingkat Pengangguran

Di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi global, masalah pengangguran menjadi salah satu persoalan yang penting untuk menjadi perhatian. Isu tingkat pengangguran memberikan ekspektasi yang cukup negatif di wilayah barat. Angka index yang berada diatas nilai 2 (dua) menunjukkan adanya kecenderugangna responden melihat isu pengangguran sebagai lebih buruk. Namun, tekanan ini diperkirakan akan membaik dalam 3 (tiga) bulan kedepan baik di tingkat nasional maupun tingkat daerah.

Hampir seluruh provinsi yang tercakup dalam wilayah barat mempunyai Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang lebih rendah dibandingkan nasional. Terdapat 3 (tiga) provinsi di wilayah barat dengan TPT yang lebih tinggi dari nasional yaitu Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Hal ini perlu menjadi perhatian karena tiga provinsi tersebut juga memiliki jumlah populasi yang besar.

Tabel 3. Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi di Wilayah Barat

No	Provinsi	TPT Agustus 2021	TPT Februari 2022
1.	Aceh	6,30	5,97
2.	Sumatera Utara	6,33	5,47
3.	Sumatera Barat	6,52	6,17
4.	Riau	4,42	4,40
5.	Jambi	5,09	4,70
6.	Sumatera Selatan	4,98	4,74
7.	Bengkulu	3,65	3,39
8.	Lampung	4,69	4,31
9.	Kep. Bangka Belitung	5,03	4,18
10.	Kep. Riau	9,91	8,02

Sumber: Badan pusat Statistik, 2022

Dalam tiga bulan kedepan, TPT diperkirakan akan terus menurun selaras dengan memulihnya perekonomian di Indonesia. Pemulihan aktivitas ekonomi diharapkan akan mendorong sektor produktif dan ekspor yang memiliki tingkat penyerapan tenaga kerja yang cukup tinggi. Kota-kota utama di wilayah barat tercatat mempunyai sektor-sektor industri dan pengolahan yang cukup besar.





Tingkat Inflasi

Hasil survei wilayah barat menunjukkan bahwa, tingkat inflasi nasional dan wilayah barat akan meningkat untuk saat ini dan menurun tiga bulan ke depan. Hal ini didasarkan dari rata-rata nilai indeks terhadap tingkat inflasi nasional untuk saat ini sebesar 2,47 dan tiga bulan ke depan sebesar 2,21, sedangkan di wilayah barat untuk saat ini sebesar 2,45 dan untuk tiga bulan ke depan sebesar 2,19.

Tingginya kekhawatiran terhadap inflasi nasional dari hasil survei Wilayah Barat sejalan dengan realisasi inflasi tahun berjalan yang memang sudah mulai menunjukkan peningkatan bahkan diperkirakan akan melewati batas atas target inflasi tahun ini. Disisi lain, beberapa kota di Wilayah Barat mengalami laju inflasi yang lebih tinggi dari Nasional, diantaranya Banda Aceh, Padang, Palembang, Bengkulu, dan Bandar Lampung. Laju perbaikan ekonomi setelah pandemi yang diiringi kenaikan harga-harga komoditas menjadi penyebab kenaikan inflasi secara merata di seluruh Indonesia. Sampai paruh pertama tahun 2022, inflasi dari bahan makanan (*volatile food*) telah mencapai tingkat yang cukup tinggi.

Tabel 4. Perkembangan Laju Inflasi di Wilayah Barat

	Inflasi (% , mom)						
	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli
KOTA BANDA ACEH	1.01	-0.34	0.59	1.23	0.92	0.76	0.98
KOTA MEDAN	1.04	-0.28	0.68	0.43	0.76	1.39	0.27
KOTA PADANG	1.03	0.09	0.72	0.60	1.38	1.16	1.35
KOTA PALEMBANG	0.94	-0.01	0.70	0.96	0.81	0.90	0.76
KOTA BENGKULU	0.54	-0.10	0.74	1.45	0.53	0.60	0.91
KOTA BANDAR LAMPUNG	0.38	-0.40	0.93	0.81	0.58	1.22	0.75
KOTA BATAM	0.74	-0.48	0.73	1.12	0.79	0.84	0.61
KOTA PONTIANAK	0.87	0.28	0.43	1.05	0.71	0.07	0.05
KOTA PALANGKA RAYA	0.62	-0.01	0.69	0.97	0.93	0.87	0.56
INDONESIA	0.56	-0.02	0.66	0.95	0.40	0.61	0.64

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

Namun demikian, seluruh responden di Wilayah Barat menunjukkan adanya optimisme pada inflasi baik ditingkat nasional maupun daerah untuk beberapa waktu kedepan. Meskipun hasil Wilayah Barat saat ini menunjukkan adanya kekhawatiran pada topik inflasi nasional maupun daerah, namun hal tersebut akan berkurang dalam 3 (tiga) bulan kedepan. Pemerintah telah mengingatkan para pemimpin di daerah untuk memperhatikan harga komoditas yang naik di





daerah masing-masing. Presiden Joko Widodo juga telah berpesan agar pemerintah daerah dapat menggunakan anggaran tak tertuga untuk pembiayaan transportasi komoditas, sehingga dapat menurunkan harga-harga terutama bahan pokok.

Persepsi Dampak Tantangan Ekonomi

Dampak dari Tantangan Ekonomi Nasional

Hasil survei wilayah barat berpersepsi bahwa kenaikan suku bunga kredit menjadi yang paling terdampak bagi perekonomian nasional saat ini dari berbagai tantangan yang akan dihadapi baik nasional maupun global. Setelah itu, disusul oleh volatilitas kurs, pertumbuhan investasi yang melambat, deficit APBN, serta gejala dan kondisi politik dalam negeri. Sedangkan untuk tiga bulan ke depan, suku bunga kredit masih menjadi yang paling terdampak dari tantangan yang dihadapi, disusul oleh volatilitas kurs, deficit APBN, pertumbuhan investasi yang melambat, serta gejala dan kondisi politik dalam negeri.

Tabel 5. Lima Dampak Terbesar dari Tantangan Ekonomi Berdasarkan Survei Wilayah Barat

Di Tingkat Nasional		Di Tingkat Daerah	
Kondisi Saat ini	Prediksi 3 Bulan Kedepan	Kondisi Saat ini	Prediksi 3 Bulan Kedepan
1. Kenaikan suku bunga kredit	1. Kenaikan suku bunga kredit	1. Volatilitas kurs	1. Volatilitas kurs
2. Volatilitas kurs	2. Volatilitas kurs	2. Kenaikan suku bunga kredit	2. Kenaikan suku bunga kredit
3. Pertumbuhan investasi yang melambat	3. Defisit APBN	3. Gejala dan kondisi politik dalam negeri	3. Defisit APBN
4. Defisit APBN	4. Pertumbuhan investasi yang melambat	4. Defisit APBN	4. Pertumbuhan investasi yang melambat
5. Gejala dan kondisi politik dalam negeri	5. Gejala dan kondisi politik dalam negeri	5. Pertumbuhan investasi yang melambat	5. Gejala dan kondisi politik dalam negeri

Sumber: Hasil Survei Ekonom ISEI, 2022

Tantangan ekonomi nasional terbesar baik saat ini maupun tiga bulan ke depan adalah “kenaikan suku bunga kredit”. Faktor yang cukup signifikan dalam peningkatan suku bunga kredit berasal dari pergerakan suku bunga global yang





sudah mulai beranjak naik. Potensi kenaikan suku bunga acuan di AS dapat ditransmisikan ke kondisi domestik. Hal ini perlu disikapi dengan pengelolaan kebijakan moneter yang terukur agar dapat menjaga suku bunga dan inflasi agar tetap pada level moderat.

Dampak dari Tantangan Ekonomi Daerah

Hasil survei wilayah barat berpersepsi bahwa volatilitas kurs menjadi yang paling terdampak bagi perekonomian daerah saat ini dari berbagai tantangan yang akan dihadapi baik nasional maupun global. Setelah itu, disusul oleh kenaikan suku bunga kredit, gejolak dan kondisi politik dalam negeri, deficit APBN, dan pertumbuhan investasi yang melambat. Sedangkan untuk tiga bulan ke depan, volatilitas kurs masih menjadi yang paling terdampak dari tantangan yang dihadapi, disusul oleh kenaikan suku bunga kredit, deficit APBN, pertumbuhan investasi yang melambat, serta gejolak dan kondisi politik dalam negeri.

Volatilitas kurs akan menjadi yang paling terdampak bagi perekonomian daerah. Volatilitas kurs utamanya disebabkan oleh tantangan dan faktor eksternal yang berdampak cukup signifikan terhadap perekonomian nasional dan daerah seperti tingginya ketidakpastian di tingkat global dikarenakan pembalikan kebijakan moneter dari AS dan risiko geopolitik Russia-Ukraina menimbulkan kekhawatiran.

Persepsi Peranan Pemerintah

Keyakinan terhadap Kemampuan Pemerintah Pusat

Hasil survei wilayah barat menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah pusat terbesar adalah peningkatan *human capital* (termasuk peningkatan sumberdaya manusia berkualitas dan peningkatan kesehatan masyarakat), kemudian disusul oleh menciptakan rasa aman dan tentram, perbaikan system logistic untuk kelancaran distribusi, akselerasi pertumbuhan investasi, serta merawat dan menyediakan infrastruktur. Hasil ini sejalan dengan berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam memberikan prioritas pengembangan SDM.





Tabel 6. Top 5 Persepsi Kemampuan Pemerintah Berdasarkan Survei Wilayah Barat

Pemerintah Pusat	Pemerintah Daerah
1. Peningkatan human capital (termasuk peningkatan sumberdaya manusia yang berkualitas dan peningkatan kesehatan masyarakat)	1. Menciptakan rasa aman dan tenteram
2. Menciptakan rasa aman dan tenteram	2. Perbaiki sistem logistik untuk kelancaran distribusi
3. Perbaiki sistem logistik untuk kelancaran distribusi	3. Peningkatan human capital (termasuk peningkatan sumberdaya manusia yang berkualitas dan peningkatan kesehatan masyarakat)
4. Akselerasi pertumbuhan investasi	4. Menciptakan lingkungan hidup hijau, meningkatkan ketahanan bencana, dan meminimalisir dampak perubahan iklim.
5. Menyediakan dan merawat infrastruktur	5. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan menciptakan lapangan kerja

Sumber: Hasil Survei Ekonom ISEI, 2022

Keyakinan terhadap Kemampuan Pemerintah Daerah

Hasil survei wilayah barat menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah daerah terbesar adalah menciptakan rasa aman dan tenteram, kemudian disusul oleh perbaikan sistem logistik untuk kelancaran distribusi, peningkatan *human capital* (termasuk peningkatan sumberdaya manusia berkualitas dan peningkatan kesehatan masyarakat), menciptakan lingkungan hijau, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan menciptakan lapangan kerja. Pemerintah daerah telah dianggap sangat mampu dalam menciptakan rasa aman dan tenteram bagi masyarakat.





BAB 4 HASIL SURVEI WILAYAH TENGAH

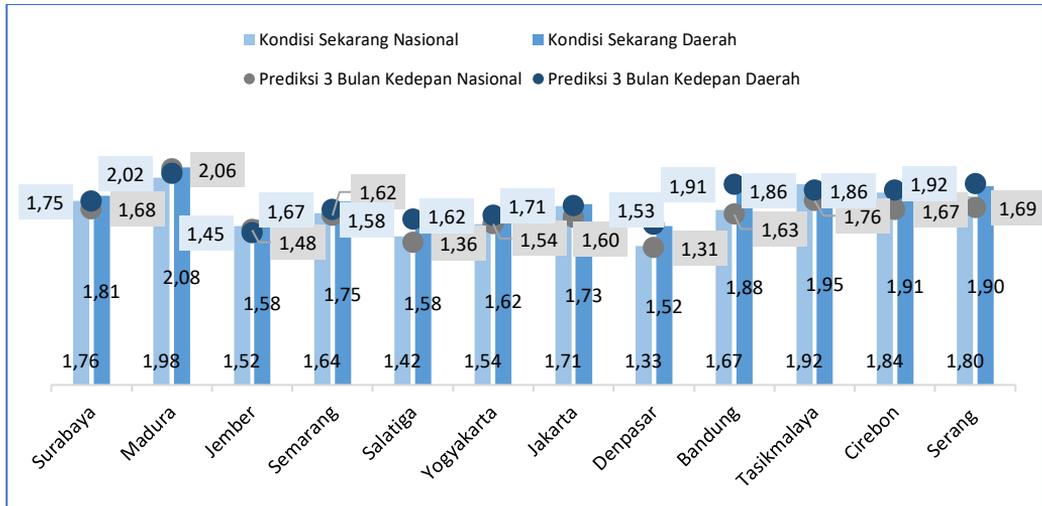
Ringkasan Survei

Survei ISEI Indeks Korwil Tengah mencakup Semarang, Tasikmalaya, Yogyakarta, Surabaya, Cirebon, Denpasar, Jakarta, Madura, Serang, Bandung, Salatiga, dan Jember yang terdiri dari 1.140 orang responden. Hasil survei menunjukkan bahwa persepsi responden terhadap kondisi ekonomi secara umum akan membaik untuk saat ini dan tiga bulan depan baik ditingkat pusat maupun daerah. Perbaikan kondisi ekonomi ini disebabkan oleh pemulihan dan perbaikan indikator makro yaitu pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, dan tingkat inflasi. Adapun persepsi responden terhadap indikator yang paling terdampak dari berbagai tantangan ekonomi di tingkat pusat adalah kenaikan suku bunga kredit untuk saat ini dan melambatnya pertumbuhan investasi untuk tiga bulan ke depan, sedangkan di tingkat daerah adalah volatilitas kurs baik untuk saat ini maupun tiga bulan ke depan. Hal ini utamanya dikarenakan kondisi ketidakpastian ekonomi yang tercipta, dampak ketegangan geopolitik, dan percepatan normalisasi kebijakan moneter. Disisi lain, responden berpersepsi bahwa kemampuan terbesar pemerintah pusat adalah terkait dengan human capital, sedangkan kemampuan terbesar pemerintah daerah adalah terkait dengan menciptakan rasa aman dan tenang.

Hasil survei wilayah tengah menunjukkan bahwa, kondisi perekonomian nasional dan wilayah tengah untuk saat ini akan membaik, namun akan mengalami perlambatan pada tiga bulan ke depan. Hal ini didasarkan dari rata-rata nilai indeks terhadap kondisi perekonomian nasional sebesar 1,68 untuk saat ini dan 1,62 untuk tiga bulan ke depan serta terhadap kondisi perekonomian wilayah tengah sebesar 1,78 untuk saat ini dan 1,74 untuk tiga bulan ke depan. Hasil survei ini sejalan dengan kondisi perekonomian saat ini yang menunjukkan perbaikan khususnya pada indikator pertumbuhan ekonomi. Berbagai indikator yang menjadi faktor penentu kondisi perekonomian diantaranya pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, dan tingkat inflasi yang akan dibahas lebih lanjut dalam analisis ini.



Gambar 5. Kondisi Ekonomi Secara Umum Wilayah Indonesia Bagian Tengah (Jawa-Bali)



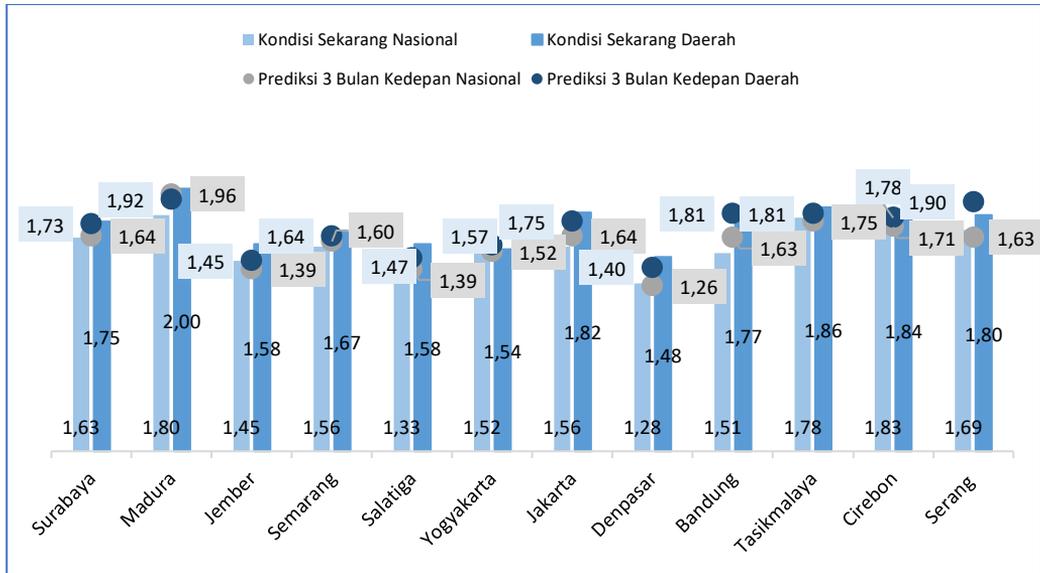
Sumber: Hasil Survei Ekonom ISEI, 2022

Pertumbuhan Ekonomi

Hasil survei wilayah tengah menunjukkan bahwa, pertumbuhan ekonomi nasional dan wilayah tengah untuk saat ini akan membaik, namun akan mengalami perlambatan pada tiga bulan ke depan. Hal ini didasarkan dari rata-rata nilai indeks terhadap pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 1,58 untuk saat ini dan 1,59 untuk tiga bulan ke depan serta terhadap kondisi perekonomian wilayah tengah sebesar 1,72 untuk saat ini dan 1,69 untuk tiga bulan ke depan. Hasil ini sejalan dengan kondisi pertumbuhan ekonomi nasional saat ini dan proyeksi dari berbagai organisasi dunia.



**Gambar 6. Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Indonesia Bagian Tengah
(Jawa-Bali)**



Sumber: Hasil Survei Ekonom ISEI, 2022

Tercatat pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan II tahun 2022 tumbuh lebih tinggi sebesar 5,44 persen (YoY) jika dibandingkan triwulan sebelumnya yang hanya sebesar 5,01 persen (YoY). Pencapaian pertumbuhan ekonomi ini juga semakin memperkuat level perekonomian untuk terus melaju melampaui level prapandemi. Pertumbuhan ekonomi yang menguat ini disebabkan oleh faktor pendorong utama diantaranya akselerasi vaksinasi booster, relaksasi aturan perjalanan yang mendorong peningkatan konsumsi masyarakat, peningkatan daya beli dan konsumsi masyarakat di bulan Ramadhan dan Lebaran, serta kinerja ekspor komoditas unggulan yang masih sangat kuat⁸.

Angka indeks mencatatkan bahwa dalam tiga bulan ke depan pertumbuhan ekonomi nasional dan wilayah tengah akan mengalami perlambatan seiring dengan perlambatan ekonomi global. Hasil survei ini sejalan dengan proyeksi dari International Monetary Fund (IMF) bahwa perekonomian global pada 2022 akan mengalami perlambatan yang disebabkan oleh berkurangnya daya beli dan

⁸ Pertumbuhan Ekonomi Triwulan II 2022 Menguat Signifikan di Tengah Ketidakpastian dan Tren Perlambatan Global, Siaran Pers, Kementerian Keuangan, Agustus 2022. <https://fiskal.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers-detil/430>. Diakses pada 17 Agustus 2022.





kebijakan moneter yang lebih ketat, dan dampak dari ketegangan geopolitik Rusia-Ukraina⁹. World Bank juga memproyeksikan bahwa perekonomian global akan melambat pada 2022 yang dilatarbelakangi oleh perang Rusia-Ukraina yang mengganggu aktivitas ekonomi, investasi, perdagangan, dan permintaan masyarakat¹⁰. World Bank juga memproyeksikan bahwa kondisi ekonomi negara berkembang juga akan mengalami penurunan diakibatkan oleh dampak negatif perang Rusia-Ukraina yang menyebabkan kenaikan harga komoditas dan energi³.

Perekonomian Indonesia diproyeksikan akan meningkat pada 5,1 persen pada tahun 2022 dan 5,3 persen pada tahun 2023 karena peningkatan permintaan, kepercayaan konsumen yang meningkat, dan persyaratan perdagangan yang membaik. Guna merealisasikan proyeksi ini, maka diperlukan berbagai upaya dalam mempertahankan reformasi kebijakan struktural untuk mendukung pertumbuhan ekonomi ke depan diantaranya (1) reformasi pajak untuk memperbesar belanja publik yang berkualitas; (2) memprioritaskan lingkungan pendukung usaha bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM); (3) memikirkan kembali kebijakan perdagangan untuk mengembangkan industri hilir yang lebih hijau; dan (4) pendalaman sektor keuangan¹¹.

Tingkat Pengangguran

Hasil survei wilayah tengah menunjukkan bahwa, tingkat pengangguran nasional dan wilayah tengah akan membaik untuk saat ini dan tiga bulan ke depan. Hal ini didasarkan dari rata-rata nilai indeks terhadap tingkat pengangguran nasional dan wilayah tengah sebesar 2,19 untuk saat ini dan 2,00 untuk tiga bulan ke

⁹ Gloomy and More Uncertain: World Economic Outlook Update July 2022, IMF, 2022. <https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2022/07/26/world-economic-outlook-update-july-2022>. Diakses pada 17 Agustus 2022.

¹⁰ Stagflation Risk Rises Amid Sharp Slowdown in Growth, Press Release, Juni 2022. <https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2022/06/07/stagflation-risk-rises-amid-sharp-slowdown-in-growth-energy-markets#:~:text=Among%20emerging%20market%20and%20developing,4.8%20percent%20over%202011%2D2019>. Diakses pada 17 Agustus 2022.

¹¹ Indonesia Economic Perspectives (IEP), June 2022: Financial Deepening for Stronger Growth and Sustainable Recovery, World Bank, Juni 2022. <https://www.worldbank.org/en/country/indonesia/publication/indonesia-economic-prospects-iep-june-2022-financial-deepening-for-stronger-growth-and-sustainable-recovery>. 17 Agustus 2022.





depan. Hasil ini sejalan dengan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik saat ini dan proyeksi organisasi dunia.

Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik tercatat bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Indonesia pada Februari 2022 sebesar 5,83 persen atau sebesar 8,40 juta penduduk, menurun sekitar 350 ribu orang jika dibandingkan periode sebelumnya. Jika diklasifikasikan berdasarkan provinsi, seluruh provinsi yang berada di wilayah tengah juga mengalami penurunan TPT sebagaimana tercantum dalam Tabel 7.

Tabel 7. Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi di Wilayah Indonesia Tengah (Jawa-Bali)

No.	Provinsi	TPT Agustus 2021	TPT Februari 2022
1.	DKI Jakarta	8,50	8,00
2.	Jawa Barat	9,82	8,35
3.	Jawa Tengah	5,95	5,75
4.	DI Yogyakarta	4,56	3,73
5.	Jawa Timur	5,74	4,81
6.	Banten	8,98	8,53
7.	Bali	5,37	4,84

Sumber: Badan pusat Statistik, 2022

Penurunan TPT baik ditingkat nasional atau wilayah tengah terutama disebabkan oleh mulai membaiknya situasi pandemi dan akselerasi vaksinasi di Indonesia. Hal ini memicu kondisi dunia usaha untuk pulih dan kembali bangkit. Hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) Bank Indonesia mengindikasikan adanya peningkatan kegiatan dunia usaha pada triwulan II 2022 yang tercermin dari nilai Saldo Bersih Tertimbang (SBT) sebesar 14,13%, lebih tinggi dari SBT pada triwulan I 2022 sebesar 8,71%¹². Peningkatan kinerja usaha terindikasi terutama pada Sektor Industri Pengolahan; Perdagangan, Hotel dan Restoran; serta Pengangkutan dan Komunikasi, sejalan dengan pelonggaran kebijakan pembatasan mobilitas di berbagai daerah, perayaan Hari Besar Keagamaan

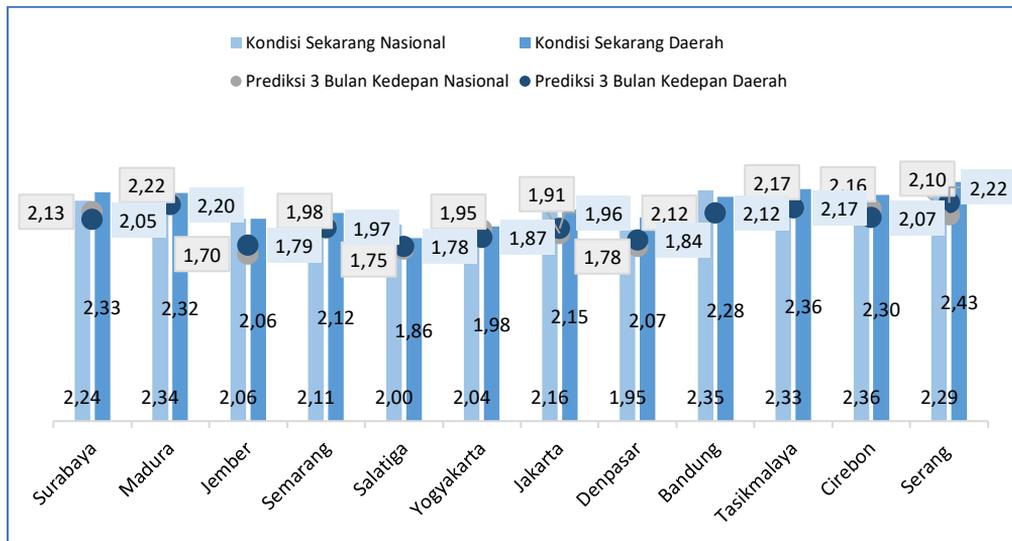
¹² Survei Kegiatan Dunia Usaha Triwulan II 2022: Kegiatan Dunia Usaha Meningkat dan Diperkirakan Tetap Kuat, Bank Indonesia, Juli 2022. https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2418122.aspx. Diakses pada 17 Agustus 2022.





Nasional (HBKN) yang mendorong permintaan, serta ketersediaan sarana produksi. Sejalan dengan perkembangan kegiatan usaha, kapasitas produksi terpakai triwulan II 2022 tercatat sebesar 73,22%, meningkat dari 73,08% pada triwulan sebelumnya dengan penggunaan tenaga kerja terindikasi membaik dan keluar dari fase kontraksi.

Gambar 7. Tingkat Pengangguran



Sumber: Hasil Survei Ekonom ISEI, 2022

TPT dalam tiga bulan ke depan diprediksikan akan membaik berdasarkan hasil survei. Hasil ini sejalan dengan proyeksi dalam SKDU bahwa kegiatan dunia usaha akan tetap menguat pada triwulan III 2022 didorong oleh kinerja beberapa sektor seperti Sektor Pertambangan dan Penggalian; dan Industri Pengolahan sejalan dengan ketersediaan sarana produksi serta Sektor Konstruksi sesuai pola historis dan peningkatan permintaan dalam negeri⁵. International Labor Organization (ILO) juga melaporkan bahwa pola pemulihan kondisi ketenagakerjaan di dunia akan bervariasi di seluruh wilayah, negara, dan sektor. Perbaikan pasar tenaga kerja untuk wilayah Asia Pasifik, Eropa, dan Asia Tengah akan mengalami penurunan tingkat pengangguran meskipun masih berada di atas angka pra



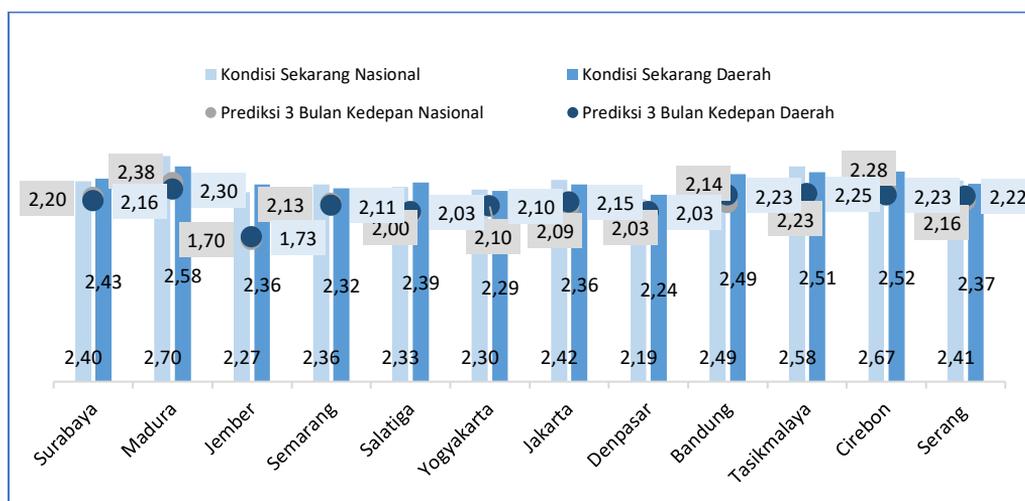


pandemi yang disebabkan oleh ketidakpastian global yang berakibat pada ketidakpastian dunia usaha¹³.

Tingkat Inflasi

Hasil survei wilayah tengah menunjukkan bahwa, tingkat inflasi nasional dan wilayah tengah akan meningkat untuk saat ini dan menurun tiga bulan ke depan. Hal ini didasarkan dari rata-rata nilai indeks terhadap tingkat inflasi nasional untuk saat ini sebesar 2,43 dan tiga bulan ke depan sebesar 2,12, sedangkan di wilayah tengah untuk saat ini sebesar 2,41 dan untuk tiga bulan ke depan sebesar 2,00. Hasil ini sejalan dengan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik saat ini dan proyeksi organisasi dunia.

Gambar 8. Tingkat Inflasi Wilayah Indonesia Bagian Tengah (Jawa-Bali)



Sumber: Hasil Survei Ekonom ISEI, 2022

Angka inflasi Tahun ke Tahun (Juli 2022 terhadap Juli 2021) tercatat sebesar 4,94 persen. Angka ini cukup tinggi didorong oleh inflasi yang terjadi pada beberapa kelompok pengeluaran yaitu Makanan, Minuman, dan Tembakau (9,35 persen); Transportasi (6,65 persen); Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin

¹³ World Employment and Social Outlook Trends 2022, International Labor Organization, 2022. https://www.ilo.org/global/research/global-reports/weso/trends2022/WCMS_834081/lang--en/index.htm. Diakses pada 17 Agustus 2022.





Rumah Tangga (4,91 persen); Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya (4,79 persen); dan Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran (3,96 persen). Inflasi ini terutama disebabkan oleh Perang Rusia Ukraina yang mengganggu pasokan pangan, minyak, dan energi global dengan permintaan yang terus meningkat sehingga harga melonjak tinggi¹⁴.

Tingkat inflasi dalam tiga bulan ke depan diprediksikan terus menurun dibandingkan saat ini. Prediksi ini didukung oleh proyeksi dari Bank Indonesia bahwa tingkat inflasi di Indonesia pada 2022 sebesar 4,60 persen seiring dengan kenaikan harga komoditas yang masih berlanjut. Kenaikan harga komoditas terutama pangan dan minyak diakibatkan oleh dampak ketegangan politik Rusia Ukraina. Perang Rusia-Ukraina menyebabkan krisis pangan dan bahan bakar. Hal ini dikarenakan *Mineral fuels, mineral oils and products of their distillation; bituminous substances* (HS 27) merupakan komoditas ekspor utama Rusia, dan Rusia merupakan pengekspor HS 27 terbesar kedua di dunia setelah Amerika Serikat pada tahun 2021 dengan nilai ekspor sebesar USD 212,4 milyar¹⁵. Sementara, komoditas ekspor utama Ukraina adalah *Cereals* (HS 10) dan Ukraina menduduki eksportir *cereals* terbesar ke empat di dunia setelah Amerika Serikat, Argentina, dan India dengan nilai ekspor sebesar USD 11,8 milyar pada tahun 2021⁸. Perang ini mendorong pasokan global yang lebih kecil terutama untuk komoditas pangan, energi dan pupuk yang akan memicu kenaikan harga global untuk komoditas ini.

¹⁴ Russia-Ukraine Conflict Puts Fragile Global Trade Recovery at Risk, Press Release, World Trade Organization, April 2022. https://www.wto.org/english/news_e/pres22_e/pr902_e.htm. Diakses pada 17 Agustus 2022.

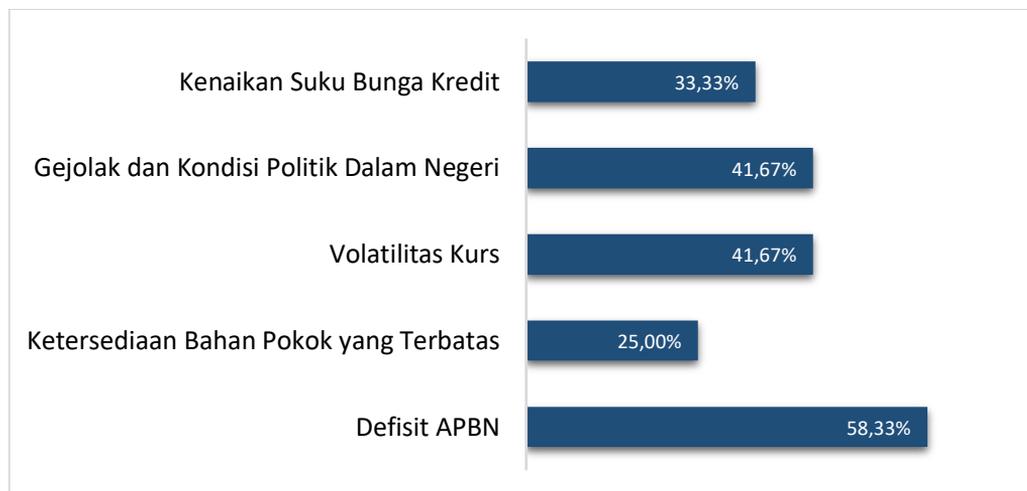
¹⁵ Trade Map, Mei 2022. <https://www.trademap.org/Index.aspx>. Diakses pada Mei 2022.



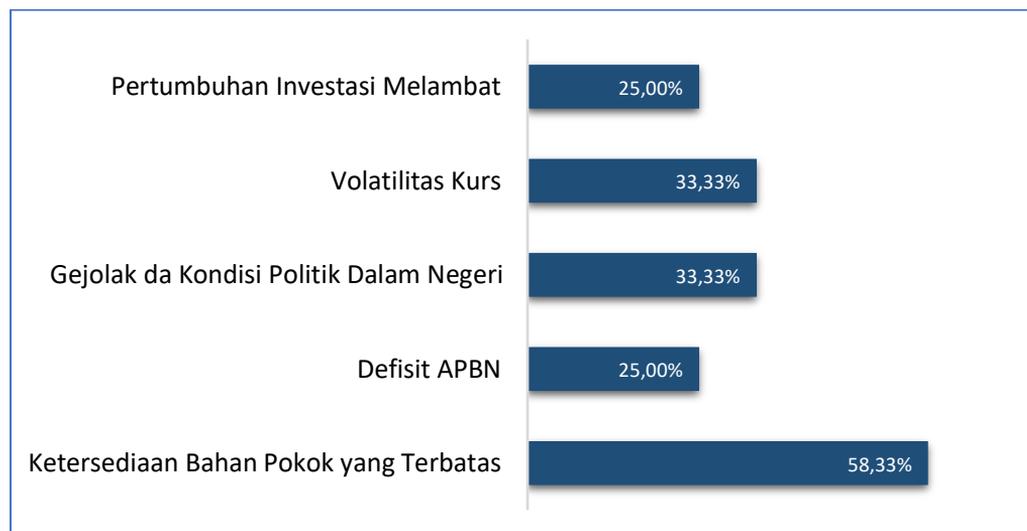


Dampak dari Tantangan Ekonomi Nasional

Gambar 9. Top 5 Tantangan Ekonomi Nasional Terbesar Saat Ini



Gambar 10. Top 5 Tantangan Ekonomi Nasional 3 Bulan Kedepan



Keterangan: Angka persentase responden yang memilih indikator sebagai urutan 1-5.

Sumber: Hasil Survei Ekonom ISEI, 2022

Hasil survei wilayah tengah menunjukkan bahwa sebanyak 33,33 persen daerah di wilayah tengah berpersepsi bahwa kenaikan suku bunga kredit menjadi yang paling berdampak bagi perekonomian nasional saat ini dari berbagai tantangan





yang akan dihadapi baik nasional maupun global. Setelah itu, disusul oleh gejolak dan kondisi politik dalam negeri, volatilitas kurs, ketersediaan bahan pokok yang terbatas, dan defisit APBN.

Kenaikan suku bunga kredit menjadi yang paling terdampak dikarenakan kondisi ketidakpastian ekonomi yang tercipta, dampak ketegangan geopolitik, dan percepatan normalisasi kebijakan moneter. Beberapa upaya telah dilakukan oleh Bank Indonesia agar Ssuku bunga kredit tetap terjaga untuk pengendalian inflasi, stabilisasi nilai tukar, dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional diantaranya (1) memperkuat kebijakan nilai tukar Rupiah untuk menjaga stabilitas nilai tukar yang sejalan dengan mekanisme pasar dan fundamental ekonomi; (2) mempercepat normalisasi kebijakan likuiditas melalui kenaikan Giro Wajib Minimum (GWM) Rupiah secara bertahap; (3) meningkatkan insentif bagi bank-bank yang menyalurkan kredit/pembiayaan kepada sektor prioritas dan UMKM; (4) melanjutkan kebijakan transparansi suku bunga dasar kredit (SBDK) dengan pendalaman pada suku bunga kredit sektor prioritas; (5) melanjutkan dukungan pengembangan UMKM melalui penyelenggaraan Karya Kreatif Indonesia (KKI), dalam rangka mendorong pemulihan ekonomi, termasuk Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (GBBI) dan Gerakan Bangga Berwisata Indonesia (GBWI); (6) memperkuat kebijakan sistem pembayaran untuk mendukung pemulihan ekonomi dan akselerasi digitalisasi yang inklusif; dan (7) memperkuat kebijakan internasional dengan memperluas kerja sama dengan bank sentral dan otoritas negara mitra lainnya, fasilitasi penyelenggaraan promosi investasi dan perdagangan di sektor prioritas bekerja sama dengan instansi terkait, serta bersama Kementerian Keuangan menyukseskan 6 (enam) agenda prioritas jalur keuangan Presidensi Indonesia pada G20 tahun 2022¹⁶.

Hasil survei wilayah tengah juga menunjukkan bahwa sebanyak 25,00 persen daerah di wilayah tengah berpersepsi bahwa pertumbuhan investasi yang melambat menjadi yang paling terdampak bagi perekonomian nasional tiga bulan ke depan dari berbagai tantangan yang akan dihadapi baik nasional maupun global. Setelah itu, disusul oleh volatilitas kurs, gejolak dan kondisi politik

¹⁶ BI 7-DAY Reverse Repo Rate Tetap 3,50%; Memperkuat Sinergi untuk Menjaga Stabilitas dan Mendukung Pemulihan, Siaran Pers, bank Indonesia, Mei 2022. [https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2413622.aspx#:~:text=Rapat%20Dewan%20Gubernur%20\(RDG\)%20Bank,Facility%20sebesar%204%2C25%25](https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2413622.aspx#:~:text=Rapat%20Dewan%20Gubernur%20(RDG)%20Bank,Facility%20sebesar%204%2C25%25). Diakses pada 17 Agustus 2022.





dalam negeri, deficit APBN, dan ketersediaan bahan pokok yang terbatas. Apabila Indonesia tidak dapat mengatasi berbagai tantangan, maka pertumbuhan investasi diperkirakan melambat pada tiga bulan ke depan. Berbagai tantangan dapat mengakibatkan ketidakstabilan kondisi dunia usaha, perubahan kebijakan pemerintah, dan ketidakstabilan kondisi sosial politik.

Dampak dari Tantangan Ekonomi Daerah

Hasil survei wilayah tengah menunjukkan bahwa sebanyak 41,67 persen daerah di wilayah tengah berpersepsi bahwa volatilitas kurs menjadi yang paling terdampak bagi perekonomian wilayah tegah saat ini dari berbagai tantangan yang akan dihadapi baik nasional maupun global. Setelah itu, disusul oleh gejolak dan kondisi politik dalam negeri, kenaikan suku bunga kredit, deficit APBN, dan pertumbuhan investasi yang melambat.

Gambar 11. Tantangan Ekonomi Daerah Saat Ini





Gambar 12. Top 5 Tantangan Daerah 3 Bulan Kedepan



Keterangan: Angka persentase responden yang memilih indikator sebagai urutan 1-5.

Sumber: Hasil Survei Ekonom ISEI, 2022

Hasil survei wilayah tengah juga menunjukkan bahwa sebanyak 75,00 persen daerah di wilayah tengah berpersepsi bahwa volatilitas kurs menjadi yang paling terdampak bagi perekonomian wilayah tengah pada tiga bulan ke depan dari berbagai tantangan yang akan dihadapi baik nasional maupun global. Setelah itu, disusul oleh kenaikan suku bunga kredit deficit APBN, pertumbuhan investasi yang melambat, serta gejolak dan kondisi politik dalam negeri. Dampak dari volatilitas nilai tukar akan dirasakan oleh wilayah yang memiliki komoditas ekspor unggulan, daerah dengan bahan baku impor, daerah dengan penanaman investasi yang masih rendah¹⁷.

¹⁷ Schnabl, G. (2008). Exchange rate volatility and growth in small open economies at the EMU periphery. *Economic Systems*, 32(1), 70–91. doi:10.1016/j.ecosys.2007.06.006. Diakses pada 17 Agustus 2022.



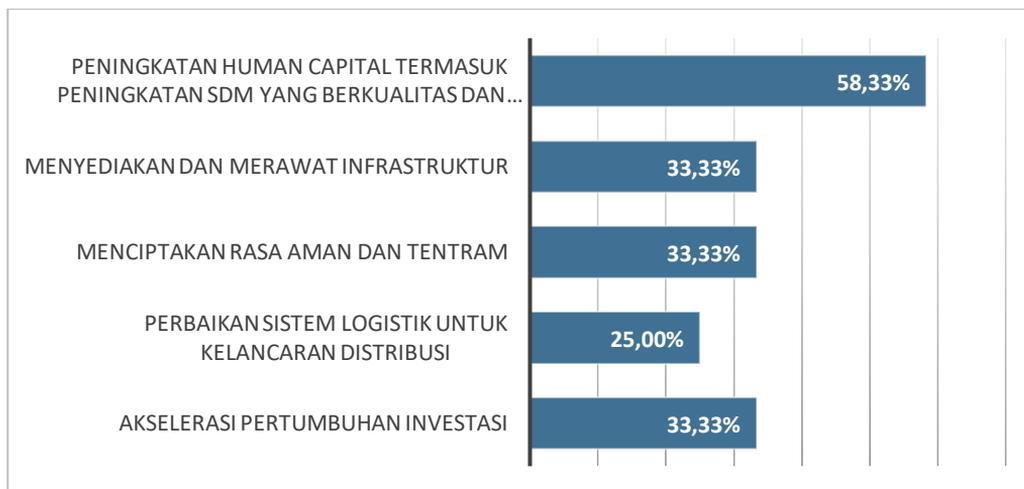


Persepsi Peranan Pemerintah

Keyakinan terhadap Kemampuan Pemerintah Pusat

Hasil survei menunjukkan bahwa sebesar 58,33 persen daerah di wilayah tengah berpersepsi bahwa peningkatan *human capital* termasuk SDM yang berkualitas dan peningkatan kesehatan masyarakat sebagai indikator tertinggi yang harus dilakukan dan paling mampu direalisasikan oleh pemerintah pusat. Kemudian disusul oleh menyediakan dan merawat infrastruktur, menciptakan rasa aman dan tentram, perbaikan system logistic untuk kelancaran distribusi, dan akselerasi pertumbuhan investasi.

Gambar 13. Top 5 Persepsi Kemampuan Pemerintah Pusat



Keterangan: Angka persentase responden yang memilih indikator sebagai urutan 1-5.

Sumber: Hasil Survei Ekonom ISEI, 2022

Human Capital menjadi faktor penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional sehingga Indonesia diharapkan dapat mencapai Visi 2045 dan keluar dari *middle income trap* pada 2036. Kesehatan masyarakat yang terjamin dapat memperlancar masyarakat dalam bekerja dan mengenyam Pendidikan. Pendidikan secara indirect memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Peningkatan pendidikan masyarakat dapat berdampak pada penurunan kemiskinan dan ketimpangan sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi¹⁸.

¹⁸ : Goodspeed (2000): Education Spending, Inequality, and Economic Growth: Evidence from US State. Diakses pada 1 Agustus 2022.

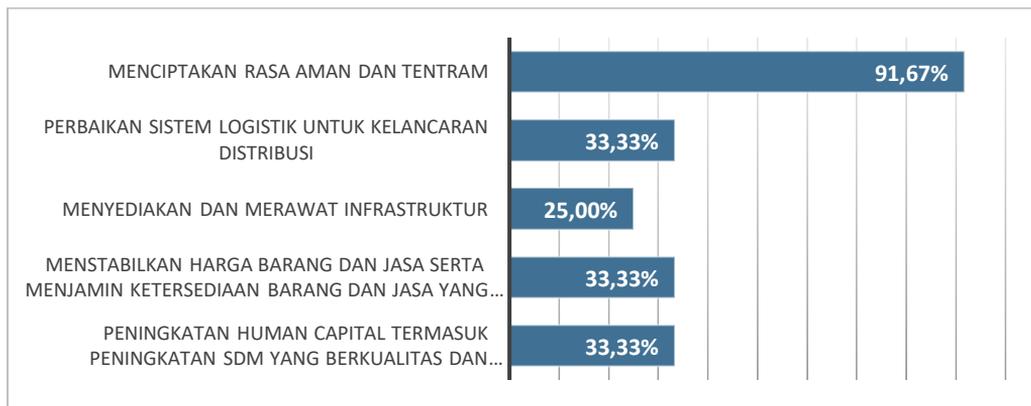




Keyakinan terhadap Kemampuan Pemerintah Daerah

Hasil survei menunjukkan bahwa sebesar 91,67 persen daerah di wilayah tengah berpersepsi bahwa menciptakan rasa aman dan tentram sebagai indikator tertinggi yang harus dilakukan dan paling mampu direalisasikan oleh pemerintah daerah. Kemudian disusul oleh perbaikan system logistic untuk kelancaran distribusi, menyediakan dan merawat infrastruktur, menstabilkan harga barang dan jasa serta menjamin ketersediaan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat, serta peningkatan *human capital* termasuk peningkatan SDM yang berkualitas dan peningkatan kesehatan masyarakat.

Gambar 14. Top 5 Persepsi Kemampuan Pemerintah Daerah



Keterangan: Angka persentase responden yang memilih indikator sebagai urutan 1-5.

Sumber: Hasil Survei Ekonom ISEI, 2022

Menciptakan rasa aman dan tentram dapat mendorong kegiatan masyarakat yang lebih produktif, meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat, serta menciptakan iklim usaha yang sehat. Hal ini dapat memicu peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan. Hasil studi empiris juga menunjukkan bahwa keamanan yang tercipta akan meningkatkan kestabilan kondisi social sehingga mengurangi tingkat kejahatan yang berdampak dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi¹⁹.

¹⁹ Zhang, M., Zou, X., & Sha, L. (2019). Social Security and Sustainable Economic Growth: Based on the Perspective of Human Capital. *Sustainability*, 11(3), 662. doi:10.3390/su11030662. Diakses pada 17 Agustus 2022.





BAB 5 HASIL SURVEI WILAYAH TIMUR

Ringkasan Survei

Jumlah responden survei ISEI Index di wilayah timur sebesar 1135 orang responden yang berasal dari 17 cabang ISEI di wilayah ini. 5 (lima) cabang dengan responden terbanyak adalah cabang Makassar, Ambon, Manado, Kupang, dan Samarinda. Secara umum, responden survei memiliki persepsi positif atas kondisi ekonomi nasional serta potensi perbaikan ke arah yang lebih baik lagi dalam 3 (tiga) bulan kedepan. Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian baik bagi pemerintah pusat dan daerah adalah terkait dengan kekhawatiran responden atas kondisi inflasi serta isu pemenuhan lapangan kerja.

Ekspektasi Kondisi Ekonomi Indonesia dan Wilayah Timur

Kondisi Ekonomi Secara Umum

Hasil survei wilayah timur menunjukkan bahwa, kondisi perekonomian nasional dan daerah akan membaik untuk saat ini hingga tiga bulan ke depan. Hal ini didasarkan dari rata-rata nilai indeks terhadap kondisi perekonomian nasional sebesar 1,64 untuk saat ini dan 1,61 untuk tiga bulan ke depan, serta terhadap perekonomian daerah sebesar 1,80 untuk saat ini dan 1,72 untuk tiga bulan ke depan. Hasil survei ISEI Index di wilayah timur mengindikasikan optimisme keyakinan terhadap kondisi perekonomian secara umum baik saat ini maupun tiga bulan ke depan yang sejalan jika dibandingkan dengan hasil Survei Keyakinan Konsumen Bank Indonesia khususnya komponen Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) dan Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) nasional. IKE dan IEK ditingkat nasional tercatat berada di atas 100 yang berarti bahwa terdapat optimisme kondisi perekonomian saat ini dan di periode selanjutnya akan pulih dan membaik²⁰.

²⁰ https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/Documents/SK_Juli_2022.pdf





Gambar 15. Ekspektasi Kondisi Ekonomi Wilayah Timur



Sumber: Hasil Survei ISEI (2022)

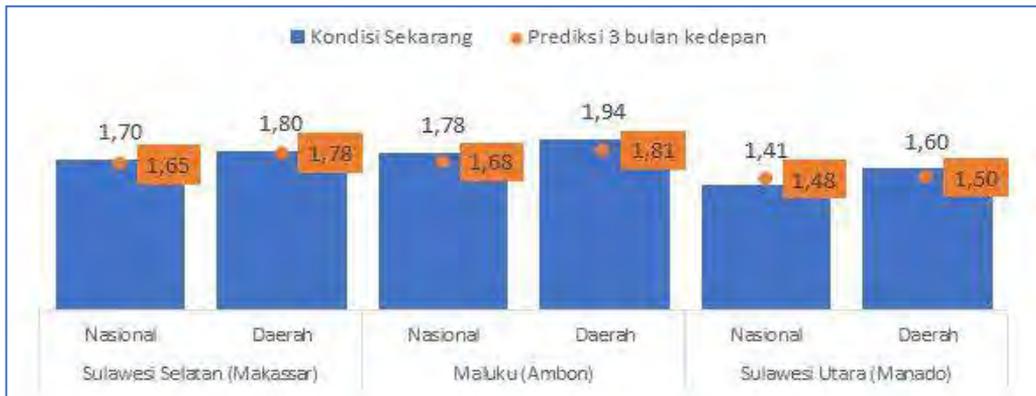
Pertumbuhan Ekonomi

Secara lebih khusus, hasil survei di tiga cabang terbesar menunjukkan bahwa kondisi perekonomian nasional dan daerah di wilayah timur dipersepsikan saat ini telah membaik dan dipersepsikan akan semakin mengalami perbaikan pada kurun waktu 3 (tiga) bulan ke depan. Hasil ini sejalan dengan peningkatan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK), Indeks Kondisi Ekonomi Saat ini (IKE), serta Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) pada ketiga kota tersebut pada triwulan II 2022 dibandingkan dengan triwulan I 2022. Hasil ini juga sejalan dengan kondisi beberapa indikator ekonomi yang menunjukkan perbaikan, khususnya pada indikator pertumbuhan ekonomi.





Gambar 16. Ekspektasi Kondisi Ekonomi Berdasarkan Survei 3 Provinsi Terbesar



Sumber: Hasil Survei ISEI Indeks (2022)

Tabel 8. Perkembangan Survei Indeks Keyakinan Konsumen

	Maret 2022	Juni 2022	Perubahan Indeks
Ambon			
Indeks Keyakinan Konsumen (IKK)	109,10	114,50	5,40
Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE)	102,00	106,30	4,30
Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK)	116,20	122,70	6,50
Makassar			
Indeks Keyakinan Konsumen (IKK)	118,80	139,60	20,80
Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE)	112,30	124,70	12,40
Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK)	125,30	154,50	29,20
Manado			
Indeks Keyakinan Konsumen (IKK)	134,70	142,50	7,80
Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE)	119,70	135,30	15,60
Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK)	149,70	149,70	-

Sumber: Bank Indonesia (2022)

Secara lebih khusus, hasil survei di tiga cabang terbesar menunjukkan bahwa kondisi perekonomian nasional dan daerah di wilayah timur dipersepsikan saat ini telah membaik dan dipersepsikan akan semakin mengalami perbaikan pada kurun waktu 3 (tiga) bulan ke depan. Hasil ini sejalan dengan peningkatan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK), Indeks Kondisi Ekonomi Saat ini (IKE), serta Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) pada ketiga kota tersebut pada triwulan II 2022 dibandingkan dengan triwulan I 2022. Hasil ini juga sejalan dengan kondisi beberapa indikator ekonomi yang menunjukkan perbaikan, khususnya pada indikator pertumbuhan ekonomi.





Pertumbuhan Ekonomi

Hasil survei wilayah timur menunjukkan bahwa, pertumbuhan ekonomi nasional saat ini dan tiga bulan kedepan akan membaik. Hal ini didasarkan dari rata-rata nilai indeks terhadap pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 1,69 untuk saat ini dan 1,66 untuk tiga bulan ke depan. Hasil survei ISEI Indeks untuk pertumbuhan ekonomi nasional ini sesuai kondisi perekonomian Indonesia pada triwulan II-2022 yang tumbuh sebesar 5,44% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya atau mengalami pertumbuhan 3,72% dibandingkan kondisi triwulan sebelumnya.

Gambar 17. Ekspektasi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia di 3 Provinsi Terbesar



Sumber: Hasil Survei ISEI Indeks (2022)

Tabel 9 Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Sulawesi, Maluku, dan Papua

Indikator	Nasional	Sulawesi	Maluku & Papua
Pertumbuhan Ekonomi Triwulan II-2022 (%)	5,44	6,47	13,01
PDB ADHB Triwulan II-2022 (Triliun Rupiah)	4.919,90	349,31	123,49

Sumber: Badan Pusat Statistik (2022)²¹

²¹ BPS (2022). Berita Resmi Statistik. https://www.bps.go.id/website/materi_ind/materiBrsInd-20220805094500.pdf





Disisi lain, pertumbuhan ekonomi wilayah timur akan sedikit melambat untuk tiga bulan ke depan. Hal ini didasarkan rata-rata nilai indeks terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah timur sebesar 1,74 untuk saat ini dan 1,76 untuk tiga bulan ke depan. Hasil survei ini sejalan dengan pertumbuhan ekonomi triwulan II 2022 di Sulawesi, Maluku, dan Papua yang lebih tinggi jika dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional. Sulawesi yang masuk dalam wilayah timur memberikan kontribusi terhadap PDB sebesar 7,10%.

Tingkat Pengangguran

Hasil survei wilayah timur, khususnya di 3 (tiga) cabang utama, menunjukkan bahwa kondisi pengangguran dipersepsikan tidak/belum berubah pada kondisi saat ini baik ditingkat pusat maupun daerah. Persepsi tersebut mengalami “perbaikan” untuk kondisi 3 (tiga) bulan kedepan dimana terdapat perubahan rata-rata perbaikan ekspektasi tingkat pengangguran yang mengarah kepada indikator “lebih baik” baik ditingkat pusat maupun daerah. Hal ini didasarkan pada rata-rata indeks persepsi TPT di atas 2 baik di tingkat nasional maupun daerah.

Gambar 18. Ekspektasi Tingkat Pengangguran di 3 Provinsi Terbesar



Sumber: Hasil Survei ISEI Indeks (2022)

Hasil survei ISEI Indeks tersebut sejalan dengan TPT di beberapa provinsi wilayah timur yang mengalami peningkatan pada Februari 2022 diantaranya Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, Gorontalo, dan Maluku Utara. Berdasarkan hasil survei





tersebut, maka diharapkan berbagai kebijakan pemerintah seperti pelonggaran syarat perjalanan, vaksin booster, serta kebijakan ekonomi lainnya yang tepat dapat mendorong pertumbuhan tenaga kerja di seluruh lapangan usaha yang sempat mengalami kontraksi di masa pandemi.

Hasil survei ISEI Indeks wilayah timur menunjukkan bahwa dalam 3 bulan ke depan TPT akan mengalami perbaikan baik ditingkat pusat maupun daerah. Hasil ini sejalan dengan Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) yang dilakukan oleh Bank Indonesia, pada triwulan II 2022, dimana nilai Saldo Bersih Tertimbang (SBT) tenaga kerja sebesar 1,69% dan telah keluar dari fase kontraksi sejak awal Covid-19. Menurut hasil survei yang sama, penggunaan tenaga kerja diperkirakan masih berada dalam fase ekspansi meski sedikit melambat pada triwulan III 2022. Berdasarkan hal tersebut, maka komunikasi publik yang lebih baik terkait dengan kebijakan pemerintah dalam upaya meningkatkan penyediaan lapangan pekerjaan perlu dilakukan untuk meningkatkan persepsi positif masyarakat.

Tabel 10. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi di Wilayah Timur

Provinsi	TPT Agustus 2021	TPT Februari 2022
Kalimantan Barat	5.82	4.86
Kalimantan Tengah	4.53	4.20
Kalimantan Selatan	4.95	4.20
Kalimantan Timur	6.83	6.77
Kalimantan Utara	4.58	4.62
Sulawesi Utara	7.06	6.51
Sulawesi Tengah	3.75	3.67
Sulawesi Selatan	5.72	5.75
Sulawesi Tenggara	3.92	3.86
Gorontalo	3.01	3.25
Sulawesi Barat	3.13	3.11
Maluku	6.93	6.44
Maluku Utara	4.71	4.98
Papua Barat	5.84	5.78
Papua	3.33	3.60





Tingkat Inflasi

Hasil survei ISEI Indeks menunjukkan bahwa kondisi inflasi saat ini masih meningkat namun akan sedikit membaik tiga bulan ke depan baik di tingkat pusat maupun daerah. Ekspektasi responden survei wilayah timur terhadap tingkat inflasi Indonesia tentunya sedikit banyak dipengaruhi oleh kondisi perekonomian global yang masih dihadapkan pada sejumlah tekanan. Terdapat tendensi persepsi tingkat inflasi Indonesia mengalami kondisi yang lebih buruk pada saat ini berdasarkan hasil survei di tiga kota utama di wilayah timur. Hal ini sejalan dengan pandangan IMF yang dalam hal ini meningkatkan proyeksi inflasi global sebagai akibat dari kekhawatiran atas peningkatan inflasi di berbagai negara kuat sebagai imbas dari kondisi geopolitik akhir-akhir ini. Tercatat tingkat inflasi di beberapa negara (% yoy) mengalami peningkatan di triwulan II 2022 ini, seperti Amerika (9,1%), Uni Eropa (9,6%), serta Inggris (8,2%).

Grafik 2. Ekspektasi Tingkat Inflasi Indonesia di 3 Provinsi Terbesar



Sumber: Hasil Survei ISEI Indeks (2022)

Hal yang perlu menjadi perhatian adalah bahwa hasil survei ini mengindikasikan kekhawatiran responden atas kondisi inflasi saat ini dan di masa yang akan datang. Walaupun kekhawatiran ini beralasan kuat, pemerintah mungkin perlu lebih baik di dalam melakukan komunikasi publik terkait dengan kondisi inflasi nasional dan daerah, dimana secara nasional tingkat inflasi Indonesia jauh lebih baik jika dibandingkan dengan banyak negara lainnya. Selain itu berdasarkan hasil





survei Bloomberg (2022), Indonesia bukan merupakan salah satu negara yang berpotensi besar terdampak resesi²².

Persepsi Dampak Tantangan Ekonomi

Dampak dari Tantangan Ekonomi Nasional

Hasil survei wilayah timur berpersepsi bahwa kenaikan suku bunga kredit menjadi yang paling terdampak bagi perekonomian nasional saat ini dari berbagai tantangan yang akan dihadapi baik nasional maupun global. Setelah itu, disusul oleh pertumbuhan investasi yang melambat, volatilitas kurs, deficit APBN, serta gejolak dan kondisi politik dalam negeri. Sedangkan untuk tiga bulan ke depan, suku bunga kredit masih menjadi yang paling terdampak dari tantangan yang dihadapi, disusul oleh pertumbuhan investasi yang melambat, deficit APBN, volatilitas kurs, serta gejolak dan kondisi politik dalam negeri.

Tabel 11. Lima Dampak Terbesar dari Tantangan Ekonomi Berdasarkan Survei Wilayah Timur

Di Tingkat Nasional		Di Tingkat Daerah	
Kondisi Saat ini	Prediksi 3 Bulan Kedepan	Kondisi Saat ini	Prediksi 3 Bulan Kedepan
1. Kenaikan suku bunga kredit	1. Kenaikan suku bunga kredit	1. Volatilitas kurs	1. Volatilitas kurs
2. Pertumbuhan investasi yang melambat	2. Pertumbuhan investasi yang melambat	2. Kenaikan suku bunga kredit	2. Kenaikan suku bunga kredit
3. Volatilitas kurs	3. Defisit APBN	3. Gejolak dan kondisi politik dalam negeri	3. Pertumbuhan investasi yang melambat
4. Defisit APBN	4. Volatilitas kurs	4. Pertumbuhan investasi yang melambat	4. Gejolak dan kondisi politik dalam negeri
5. Gejolak dan kondisi politik dalam negeri	5. Gejolak dan kondisi politik dalam negeri	5. Defisit APBN	5. Defisit APBN

Sumber: Hasil Survei Ekonom ISEI, 2022

Tantangan ekonomi nasional terbesar baik saat ini maupun tiga bulan ke depan adalah “kenaikan suku bunga kredit”. Kekhawatiran atas kenaikan suku bunga kredit ini didorong oleh kemungkinan kenaikan suku bunga The Fed sebesar 50-

²² Bloomberg (2022). Recession Risk Climbs for Some Asian Economies, Survei Shows. [bloomberg.com/news/articles/2022-07-06/recession-risk-climbs-for-some-asian-economies-survei-shows](https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-07-06/recession-risk-climbs-for-some-asian-economies-survei-shows)





75 basis poin yang tentu saja mendorong kekhawatiran kalangan ekonom mengenai biaya pinjaman yang lebih tinggi yang dapat memicu penurunan tajam pada ekonomi. Khusus terkait dengan gejolak dan kondisi politik dalam negeri di tengah usaha pemerintah untuk membangkitkan perekonomian pasca pandemi, hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah dikarenakan stabilitas politik di Indonesia dipandang oleh responden survei sebagai salah satu penentu keberhasilan ekonomi Indonesia, mengingat atmosfer pemilu 2024 akan mulai dirasakan dalam kurun 1-2 tahun ke depan.

Dampak dari Tantangan Ekonomi Daerah

Hasil survei wilayah timur berpersepsi bahwa volatilitas kurs menjadi yang paling terdampak bagi perekonomian daerah saat ini dari berbagai tantangan yang akan dihadapi baik nasional maupun global. Setelah itu, disusul oleh kenaikan suku bunga kredit, gejolak dan kondisi politik dalam negeri, pertumbuhan investasi yang melambat, dan deficit APBN. Sedangkan untuk tiga bulan ke depan, volatilitas kurs masih menjadi yang paling terdampak dari tantangan yang dihadapi, disusul oleh kenaikan suku bunga kredit, pertumbuhan investasi yang melambat, gejolak dan kondisi politik dalam negeri, serta deficit APBN.

Volatilitas kurs akan menjadi yang paling terdampak bagi perekonomian daerah. Kekhawatiran terhadap volatilitas kurs ini kemungkinan didorong atas kekhawatiran pelemahan Rupiah yang dapat meningkatkan harga barang-barang konsumsi dan produksi. Hal ini sejalan dengan ekspektasi negatif responden survei terhadap kondisi inflasi nasional dan daerah. Beriringan dengan persepsi tantangan terbesar pertama, kekhawatiran terkait dengan volatilitas kurs diikuti dengan kekhawatiran terhadap kenaikan suku bunga kredit.

Persepsi Peranan Pemerintah

Keyakinan terhadap Kemampuan Pemerintah Pusat

Hasil survei wilayah timur menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah pusat terbesar adalah menciptakan rasa aman dan tentram, kemudian disusul oleh peningkatan *human capital* (termasuk peningkatan sumberdaya manusia berkualitas dan peningkatan kesehatan masyarakat), perbaikan sistem logistik





untuk kelancaran distribusi, menyediakan infrastruktur, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan menciptakan lapangan kerja.

Tabel 12. Top 5 Persepsi Kemampuan Pemerintah berdasarkan Wilayah Timur

Pemerintah Pusat	Pemerintah Daerah
1. Menciptakan rasa aman dan tenteram	1. Menciptakan rasa aman dan tenteram
2. Peningkatan human capital (termasuk peningkatan sumberdaya manusia yang berkualitas dan peningkatan kesehatan masyarakat)	2. Perbaiki sistem logistik untuk kelancaran distribusi
3. Perbaiki sistem logistik untuk kelancaran distribusi	3. Peningkatan human capital (termasuk peningkatan sumberdaya manusia yang berkualitas dan peningkatan kesehatan masyarakat)
4. Menyediakan dan merawat infrastruktur	4. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan menciptakan lapangan kerja
5. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan menciptakan lapangan kerja	5. Menciptakan lingkungan hidup hijau, meningkatkan ketahanan bencana, dan meminimalisir dampak perubahan iklim.

Sumber: Hasil Survei Ekonom ISEI, 2022

Hasil survei di wilayah timur ini menunjukkan kepercayaan responden terhadap peran pemerintah pusat di dalam menciptakan rasa aman dan tenteram. Responden survei percaya bahwa pemerintah pusat dan daerah telah cukup baik dalam menciptakan rasa aman dan tenteram. Hasil survei ini sejalan dengan hasil survei yang juga dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia (IPI) yang menunjukkan bahwa 61,3% responden menganggap kondisi keamanan nasional saat ini dalam situasi baik²³.

Selanjutnya dalam tingkatan nasional, peningkatan kualitas human capital menjadi salah satu kinerja pemerintah pusat terbaik kedua menurut responden survei. Beberapa strategi pembangunan pendidikan yang dilakukan pemerintah seperti peningkatan kualitas dan layanan pendidikan secara merata, profesionalisme dan perubahan metode pembelajaran, pembudayaan sekolah dan baca, serta penguatan pendidikan vokasi dan kewirausahaan dan kebijakan peningkatan kualitas SDM Indonesia lainnya dirasa sudah cukup baik oleh para responden survei. Persepsi kinerja pemerintah lainnya yang dirasa baik adalah perbaikan sistem logistik untuk kelancaran distribusi, penyediaan dan perawatan

²³ Kompas. <https://nasional.kompas.com/read/2022/07/11/19535351/survei-indikator-613-persen-responden-anggap-kondisi-keamanan-nasional-baik>





infrastruktur, serta peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dalam menciptakan lapangan kerja.

Keyakinan terhadap Kemampuan Pemerintah Daerah

Hasil survei wilayah timur menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah daerah terbesar adalah menciptakan rasa aman dan tentram, kemudian disusul oleh perbaikan system logistic untuk kelancaran distribusi, peningkatan *human capital* (termasuk peningkatan sumberdaya manusia berkualitas dan peningkatan kesehatan masyarakat), meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan menciptakan lapangan kerja, serta menciptakan lingkungan hijau. Pemerintah daerah telah dianggap sangat mampu dalam menciptakan rasa aman dan tentram bagi masyarakat. Hal yang perlu menjadi perhatian adalah tidak adanya persepsi positif terbesar dari kinerja pemerintah di bidang penyediaan dan perawatan infrastruktur di tingkat daerah. Hal ini bertolak belakang dengan persepsi responden survei terhadap hal ini di tingkat nasional.







KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Survei Indeks ISEI dilakukan oleh Bidang I PP-ISEI guna mengukur persepsi pandangan, optimisme, serta ekspektasi anggota ISEI terhadap kondisi ekonomi, tantangan ekonomi, dan kemampuan pemerintah dalam hal ini adalah pemerintah pusat dan daerah. Hasil survei secara umum sebagai berikut:

1. Anggota ISEI memiliki ekspektasi kondisi perekonomian nasional dan daerah akan membaik dalam 3 bulan ke depan

Responden survei masih meyakini kondisi ekonomi nasional dan daerah masih cukup stabil dan mampu menahan transmisi guncangan ekonomi global yang penuh ketidakpastian. Walaupun demikian, ekspektasi responden terhadap perekonomian nasional lebih optimis dibandingkan dengan ekspektasi perekonomian daerah. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi yang diluncurkan oleh pemerintah pusat dalam mengantisipasi dampak ketidakpastian global dipandang tepat oleh para ekonom. Dengan demikian, hasil survei untuk prediksi kondisi ekonomi dalam tiga bulan ke depan menunjukkan ekspektasi kondisi yang lebih baik. Sementara itu, ekspektasi terhadap perekonomian daerah dalam tiga bulan ke depan diperkirakan tetap sama dengan kondisi saat ini, dalam kondisi yang baik.

2. Anggota ISEI melihat tantangan terbesar adalah suku bunga kredit bank dan kurs rupiah

Hasil survei menunjukkan bahwa tiga tantangan terbesar dari perekonomian nasional untuk saat ini dan 3 bulan ke depan adalah: (i) kenaikan suku bunga kredit; (ii) pertumbuhan investasi yang melambat; serta (iii) volatilitas nilai tukar. Indikator tersebut menunjukkan bahwa investasi dan ekspor masih diharapkan sebagai sumber aktivitas perekonomian nasional, sehingga suku bunga, perkembangan investasi, dan nilai tukar menjadi indikator utama yang menjadi perhatian para anggota ISEI.





Sementara itu, tantangan terbesar perekonomian daerah saat ini berdasarkan hasil survei adalah: (i) volatilitas nilai tukar; (ii) kenaikan suku bunga kredit; serta (iii) kondisi politik di dalam negeri. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi politik di daerah relatif lebih mempengaruhi kepercayaan pelaku ekonomi, dibandingkan dengan kondisi politik nasional. Dengan kata lain, kondisi politik nasional masih dianggap relatif stabil dan terkendali dibandingkan dengan kondisi politik di daerah saat ini.

Untuk kondisi tiga bulan ke depan, tantangan perekonomian daerah yang terbesar adalah: (i) volatilitas nilai tukar; (ii) kenaikan suku bunga kredit; serta (iii) pertumbuhan investasi yang melambat.

3. Anggota ISEI melihat bahwa pemerintah pusat dan daerah mempunyai kemampuan dalam peningkatan perekonomian Indonesia

Selaras dengan kesimpulan nomor 2 di atas, anggota ISEI memiliki persepsi positif terhadap kemampuan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dalam hal: (i) peningkatan kualitas sumber daya manusia dan masyarakat (termasuk: Pendidikan dan kesehatan); (ii) perbaikan sistem logistik untuk kelancaran distribusi; serta (iii) menciptakan rasa aman dan tenteram.

Kemampuan pemerintah pusat dan daerah yang diyakini oleh responden untuk mengatasi hal tersebut, relatif lebih pada upaya sosial kemasyarakatan serta distribusi barang. Upaya ke depan yang perlu dilakukan oleh pemerintah adalah mempercepat pemulihan ekonomi Indonesia dan daerah, melalui peningkatan investasi dan penciptaan lapangan kerja sehingga dapat memberikan peningkatan kesejahteraan dan membantu mengentaskan kemiskinan.

Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan analisis hasil survei yang dilakukan, pemerintah pusat dan daerah masih perlu melakukan berbagai upaya kebijakan ke depan, agar ekonomi Indonesia dapat lebih tangguh dan pulih lebih cepat dan memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan secara merata di seluruh Indonesia.





Adapun rekomendasi kebijakan dibagi berdasarkan tingkat nasional, wilayah Barat, Wilayah Tengah, dan Wilayah Timur Indonesia, sebagai berikut:

Tingkat Nasional

1. Perlunya meningkatkan kewaspadaan dan antisipasi terhadap tantangan perekonomian global yang berpotensi menjalar ke perekonomian domestik dari berbagai jalur. Monitoring perekonomian secara menyeluruh dan berkala dapat membantu perumusan kebijakan ekonomi yang adaptif yang dapat meredam dampak sistemik ketidakpastian global terhadap perekonomian Indonesia.
2. Perencanaan kebijakan ekonomi perlu dipastikan diimplementasikan di pusat dan daerah secara holistik, efektif, dan efisien agar dapat mempercepat pemulihan ekonomi paska krisis COVID, menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, serta memastikan sinergi kebijakan antara pusat dan daerah untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata.
3. Perbaiki sistem logistik yang terintegrasi antara nasional dan daerah terutama sistem logistik yang dapat: (i) memperlancar distribusi barang dan jasa antar wilayah di Indonesia; dan (ii) sistem logistik yang dapat meningkatkan efisiensi perekonomian nasional dan daerah.
4. Menjamin ketersediaan barang dan jasa khususnya bahan pokok dan barang penting (terutama yang masuk ke dalam kelompok inflasi pangan bergejolak) agar mengurangi tekanan inflasi di Indonesia.
5. Menciptakan iklim usaha yang sehat untuk meningkatkan investasi dan membuka lapangan pekerjaan yang lebih luas.
6. Memanfaatkan kenaikan harga komoditas untuk meningkatkan ekspor untuk mendorong kestabilan nilai tukar rupiah.

Wilayah Barat

1. Memprioritaskan kebijakan-kebijakan yang spesifik sesuai dengan potensi daerahnya, antara lain: hilirisasi industri berbasis komoditas untuk meningkatkan nilai tambah.





2. Beberapa area di Wilayah Barat mempunyai potensi komoditas yang cukup besar, misalnya komoditas sawit, yang sangat berpotensi untuk didorong ke arah industrialisasi dan menjadi substitusi impor. Dengan demikian, dapat membantu dalam menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah melalui peningkatan kinerja ekspor serta menciptakan lapangan kerja baru untuk mengurangi pengangguran.
3. Merevitalisasi kembali kerjasama dengan negara tetangga dalam hal perdagangan. Wilayah Barat mempunyai potensi segitiga pertumbuhan (Singapura-Johor-Riau) yang dapat terus dioptimalkan dan menciptakan sumber pertumbuhan baru. Hal ini dapat dilakukan melalui optimalisasi peran Batam, Bintan, Karimun dan Sabang sebagai kawasan Free Trade Zone (FTZ) untuk mendorong perdagangan di kawasan barat Indonesia, khususnya yang termasuk pada Wilayah Barat ISEI.
4. Pengembangan produk unggulan di masing-masing daerah wilayah barat untuk meningkatkan kegiatan ekonomi produktif dan mengurangi tingkat pengangguran.
5. Pembangunan infrastruktur logistic yang memadahi untuk pemerataan distribusi barang dan jasa sehingga dapat mengurangi ketidaksetaraan harga-harga.

Wilayah Tengah

Perekonomian wilayah tengah relatif lebih terdiversifikasi dibandingkan dengan wilayah Barat dan Wilayah Timur. Tantangan perekonomian wilayah tengah lebih pada upaya untuk mendorong perekonomian yang lebih inklusif dan hijau, serta meningkatkan potensi penerimaan perpajakan dari aktivitas perekonomian saat ini dan ke depan. Beberapa rekomendasi kebijakan yang diusulkan adalah:

1. Reformasi pajak untuk memperbesar belanja publik yang berkualitas.
2. Menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) agar membantu pemulihan dan pengembangan usaha, antara: melanjutkan subsidi bunga kredit bagi UMKM, fasilitasi untuk wirausaha baru, membantu peningkatan kualitas dan diversifikasi produk UMKM, pemanfaatan teknologi digital, serta inovasi produk dan usaha.
3. Pengembangan industri hilir dan perdagangan yang lebih hijau.





4. Memastikan ketersediaan pasokan bahan pangan untuk menekan inflasi dan menjaga kepercayaan masyarakat.
5. Peningkatan pengeluaran pemerintah untuk sektor pendidikan, riset, dan inovasi.
6. Peningkatan pengeluaran pemerintah untuk menjamin keamanan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Wilayah Timur

1. Pemerintah Pusat dan Daerah perlu lebih memperhatikan pembangunan infrastruktur ekonomi prioritas di wilayah timur Indonesia untuk mengurangi tekanan inflasi dan menciptakan aktivitas ekonomi baru di Kawasan Timur Indonesia.
2. Meskipun pertumbuhan ekonomi di wilayah timur tinggi, namun ketimpangan juga sangat tinggi, maka pemerataan perlu dilakukan melalui peningkatan pendidikan dan pembukaan lapangan kerja di wilayah timur.
3. Peningkatan investasi dengan memberikan iklim usaha yang sehat di wilayah timur juga diperlukan guna meningkatkan pemerataan.
4. Sumberdaya alam yang sangat melimpah di wilayah Timur, ternyata tidak memberikan efek pengganda yang optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah timur. Oleh sebab itu, diperlukan model pembangunan ekonomi yang lebih spesifik yang menggabungkan karakteristik dan keunikan antara potensi alam, sumber daya manusia, dan budaya masyarakat setempat. Sehingga, kebijakan ekonomi tersebut dapat secara efektif meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
5. Pemanfaatan sumberdaya alam yang melimpah perlu diiringi dengan pembangunan industri/usaha yang ramah lingkungan karena tren permintaan ke depan adalah produk-produk yang lebih hijau, seiring dengan meningkatnya tanggung jawab konsumen domestik dan global terhadap keberlanjutan lingkungan.

Langkah ke Depan

Sesuai dengan tujuan awal survei bahwa survei indeks ISEI dapat rutin dilaksanakan setiap 6 bulan sekali, sehingga indeks ISEI dapat berkontribusi





kepada perumusan kebijakan ke depannya. Beberapa hal yang dapat menjadi pembelajaran dan perlu diperbaiki pada pelaksanaan berikutnya adalah:

1. Pendalaman analisis
2. Perbaikan kualitas responden (harus yang mengerti betul tentang teori dan kondisi perekonomian nasional/daerah)
3. Ketepatan dalam memberikan hasil analisis

Partisipasi aktif dari seluruh cabang diperlukan untuk dapat menghasilkan analisis pada semua cabang. Karena pada survei ini, dari 52 cabang ada sekitar 20 cabang yang tidak dapat dianalisis karena jumlah responden yang masih di bawah batas minimum sehingga akan berpengaruh terhadap hasil analisis.





LAMPIRAN

LAPORAN ANALISIS CABANG





Laporan Survei Indikator Survei Ekonomi Indonesia (ISEI) Index Cabang: AMBON

Tim Penyusun :

1. Dr. Fahrudin Ramly, SE.M.Si
2. Dr. Maryam Sangadji, SE.ME
3. Dr. Jolyne Myrell Parera, SE.M.Si

Ringkasan Eksekutif

Kondisi saat ini perekonomian nasional dan daerah tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan tahun lalu, tetapi diprediksi tiga bulan ke depan akan membaik. Pertumbuhan ekonomi dapat ditingkatkan, tingkat pengangguran berkurang dan inflasi dapat dikendalikan dan ditekan. Walaupun masih banyak tantangan yang dihadapi oleh pemerintah baik pusat ataupun daerah seperti kenaikan suku bunga kredit, pertumbuhan investasi mengalami perlambatan, defisit APBN, Volatilitas kurs kebutuhan bahan pokok mengalami persediaan yang terbatas. Demand atau daya beli masyarakat akan berkurang.

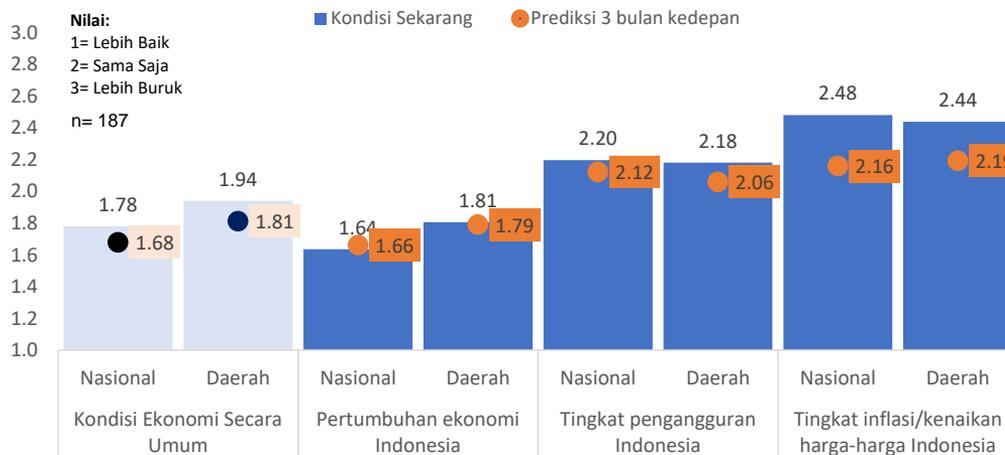
Walaupun demikian pemerintah pusat dan daerah masih memiliki kemampuan untuk perbaikan sistem logistik untuk kelancaran distribusi, peningkatan human capital (termasuk peningkatan sumberdaya manusia yang berkualitas dan peningkatan kesehatan masyarakat), menciptakan rasa aman dan tenteram, menyediakan dan merawat infrastruktur, meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan menciptakan lapangan kerja serta menciptakan lingkungan hidup hijau, meningkatkan ketahanan bencana dan meminimalisir dampak perubahan iklim.





Ekspektasi Ekonomi

Grafik 1. Ekspektasi Kondisi Ekonomi Cabang Ambon



Analisa:

Perekonomian nasional dianggap tidak mengalami perubahan yang berarti dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan prediksi tiga bulan kedepan lebih rendah dari sekarang. Sedangkan perekonomian Maluku juga tidak banyak berubah dari tahun sebelumnya namun diprediksi tiga bulan ke depan jauh lebih baik dari sekarang.

Pesimisme terhadap perekonomian nasional terlihat pada pertumbuhan ekonomi tiga bulan kedepan diperkirakan mengalami perlambatan. Pengeluaran pemerintah yang mengalami penurunan dapat dianggap sebagai salah satu penyebabnya. Pada triwulan II 2022 turun sebesar -5,24% dibandingkan triwulan yang sama pada tahun 2021. Pada semester I 2022 terhadap semester I 2021 turun sebesar -6,27%. Selain itu Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) mengalami penurunan secara berturut-turut pada triwulan I dan II 2022 dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (q to q) masing sebesar -2,56% dan -3,66%, walaupun meningkat pada triwulan I dan II 2022 dibandingkan dengan triwulan I dan II pada tahun 2021 (y on y) masing-masing sebesar 4,09% dan 3,07%.

Sedangkan perekonomian daerah akan mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dari sekarang. Triwulan II 2022 tumbuh sebesar 4,93% dibandingkan





dengan triwulan I 2022 (q to q) sedangkan pada triwulan yang sama tahun 2021 tumbuh sebesar 4,81% (y on y). Optimisme ini juga didukung oleh konsumsi pengeluaran pemerintah diharapkan meningkat untuk membiayai berbagai proyek pembangunan. Optimisme perekonomian daerah tiga bulan ke depan diharapkan berpengaruh pada tingkat pengangguran. Walaupun lebih buruk dibandingkan dengan tahun sebelumnya, tetapi diperkirakan mengalami penurunan untuk tiga bulan ke depan. baik secara nasional ataupun ditingkat daerah. Di Provinsi Maluku tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada bulan Agustus 2021 sebesar 6,93% turun menjadi 6.44% pada Februari 2022, atau turun sebesar -0,49% sedangkan dibandingkan dengan Februari 2021 turun sebesar -0,3%. Data historis ini diharapkan tiga bulan yang akan datang tingkat pengangguran akan turun lagi. Hal ini didukung oleh kondisi pandemic sudah mulai menurun dan membaik, sehingga jumlah orang yang bekerja sudah mulai meningkat. Sektor ekonomi yang mengalami peningkatan dibandingkan dengan Februari 2021 adalah Industri pengolahan sebesar 1,61%, Pertambangan dan pengggalian 1,45%, Administrasi pemerintahan dan jasa sebesar 1,29%. Disamping itu, jumlah pekerja dengan status sebagai buruh/karyawan/pegawai sebanyak 33,62%, menyusul berusaha sendiri sebesar 28,81 dan lainnya sebesar 37,57%. Artinya perekonomian Provinsi Maluku sudah mulai membaik yang berdampak pada tingkat pengangguran.

Persepsi masyarakat terhadap tingkat Inflasi diperkirakan akan menurun tiga bulan yang akan datang, walaupun saat ini lebih buruk dibandingkan dengan tahun yang lalu. Transportasi udara, cabai rawit, bawang merah, kangkung, rokok putih, ikan layang/ikan benggol, sawi hijau, minyak goreng, bayam dan ikan cakalang merupakan komoditi yang memberikan andil terbesar terhadap inflasi di Provinsi Maluku. Sebagian besar merupakan komoditi yang didatangkan dari daerah lain di luar Maluku, sehingga jika terjadi keterlambatan dalam distribusinya, maka akan memicu melonjaknya angka inflasi.





Laporan Survei Indikator Survei Ekonomi Indonesia (ISEI) Index **Cabang: Bangka Belitung**

Tim Penyusun :

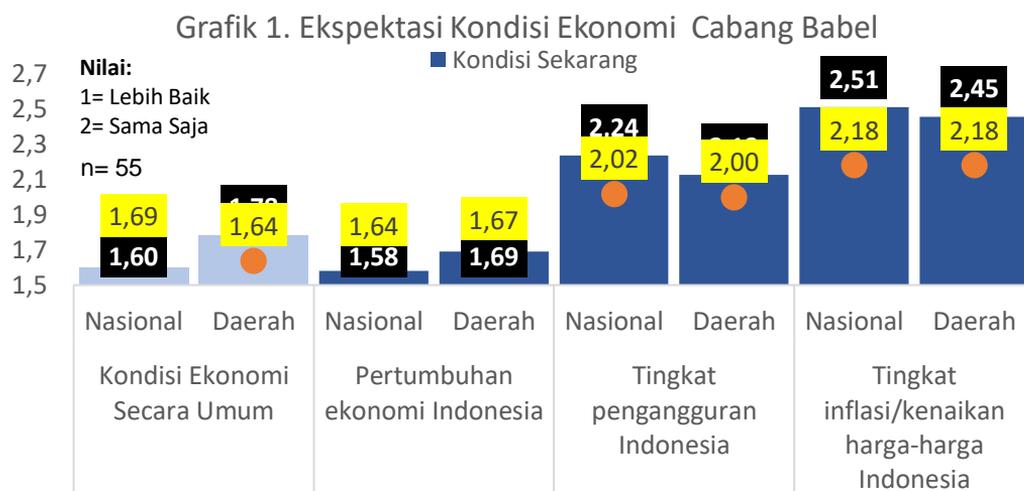
1. Dr. Reniati, S.E.,M.Si
2. Aja Nasrun, S.ST, M.Sc

Ringkasan Eksekutif

Masyarakat Bangka Belitung menilai kondisi ekonomi secara umum saat ini relatif baik, dengan kondisi ekonomi daerah Bangka Belitung sedikit berada di bawah nasional. Persepsi ini didukung oleh membaiknya beberapa indikator makro perekonomian seperti pertumbuhan yang positif, neraca dagang yang masih mencatatkan surplus, investasi yang mulai meningkat, termasuk PMI manufaktur yang berdaya tahan. Persepsi Masyarakat Bangka Belitung terhadap tantangan ekonomi nasional dan daerah saat ini dan 3 bulan kedepan didominasi oleh lima tantangan, yaitu kenaikan suku bunga kredit, defisit APBN, volatilitas kurs, pertumbuhan investasi yang melambat, dan gejolak dan kondisi politik dalam negeri. Peningkatan tekanan perekonomian global sebagai akibat perang Rusia-Ukraina yang masih belum selesai, tekanan inflasi global, serta respons pengetatan kebijakan moneter global yang lebih agresif merupakan gambaran dari kondisi perekonomian global yang tidak dalam kondisi baik dampaknya tidak hanya berpengaruh di sisi politik tetapi juga perekonomian baik nasional maupun daerah. Masyarakat Bangka Belitung menyakini bahwa baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah akan dapat menjaga kinerja perekonomian dalam level yang positif.



Ekspektasi Ekonomi



Analisa:

Masyarakat Bangka Belitung menilai kondisi ekonomi secara umum saat ini relatif baik, dengan kondisi ekonomi daerah yang sedikit berada di bawah nasional. Persepsi ini didukung oleh mulai membaiknya beberapa indikator perekonomian seperti pertumbuhan yang positif, neraca dagang yang masih tercatat surplus periode Januari – Juni 2022, investasi yang mulai meningkat, termasuk PMI manufaktur yang berdaya tahan.

Di sisi pertumbuhan, secara nasional dalam 3 (tiga) bulan ke depan diprediksi akan mengalami sedikit perlambatan, hal ini terkait dengan kondisi perekonomian global yang mengalami tekanan baik dari sisi politik maupun ekonomi yang secara tidak langsung mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Namun untuk daerah di Bangka Belitung, pertumbuhan diprediksi akan membaik untuk tiga bulan kedepan dengan mendorong serta mempertahankan kinerja pemerintah dalam peningkatan sektor pertanian, perdagangan, pertambangan yang menjadi komoditas andalan ekspor (Timah, Ikan udang dan Lada) Bangka Belitung yang akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang positif.

Untuk tingkat pengangguran, baik nasional maupun daerah, selama tiga bulan ke depan diprediksi akan mengalami penurunan, hal ini disebabkan oleh mulai pulihnya berbagai sektor industri yang dapat Kembali menyerap tenaga kerja



dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang meningkat disertai Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang menurun. Di Bangka Belitung terjadi peningkatan harga di beberapa komoditas terjadi, hal ini mendorong meningkatnya aktivitas ekonomi seperti pertambangan dan berdampak pada penyerapan tenaga kerja.

Sedangkan untuk inflasi walaupun saat ini terjadi peningkatan harga akibat Kenaikan harga LPG/Bright Gas 5,5 Kg dan 12 Kg dan kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) untuk pelanggan rumah tangga di atas 3.500 VA, peningkatan curah Hujan di sentra produksi komoditas impor di Pulau Jawa, Hari Besar Keagamaan dan Libur sekolah, masyarakat memprediksi akan mengalami penurunan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan ke depan, hal ini disebabkan karena normalisasi permintaan serta ketersediaan stok pangan dan berbagai barang kebutuhan masyarakat yang masih mencukupi.

Persepsi Kemampuan Pemerintah

Tabel 1. Lima Tantangan Ekonomi Terbesar dari Cabang Babel

Di Tingkat Nasional		Di Tingkat Daerah	
Kondisi Saat ini	Prediksi 3 Bulan Kedepan	Kondisi Saat ini	Prediksi 3 Bulan Kedepan
1. Kenaikan suku bunga kredit	1. Gejala dan kondisi politik dalam negeri	1. Defisit APBN	1. Volatilitas kurs
2. Pertumbuhan investasi yang melambat	2. Kenaikan suku bunga kredit	2. Volatilitas kurs	2. Gejala dan kondisi politik dalam negeri
3. Gejala dan kondisi politik dalam negeri	3. Volatilitas kurs	3. Gejala dan kondisi politik dalam negeri	3. Defisit APBN
4. Defisit APBN	4. Defisit APBN	4. Kenaikan suku bunga kredit	4. Pertumbuhan investasi yang melambat
5. Volatilitas kurs	5. Pertumbuhan investasi yang melambat	5. Pertumbuhan investasi yang melambat	5. Kenaikan suku bunga kredit

Analisa:

Persepsi Masyarakat Bangka Belitung terhadap tantangan ekonomi Nasional dan Daerah saat ini dan 3 bulan kedepan didominasi oleh lima tantangan, yaitu kenaikan suku bunga kredit, defisit APBN, volatilitas kurs, pertumbuhan investasi yang melambat, dan gejala dan kondisi politik dalam negeri. Peningkatan tekanan perekonomian global sebagai akibat perang Rusia-Ukraina yang masih belum selesai, tekanan inflasi global, serta respons pengetatan kebijakan moneter global yang lebih agresif merupakan gambaran dari kondisi perekonomian global yang tidak dalam kondisi baik dampaknya tidak hanya





berpengaruh di sisi politik tetapi juga perekonomian baik nasional maupun daerah.

Tekanan geopolitik yang sedang terjadi antara Rusia-Ukraina akan berdampak terhadap ekonomi, dunia usaha secara umum dan bisnis perusahaan utamanya di sektor energi, pangan dan perdagangan. Dimana rusia merupakan salah satu pemasok energi terbesar di dunia dengan pasokan gas alam mencapai 16 persen dan minyak 11 persen. Sementara itu Ukraina merupakan pemasok gandum terbesar bagi Indonesia. dalam jangka pendek kenaikan harga energi dan pangan global ini dapat memicu inflasi.

Kemudian terkait situasi perekonomian Amerika Serikat (AS) sudah masuk kedalam resesi namun kontraksinya menurun dimana PDB kuartal II-2022 kontraksi atau negatif sebesar 0,9 persen (yoy) dengan pertumbuhan sebesar -1,6 persen dengan inflasi mencapai 9,1 persen. Sementara itu, ekonomi pada kuartal II/2022 mengalami penurunan 0,4 persen dari pertumbuhan sebelumnya sebesar 2,5 persen.

Dari sisi ekspor, AS dan Cina adalah salah satu negara tujuan ekspor utama Indonesia. Jika ekonomi AS dan Cina mengalami pelemahan, maka permintaan ekspor turun dan harga komoditas juga akan turun. Sementara di sisi investasi, AS dan Cina juga memegang peranan yang penting bagi Indonesia. Pada semester I-2022, AS menempati peringkat kelima negara dengan investasi terbesar di Tanah Air. Ketidakpastian ekonomi dunia seperti menyangkut suku bunga Bank Sentral AS atau tingkat Inflasi menjadi faktor penentu bagi investor jika peningkatan suku bunga cepat maka investasi ke Negara Indonesia menjadi kurang menarik membuat para pemilik modal di seluruh dunia mengalami kepanikan dan memilih mengamankan hartanya dari amukan resesi.

Berdasarkan hal tersebut berbagai kemungkinan bisa terjadi dengan kenaikan suku bunga, *capital outflow* terjadi di seluruh Negara berkembang dan emerging termasuk Indonesia dan bisa mempengaruhi nilai tukar, suku bunga dan Inflasi di Indonesia sehingga terjadi pelemahan terhadap perekonomian nasional serta akan berdampak kepada pendapatan pajak negara serta perhitungan alokasi APBN.





Seiring meningkatnya ekspor timah Bangka Belitung, tantangan kedepan daerah adalah Investasi Hilirasi Timah yang mengharapkan kestabilan nilai tukar, yang tentunya didukung kondisi politik dalam negeri yang stabil dalam menghasilkan regulasi tata niaga dan teknologi.

Persepsi Kemampuan Pemerintah

Tabel 2. Top-5 Persepsi Kemampuan Pemerintah berdasarkan cabang Babel

Pemerintah Pusat	Pemerintah Daerah
1. Peningkatan human capital (termasuk peningkatan sumberdaya manusia yang berkualitas dan peningkatan kesehatan masyarakat)	1. Menciptakan rasa aman dan tenteram
2. Perbaikan sistem logistik untuk kelancaran distribusi	2. Peningkatan human capital (termasuk peningkatan sumberdaya manusia yang berkualitas dan peningkatan kesehatan masyarakat)
3. Menciptakan rasa aman dan tenteram	3. Perbaikan sistem logistik untuk kelancaran distribusi
4. Akselerasi pertumbuhan investasi	4. Menciptakan lingkungan hidup hijau, meningkatkan ketahanan bencana, dan meminimalisir dampak perubahan iklim.
5. Menyediakan dan merawat infrastruktur	5. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan menciptakan lapangan kerja

Analisa:

Persepsi masyarakat Bangka Belitung ditengah ketidakpastian perekonomian ekonomi global yang dapat mengancam pertumbuhan ekonomi secara nasional maupun daerah yaitu menyakini bahwa baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah akan dapat menjaga kinerja perekonomian dalam level yang positif. Pertumbuhan ekonomi nasional yang stabil dan berada pada tren positif dan kondisi APBN Indonesia yang menunjukkan kondisi surplus menjadi sinyal optimisme bagi perekonomian nasional maupun daerah.

Masyarakat Bangka Belitung menyakini bahwa, dengan kondisi surplus tersebut pemerintah dapat melaksanakan berbagai kebijakan strategis pembangunan. Lima teratas persepsi kemampuan pemerintah pusat dari cabang Bangka Belitung ditujukan pada peningkatan *human capital* (termasuk peningkatan sumberdaya manusia yang berkualitas dan peningkatan kesehatan masyarakat), perbaikan sistem logistik untuk kelancaran distribusi, menciptakan rasa aman dan tenteram, akselerasi pertumbuhan investasi, serta menyediakan dan merawat infrastruktur.





Sementara itu, bagi pemerintah daerah Masyarakat Bangka Belitung menyakini bahwa pertumbuhan ekonomi daerah yang juga berada pada tren positif dan kondisi APBN Indonesia yang menunjukkan kondisi surplus sebagai potensi pendapatan daerah dari komponen dana transfer pemerintah pusat akan mendorong peningkatan kinerja pembangunan daerah. Lima teratas persepsi kemampuan pemerintah daerah dari cabang Bangka Belitung ditujukan pada keyakinan menciptakan rasa aman dan tenteram, peningkatan human capital (termasuk peningkatan sumberdaya manusia yang berkualitas dan peningkatan kesehatan masyarakat), perbaikan sistem logistik untuk kelancaran distribusi, menciptakan lingkungan hidup hijau, meningkatkan ketahanan bencana, dan meminimalisir dampak perubahan iklim, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan menciptakan lapangan kerja.





Laporan Survei Indikator Survei Ekonomi Indonesia (ISEI) Index **Cabang: Banda Aceh**

Tim Penyusun :

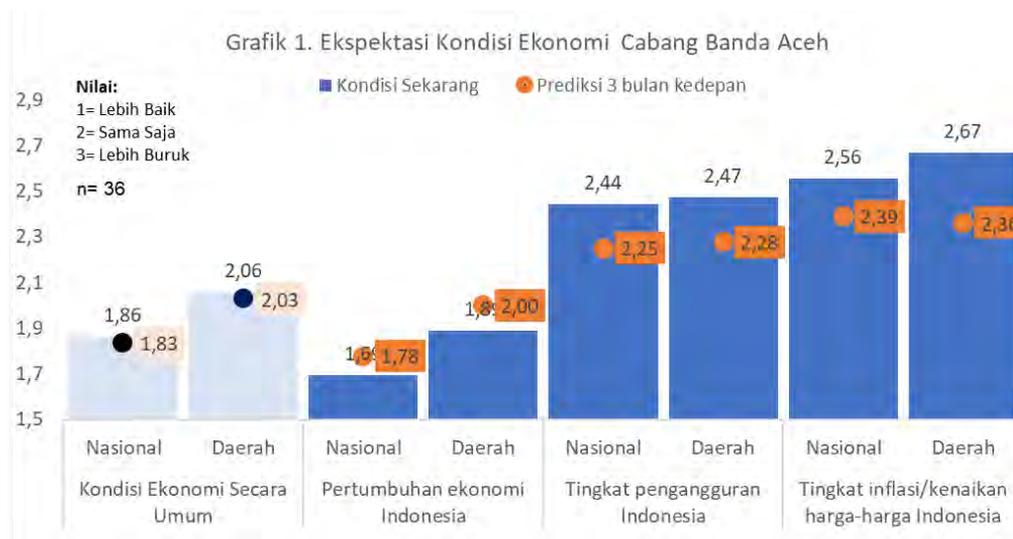
1. Dr. Chenny Seftarita, S.E, M.Si
2. Dr. Rustam Effendi, S.E, M.Sc
3. Nashrillah, SE, MM

Ringkasan Eksekutif

Secara umum, pasca pandemi Covid 19, kondisi ekonomi nasional dan regional Aceh menunjukkan kinerja yang lebih baik. Hal ini terlihat dari optimisme responden pada kondisi ekonomi saat ini dan proyeksi ke depan. Pertumbuhan ekonomi dinilai menunjukkan kinerja positif, walaupun tingkat pengangguran dan inflasi belum menunjukkan kinerja positif. Tekanan ekonomi global diperkirakan akan berdampak terhadap kondisi ekonomi nasional dan regional. Pengetatan moneter menjadi tantangan utama dalam ekonomi global, menyusul stabilitas politik. Pada tingkat nasional diperkirakan ancaman krisis global akan memperberat deficit APBN, sehingga pemerintah mencabut subsidi dan menaikkan harga komoditas administered prices. Pada tingkat regional, tantangan ke depan lebih pada stabilitas kondisi politik menjelang pilkada.



Ekspektasi Ekonomi



Analisa:

Ahli Ekonomi dan praktisi ekonomi di Aceh yang menjadi responden pada survei ISEI melihat bahwa kondisi eksisting ekonomi saat ini secara nasional cenderung lebih baik, kondisi ini terlihat dari penilaian kondisi eksisting dan proyeksi 3 bulan ke depan pada indikator **ekonomi secara umum** yang mengarah kepada angka lebih baik (> atau = 1). Kondisi eksisting **pertumbuhan ekonomi** dan proyeksi pada level nasional juga menunjukkan angka yang mengarah ke lebih baik. Sedikit berbeda pada penilaian level Aceh, di mana responden memperkirakan kondisi ekonomi secara umum baik kondisi eksisting maupun proyeksi tidak mengalami perubahan yang signifikan (sama saja). Pertumbuhan ekonomi Aceh saat ini sudah lebih baik dibandingkan sebelumnya, namun melihat kondisi ekonomi global yang terus mengalami tekanan, untuk proyeksi ke depan pertumbuhan ekonomi tidak akan terlalu banyak mengalami perubahan (sama saja). Baik pada level nasional maupun level Aceh, tingkat pengangguran dan inflasi menunjukkan tidak terjadi perubahan signifikan (sama saja dengan sebelumnya) baik pada kondisi eksisting maupun proyeksi 3 bulan ke depan



Persepsi Tantangan Ekonomi

Tabel 1. Lima Tantangan Ekonomi Terbesar dari Cabang Banda Aceh

Di Tingkat Nasional		Di Tingkat Daerah	
Kondisi Saat ini	Prediksi 3 Bulan Kedepan	Kondisi Saat ini	Prediksi 3 Bulan Kedepan
1. Kenaikan suku bunga kredit	1. Defisit APBN	1. Gejala dan kondisi politik dalam negeri	1. Gejala dan kondisi politik dalam negeri
2. Gejala dan kondisi politik dalam negeri	2. Volatilitas kurs	2. Kenaikan suku bunga kredit	2. Volatilitas kurs
3. Volatilitas kurs	3. Kenaikan suku bunga kredit	3. Volatilitas kurs	3. Kenaikan suku bunga kredit
4. Defisit APBN	4. Ketersediaan bahan pokok yang terbatas	4. Pertumbuhan investasi yang melambat	4. Pertumbuhan investasi yang melambat
5. Ketersediaan bahan pokok yang terbatas	5. Gejala dan kondisi politik dalam negeri	5. Ketersediaan bahan pokok yang terbatas	5. Defisit APBN

Analisa:

Melemahnya kondisi ekonomi global diprediksikan akan berimbas pada kinerja ekonomi nasional dan regional. Secara nasional, tantangan terbesar yang dihadapi adalah adanya pengetatan moneter dengan kenaikan suku bunga yang berdampak pada naiknya tingkat bunga kredit. Selanjutnya di posisi kedua adanya gejala dan kondisi politik dalam negeri sebagai dampak persiapan pemilu dan pilkada. Pada 3 bulan ke depan diperkirakan defisit APBN yang kian membengkak akan berimbas terhadap perekonomian, terutama inflasi, seiring dinaikkannya harga komoditas administered prices dan pencabutan subsidi. Pada level Aceh, gejala dan kondisi politik menjadi tangan berat baik pada saat ini maupun beberapa bulan mendatang. Hal ini terutama menyambut persiapan Pilkada. Kondisi ekonomi moneter seperti kenaikan bunga kredit dan volatilitas kurs menjadi tantangan cukup besar, terutama terhadap sector UMKM dan usaha berorientasi impor.

Tabel 2. Top-5 Persepsi Kemampuan Pemerintah berdasarkan cabang Banda Aceh

Pemerintah Pusat	Pemerintah Daerah
1. Peningkatan human capital (termasuk peningkatan sumberdaya manusia yang berkualitas dan peningkatan kesehatan masyarakat)	1. Menciptakan rasa aman dan tenteram
2. Perbaikan sistem logistik untuk kelancaran distribusi	2. Peningkatan human capital (termasuk peningkatan sumberdaya manusia yang berkualitas dan peningkatan kesehatan masyarakat)
3. Menyediakan dan merawat infrastruktur	3. Perbaikan sistem logistik untuk kelancaran distribusi
4. Menciptakan rasa aman dan tenteram	4. Menegakkan hukum dan memberikan rasa keadilan
5. Akselerasi pertumbuhan investasi	5. Menciptakan lingkungan hidup hijau, meningkatkan ketahanan bencana, dan meminimalisir dampak perubahan iklim.





Analisa:

Peningkatan human capital menjadi *goal* pertama yang diharapkan mampu dipenuhi pemerintah pusat. Saat ini tingkat persaingan global semakin tinggi dan membutuhkan sumberdaya handal baik fisik maupun mental. Selain itu SDM harus dibekali oleh soft skill sehingga mampu bersaing pada pasar kerja internasional. Terkait naiknya harga-harga (inflasi) beberapa periode terakhir, diharapkan pemerintah berupaya menjaga kelancaran distribusi barang dan memperbaiki system logistic untuk menghindari kelangkaan barang. Pada tingkat regional Aceh, pemerintah harus terus menjaga dan menciptakan rasa aman dan tenteram terutama menyambut Pilkada ke depan. Selain itu pemerintah Aceh diharapkan concern terhadap invetasi Sumber Daya Manusia sehingga mampu bersaing pada tingkat nasional dan internasional. Selain itu guna menekan inflasi, pemerintah diharapkan menjaga kelancaran distribusi barang, mengingat kenaikan inflasi salahsatunya disebabkan oleh tidak lancarnya distribusi.





Laporan Survei Indikator Survei Ekonomi Indonesia (ISEI) Index Cabang: Bandung

Tim Penyusun :

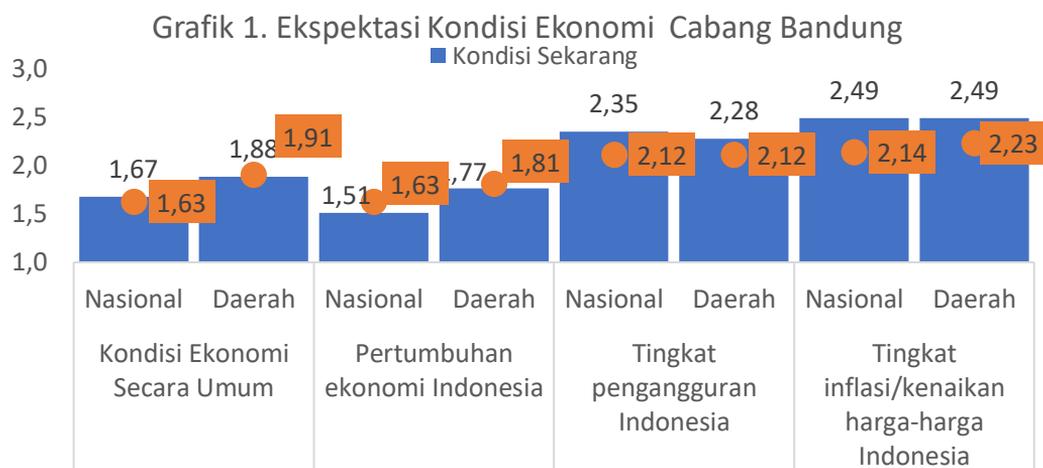
1. Dr. Farida Titik Kristanti
2. Dr. Putri Fariska S.
3. Dr. Dwi Fitrizal Salim

Ringkasan Eksekutif

Survei menunjukkan adanya optimisme terhadap kondisi ekonomi Nasional maupun daerah saat maupun prediksi 3 bulan kedepan. Hal ini terutama disebabkan ekspektasi pertumbuhan ekonomi yang dinilai lebih baik. Namun nampaknya optimisme tersebut belum akan diikuti oleh membaiknya tingkat pengangguran dan tingkat inflasi. Hasil survei ekonomi Indonesia juga menunjukkan bahwa di tingkat nasional dan daerah, tantangan yang paling utama adalah pertumbuhan investasi yang melambat. Sedangkan untuk prediksi 3 bulan ke depan. untuk tingkat nasional, kenaikan suku bunga adalah tantangan terbesar, sedangkan di tingkat daerah justru volatilitas kurs yang menjadi tantangan utama. Dari sisi kemampuan Pemerintah, responden memandang bahwa pemerintah pusat memiliki kemampuan dalam peningkatan human capital, menyediakan dan merawat infrastruktur, menciptakan rasa aman dan tentram, perbaikan system logistic dan yang terakhir adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah & menciptakan lapangan kerja. Sedangkan untuk pemerintah daerah dipersepsikan memiliki kemampuan utama pada penciptaan rasa aman dan tentram, perbaikan sistem logistik, akselerasi pertumbuhan investasi. Menciptakan lingkungan hidup hijau serta peningkatan human capital. Perbedaan persepsi yang terjadi ini kemungkinan disebabkan adanya situasi dan resource yang berbeda antara nasional dan daerah. Pusat lebih berbicara pada tataran umum yang lebih besar, sedangkan daerah lebih pada hal-hal yang sifatnya implementatif.



Ekspektasi Ekonomi



Analisa:

Ekspektasi kondisi perekonomian dapat dilihat melalui Pertumbuhan ekonomi, Tingkat pengangguran dan Tingkat inflasi/ kenaikan harga-harga. Jika dilihat dari Grafik 1. Ekspektasi secara umum kondisi perekonomian saat ini, baik pada tingkat Nasional maupun daerah adalah lebih baik, meskipun jika dilihat pada nilai indeks, terlihat indeks daerah, 1,88, lebih tinggi jika dibandingkan dengan nasional yaitu sebesar 1,67. Ekspektasi yang lebih baik ini dilandaskan pada ekspektasi pertumbuhan ekonomi yang lebih baik untuk kondisi saat ini maupun prediksi 3 bulan ke depan baik nasional maupun daerah. Namun untuk tingkat pengangguran dan tingkat inflasi saat ini maupun prediksi 3 bulan kedepan, ekspektasi ekonom ISEI cabang Bandung tampaknya tidak terlalu optimis, mereka melihat bahwa kondisinya akan sama baik saja baik di tingkat nasional maupun daerah.

Hasil ini menunjukkan bahwa ISEI Bandung memiliki pandangan yang optimis terhadap kondisi secara umum ekonomi nasional maupun daerah, karena adanya pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lebih baik. Meskipun optimism itu tidak diikuti dengan harapan yang lebih baik atas tingkat pengangguran, dan tingkat inflasi/kenaikan harga. Kemungkinan hal ini lebih disebabkan masih relatif kecilnya pertumbuhan ekonomi yang akan terjadi sehingga belum mampu menyelesaikan masalah pengangguran dan dampaknya terhadap inflasi.



Persepsi Tantangan Ekonomi

Tabel 1. Lima Tantangan Ekonomi Terbesar dari Cabang Bandung

Di Tingkat Nasional		Di Tingkat Daerah	
Kondisi Saat ini	Prediksi 3 Bulan Kedepan	Kondisi Saat ini	Prediksi 3 Bulan Kedepan
1. Pertumbuhan investasi yang melambat	1. Kenaikan suku bunga kredit	1. Pertumbuhan investasi yang melambat	1. Volatilitas kurs
2. Gejala dan kondisi politik dalam negeri	2. Volatilitas kurs	2. Volatilitas kurs	2. Defisit APBN
3. Volatilitas kurs	3. Pertumbuhan investasi yang melambat	3. Kenaikan suku bunga kredit	3. Kenaikan suku bunga kredit
4. Ketersediaan bahan pokok yang terbatas	4. Ketersediaan bahan pokok yang terbatas	4. Defisit APBN	4. Pertumbuhan investasi yang melambat
5. Defisit APBN	5. Demand Daya beli masyarakat yang menurun	5. Gejala dan kondisi politik dalam negeri	5. Gejala dan kondisi politik dalam negeri

Analisa:

Pada tingkat nasional tantangan ekonomi terbesar yang dihadapi saat ini adalah pertumbuhan investasi yang melambat, namun menurut prediksi ekonom ISEI cabang Bandung pada tiga bulan kedepan permasalahan terbesar adalah pada kenaikan suku bunga kredit hal ini atas dampak dari peningkatan inflasi domestik sehingga menyebabkan bank indonesia cenderung akan menerapkan kebijakan moneter yang ketat dikarenakan tingkat inflasi yang meningkat, hal ini akan mendorong bank sentral untuk melakukan stance moneter yang kontraktif yaitu dengan menaikkan tingkat suku bunga acuan guna untuk mengurangi likuiditas.

Selain itu ekonom ISEI cabang Bandung pada tiga bulan kedepan tidak lagi memandang gejala dan kondisi politik dalam negeri sebagai tantangan dalam perekonomian namun lebih melihat dari dampak volatilitas kurs, pertumbuhan investasi yang melambat akibat dari pengurangan likuiditas, ketersediaan bahan pokok yang terbatas serta demand daya beli masyarakat yang menurun akibat peningkatan inflasi domestik yang menyebabkan harga barang meningkat.

Sedangkan kondisi di daerah dalam 3 bulan kedepan tantangan ekonomi terbesar yang dihadapi adalah volatilitas kurs, ekonom ISEI cabang Bandung berpendapat bahwa volatilitas kurs akan berdampak lebih besar ditingkat daerah dibandingkan di tingkat nasional. Volatilitas kurs yang semakin besar menunjukkan overvalued dan undervalued nilai tukar mata uang terhadap mata uang negara lainnya hal ini berdampak pada ketidakstabilan perekonomian baik dari sisi makro maupun mikro. Selain itu sektor kegiatan ekonomi dengan kebutuhan investasi awal yang sedikit akan cenderung untuk lebih sensitif terhadap volatilitas nilai tukar mata uang dibandingkan dengan sektor ekonomi dengan tingkat kebutuhan investasi awal yang cukup besar (Larson et al, 2005). Selain itu bagi daerah, defisit APBN sangatlah berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi, dikarenakan injeksi belanja pemerintah daerah hampir 90% ditopang oleh dana





APBN. Dengan adanya kenaikan harga minyak dunia menyebabkan adanya peningkatan pada subsidi energi, sehingga apabila terjadi defisit pada APBN maka akan sangat berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi di daerah.

Berbeda dengan prediksi pada tingkat Nasional, gejala dan kondisi politik dalam negeri masih tantangan terbesar dalam pertumbuhan ekonomi di daerah. Dikarenakan meskipun tren pemulihan ekonomi terus berlanjut dilihat dari adanya penurunan tingkat pengangguran terbuka namun kondisi ketenagakerjaan belum sepenuhnya pulih akibat covid 19 (BPS, 2022). Jumlah tingkat pengangguran masih cukup tinggi dibandingkan sebelum masa pandemic yaitu sebesar 8,4 juta orang (BPS, Feb 2022). Tingkat pengangguran dan penduduk miskin dapat berpengaruh kepada gejala dan kondisi politik dalam negeri dikarenakan menurut Amalia (2012), Pengangguran memiliki keterbatasan yang perlu diperhatikan karena pengangguran sangat berpengaruh pada terjadinya masalah berbagai criminal dan gejala sosial, politik dan kemiskinan.

Persepsi Kemampuan Pemerintah

Tabel 2. Top-5 Persepsi Kemampuan Pemerintah berdasarkan cabang Bandung

Pemerintah Pusat	Pemerintah Daerah
1. Peningkatan human capital (termasuk peningkatan sumberdaya manusia yang berkualitas dan peningkatan kesehatan masyarakat)	1. Menciptakan rasa aman dan tenteram
2. Menyediakan dan merawat infrastruktur	2. Perbaiki sistem logistik untuk kelancaran distribusi
3. Menciptakan rasa aman dan tenteram	3. Akselerasi pertumbuhan investasi
4. Perbaiki sistem logistik untuk kelancaran distribusi	4. Menciptakan lingkungan hidup hijau, meningkatkan ketahanan bencana, dan meminimalisir dampak perubahan iklim.
5. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan menciptakan lapangan kerja	5. Peningkatan human capital (termasuk peningkatan sumberdaya manusia yang berkualitas dan peningkatan kesehatan masyarakat)

Analisa:

Pemerintah harus mempunyai sasaran utama yang berkenaan dengan bagaimana upaya meningkatkan taraf hidup atau tingkat kemakmuran rakyatnya. Menurut hasil “Indikator Survei Ekonomi Indonesia (ISEI)”, persepsi kemampuan pemerintah pusat terutama dilihat dari bagaimana pemerintah mampu meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan peningkatan kesehatan masyarakat. Masih belum maksimalnya pemerintah melakukan pengelolaan pada peningkatan kesehatan masyarakat terutama sejak diberlakukannya BPJS kesehatan dimana dalam pengelolaan dana kesehatan sampai dengan saat ini masih terkendala.





Namun, persepsi kemampuan yang terpenting pada pemerintah daerah adalah bagaimana menciptakan rasa aman dan tenang hal ini disebabkan adanya menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keamanan. Hal ini disebabkan oleh adanya peningkatan kejahatan selama masa pandemi. Persepsi kemampuan lainnya antara pemerintah daerah yang berbeda dengan pemerintah pusat adalah bagaimana pemerintah daerah mampu untuk menciptakan lingkungan hidup hijau, meningkatkan ketahanan bencana dan meminimalisir dampak perubahan iklim hal ini sejalan dengan surat Menteri LHK yang ditujukan kepada Gubernur Provinsi se-Indonesia agar mampu untuk memiliki pemahaman yang sama atas kebijakan pengendalian perubahan iklim dan setiap perkembangannya serta melakukan pembinaan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota dan pemangku kepentingan dalam pengendalian perubahan iklim.

Selain itu yang menjadi persepsi kemampuan pemerintah daerah adalah bagaimana melakukan akselerasi pertumbuhan investasi, dikarenakan peningkatan investasi diyakini mampu untuk meningkatkan pembangunan perekonomian suatu negara. Meningkatnya penanaman modal atau investasi sangat diperlukan dan harus menjadi strategi percepatan pembangunan di daerah. Hal ini sejalan dengan persepsi masyarakat terhadap pemerintah pusat yang harus mampu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan bagaimana mampu untuk menciptakan lapangan kerja melalui peningkatan penanaman modal atau investasi.





Laporan Survei Indikator Survei Ekonomi Indonesia (ISEI) Index Cabang: Banjarmasin

Tim Penyusun :

1. Dr. Ahmad Yunani, SE, M.Si
2. Sri Maulida, SESy, M

Ringkasan Eksekutif

Pertumbuhan Ekonomi Daerah Provinsi Kalsel 1,73 lebih tinggi daripada kondisi nasional dengan nilai 1,57 (sama saja dengan ekspektasinya), sedangkan Tingkat pengangguran di daerah 2,24 lebih baik karena nilainya lebih rendah daripada pada nasional 2,32 (namun ekspektasinya nasional lebih baik karena lebih rendah dari daerah 2,16 ekspektasi daerah dan 2,14 ekspektasi nasional).

Dalam hal inflasi nasional lebih tinggi daripada daerah kondisi saat ini tapi ekspektasinya daerah lebih tinggi jadi Kalimantan Selatan inflasi yang akan datang kondisinya meningkat secara kondisi ekonomi menurunkan kualitas perekonomian daerah.

Tantangan ekonomi daerah Kalimantan Selatan berdasarkan survei ini menariknya adalah yang pertama justru volatilitas kurs, kemudian gejolak dan kondisi politik dalam negeri, defisit anggaran, kenaikan suku bunga kredit dan pertumbuhan investasi yang melambat.

Persepsi kemampuan Pemerintah berdasarkan hasil survei ini menunjukkan bahwa baik nasional maupun daerah sepakat bahwa kondisi menciptakan rasa aman dan tenteram sangat prioritas, selanjutnya Kalimantan Selatan mengedepankan adanya akselerasi pertumbuhan investasi, peningkatan human kapital, peningkatan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja.





Ekspektasi Ekonomi



Analisa:

Berdasarkan gambar grafik di atas tergambar bahwa perekonomian daerah kalimantan selatan baik secara riil maupun ekspektasi 3 bulan kedepan saat ini lebih rendah dibandingkan kondisi umum perekonomian nasional. Dilihat pertumbuhan ekonomi saat ini nasional juga lebih baik dibandingkan daerah sehingga daerah harus lebih meningkatkan program pembangunan yang bisa meningkatkan perekonomian daerah. Kalimantan Selatan hanya unggul saat ini dalam hal kondisi pengangguran yang lebih baik karena nilainya rendah, namun dalam hal kondisi ekspektasi pengangguran dimasa yang akan datang kondisi Kalsel kembali lebih baik kondisi nasional, artinya program penanggulangan pengangguran nasional diprediksi lebih berhasil mengurangi jumlah pengangguran dibandingkan daerah.

Demikian pula kondisi inflasi daerah kalimantan selatan relatif masih lebih baik daripada nasional inflasinya lebih tinggi namun diprediksi yang akan datang kondisi inflasi nasional jauh lebih baik dibandingkan kalimantan selatan, sehingga berdasarkan prediksi ini pemerintah daerah dan tim TPID nya harus lebih dapat mengendalikan stabilisasi harga dan ketersediaan komoditi agar harga-harga bisa stabil dan inflasi lebih rendah tidak terjadi seperti prediksi.





Persepsi Tantangan Ekonomi

Tabel 1. Lima Tantangan Ekonomi Terbesar dari Cabang Banjarmasin

Di Tingkat Nasional		Di Tingkat Daerah	
Kondisi Saat ini	Prediksi 3 Bulan Kedepan	Kondisi Saat ini	Prediksi 3 Bulan Kedepan
1. Kenaikan suku bunga kredit	1. Kenaikan suku bunga kredit	1. Volatilitas kurs	1. Volatilitas kurs
2. Volatilitas kurs	2. Gejala dan kondisi politik dalam negeri	2. Gejala dan kondisi politik dalam negeri	2. Kenaikan suku bunga kredit
3. Pertumbuhan investasi yang melambat	3. Pertumbuhan investasi yang melambat	3. Defisit APBN	3. Defisit APBN
4. Gejala dan kondisi politik dalam negeri	4. Volatilitas kurs	4. Kenaikan suku bunga kredit	4. Gejala dan kondisi politik dalam negeri
5. Ketersediaan bahan pokok yang terbatas	5. Defisit APBN	5. Pertumbuhan investasi yang melambat	5. Pertumbuhan investasi yang melambat

Analisa:

Tantangan ekonomi daerah kalimantan selatan berdasarkan survei ini menariknya adalah yang pertama justru volatilitas kurs, kemudian gejala dan kondisi politik dalam negeri, defisit anggaran, kenaikan suku bunga kredit dan pertumbuhan investasi yang melambat, yang berbeda dengan prediksi 3 bulan ke depan dalam hal melihat kenaikan suku bunga yang meningkat menjadi perhatian daerah untuk kondisi yang akan datang. Dan diperkirakan masalah gejala dan kondisi politik akan menurun dampaknya bagi perekonomian.

Kondisi ini berbeda dengan kondisi nasional yang menyoroti kenaikan suku bunga justru lebih menonjol selanjutnya volatilitas kurs, pertumbuhan investasi, gejala politik dalam negeri dan ketersediaan bahan pokok, dengan prediksi ekonomi nasional 3 bulan akan datang lebih menyoroti kenaikan suku bunga, gejala politik, pertumbuhan investasi volatilitas kurs dan defisit APBN. Secara umum ada beberapa irisan permasalahan dan tantangan ekonomi nasional dan daerah yang harus diatasi dan dihadapi bersama agar bisa memperkuat perekonomian nasional





Persepsi Kemampuan Pemerintah

Tabel 2. Top-5 Persepsi Kemampuan Pemerintah berdasarkan cabang Banjarmasin

Pemerintah Pusat	Pemerintah Daerah
1. Menciptakan rasa aman dan tenteram	1. Menciptakan rasa aman dan tenteram
2. Menyediakan dan merawat infrastruktur	2. Akselerasi pertumbuhan investasi
3. Peningkatan human capital (termasuk peningkatan sumberdaya manusia yang berkualitas dan peningkatan kesehatan masyarakat)	3. Peningkatan human capital (termasuk peningkatan sumberdaya manusia yang berkualitas dan peningkatan kesehatan masyarakat)
4. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan menciptakan lapangan kerja	4. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan menciptakan lapangan kerja
5. Perbaiki sistem logistik untuk kelancaran distribusi	5. Menciptakan lingkungan hidup hijau, meningkatkan ketahanan bencana, dan meminimalisir dampak perubahan iklim.

Analisa:

Persepsi kemampuan Pemerintah berdasarkan hasil survei ini menunjukkan bahwa baik nasional maupun daerah sepakat bahwa kondisi menciptakan rasa aman dan tenteram sangat prioritas, selanjutnya Kalimantan Selatan mengedepankan adanya akselerasi pertumbuhan investasi, peningkatan human kapital, peningkatan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Kemudian sebagai daerah yang masih cukup besar potensi green economy nya maka Kalimantan Selatan juga menginginkan terciptanya lingkungan hijau, ketahanan bencana dan minimalisir dampak perubahan iklim yang menjadi tantangan baru daerah.

Sedangkan nasional selain menciptakan rasa aman dan tenteram juga masih konsen pada masalah penyediaan dan merawat infrastruktur, peningkatan human capital, peningkatan pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja serta perbaikan sistem logistik dan kelancaran distribusi. Hal ini penting untuk menjadi stabilisasi ekonomi dan stabilisasi harga dengan terkendalinya inflasi nasional dan daerah.

Jadi persepsi ekonomi daerah dan nasional saling mendukung dan hampir sama hanya beberapa hal ada fokus program nasional dan daerah sesuai kondisi saat ini.





Laporan Survei Indikator Survei Ekonomi Indonesia (ISEI) Index Cabang: Bengkulu

Tim Penyusun :

1. Esti Pasaribu, S.E., M.Ec.Dev
2. Dr. Armelly, S.E., M.Si
3. Ratu Eva Febriani, S.E., M.Sc
4. Novi Tri Putri, S.E., M.Sc

Ringkasan Eksekutif

Responden menilai kondisi ekonomi secara umum saat ini relatif baik, dengan kondisi ekonomi daerah Bengkulu sedikit berada di bawah nasional. Persepsi ini didukung oleh membaiknya beberapa indikator makro perekonomian seperti pertumbuhan yang positif, neraca dagang yang masih mencatatkan surplus, investasi yang mulai meningkat, termasuk PMI manufaktur yang berdaya tahan. Persepsi masyarakat terhadap tantangan ekonomi nasional dan daerah saat ini dan 3 bulan kedepan didominasi oleh lima tantangan, yaitu kenaikan suku bunga kredit, volatilitas kurs, defisit APBN, dan pertumbuhan ekonomi yang melambat.

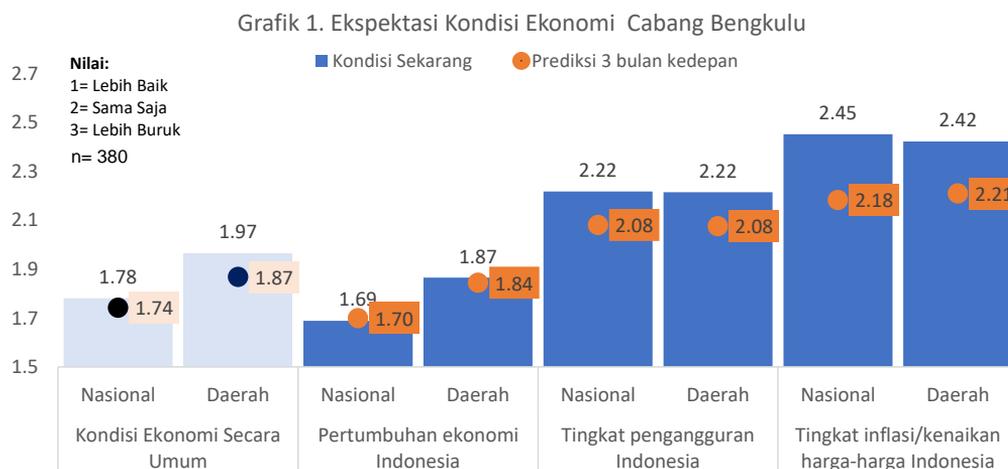
Defisit anggaran belanja dan minim investasi menjadi perhatian serius karena berkaitan dengan hutang luar negeri dan peningkatan uang beredar. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerintah pusat untuk lebih berfokus kepada akselerasi pertumbuhan investasi sementara pemerintah daerah perlu untuk memperhatikan perkembangan tingkat inflasi dan ketersediaan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat.

Di tingkat daerah, pemerintah juga perlu mempertimbangkan resiko bencana ataupun kondisi tidak terduga sebagaimana yang terjadi saat covid-19 yang lampau. Belajar dari pengalaman, ketidaksiapan mitigasi resiko dapat meruntuhkan pertumbuhan ekonomi sehingga perlu mendapatkan perhatian khusus. Walaupun demikian, rata-rata responden Bengkulu cukup optimis dengan kondisi perekonomian daerah maupun nasional untuk prediksi tiga bulan ke depan. Hal ini menunjukkan kepercayaan masyarakat bagi kinerja pemerintah.





Ekspektasi Ekonomi



Analisa:

Responden Bengkulu merasakan kondisi ekonomi secara umum dan pertumbuhan ekonomi, baik nasional maupun daerah relatif lebih baik dibandingkan dengan kondisi 3 bulan lalu dan memprediksi bahwa untuk 3 bulan ke depan kondisinya juga akan lebih baik dibandingkan saat ini. Namun, untuk tingkat pengangguran dan inflasi, responden menganggap bahwa kondisi saat ini lebih buruk dibandingkan dengan kondisi 3 bulan lalu, dan untuk tiga bulan ke depan kondisinya tetap memburuk. Trade-off yang diharapkan antara inflasi dan pengangguran tidak terjadi, bahkan inflasi dan pengangguran berjalan searah kearah yang tidak menguntungkan. Bahwa pertumbuhan ekonomi membaik disaat pengangguran memburuk dapat dirasionalkan dengan pertumbuhan ekonomi berakar dari peningkatan produktifitas tenaga kerja. Dalam hal ini, UMKM dipandang mampu menjadi wadah dimana perekonomian berbasis padat karya mampu bertahan di masa pandemi covid-19.





Persepsi Tantangan Ekonomi

Tabel 1. Lima Tantangan Ekonomi Terbesar dari Cabang Bengkulu

Di Tingkat Nasional		Di Tingkat Daerah	
Kondisi Saat ini	Prediksi 3 Bulan Kedepan	Kondisi Saat ini	Prediksi 3 Bulan Kedepan
1. Kenaikan suku bunga kredit	1. Volatilitas kurs	1. Volatilitas kurs	1. Volatilitas kurs
2. Volatilitas kurs	2. Kenaikan suku bunga kredit	2. Kenaikan suku bunga kredit	2. Kenaikan suku bunga kredit
3. Pertumbuhan investasi yang melambat	3. Pertumbuhan investasi yang melambat	3. Defisit APBN	3. Defisit APBN
4. Ketersediaan bahan pokok yang terbatas	4. Defisit APBN	4. Gejala dan kondisi politik dalam negeri	4. Pertumbuhan investasi yang melambat
5. Defisit APBN	5. Ketersediaan bahan pokok yang terbatas	5. Pertumbuhan investasi yang melambat	5. Gejala dan kondisi politik dalam negeri

Analisa:

Persepsi responden terhadap tantangan ekonomi nasional dan daerah saat ini dan 3 bulan kedepan didominasi oleh lima tantangan, yaitu kenaikan suku bunga kredit, volatilitas kurs, pertumbuhan investasi yang melambat, ketersediaan bahan pokok yang terbatas, dan defisit APBN. Peningkatan tekanan perekonomian global sebagai akibat perang Rusia-Ukraina yang masih belum selesai, tekanan inflasi global, serta respons pengetatan kebijakan moneter global yang lebih agresif merupakan gambaran dari kondisi perekonomian global yang tidak dalam kondisi baik dan akan berdampak pada perekonomian nasional dan daerah.

Selain dari sisi perdagangan dan investasi, gejala ekonomi dunia yang terjadi juga berpotensi melemahkan nilai tukar Rupiah, kenaikan suku bunga secara agresif, dan inflasi di Indonesia. Potensi pelemahan terhadap perekonomian nasional tersebut akan berdampak kepada pendapatan pajak negara serta perhitungan alokasi APBN.

Sementara itu, di tingkat daerah, pondasi ekonomi daerah ditopang oleh UMKM dan sektor informasi. Imbasnya, perekonomian mulai mendapat respon yang positif. Banyak sektor UMKM yang tidak terimbas secara langsung saat pandemi covid-19. Untuk dapat lebih memacu sektor ini, maka infrastruktur serta pemanfaatan teknologi digitalisasi sangat diperlukan. Agar keberlangsungan ekonomi jangka panjang dapat dipertahankan secara konsisten. Menariknya, volatilitas kurs justru menjadi tantangan terbesar yang dipilih responden pada prediksi di tingkat daerah. Hal ini menunjukkan sisi perdagangan internasional





yang kian masif dan berkembang. Di sisi lain, kenaikan suku bunga kredit juga dianggap menjadi tantangan, yang mana hal ini menkonfirmasi adanya geliat perekonomian di tingkat daerah.

Persepsi Kemampuan Pemerintah

Tabel 2. Top-5 Persepsi Kemampuan Pemerintah berdasarkan cabang Bengkulu

Pemerintah Pusat	Pemerintah Daerah
1. Peningkatan human capital (termasuk peningkatan sumberdaya manusia yang berkualitas dan peningkatan kesehatan masyarakat)	1. Menciptakan rasa aman dan tenteram
2. Menciptakan rasa aman dan tenteram	2. Perbaikan sistem logistik untuk kelancaran distribusi
3. Perbaikan sistem logistik untuk kelancaran distribusi	3. Peningkatan human capital (termasuk peningkatan sumberdaya manusia yang berkualitas dan peningkatan kesehatan masyarakat)
4. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan menciptakan lapangan kerja	4. Menciptakan lingkungan hidup hijau, meningkatkan ketahanan bencana, dan meminimalisir dampak perubahan iklim.
5. Akselerasi pertumbuhan investasi	5. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan menciptakan lapangan kerja

Analisa:

Responden percaya pada kemampuan pemerintah pusat dan daerah untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, menciptakan rasa aman dan tenteram, memperbaiki sistem logistik untuk kelancaran distribusi, memperbaiki sistem logistik untuk kelancaran distribusi, meningkatkan pertumbuhan ekonomi demi keterbukaan lapangan kerja, serta akselerasi pertumbuhan investasi. Hal ini terlihat dari persepsi positif yang muncul dari masyarakat akan kondisi ekonomi saat ini.

Di tingkat provinsi dan kabupaten, Rencana Umum Penanaman Modal disusun dengan mengungkap potensi daerah dengan tetap disinergikan dengan visi misi nasional. Belajar dari pandemi covid-19, pemerintah daerah juga mulai menyusun kebijakan dengan mempertimbangkan faktor ketahanan bencana, kondisi tidak terduga, pandemi, maupun dampak perubahan iklim. Pembangunan tol Bengkulu-Lubuk Linggau yang masih berjalan juga dianggap sebuah terobosan untuk pengendalian harga dan usaha untuk menciptakan lapangan kerja dengan iklim investasi yang lebih kondusif.





Laporan Survei Indikator Survei Ekonomi Indonesia (ISEI) Index Cabang: Cirebon

Tim Penyusun:

1. Prof. Dr. Ida Rosnidah, SE. MM.Ak.CA
2. Moh. Yudi Mahadianto, SE.MM

Ringkasan Eksekutif

Berdasarkan hasil survei ISEI Cabang Cirebon, Kondisi Ekonomi saat ini dan prediksi 3 bulan ke depan baik tingkat nasional maupun daerah dinilai lebih baik, namun untuk tingkat pengangguran baik nasional maupun daerah untuk saat ini dan prediksi 3 bulan ke depan dinilai sama saja, demikian juga penilaian tingkat inflasi baik nasional maupun daerah dinilai sama saja.

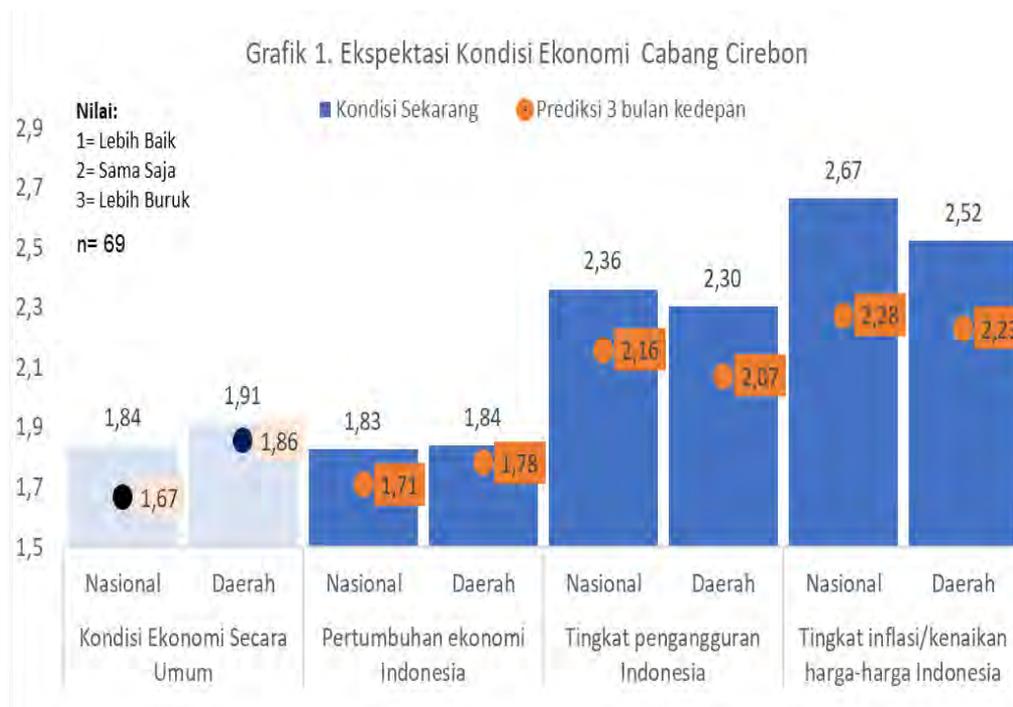
Menurut responden, 5 tantangan ekonomi terbesar nasional saat ini adalah : volatilitas kurs, kenaikan suku bunga kredit, pertumbuhan ekonomi yang melambat, gejolak dan kondisi politik dalam negeri dan defisit APBN. Sedangkan prediksi 3 bulan ke depan, 5 tantangan ekonomi terbesar adalah : pertumbuhan investasi yang melambat, volatilitas kurs, gejolak dan kondisi politik dalam negeri, defisit APBN dan ketersediaan bahan pokok yang terbatas. Untuk Cirebon, 5 tantangan ekonomi terbesar saat ini adalah : volatilitas kurs, kenaikan suku bunga kredit, defisit APBN, Pertumbuhan ekonomi yang melambat dan gejolak kondisi politik dalam negeri. Sedangkan prediksi 3 bulan ke depan, 5 tantangan ekonomi terbesar adalah: Volatilitas kurs, kenaikan suku bunga kredit, pertumbuhan ekonomi yang melambat, defisit APBN dan gejolak kondisi politik dalam negeri.

Menurut responden, 5 top persepsi kemampuan pemerintah pusat adalah: peningkatan human capital, menyediakan dan merawat infrastruktur, perbaikan sistem logistik untuk kelancaran distribusi, menciptakan rasa aman dan tentram dan akselerasi pertumbuhan investasi. Sedangkan 5 top persepsi kemampuan pemerintah daerah adalah: menciptakan rasa aman dan tenteram, peningkatan human capital, perbaikan sistem logistik untuk kelancaran distribusi, akselerasi pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lingkungan hidup hijau, meningkatkan ketahanan bencana, dan meminimalisir dampak perubahan iklim.





Ekspektasi Ekonomi



Analisis:

Berdasarkan hasil kuesioner, menurut responden ISEI cabang Cirebon, kondisi ekonomi Nasional secara umum saat ini lebih baik (1,84) dan prediksi kondisi ekonomi nasional 3 bulan ke depan lebih baik (1,67). Sedangkan kondisi ekonomi daerah secara umum saat ini juga lebih baik (1,91) dan prediksi kondisi ekonomi daerah 3 bulan ke depan juga diprediksi lebih baik. Menurut responden kondisi ekonomi secara umum nasional lebih baik dari kondisi ekonomi daerah secara umum.

Untuk penilaian pertumbuhan ekonomi secara nasional saat ini lebih baik (1,83) dan prediksi 3 bulan ke depan pertumbuhan ekonomi nasional lebih baik (1,71). Sedangkan pertumbuhan ekonomi daerah saat ini dinilai lebih baik (1,84) dan prediksi pertumbuhan ekonomi daerah 3 bulan ke depan juga lebih baik (1,78). Menurut responden, pertumbuhan ekonomi nasional saat ini sedikit lebih baik dari pertumbuhan ekonomi daerah Cirebon. Sedangkan prediksi 3 bulan ke depan, pertumbuhan ekonomi nasional juga lebih baik dari daerah Cirebon.

Untuk tingkat pengangguran, baik secara nasional saat ini maupun prediksi 3 bulan kedepan, responden menilai sama saja, hasil yang sama untuk daerah





Cirebon. Demikian juga hasil untuk tingkat inflasi, responden menilai sama saja baik tingkat nasional maupun daerah Cirebon.

Persepsi Tantangan Ekonomi

Tabel 1. Lima Tantangan Ekonomi Terbesar dari Cabang Cirebon

Di Tingkat Nasional		Di Tingkat Daerah	
Kondisi Saat ini	Prediksi 3 Bulan Kedepan	Kondisi Saat ini	Prediksi 3 Bulan Kedepan
1. Volatilitas kurs	1. Pertumbuhan investasi yang melambat	1. Volatilitas kurs	1. Volatilitas kurs
2. Kenaikan suku bunga kredit	2. Volatilitas kurs	2. Kenaikan suku bunga kredit	2. Kenaikan suku bunga kredit
3. Pertumbuhan investasi yang melambat	3. Gejolak dan kondisi politik dalam negeri	3. Defisit APBN	3. Pertumbuhan investasi yang melambat
4. Gejolak dan kondisi politik dalam negeri	4. Defisit APBN	4. Pertumbuhan investasi yang melambat	4. Defisit APBN
5. Defisit APBN	5. Ketersediaan bahan pokok yang terbatas	5. Gejolak dan kondisi politik dalam negeri	5. Gejolak dan kondisi politik dalam negeri

Analisis:

Menurut responden, 5 tantangan ekonomi terbesar nasional saat ini adalah : volatilitas kurs, kenaikan suku bunga kredit, pertumbuhan ekonomi yang melambat, gejolak dan kondisi politik dalam negeri dan defisit APBN. Sedangkan prediksi 3 bulan ke depan, 5 tantangan ekonomi terbesar adalah : pertumbuhan investasi yang melambat, volatilitas kurs, gejolak dan kondisi politik dalam negeri, defisit APBN dan ketersediaan bahan pokok yang terbatas. Untuk Cirebon, 5 tantangan ekonomi terbesar saat ini adalah : volatilitas kurs, kenaikan suku bunga kredit, defisit APBN, Pertumbuhan ekonomi yang melambat dan gejolak kondisi politik dalam negeri. Sedangkan prediksi 3 bulan ke depan, 5 tantangan ekonomi terbesar adalah: Volatilitas kurs, kenaikan suku bunga kredit, pertumbuhan ekonomi yang melambat, defisit APBN dan gejolak kondisi politik dalam negeri.





Persepsi Kemampuan Pemerintah

Tabel 2. Top-5 Persepsi Kemampuan Pemerintah berdasarkan cabang Cirebon

Pemerintah Pusat	Pemerintah Daerah
1. Peningkatan human capital (termasuk peningkatan sumberdaya manusia yang berkualitas dan peningkatan kesehatan masyarakat)	1. Menciptakan rasa aman dan tenteram
2. Menyediakan dan merawat infrastruktur	2. Peningkatan human capital (termasuk peningkatan sumberdaya manusia yang berkualitas dan peningkatan kesehatan masyarakat)
3. Perbaikan sistem logistik untuk kelancaran distribusi	3. Perbaikan sistem logistik untuk kelancaran distribusi
4. Menciptakan rasa aman dan tenteram	4. Akselerasi pertumbuhan investasi
5. Akselerasi pertumbuhan investasi	5. Menciptakan lingkungan hidup hijau, meningkatkan ketahanan bencana, dan meminimalisir dampak perubahan iklim.

Analisis:

Menurut responden, 5 top persepsi kemampuan pemerintah pusat adalah : peningkatan human capital, menyediakan dan merawat infrastruktur, perbaikan sistem logistik untuk kelancaran distribusi, menciptakan rasa aman dan tenteram dan akselerasi pertumbuhan investasi. Sedangkan 5 top persepsi kemampuan pemerintah daerah adalah : menciptakan rasa aman dan tenteram, peningkatan human capital, perbaikan sistem logistik untuk kelancaran distribusi, akselerasi pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lingkungan hidup hijau, meningkatkan ketahanan bencana, dan meminimalisir dampak perubahan iklim.





Laporan Survei Indikator Survei Ekonomi Indonesia (ISEI)

Index Cabang: Denpasar

Tim Penyusun:

1. Dr. I Nyoman Mahaendra Yasa, S.E., M.Si.
2. Dr. Ni Putu Nina Eka Lestari, S.E., M.M
3. Dr. Putu Yudy Wijaya, S.E., M.Si.

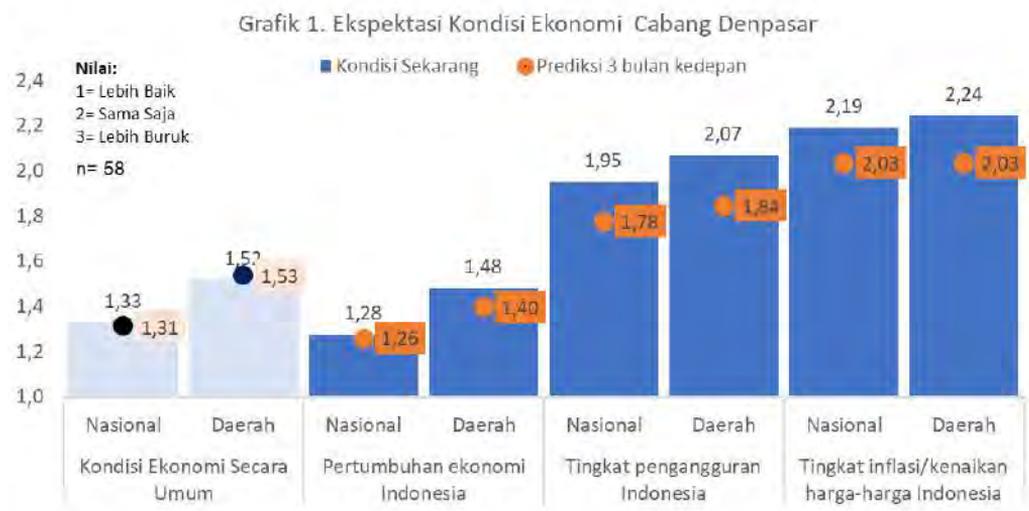
Ringkasan Eksekutif

Perkembangan kepariwisataan Bali memberikan dampak yang luas bagi perekonomian Bali. Investasi yang masif di sektor pariwisata telah mampu membuka lapangan pekerjaan yang luas dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Disisi lain, pariwisata sebagai sektor unggulan menyebabkan Bali menjadi ketergantungan terhadap dinamika kunjungan wisatawan ke Bali. Semakin meningkat jumlah wisatawan yang berkunjung, maka realisasi Pendapatan Asli Daerah meningkat. Hal ini menyebabkan sektor pariwisata sebagai sumber utama Pendapatan Asli Daerah yang berkontribusi paling besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Perekonomian Bali yang didominasi oleh sektor pariwisata menyebabkan sangat rentan terhadap guncangan kondisi global maupun domestik. Keterpurukan ekonomi Bali akibat kebijakan pembatasan mobilitas masyarakat menyebabkan aktivitas perekonomian melemah selama masa Pandemi *Covid-19* dan sulit untuk bangkit, karena struktur perekonomian Bali yang kurang tangguh. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah Provinsi Bali bersama-sama melakukan upaya pemulihan ekonomi sekaligus transformasi ekonomi. Dampak Pandemi *Covid-19* memberikan momentum untuk melakukan evaluasi serta memperbaiki, memperkuat dan mempercepat pemulihan dan transformasi ekonomi Bali. Perekonomian Bali pada Semester II-2022 diperkirakan tumbuh membaik dibandingkan Semester I-2022 yang didukung oleh pemulihan kinerja pariwisata. Kunjungan wisatawan nusantara dan perhelatan *event* berskala Nasional dan Internasional akan menjadi pemicu utama pemulihan lapangan usaha yang terkait pariwisata. Walaupun demikian, upaya pemulihan yang telah dilakukan realisasinya diperkirakan belum seperti yang diharapkan, yaitu dapat mencapai atau setidaknya mendekati kinerja makro ekonomi seperti sebelum masa Pandemi *Covid-19*, terutama berkaitan dengan indikator pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran dan inflasi. Dari sisi pengeluaran, hal ini disebabkan oleh belum optimalnya konsumsi rumah tangga, investasi dan ekspor ditengah perbaikan konsumsi pemerintah yang masih terbatas. Dari sisi penawaran, hal ini disebabkan oleh belum optimalnya kinerja lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (Akmamin), Transportasi, Perdagangan dan Konstruksi.





Ekspektasi Ekonomi



Analisa:

Ekspektasi kondisi ekonomi secara umum, walaupun sudah mulai membaik, namun belum pulih seperti yang diharapkan, baik nasional maupun daerah. Hal ini disebabkan oleh belum pulihnya perekonomian dunia yang berdampak kepada perekonomian nasional dan daerah. Diperkirakan perekonomian dunia tahun ini hanya mampu tumbuh sekitar 3,2 persen (y-on-y). Hal ini akan menimbulkan perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2022, khususnya di semester II-2022 dibandingkan dengan capaian ekonomi nasional tahun 2021 yang telah mencapai 6,1 persen. Hal ini dipicu oleh meningkatnya inflasi global, terutama di Amerika Serikat dan Uni Eropa yang memicu pengetatan di sektor finansial. Disisi lain, ketegangan antara Rusia dan Ukraina yang masih belum berakhir dapat memicu terhentinya impor gas Eropa dari Rusia, yang selanjutnya berdampak pada peningkatan inflasi yang bermuara kepada stabilitas perdagangan internasional. Kondisi eksternal ini dapat menghambat upaya pemulihan ekonomi nasional maupun daerah. Untuk perekonomian daerah Bali, diperkirakan akan berdampak terhadap capaian kinerja makro ekonomi Semester II-2022, khususnya pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran dan tingkat inflasi.

Jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya (y-on-y), ekonomi Bali Triwulan II-2022 tumbuh sebesar 3,04 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai pada lapangan usaha Kategori D (Pengadaan





Listrik dan Gas) sebesar 15,40 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai pada Komponen Impor Luar Negeri, yaitu sebesar 556,67 persen. Jika diakumulasikan, pertumbuhan ekonomi Triwulan I-2022 sampai dengan Triwulan II-2022, maka pertumbuhan ekonomi Bali semester I-2022 hanya tumbuh sebesar 2,27 persen (c-to-c). Struktur ekonomi Bali dari sisi produksi pada Triwulan II-2022, masih didominasi oleh Kategori I (Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum) yang berkontribusi sebesar 17,64 persen. Dari sisi pengeluaran, kontribusi terbesar adalah Komponen Konsumsi Rumah Tangga sebesar 54,68 persen.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Februari 2022 sebesar 4,84 persen, turun 0,58 persen dibandingkan dengan bulan Februari 2021. Namun demikian, TPT tersebut masih cukup tinggi jika dibandingkan dengan TPT Bali sebelum Pandemi *Covid-19* pada Februari 2020 yang tercatat sangat rendah yaitu sebesar 1,25 persen. Lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan terbesar yaitu sektor industri pengolahan (2,76 persen), sementara sektor yang mengalami penurunan terbesar yaitu sektor transportasi dan pergudangan (-1,5 persen). Telah banyak pekerja yang sebelumnya terdampak pandemi *Covid-19* seperti di-PHK dan dirumahkan, telah kembali bekerja (dipanggil kembali dan telah menemukan pekerjaan baru).

Inflasi Provinsi Bali pada Triwulan I-2022 sebesar 2,41 persen (y-on-y) lebih tinggi dibandingkan capaian inflasi triwulan I-2021 yang tercatat 2,07 persen (y-on-y). Hal ini disebabkan oleh meningkatnya tekanan harga disebagian besar kelompok komoditas, walaupun realisasi inflasi tersebut masih dibawah inflasi nasional yang mencapai 2,64 persen (y-on-y). Pada Triwulan II-2022, tekanan harga semakin meningkat terutama didorong oleh peningkatan tekanan harga *volatile food* dan *administered prices*. Peningkatan tekanan harga *volatile food* disebabkan oleh masih tingginya harga komoditas CPO global yang berdampak terhadap harga komoditas minyak goreng maupun komoditas yang berbahan dasar minyak sawit. Tekanan harga terhadap kelompok *administered prices* disebabkan oleh kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan Bahan Bakar Rumah Tangga (BBRT) sesuai dengan peningkatan harga komoditas energi dunia. Pola perkembangan dari tiga indikator makro ekonomi tersebut pada semester II-2022 diperkirakan relatif membaik dibandingkan Semester I-2022, walaupun belum pulih seperti yang diharapkan.





Persepsi Tantangan Ekonomi

Tabel 1. Lima Tantangan Ekonomi Terbesar dari Cabang Denpasar

Di Tingkat Nasional		Di Tingkat Daerah	
Kondisi Saat ini	Prediksi 3 Bulan Kedepan	Kondisi Saat ini	Prediksi 3 Bulan Kedepan
1. Kenaikan suku bunga kredit	1. Kenaikan suku bunga kredit	1. Volatilitas kurs	1. Volatilitas kurs
2. Gejala dan kondisi politik dalam negeri	2. Defisit APBN	2. Kenaikan suku bunga kredit	2. Kenaikan suku bunga kredit
3. Volatilitas kurs	3. Gejala dan kondisi politik dalam negeri	3. Pertumbuhan investasi yang melambat	3. Defisit APBN
4. Defisit APBN	4. Volatilitas kurs	4. Defisit APBN	4. Pertumbuhan investasi yang melambat
5. Ketersediaan bahan pokok yang terbatas	5. Ketersediaan bahan pokok yang terbatas	5. Gejala dan kondisi politik dalam negeri	5. Ketersediaan bahan pokok yang terbatas

Analisa:

Lima tantangan ekonomi yang dihadapi kedepan diperkirakan relatif lebih berat, baik ditingkat nasional maupun daerah yang meliputi instabilitas suku bunga kredit, khususnya **kenaikan suku bunga** yang berdampak kepada **melambatnya pertumbuhan investasi**. Disisi lain, kondisi ini seharusnya mampu mendorong inovasi dalam upaya menciptakan efisiensi investasi dan meningkatkan daya saing komoditas, sektor maupun wilayah. Kondisi yang baik ini akan mampu mendorong akselerasi pemerataan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi, baik antar sektor maupun wilayah. Untuk menjaga peningkatan pertumbuhan ekonomi dari sisi permintaan, tantangan **instabilitas kurs** akan berdampak terhadap net ekspor hendaknya dikelola dengan baik dalam rangka peningkatan devisa melalui ekspor yang selanjutnya dapat mereduksi tantangan **defisit APBN** melalui penerimaan dalam negeri. Upaya peningkatan net ekspor, melalui strategi promosi ekspor dan strategi substitusi impor akan menjawab tantangan **ketersediaan bahan pokok yang terbatas** yang nanti akan mampu menjaga stabilitas harga. Lima tantangan ekonomi terbesar ini perlu dikelola dengan baik sebagai momentum untuk melakukan penyesuaian dan perbaikan dalam upaya percepatan pemulihan ekonomi kedepan.





Tabel 2. Top-5 Persepsi Kemampuan Pemerintah berdasarkan cabang Denpasar

Pemerintah Pusat	Pemerintah Daerah
1. Peningkatan human capital (termasuk peningkatan sumberdaya manusia yang berkualitas dan peningkatan kesehatan masyarakat)	1. Menciptakan rasa aman dan tenteram
2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan menciptakan lapangan kerja	2. Perbaiki sistem logistik untuk kelancaran distribusi
3. Menyediakan dan merawat infrastruktur	3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan menciptakan lapangan kerja
4. Menciptakan rasa aman dan tenteram	4. Akselerasi pertumbuhan investasi
5. Akselerasi pertumbuhan investasi	5. Peningkatan human capital (termasuk peningkatan sumberdaya manusia yang berkualitas dan peningkatan kesehatan masyarakat)

Analisa:

Secara umum kemampuan dan upaya pemerintah dalam menciptakan lima kondisi ini sudah baik, namun dengan berbagai kendala eksternal, belum mencapai hasil yang optimal. Untuk itu, perlu dilakukan upaya lanjutan yang lebih holistik dan terintegrasi. Dalam upaya peningkatan **human capital (termasuk peningkatan sumberdaya manusia yang berkualitas dan peningkatan kesehatan masyarakat)**, pemerintah diharapkan melakukan monitoring pemberlakuan UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dimana alokasi anggaran pendidikan nasional maupun daerah minimal sebesar 20 persen dari APBD. Disamping itu, UU No. 36 Tahun 2009 juga mengamanatkan pemerintah provinsi mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10 persen dari APBD. . Dengan demikian, diharapkan kualitas sumber daya manusia, baik menurut kualifikasi, jenjang pendidikan, kompetensi dan sehat akan tersedia sesuai dengan yang dibutuhkan. Pendidikan tidak hanya menambah pengetahuan, akan tetapi juga meningkatkan keterampilan bekerja, meningkatkan produktivitas dan mampu **meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja**..Tersedianya kualitas *human capital* yang unggul akan berdampak terhadap **akselerasi pertumbuhan investasi** antar sektor maupun wilayah. Disiapkan anggaran infrastruktur yang memadai untuk **menyediakan dan merawat infrastruktur** yang ada. Dengan infrastruktur yang memadai dan **perbaiki sistem logistik untuk kelancaran distribusi**, maka akan terjamin konektivitas antar wilayah dan mobilitas sumber daya ekonomi semakin baik dan efisien. Hal ini dimungkinkan jika tercipta **rasa aman dan tentram** melalui stabilitas politik, sosial, ekonomi, dan hankam.





Laporan Survei Indikator Survei Ekonomi Indonesia (ISEI)

Index Cabang: GORONTALO

Tim Penyusun:

1. Dr. Hais Dama, SE, M.Si
2. Dr Herwin Mopangga, SE, M.Si
3. Dr. Andi Yusniar Mendo

Ringkasan Eksekutif

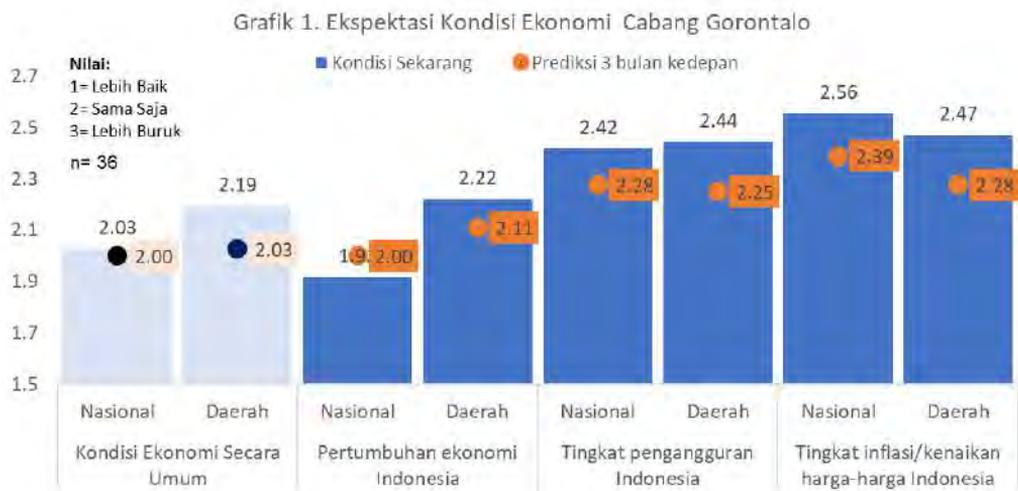
Ekonomi Gorontalo triwulan I-2022 terhadap triwulan sebelumnya (q-to-q) terkontraksi sebesar 1,06 persen. Dari sisi produksi, kontraksi terdalam dialami oleh kategori Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 8,79 persen. Sementara dari sisi pengeluaran kontraksi terdalam dialami oleh komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar 34,49 persen. Struktur ekonomi Gorontalo triwulan I-2022 dari sisi produksi didominasi oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dengan kontribusi sebesar 38,16 persen. Sedangkan dari sisi pengeluaran didominasi oleh komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga dengan kontribusi sebesar 62,74 persen.

Ekonomi Gorontalo triwulan II-2022 terhadap triwulan II-2021 (y-on-y) tumbuh sebesar 4,91 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh kategori Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 16,40 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Ekspor Barang dan Jasa yang tumbuh sebesar 7,39 persen. Apabila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Gorontalo triwulan I-2022 (y-on-y), Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) merupakan komponen dengan sumber pertumbuhan tertinggi yakni sebesar 1,80 persen; diikuti oleh Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 0,95 persen. Sementara sumber pertumbuhan ekonomi Gorontalo dari komponen lainnya sebesar 0,43 persen. Seiring dengan membaiknya pertumbuhan ekonomi Gorontalo pada triwulan I 2022, kondisi ketenagakerjaan di Gorontalo juga mengalami perbaikan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan periode IV tahun 2021. Membaiknya kondisi ketenagakerjaan ini berdampak baik pada tingkat pengangguran terbuka yang juga membaik.

Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) Provinsi Gorontalo yang hanya diwakilkan oleh Kota Gorontalo pada triwulan I 2022 relatif masih rendah yang tercatat sebesar 1,78% (yoy) dibandingkan triwulan IV 2021 yang tercatat sebesar 2,59% (yoy). Perkembangan inflasi tahunan ini sejalan dengan kinerja perekonomian Gorontalo yang melambat pada triwulan laporan. Inflasi IHK yang lebih rendah dari triwulan sebelumnya terutama bersumber dari penurunan kelompok makanan, minuman dan tembakau, kelompok penyediaan makanan dan minuman restoran, serta kelompok pakaian dan alas kaki. Sementara itu, tekanan inflasi IHK terutama didorong oleh inflasi, kelompok perumahan, air, listrik dan BBRT, kelompok transportasi serta perawatan pribadi dan jasa lainnya yang meningkat dari triwulan sebelumnya.



Ekspektasi Ekonomi



Analisa:

Berdasarkan data diatas menggambarkan bahwa secara umum pertumbuhan ekonomi baik ditingkat nasional maupun daerah sebagaimana jawaban para resnponden kondisi sekarang masih sama, demikian pula untuk tiga bulan kedepan masih sama saja, dalam artian bahwa sampai dengan tiga bulan kedepan belum ada gambaran adanya kenaikan pertumbuhan ekonomi yang sigifikan. Pertumbuhan ekonomi daerah Gorontalo pada triwulan ke dua ini tubuh sebesar 3.23 persen, tumbuh 4,91 jika dibandingkan pada triwulan II tahun 2021, dan sekktor penyumban pertumbuhan ekonomi tertinggi adalah sektor pertanian sebesar 1,89%.

Tingkat pengangguran didaerah dimana kondisi saat ini dibanding dengan tiga bulan yang akan datang menurut tanggapan para responden masih sama saja, walaupun cenderung optimis akan membaik. Inflasi didaerah pun demikian, saat ini masih cukup terkendali, walaupun ada gejala secara nasional dimana terjadinya inflasi tinggi terutama pada sektor pangan, tidak demikian di daerah, tekanan inflasi masih sama saja dan cenderung terkendali, walaupun ada tekanan naiknya harga pangan yang terjadi pada waktu-waktu tertentu (hari-hari besar) yang diakibatkan oleh naiknya permintaan seperti cabe merah, telur dan daging ayam.

Dari hasil evaluasi BPS dan Bank Indonesia Kpw Gorontalo, Pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo pada 2022 diperkirakan terakselerasi dari capaian



pertumbuhan ekonomi yang positif pada tahun 2021. Akselerasi perekonomian pada 2022 diperkirakan akan didorong oleh semakin membaiknya beberapa faktor positif dari sisi permintaan maupun sisi penawaran seiring akselerasi capaian vaksinasi dan berlanjutnya stimulus fiskal melalui program pinjaman PEN 2021.

Dari sisi permintaan, perekonomian 2022 diperkirakan didorong oleh meningkatnya konsumsi rumah tangga, seiring dengan capaian vaksinasi, membaiknya konsumsi pemerintahan khususnya dari program pinjaman PEN 2021 dan membaiknya kinerja investasi. Sedangkan di sisi penawaran, perekonomian didorong oleh pemulihan pada LU utama yaitu LU Pertanian, LU PBE, LU Industri Pengolahan, dan LU Transportasi dan Pergudangan.

Tekanan inflasi Gorontalo triwulan II tahun 2022 diperkirakan lebih tinggi dari triwulan I 2022 dan berada di dalam target sasaran nasional sebesar $3\% \pm 1\%$ (yoy). Tekanan inflasi Gorontalo triwulan II tahun 2022 diperkirakan sebesar 2,31% (yoy) – 2,81% (yoy). Peningkatan tekanan inflasi pada triwulan II seiring dengan meningkatnya permintaan menjelang HBKN Ramadhan dan Idul Fitri seperti angkutan udara, peningkatan harga bahan bakar rumah tangga, minyak goreng dan beberapa komoditas pangan strategis seperti bawang merah, tomat, dan komoditas ikan tangkap. Sepanjang tahun 2022, inflasi diperkirakan akan mencapai rentang 2,48%-2,98%(yoy). Potensi upside risk inflasi 2022 bersumber dari peningkatan harga komoditas pangan dan makanan yang dipengaruhi oleh kenaikan harga komoditas internasional serta disrupsi pasokan bahan baku secara global.

Persepsi Tantangan Ekonomi

Tabel 1. Lima Tantangan Ekonomi Terbesar dari Cabang Gorontalo

Di Tingkat Nasional		Di Tingkat Daerah	
Kondisi Saat ini	Prediksi 3 Bulan Kedepan	Kondisi Saat ini	Prediksi 3 Bulan Kedepan
1. Volatilitas kurs	1. Pertumbuhan investasi yang melambat	1. Gejala dan kondisi politik dalam negeri	1. Volatilitas kurs
2. Gejala dan kondisi politik dalam negeri	2. Volatilitas kurs	2. Volatilitas kurs	2. Pertumbuhan investasi yang melambat
3. Pertumbuhan investasi yang melambat	3. Kenaikan suku bunga kredit	3. Defisit APBN	3. Defisit APBN
4. Defisit APBN	4. Ketersediaan bahan pokok yang terbatas	4. Pertumbuhan investasi yang melambat	4. Gejala dan kondisi politik dalam negeri
5. Kenaikan suku bunga kredit	5. Defisit APBN	5. Kenaikan suku bunga kredit	5. Kenaikan suku bunga kredit





Analisa:

Tantangan ekonomi daerah berdasarkan hasil survei lebih pada adanya gejolak dan kondisi politik dalam negeri yang saat ini menjelang tahun politik tahun 2024. berbeda dengan hasil tantangan ekonomi ditingkat nasional yang lebih pada adanya volatilitas kurs. Justru didaerah volatilitas kurs merupakan tantangan kedua yang diprediksi akan menjadi tantangan utama ditiga bulan kedepan. Gejolak kurs dengan naiknya nilai tukar USD terhadap beberapa mata uang di dunia juga berdampak pada nilai Rupiah, dan ini yang akan menyebabkan terjadinya ketidakstabilan harga yang menyebabkan tekanan inflasi secara nasional maupun didaerah. Kondisi lain sebagaimana tanggapan responden didaerah dari devisa APBN masih merupakan kondisi yang terjadi akibat dari program PEN yang masih saja berjalan sejak tahun 2021 dimana anggaran APBN masih dikonsentrasikan pada program peningkatan kesehatan masyarakat akibat Covid-19.

Pertumbuhan investasi yang melambat yang saat ini dirasakan oleh daerah juga merupakan kondisi reel yang justru pada 3 bulan akan datang dipresepsikan akan semakin membaik. Bahkan sebagaimana tanggapan responden perlambatan pertumbuhan investasi juga disebabkan oleh kenaikan suku bunga yang menjadi tantangan ekonomi saat ini maupun tiga bulan kedepan. Pertumbuhan kredit di Daerah Gorontalo saat ini mengalami peningkatan dan terutama perbaikan dengan tingkat NPL yang masih di bawah threshold atau dibawah standar regulator BI, hal ini ditopang oleh pertumbuhan DPK yang juga membaik, dan ini diprediksi akan membaik jika Bank Indonesia belum mengeluarkan kebijakan menaikkan suku bunga acuannya dalam upaya merangsang pertumbuhan ekonomi melalui sektor pertanian dan UKM yang menjadi prioritas utama dan penunjang pertumbuhan ekonomi daerah.





Persepsi Kemampuan Pemerintah

Tabel 2. Top-5 Persepsi Kemampuan Pemerintah berdasarkan cabang Gorontalo

Pemerintah Pusat	Pemerintah Daerah
1. Menciptakan rasa aman dan tenteram	1. Menciptakan rasa aman dan tenteram
2. Peningkatan human capital (termasuk peningkatan sumberdaya manusia yang berkualitas dan peningkatan kesehatan masyarakat)	2. Perbaikan sistem logistik untuk kelancaran distribusi
3. Perbaikan sistem logistik untuk kelancaran distribusi	3. Peningkatan human capital (termasuk peningkatan sumberdaya manusia yang berkualitas dan peningkatan kesehatan masyarakat)
4. Menyediakan dan merawat infrastruktur	4. Menciptakan lingkungan hidup hijau, meningkatkan ketahanan bencana, dan meminimalisir dampak perubahan iklim.
5. Menciptakan lingkungan hidup hijau, meningkatkan ketahanan bencana, dan meminimalisir dampak perubahan iklim.	5. Menegakkan hukum dan memberikan rasa keadilan

Analisa:

Pemerintah daerah provinsi Gorontalo tetap berkomitmen dalam upaya memulihkan perekonomian daerah pasca pandemik Covid-19, dengan tetap menciptakan kondisi daerah yang aman dan tentram. prioritas utama daerah sebagaimana hasil survei menjelaskan bahwa menciptakan rasa aman dan tentram bagi masyarakat menjadi prioritas utama pemerintah. selanjutnya adalah perbaikan sistem logistik untuk kelancaran distribusi. hasil survei SKDU daerah gorontalo periode ke 2 tahun 2022 menunjukan sistem distribusi barang dari dan keluar daerah saat ini lancar dan stabil. sehingga ketersediaan barang dan jasa yang menjadi konsumsi masyarakat aman dan terkendali. sebagaimana laporan KPw Bank Indonesia dimana salah satu sumber peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah gorontalo adalah pengeluaran konsumsi masyarakat yang tumbuh sebesar 62% dari PDRB pengeluaran pemerintah.

Peningkatan human capital termasuk peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah Gorontalo menjadi prioritas kemampuan daerah yang dilihat dari adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang tercermin dari penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terbuka pada maret 2022 dan

peningkatan indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). dari analisis kesejahteraan untuk masyarakat daerah provinsi Gorontalo tercermin dari kemampuan daerah dalam menurunkan angka penduduk miskin. pada bulan September 2021 tingkat kemiskinan Gorontalo tercatat sebesar 15,41%





membalik dibandingkan angka pada bulan Maret 2021 sebesar 15,61%. demikian pula daerah memiliki kemampuan dalam memperbaiki indikator ketimpangan pengeluaran masyarakat yang diukur dari analisis Gini Ratio tercatat sebesar 0.409 pada September 2021 dan terkesan stabil dari bulan Maret 2021 sebesar 0.408.

Kemampuan lain daerah adalah menciptakan lingkungan hijau, meningkatkan ketahanan bencana dan meminimalisir dampak perubahan iklim dan menegakan hukum dan memberuikan rasa keadilan bagi masyarakat juga merupakan hal yang dilakukan daerah dalam upaya melindungi masyarakat dari ancaman lingkungan, menciptakan lingkungan yang bersih dan hijau dengan penataan kota pembuatan taman-taman hijau dipusat kota yang saat ini sedang di kerjakan oleh dinas terkait, perbaikan saluran disepanjang jalan utama dalam upaya meminimalisir dampak banjir akibat dari perubahan iklim global saat ini.





Laporan Survei Indikator Survei Ekonomi Indonesia (ISEI) Index Cabang: Jakarta

Pendahuluan

Perekonomian nasional dan daerah setiap waktu mengalami fluktuasi, baik karena situasi domestic maupun kondisi global. Hari ini kondisi domestic sangat dipengaruhi oleh proses pemulihan ekonomi dengan dibukanya mobilitas penduduk sejak bulan April 2022. Kegiatan perdagangan, transportasi, akomodasi, restoran hingga kegiatan pendidikan dan layanan kesehatan mulai normal kembali. Meski ancaman virus Omicron masih terjadi namun aktivitas ekonomi nampaknya cenderung membaik. Sebaliknya, pada kondisi global yang saat ini dipengaruhi oleh geopolitik global akibat perang Rusia Ukraina menimbulkan dampak yang sangat besar. Kenaikan harga energi, komoditas hingga bahan baku industri mulai dirasakan banyak negara, termasuk Indonesia. Sisi positifnya, Indonesia mendapatkan windfall profit tax dari komoditas tersebut namun inflasi dari kenaikan harga BBM sulit dihindari.

Dinamika diatas sangat penting untuk ditelusuri lebih dalam agar dapat menjadi informasi dan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan, baik pemerintah dan swasta. Salah satu informasi yang dibutuhkan adalah pandangan dari pakar, akademisi serta pemerhati ekonomi yang mengetahui secara luas gambaran ekonomi masa lalu, kini dan masa depan. Pandangan tersebut diwujudkan dalam survei persepsi perekonomian nasional dan daerah. Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Cabang Jakarta memandang perlu pentingnya survei ini mengingat hasil survei ini dapat menjadi indikasi arah bagaimana proyeksi perekonomian nasional dan daerah . Harapannya selain dapat menjadi masukan juga menjadi bahan internal ISEI dalam memberikan pandangan dalam persidangan ISEI yang diselenggarakan secara rutin.

Persepsi Perekonomian Nasional dan Daerah

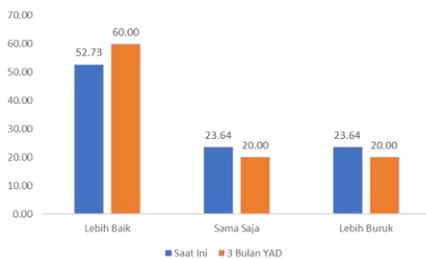
Ekonomi Indonesia secara umum mulai terjadi pemulihan ekonomi Indonesia sejak kasus pandemic mulai mereda pada awal tahun 2022. Ini dipersepsikan oleh responden bahwa secara umum ekonomi nasional saat ini mulai membaik (52,73 persen). Bahkan dalam 3 bulan ke depan akan semakin membaik lagi.



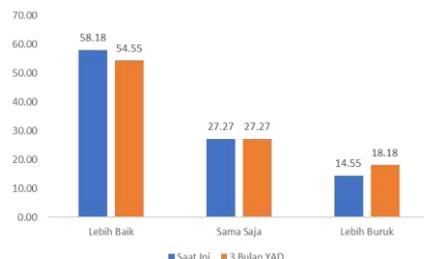


Meski demikian, responden melihat bahwa potensi penurunan pertumbuhan ekonomi akan terjadi dalam 3 bulan ke depan. Ini berarti, pertumbuhan ekonomi secara nasional yang saat ini sebesar 5,44 persen pada kuartal II tahun 2022 diperkirakan akan menurun pada kuartal III tahun 2022. Selain karena efek konsumsi masyarakat yang nampaknya mulai normal tanpa ada hari raya atau peristiwa besar. Belanja pemerintah juga kemungkinan masih belum optimal sehingga kurang mendorong pertumbuhan ekonomi, seperti halnya pada kuartal I dan kuartal II tahun 2022 yang berada pada level negative. Penurunan optimisme juga bisa disebabkan kenaikan harga BBM sehingga mengurangi daya beli masyarakat secara umum.

Gambar 1. Persepsi Perekonomian Nasional Secara Umum (%)



Gambar 2. Persepsi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (%)



Ekonomi yang membaik saat ini belum sepenuhnya pulih mengingat pengangguran secara nasional masih relative tinggi. Data BPS hingga bulan Februari Tahun 2022 menunjukkan tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebesar 8,4 juta jiwa atau 5,83%. Jauh lebih baik dibandingkan Februari tahun 2021 yang sebesar 6,26%. Meski demikian, responden melihat 3 bulan yang akan datang pemulihan ekonomi yang membaik berdampak pada berkurangnya tingkat pengangguran. Ini tercermin dari responden yang melihat kondisi lebih baik semakin membesar maupun responden yang melihat kondisi pengangguran sama saja.

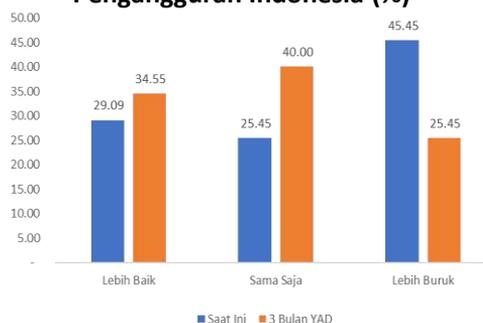
Meski demikian, ekonomi masih dibayangi oleh tingginya inflasi dimana kondisi terakhir Inflasi bulan Juli sebesar 4,94 (yoy) yang merupakan inflasi tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini juga tercermin dari persepsi responden yang sebagian besar (65,45 persen) menyatakan bahwa inflasi saat ini lebih buruk dibandingkan sebelumnya. Bukan hanya persepsi responden dipengaruhi oleh kenaikan harga minyak goreng, namun juga produk hortikultura, seperti cabai



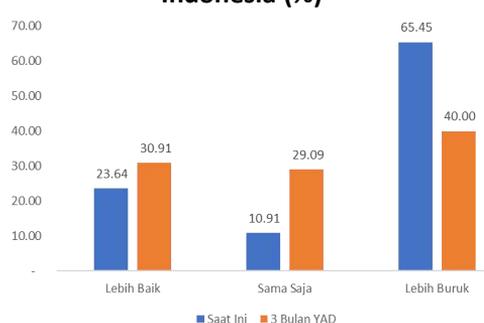


merah, cabai keriting dan bawang merah serta kenaikan tiket angkutan udara dan rokok kretek (BI, Agustus 2022). Karena itu, tekanan terhadap inflasi tampaknya oleh sebagian responden akan semakin menurun. Hal ini karena penanganan inflasi diyakini responden akan jauh lebih baik. Meski demikian, potensi inflasi yang memburuk masih lebih tinggi (40 persen), dibandingkan yang lebih baik (30.91 persen) dan sama saja (29.09 persen). Potensi kenaikan inflasi disebabkan masih oleh inflasi bergejolak oleh beragam produk hortikultura maupun administered price, khususnya tiket pesawat.

Gambar 3. Persepsi Tingkat Pengangguran Indonesia (%)



Gambar 4. Persepsi Tingkat Inflasi Indonesia (%)



Sumber : hasil survei ISEI Jakarta (2022)

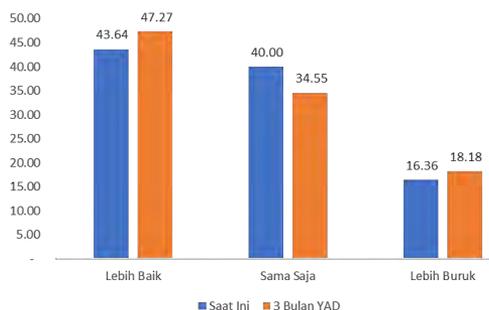
Pada tingkat daerah, khususnya DKI Jakarta, responden menilai juga terjadi pemulihan ekonomi di Jakarta juga terjadi. Tidak hanya secara umum namun juga pada pertumbuhan ekonomi. Data BPS menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Jakarta pada Triwulan II Tahun 2022 sebesar 5,59 persen lebih tinggi dibandingkan Triwulan I yang sebesar 4,62 persen²⁴. Pertumbuhan ini banyak ditunjang oleh pengeluaran konsumsi rumah tangga dan investasi (PMTB) ketimbang konsumsi pemerintah yang masih negative. Dengan kondisi ini, responden melihat bahwa pada kuartal berikutnya pertumbuhan ekonomi akan jauh lebih baik. Hal ini ditunjukkan persepsi pertumbuhan ekonomi yang meningkat dari 41.82 persen menjadi 43,64 persen.

²⁴ <https://www.bps.go.id/indicator/171/540/1/-seri-2010-4-laju-pertumbuhan-y-on-y-pdrb-atas-dasar-harga-konstan-menurut-pengeluaran-2010-100-.html>

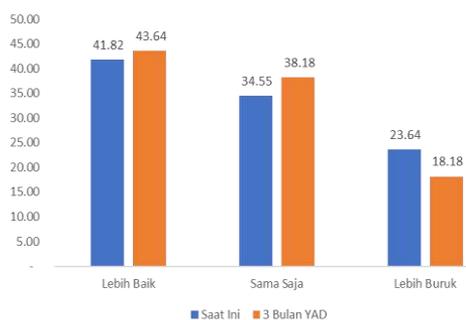




Gambar 5. Persepsi Perekonomian Daerah Secara Umum (%)



Gambar 6. Persepsi Pertumbuhan Ekonomi Daerah (%)



Sumber : hasil survei ISEI Jakarta (2022)

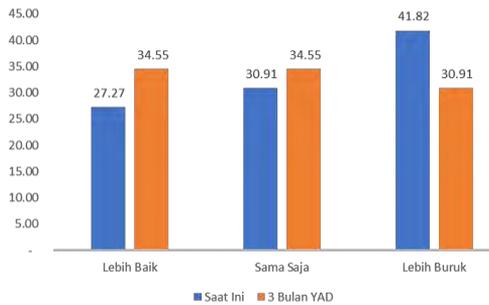
Walaupun prospek ekonomi lebih baik namun banyak responden menilai bahwa pengangguran saat ini lebih buruk. Apabila dilihat data BPS Jakarta pada Februari 2022, tingkat pengangguran terbuka di Provinsi DKI Jakarta 8 persen atau menurun dibandingkan Februari 2021 yang sebesar 8,51 persen. Pekerja formalnya tetap mendominasi yakni sebesar 63,20 persen, namun demikian dalam perkembangannya, pekerja formal mengalami penurunan dari periode sebelumnya (Februari 2021) yakni 64,1 persen²⁵. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi perbaikan dalam penciptaan lapangan pekerjaan di berbagai sector. Gambaran ini sejalan dengan hasil survei yang menunjukkan persepsi lebih buruk akan semakin berkurang dari 41,82 persen menjadi 30,91 persen. Hasil ini bahkan mengindikasikan bahwa ke depan, kesempatan lapangan pekerjaan akan semakin terbuka karena persepsi responden untuk tingkat pengangguran dalam posisi lebih baik untuk 3 bulan yang akan datang lebih besar dibandingkan persepsi sama saja dan lebih buruk.

²⁵ BPS Provinsi DKI Jakarta, Berita Resmi Statistik, 9 Mei 2022.

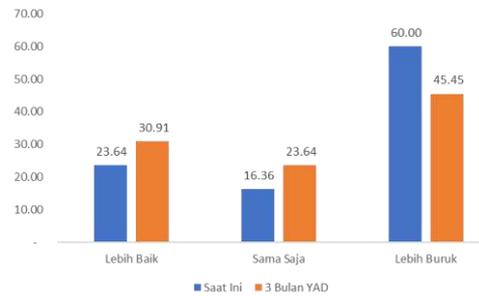




Gambar 7. Persepsi Tingkat Pengangguran Daerah (%)



Gambar 8. Persepsi Tingkat Inflasi Daerah (%)



Sumber : hasil survei ISEI Jakarta (2022)

Di sisi lain, Inflasi yang melanda DKI Jakarta sebesar pada Juli 2022 sebesar 3,5 persen (yoy) menggambarkan kenaikan yang lebih rendah dibandingkan nasional yang sebesar 4,94 persen (yoy). Inflasi tersebut didominasi oleh kenaikan indeks harga konsumen kelompok makanan, minuman, dan tembakau (1,05 persen), transportasi (0,83 persen), serta perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga (0,56 persen). Selain itu juga terdapat empat komoditas barang/jasa yang memberikan andil utama terhadap inflasi di DKI Jakarta adalah cabai rawit (0,09 persen), bahan bakar rumah tangga (0,06 persen), tarif tiket angkutan udara (0,05 persen), dan daging ayam ras (0,04 persen)²⁶. Hasil survei menunjukkan bahwa terdapat perbaikan dalam inflasi dimana responden menilai bahwa kondisi inflasi lebih buruk akan berkurang dari 60 persen menjadi 45,45 persen, seperti ditunjukkan dalam Gambar 8. Hal ini menunjukkan inflasi tinggi masih akan terjadi dalam 3 bulan mendatang namun tekanannya akan semakin berkurang. Ini disebabkan bisa jadi kemampuan daerah dalam menjaga stabilitas harga jauh lebih baik, khususnya supply untuk beberapa komoditas pokok diatas.

Persepsi Tantangan Perekonomian Nasional dan Daerah

Perekonomian nasional dihadapkan pada beragam tantangan yang cukup serius. Responden menilai, baik saat ini maupun 3 bulan yang akan datang melihat bahwa kondisi ekonomi dihadapkan adanya kemungkinan suku bunga meningkat mengingat inflasi inti telah berada pada level 2,83 persen. Bank sentral kemungkinan tidak akan mampu bertahan dengan BI 7 days repo rate yang

²⁶ BPS Provinsi DKI Jakarta, Berita Resmi Statistik, 1 Agustus 2022.





sebesar 3.5 persen, sehingga dalam beberapa bulan ke depan, suku bunga tersebut akan naik. Ini juga sebagai respon terhadap kenaikan suku bunga The Fed yang kini tembus diatas 200 basis point. Konsekuensinya adalah suku bunga pinjaman, baik untuk konsumsi, modal kerja dan investasi akan merangkak naik lagi. Padahal dengan suku bunga yang sekarang, sector riil mulai bekerja yang ditunjukkan laju kredit hingga Juli 2022 telah mencapai diatas 10 persen per bulannya. Jika suku bunga naik maka laju kredit kemungkinan turun dan ekonomi sedikit mengalami hambatan dalam pemulihan ekonominya.

Responden lain juga melihat bahwa pertumbuhan investasi yang melambat. Ini didasarkan atas persepsi bahwa kondisi global yang tidak menentu dan kenaikan suku bunga the Fed sehingga investor akan kembali keluar (capital outflow). Persepsi ini didasari oleh bahwa investasi portofolio pada triwulan II 2022 mencatat net inflow sebesar 0,2 miliar dolar AS. Namun demikian, memasuki triwulan III 2022 (hingga 19 Juli 2022), investasi portofolio mencatat net outflow sebesar 2,0 miliar dolar AS sejalan dengan ketidakpastian pasar keuangan global yang tinggi²⁷. Meski demikian, dalam realisasi investasi langsung cenderung meningkat. BKPM (2022) mencatat bahwa investasi langsung Triwulan II Tahun 2022 sebesar Rp. 302,2 trilyun atau meningkat sebesar 35 persen (yoy) dibandingkan Triwulan II Tahun 2021. Peningkatan terbesar terjadi pada penanaman modal asing (PMA) sebesar 39,7 persen dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebesar 30,8 persen. Ini menunjukkan realisasi investasi jauh lebih baik dibandingkan persepsi responden, baik saat ini maupun 3 bulan yang akan datang.

Konsekuensi masih ditahannya suku bunga tersebut adalah volatilitas nilai tukar rupiah. Nilai tukar saat ini per tanggal 12 Agustus 2022 sebesar Rp. 14.688,00/US\$. Tertinggi sebesar Rp. 15.020,00/US\$ pada tanggal 26 Juli 2022²⁸. Sepanjang Januari-Juli 2022, volatilitas nilai tukar rupiah berkisar 5% atau masih rendah dibandingkan dengan beberapa negara lain yang jauh lebih volatile, seperti Jepang, Uni Eropa, Korea, Malaysia yang volatilitasnya diatas 5 %. Konsekuensi dari volatilitas yang tinggi tersebut adalah dibutuhkan devisa yang cukup besar untuk operasi di pasar keuangan oleh Bank Indonesia. Dalam bulan

²⁷ [BI 7-Day Reverse Repo Rate Tetap 3,50%: Sinergi Menjaga Stabilitas dan Memperkuat Pemulihan](#)

²⁸ [JISDOR \(bi.go.id\)](#)





Juli 2022 saja setidaknya dibutuhkan 4 miliar US\$ atau sekitar Rp. 60 triliun (Kurs Rp. 15.000). Hal ini tentu saja, ketika volatilitas terlalu tinggi maka akan membuat keuangan dunia usaa menjadi tidak stabil, baik dari sisi liabilitas dalam US\$, nilai impor yang terlampau mahal, hingga meningkatnya beragam imported inflation dari beragam produk-produk impor tersebut. Belum lagi, akan membuat investor di pasar modal akan lari dari Indonesia karena volatilitas yang terlalu tinggi.

Tantangan berikutnya yakni ketersediaan bahan pangan pokok. Hal ini menurut responden cukup dikuatirkan mengingat penjelasan sebelumnya terjadi kenaikan harga komoditas seperti cabai, bawang, minyak goreng, daging dan telur ayam. Secara tahunan, kelompok volatile foods mengalami inflasi 11,47% (yoy), lebih tinggi dari bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 10,07% (yoy)²⁹. Kekhawatiran ini beralasan, khususnya bagi beberapa komoditas lain yang sumbernya impor, seperti kedelai, gandum, daging sapi, gula hingga bawang putih. Sebagian komoditas tersebut telah diproteksi oleh beberapa negara seperti Rusia, India, China, dan beberapa negara lainnya. Konsekuensinya dalam beberapa bulan ke depan, isu bahan pokok dan inflasinya masih akan menjadi isu strategis dalam perekonomian Indonesia ke depan.

Kondisi terakhir yang perlu diperhatikan pula adalah deficit APBN yang 3 bulan ke depan perlu menjadi perhatian. Berdasarkan realisasi Pendapatan dan Belanja Negara hingga Juli Tahun 2022, terdapat surplus anggaran pada akhir Juni 2022 sebesar Rp73,59 triliun atau 0,39 persen terhadap PDB. Sementara itu, realisasi Pembiayaan Anggaran hingga akhir Juni 2022 ini mencapai Rp153,53 triliun atau 18,30 persen terhadap Pagu APBN 2022 (Perpres No. 98 Tahun 2022)³⁰. Artinya, bahwa hingga saat ini, kekhawatiran deficit APBN membengkak nampaknya belum terjadi namun akan meningkat dalam 3 bulan ke depan. Hal ini disebabkan karena besaran subsidi yang diberikan pemerintah untuk Bahan Bakar Minyak dan Listrik bisa melebihi pagu yang ditetapkan yakni Rp. 502 trilyun rupiah. Dalam realisasi anggarannya hingga Juni 2022, BBM Solar subsidi sudah tersalurkan 8,3 juta kilo liter (KL) sementara kuotanya sebanyak 14,9 juta KL. Tanpa adanya tanpa pembatasan maka subsidi akan jebol sebesar 17,3 juta KL. Dengan demikian pemerintah akan menambahkan anggaran paling tidak untuk

²⁹ [Inflasi Inti Juli 2022 Tetap Terjaga Rendah \(bi.go.id\)](https://bi.go.id)

³⁰ Kemenkeu. APBN Kita Bulan Juli 2022





2,4 juta KL. Apabila harga keekonomian solar sebesar Rp. 12.119 per liter³¹ maka dibutuhkan tambahan anggaran sekitar Rp. 16,7 triliun rupiah. Hal yang sama untuk pertalite dimana hingga Juni 2022, BBM pertalite sudah tersalurkan 14,2 juta kilo liter (KL) sementara kuotanya sebanyak 23 juta KL. Jika tanpa pembatasan maka akan meningkat menjadi 28 juta KL. Dengan demikian dibutuhkan tambahan sekitar 5 juta KL. Apabila harga keekonomian sebesar sebesar Rp. 12.556 per liter maka tambahan anggaran sebesar Rp. 24,53 triliun rupiah. Secara total maka tambahan anggaran subsidi sebenarnya berkisar Rp. 41,23 triliun rupiah. Ini yang kemudian dipersepsikan isu deficit APBN bisa membengkak karena tidak ada kenaikan harga BBM subsidi.

Tabel 1. Persepsi Tantangan Perekonomian Menurut ISEI Jakarta

Persepsi Tantangan Kondisi Saat ini	Persepsi Tantangan 3 Bulan Kedepan
1. Kenaikan suku bunga kredit	1. Defisit APBN
2. Pertumbuhan investasi yang melambat	2. Pertumbuhan investasi yang melambat
3. Ketersediaan bahan pokok yang terbatas	3. Gejolak dan kondisi politik dalam negeri
4. Volatilitas kurs	4. Volatilitas kurs
5. Defisit APBN	5. Ketersediaan bahan pokok yang terbatas

Sumber : hasil survei ISEI Jakarta (2022)

Tantangan lain yang tampaknya penting diperhatikan yakni gejolak dan kondisi politik dalam negeri dalam 3 bulan ke depan. Penyebabnya dalam sisi ekonomi yakni kenaikan harga BBM yang akan berakibat inflasi. Inflasi ini yang kemudian akan memicu kondisi social politik memanas dan dapat dimanfaatkan oleh instrument-instrumen politik. Kondisi ini sebenarnya pernah terjadi pada Bulan Mei 2022 ketika demonstrasi di banyak tempat berkaitan dengan kenaikan harga minyak goreng dan periode presidensi sebanyak 3 kali periode. Apalagi sejak beberapa minggu lalu pendaftaran partai politik peserta pemilu serta kampanye

³¹ Kemenkeu, Kebijakan Antispatif APBN, 19 Mei 2022





secara sembunyi calon presiden telah dilakukan maka isu social politik akan semakin kencang. Isu ini sedikit banyak akan dikaitkan dengan beragam upaya yang telah dilakukan pemerintah, baik terkait keberhasilan maupun beragam kelemahannya.

Pada tingkat daerah sebenarnya tidak semua isu nasional sama namun terdapat beberapa tantangan pemulihan yang kini mulai terjadi di Jakarta. Hal ini terkait kondisi social politik di DKI Jakarta mengingat masa jabatan Gubernur saat ini akan habis pada bulan Oktober 2022. Ini juga terjadi di sebagian wilayah di Indonesia, baik provinsi maupun kabupaten. Ini sedikit banyak akan merubah arah pembangunan di Jakarta hingga akhir tahun 2022 dimana masa ‘transisi’ tidak ada keputusan yang signifikan. Sebaliknya mengingat Gubernur Jakarta saat ini juga merupakan salah satu kandidat calon presiden mendatang maka kondisi social politik di Jakarta akan semakin dinamis dalam beberapa bulan mendatang.

Upaya Ke Depan

Menangani beragam tantangan diatas secara umum dilakukan melalui kebijakan fiscal dan moneter, namun juga penanganan kondisi social politik yang semakin dinamis. Kebijakan fiscal menurut persepsi responden sesuai dengan kemampuan pemerintah pusat dan daerah diprioritaskan pada bagaimana menyediakan infrastruktur dan mendorong pertumbuhan investasi. Keduanya diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi jauh lebih tinggi pada kuartal III dan kuartal IV Tahun 2022. Diproyeksikan hingga akhir tahun, pertumbuhan kumulatif hingga tahun 2022 berada pada level 5,2 persen hingga 5,5 persen. Sementara kebijakan moneter dibutuhkan dengan menjaga likuiditas perbankan melalui akselerasi pertumbuhan investasi. Hal ini bisa dilakukan dengan mempertahankan laju kredit tetap berada setidaknya level 9%-10 % perbulan. Peluang kenaikan suku bunga BI 7 days repo rate dapat dibuka sepanjang inflasi inti telah melebihi level diatas 3 %.

Hal ini juga dibarengi dengan upaya mengatasi inflasi atas kenaikan harga-harga pangan dan energi. Persepsi responden menyatakan bahwa pemerintah memiliki kemampuan dalam mengatasi inflasi dengan perbaikan system logistic untuk kelancaran distribusi. Meskipun untuk mengatasi inflasi untuk harga





bergejolak, khususnya produk hortikultura umumnya menyangkut produksi yang terkait dengan perubahan iklim. Termasuk mengatasi administered priced dibutuhkan dukungan pemerintah mengatasi tiket pesawat yang relative mahal. Misalnya mengurangi beban maskapai dari sisi relaksasi perpajakan maupun insentif fiskal lainnya. Upaya ini dibarengi dengan upaya pemerintah daerah dengan menstabilkan harga barang dan jasa serta menjamin ketersediaan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat, khususnya komoditas pangan dan energi.

Tabel 2. Persepsi Kemampuan Pemerintah Pusat dan Daerah Menangani Tantangan Perekonomian

Persepsi Kemampuan Pemerintah Pusat	Pemerintah Daerah
1. Akselerasi pertumbuhan investasi	1. Menciptakan rasa aman dan tenteram
2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan menciptakan lapangan kerja	2. Perbaiki sistem logistik untuk kelancaran distribusi
3. Menyediakan dan merawat infrastruktur	3. Peningkatan human capital (termasuk peningkatan sumberdaya manusia yang berkualitas dan peningkatan kesehatan masyarakat)
4. Menciptakan rasa aman dan tenteram	4. Menstabilkan harga barang dan jasa serta menjamin ketersediaan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat
5. Perbaiki sistem logistik untuk kelancaran distribusi	5. Akselerasi pertumbuhan investasi

Sumber : hasil survei ISEI Jakarta (2022)

Terakhir salah satu upaya mengatasi dinamisnya kondisi social politik yang terjadi menjadi penting. Persepsi responden mengarah kepada menciptakan rasa aman dan tenteram. Hal ini dilakukan melalui menjaga isu-isu social politik yang berkaitan dengan masyarakat, seperti rencana kenaikan harga BBM subsidi, kenaikan harga tarif listrik hingga inflasi yang disebabkan kenaikan harga pangan pokok. Upaya ini perlu diperkuat dengan menjaga dinamika hubungan social politik, baik di DPR, MPR dan DPD serta Kementrian/Lembaga maupun tokoh-tokoh politik. Meskipun pemerintahan saat ini cukup kuat namun demokrasi tetap dikedepankan dalam beberapa waktu mendatang.





Laporan Survei Indikator Survei Ekonomi Indonesia (ISEI)

Index Cabang: Jember

Tim Penyusun:

1. Prof. Dr. Isti Fadah, M.Si., CRA.
2. Dr. Yulia Indrawati, S.E., M.Si.
3. Dr. Regina Niken Wilantari, S.E., M.Si.

Ringkasan Eksekutif

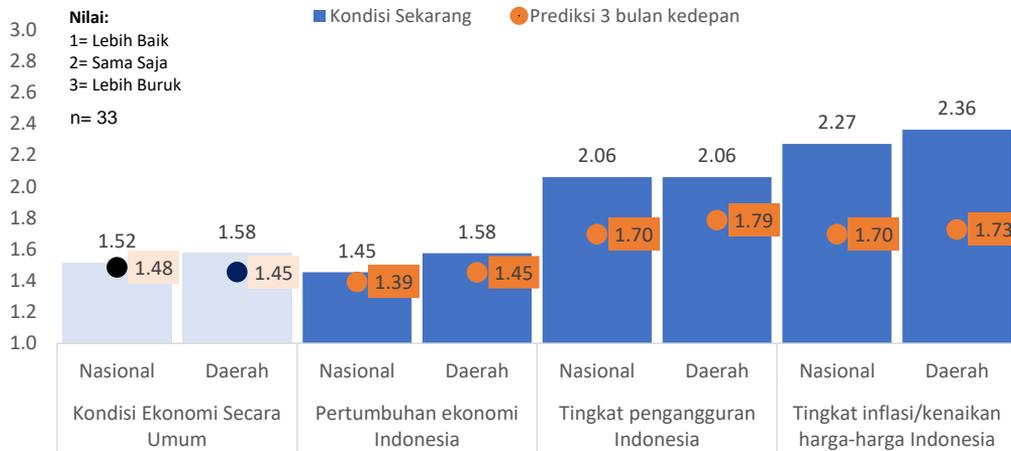
Kinerja perekonomian daerah di wilayah Karesidenan Besuki (Jember, Bondowoso, Situbondo) dan Lumajang saat ini telah melampaui rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional. Keberlanjutan akselerasi pemulihan ekonomi daerah di seluruh sektor ekonomi pasca pandemi Covid-19 sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas yang adaptif dalam merespon tantangan global. Pertumbuhan ekonomi didorong dari sisi permintaan agregat dengan komponen terbesar konsumsi dan menjamin kelancaran dalam rantai pasok sisi penawaran. Kondisi eksisting ketenagakerjaan daerah saat ini relatif sama dengan nasional, namun proyeksi 3 bulan yang akan datang terjadi kenaikan pengangguran lebih tinggi dari nasional. Terjadi anomali dengan meningkatnya kinerja pertumbuhan ekonomi daerah. Scarring effect akibat disrupsi pandemi menjadi penyebab persoalan ketenagakerjaan di daerah. Terjadinya penyesuaian keterserapan tenaga kerja dalam sektor ekonomi ditandai dengan produktivitas tenaga kerja di daerah yang belum optimal. Melambatnya kontribusi sektor pertanian yang saat ini masih menjadi leading sector wilayah Karesidenan Besuki dan Lumajang dan persoalan lainnya adalah proses catching-up teknologi dalam industrialisasi pertanian yang masih rendah sehingga dibutuhkan scaling-up skill tenaga kerja di daerah. Tingkat inflasi daerah masih lebih tinggi dari rata-rata nasional yaitu di kisaran 2,36 dan proyeksi 3 bulan yang akan datang masih lebih tinggi. Penyebab masih tingginya inflasi daerah adalah ketidakpastian global terutama akibat konflik geopolitik Rusia dan Ukraina menyebabkan terjadinya gangguan rantai pasok komoditas global yang berdampak pada harga komoditas domestik. Penyebab lainnya adalah akibat terjadinya perubahan iklim berdampak pada produktivitas komoditas pangan. Tantangan ekonomi daerah saat ini adalah menjaga momentum keberlanjutan pemulihan ekonomi daerah dan memitigasi risiko terjadinya scarring effect pandemi Covid-19, serta adaptasi teknologi. Tantangan lainnya adalah ketidakpastian global akibat eskalasi konflik geopolitik global, terjadinya stagflasi, dan perubahan iklim menjadi potensi risiko yang dapat berlanjut dan berdampak pada instabilitas perekonomian nasional dan daerah. Amplitudo gejolak dan kondisi politik menyebabkan tata kelola kelembagaan dihadapkan pada persoalan terjadinya asimetris informasi dan conflict of interest. Diperlukan komitmen, elaborasi, dan sinergitas antar pemangku kepentingan dalam memitigasi potensi konflik melalui transparansi, akuntabilitas, adil dan bertanggungjawab. Resiliensi Indonesia cukup terjaga dengan momentum pemulihan ekonomi Indonesia yang terus berlanjut dan ditandai dengan optimisme konsolidasi fiskal yang lebih baik. Kemampuan pemerintah dalam menjamin ketercapaian pembangunan ekonomi tercermin dalam komitmen yang dibangun oleh pemerintah daerah beserta seluruh perangkat pemerintah dan komponen masyarakat lainnya yang terjabarkan dalam program kerja dan bersifat bottom-up. Kepemimpinan publik yang transparan, akuntabel, adil, dan bertanggungjawab dalam setiap proses pengambilan kebijakan dan melakukan evaluasi serta rencana tindak lanjut yang bersifat continual improvement.





Ekspektasi Ekonomi

Grafik 1. Ekspektasi Kondisi Ekonomi Cabang Jember



Analisa:

Kondisi Umum. Lingkup wilayah kerja ISEI Cabang Jember terdiri dari Kabupaten Jember, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo, dan Kabupaten Lumajang. Berdasarkan hasil survei Indikator Survei Ekonomi Indonesia (ISEI) Index pada semester II-2022 menunjukkan bahwa kondisi umum kinerja perekonomian daerah saat ini adalah 1,58 sudah melampaui rata-rata kondisi umum nasional yaitu 1,52. Namun proyeksi 3 bulan yang akan datang menunjukkan kinerja yang menurun. Akselerasi kinerja perekonomian daerah dan nasional sejalan dengan upaya pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Beberapa indikator yang merepresentasikan kondisi umum ini adalah pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran dan stabilitas harga. Pelonggaran kebijakan Pembatasan kegiatan Masyarakat (PPKM) yang disertai dengan percepatan vaksinasi Covid-19 dan menurunnya penyebaran Covid-19 untuk mencapai herd immunity mendorong meningkatnya mobilitas ekonomi dan sosial masyarakat, dan diikuti membaiknya kinerja sisi permintaan dan penawaran. Terbukanya kran geliat ekonomi, ruang publik dan kecepatan digitalisasi sebagai game changer percepatan pemulihan perekonomian daerah. Industri pariwisata sebagai sektor terdampak mulai bangkit dengan transformasi konsep keberlanjutan yang digital savvy mendorong pulihnya industri kreatif dan penggerak sektor ekonomi lainnya. Stimulus fiskal dan moneter menjadi bauran kebijakan yang efektif dalam menggerakkan kembali daya beli masyarakat,





produksi, dan distribusi. Ditengah upaya pemulihan ekonomi, bayang-bayang ketidakpastian global akibat pandemi Covid-19, konflik geopolitik Rusia dan Ukraina, ancaman stagflasi, perubahan iklim, dan dampak luka memar (scarring effect) dari pandemi terhadap dunia usaha dan keberlanjutan pemulihan ekonomi serta stabilitas sistem keuangan masih menjadi tantangan nasional dan daerah. Upaya menjaga momentum fundamental stabilitas domestik di segala bidang dan membawa kerangka glokalisasi melalui penguatan kerjasama internasional sangat diperlukan dalam memitigasi risiko terjadinya krisis berkelanjutan (overlapping crises).

Pertumbuhan Ekonomi. Pertumbuhan ekonomi daerah telah melampaui pertumbuhan ekonomi nasional di kisaran 1,58 dengan proyeksi 3 bulan yang akan datang berada pada level yang masih lebih tinggi yaitu 1,45. Kinerja pertumbuhan ekonomi daerah ditopang oleh akselerasi sisi permintaan agregat dan penawaran agregat. Komponen permintaan agregat terbesar adalah konsumsi masyarakat seiring dengan meningkatnya daya beli masyarakat sejak adanya pelonggaran PPKM terlebih potensi ceruk pasar belanja online menjadi stimulus pertumbuhan digitalisasi dan sektor transportasi. Mobilitas masyarakat berdasarkan Google Mobility Index terpantau meningkat khususnya aktivitas ke tempat kerja dengan penerapan sistem kerja hybrid dan Work From Office (WFO), pusat perbelanjaan grosir, pasar tradisional, farmasi, dan taman. Hal ini berimplikasi pada meluasnya sektor ekonomi produktif seperti sektor perdagangan, kegiatan Meetings, Incentives, Conferencing, Exhibitions (MICE), dan kegiatan pariwisata. Stimulus fiskal dan moneter yang tepat pada saat krisis menjadi daya dorong daya beli masyarakat akibat pandemi Covid-19. Investasi daerah cenderung melambat seiring perlambatan perekonomian global Advanced Economies (AEs), menurunnya prospek ekspor barang dan jasa, serta gangguan rantai pasok. Kinerja ekspor komoditas pertanian dan perkebunan yang menjadi leading sector perekonomian wilayah Karesidenan Besuki dan Lumajang masih didominasi dengan raw material akibat industrialisasi dan hilirisasi komoditas pertanian yang belum optimal. Dari sisi penawaran, rantai pasokan komoditas yang cukup lancar termasuk lapangan usaha industri pengolahan, akomodasi dan makan minum serta jasa transportasi sejalan dengan meningkatnya ceruk pasar digital. Namun sektor pertanian cenderung melambat yang disebabkan akibatnya adanya perubahan iklim sehingga mempengaruhi produktivitas pertanian dan nilai tambah sektor pertanian yang masih kecil





terutama untuk komoditas berorientasi ekspor. Wabah Penyakit Mata dan Kuku (PMK) pada hewan ternak sapi menyebabkan menurunnya produktivitas sektor peternakan dan telah mendapatkan penanganan cepat. Program pemulihan khususnya sektor pertanian adalah penguatan Cooperative Farming (CF), pengembangan kualitas dan mutu produk melalui Good Agriculture Practices (GAP), pengembangan kluster komoditas, pengolahan terpadu, program petik olah kemas jual, dan program pengembangan produk pangan berbasis agro.

Peningkatan pertumbuhan terus bergerak dengan semakin cepatnya perluasan vaksinasi dan stimulus fiskal dan moneter khususnya pada UMKM dan korporasi serta kebijakan kemudahan berusaha dan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) meringankan pembiayaan pelaku industri. Insentif pajak penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai-Ditanggung Pemerintah (PPN-DTP) untuk properti, diskon Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM-DTP) untuk otomotif, kebijakan relaksasi Loan to Value (LTV)/ Financing to Value (FTV), serta kebijakan restrukturisasi kredit.

Tingkat Pengangguran. Kondisi eksisting ketenagakerjaan daerah saat ini relatif sama dengan nasional, namun proyeksi 3 bulan yang akan datang terjadi kenaikan pengangguran lebih tinggi dari nasional yaitu 1,79. Kondisi ini mengalami anomali dengan meningkatnya kinerja pertumbuhan ekonomi daerah. Scarring effect akibat disrupsi pandemi menjadi penyebab persoalan ketenagakerjaan di daerah. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kian nampak dan pengangguran terselubung menjadi keniscayaan yang harus bertahan di tengah pandemi. Begitu juga adanya kerentanan yang dialami tenaga kerja migran dalam kondisi menganggur atau melakukan pekerjaan dengan risiko tinggi. Perubahan struktur ekonomi ke arah low touch economy menjadi kejutan bagi sebagian tenaga kerja yang sebelumnya bekerja di sektor dengan high touch economy seperti industri pengolahan, pariwisata. Terjadinya penyesuaian keterserapan tenaga kerja dalam sektor ekonomi ditandai dengan produktivitas tenaga kerja di daerah yang belum optimal. Melambatnya kontribusi sektor pertanian yang saat ini masih menjadi leading sector wilayah Karesidenan Besuki dan Lumajang dan didominasi struktur masyarakat yang bekerja di sektor pertanian menyebabkan turunnya produktivitas sektoral. Persoalan lainnya adalah proses catching-up teknologi dalam industrialisasi pertanian yang masih rendah sehingga dibutuhkan scaling-up skill tenaga kerja di daerah.





Tingkat inflasi daerah masih lebih tinggi dari rata-rata nasional yaitu di kisaran 2,36 dan proyeksi 3 bulan yang akan datang masih lebih tinggi yakni 1,73. Berdasarkan data statistik yang dirilis Bank Indonesia (2022), laju inflasi di kabupaten Jember 2,87% relatif lebih tinggi dibandingkan kabupaten sekitarnya yaitu Kabupaten Banyuwangi di kisaran 2,19% terendah di Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Probolinggo pada kisaran 2,26%. Sejalan dengan akselerasi pertumbuhan ekonomi daerah mendorong kenaikan permintaan agregat masyarakat. Penyebab masih tingginya inflasi daerah adalah ketidakpastian global terutama akibat konflik geopolitik Rusia dan Ukraina menyebabkan terjadinya gangguan rantai pasok komoditas global yang berdampak pada harga komoditas domestik. Penyebab lainnya adalah akibat terjadinya perubahan iklim berdampak pada produktivitas komoditas pangan. Kenaikan harga terjadi pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau; perawatan pribadi dan jasa lainnya; penyediaan makanan dan minuman/restoran; perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga; transportasi; dan perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga. Inflasi tertinggi terjadi pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Sementara kenaikan harga lainnya terjadi pada bahan pokok, yaitu cabai rawit, cabai merah, minyak goreng, dan telur ayam ras. Peningkatan harga cabai rawit dan cabai merah terutama disebabkan oleh penurunan kuantitas dan kualitas panen akibat tingginya intensitas hujan di daerah sentra produksi. Kenaikan harga juga disebabkan adanya dampak normalisasi kebijakan moneter akomodatif yang lebih cepat di beberapa negara maju yang meningkatkan risiko nilai tukar dan potensi imported inflation, eskalasi konflik geopolitik Rusia dan Ukraina memicu kenaikan harga komoditas energi dan pangan dunia, serta penyesuaian tarif energi domestik.

Persepsi Tantangan Ekonomi

Tabel 1. Lima Tantangan Ekonomi Terbesar dari Cabang Jember

Di Tingkat Nasional		Di Tingkat Daerah	
Kondisi Saat ini	Prediksi 3 Bulan Kedepan	Kondisi Saat ini	Prediksi 3 Bulan Kedepan
1. Defisit APBN	1. Volatilitas kurs	1. Volatilitas kurs	1. Volatilitas kurs
2. Kenaikan suku bunga kredit	2. Defisit APBN	2. Kenaikan suku bunga kredit	2. Pertumbuhan investasi yang melambat
3. Volatilitas kurs	3. Pertumbuhan investasi yang melambat	3. Pertumbuhan investasi yang melambat	3. Ketersediaan bahan pokok yang terbatas
4. Pertumbuhan investasi yang melambat	4. Kenaikan suku bunga kredit	4. Gejala dan kondisi politik dalam negeri	4. Kenaikan suku bunga kredit
5. Ketersediaan bahan pokok yang terbatas	5. Ketersediaan bahan pokok yang terbatas	5. Ketersediaan bahan pokok yang terbatas	5. Defisit APBN





Analisa:

Tantangan ekonomi daerah saat ini adalah menjaga momentum keberlanjutan pemulihan ekonomi daerah dan memitigasi risiko terjadinya *scarring effect* pandemi Covid-19. Tantangan lainnya adalah ketidakpastian global akibat eskalasi konflik geopolitik global, terjadinya stagflasi, dan perubahan iklim menjadi potensi risiko yang dapat berlanjut dan berdampak pada instabilitas perekonomian nasional dan daerah.

Volatilitas Kurs. Nilai tukar menjadi indikator utama dalam stabilitas makroekonomi. Meningkatnya eskalasi ketidakpastian global menjadi potensi risiko besar terhadap instabilitas nilai tukar. Nilai tukar Rupiah relatif terjaga dengan volatilitas yang rendah meskipun terkoreksi mengalami pelemahan sejak April 2022 begitu juga dengan cadangan devisa, ditopang oleh kinerja sektor eksternal yang tetap baik, persepsi positif terhadap ekonomi domestik, dan didukung oleh kebijakan stabilisasi nilai tukar Bank Indonesia. Terjadi penyesuaian aliran modal keluar akibat perilaku *flight to quality*. Dalam hal ini, Bank Indonesia terus memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar melalui *triple intervention*, baik di pasar spot, pasar *Domestic Non-Deliverable Forward* (DNDF), maupun pembelian Surat Berharga Negara (SBN) dari pasar sekunder, dan komunikasi intensif kepada para investor dan pelaku pasar domestik dan luar negeri. Bank Indonesia mengoptimalkan strategi bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Kinerja daya saing ekspor daerah dan nasional terus menjadi prioritas dalam mendorong kurs dan memperkuat rantai pasok domestik dalam mendukung keberlanjutan pemulihan ekonomi.

Kenaikan suku bunga kredit. Marjin suku bunga perbankan masih menjadi perhatian utama khususnya dalam memitigasi terjadinya *credit rationing*. Untuk menjaga kredibilitas kebijakan moneter, Bank Indonesia menerapkan kebijakan makroprudensial dalam upaya menjaga stabilitas sistem keuangan. Potensi risiko kenaikan suku bunga mengikuti sinyal kenaikan suku bunga kebijakan BI 7 Days Reverse Repo yang juga disebabkan adanya perubahan suku bunga Amerika Serikat akibat stagflasi. Tekanan inflasi domestik juga berpotensi pada kenaikan suku bunga domestik. **Efek transmisi suku bunga pasar mempengaruhi proporsi kredit khususnya sektor rumah tangga yang didominasi kredit multiguna.** Kenaikan suku bunga ini berdampak pada **kinerja investasi** yang berpotensi mengalami perlambatan akibat ketidakpastian global.

Ketersediaan bahan pokok yang terbatas. Salah satu penyebab terjadinya *cost push inflation* adalah hambatan pasokan bahan pokok. Rantai pasok komoditas





pangan menjadi determinan penting dalam menjaga stabilitas harga pangan. Perubahan iklim menjadi penyebab terbesar yang sering terjadi dan berdampak pada menurunnya produktivitas. Persoalan lainnya rantai pasok yang belum terintegrasikan dan belum adanya dokumentasi neraca ekspor dan impor komoditas antar daerah di Indonesia menjadi pemicu terjadinya inflasi. Dalam hal ini tata niaga komoditas bahan pokok perlu menjadi fokus utama dalam memastikan rantai pasok antar wilayah dan antar komoditas. Persoalan lainnya adalah perilaku menimbun sehingga mengganggu pasokan komoditas.

Gejolak dan Kondisi Politik Dalam negeri. Amplitudo gejolak dan kondisi politik yang tengah berlangsung baik nasional dan daerah yang berimplikasi pada kinerja perekonomian nasional dan daerah. Tata kelola kelembagaan dihadapkan pada persoalan terjadinya asimetris informasi dan *conflict of interest*. Perbedaan pandangan politik berimbas pada kinerja percepatan pembangunan daerah. Konflik kepentingan antara Kepala Daerah dengan DPRD berpotensi risiko pada lambatnya dan ketepatan pengambilan keputusan kebijakan pembangunan. Ketidaksepakatan pandangan berdampak pada ketersediaan anggaran APBD yang sangat minim. Persoalan lainnya adalah konflik horisontal antar unit kerja yang menyebabkan ketidakharmonisan dan ketidaksinergian yang tercermin pada terjadinya tumpang tindih program antar unit kerja. Potensi konflik yang melibatkan organisasi masyarakat dan komponen masyarakat lainnya atas perbedaan pandangan dan kepentingan. Diperlukan komitmen, elaborasi, dan sinergitas antar pemangku kepentingan dalam memitigasi potensi konflik melalui transparansi, akuntabilitas, adil dan bertanggungjawab.

Defisit APBN. Resiliensi Indonesia cukup terjaga dengan momentum pemulihan ekonomi Indonesia yang terus berlanjut pada tahun 2022. Rasio defisit APBN terhadap PDB Indonesia pun diproyeksi secara lebih optimistik oleh Bank Dunia di tingkat 3,7% dengan postur APBN 2022 baru yaitu 4,5%. Hal ini mencerminkan optimisme konsolidasi fiskal yang lebih baik dan dinilai tepat dengan mempertimbangkan pemulihan yang semakin kuat dan memenuhi amanat UU No. 2 Tahun 2020. Defisit APBN secara gradual berhasil diturunkan dan diproyeksikan kembali ke level 3% PDB pada tahun 2023. Kesepakatan pembentukan Dana Perantara Keuangan (*Financial Intermediary Fund*) untuk membantu memastikan pembiayaan yang memadai, berkelanjutan, dan terkoordinasi untuk tindakan pencegahan (*prevention*), kesiapsiagaan (*preparedness*), dan penanggulangan (*response*) terhadap ketidakpastian di masa yang akan datang. Begitu pula dengan postur APBD memberikan ruang kapasitas fiskal yang lebih baik, meskipun ketersediaan anggaran dalam belanja modal di beberapa wilayah masih rendah. Sedangkan sisi penerimaan fiskal terus





meningkat sejalan dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan percepatan pemulihan ekonomi daerah.

Persepsi Kemampuan Pemerintah

Tabel 2. Top-5 Persepsi Kemampuan Pemerintah berdasarkan cabang Jember

Pemerintah Pusat	Pemerintah Daerah
1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan menciptakan lapangan kerja	1. Menciptakan rasa aman dan tenteram
2. Menciptakan rasa aman dan tenteram	2. Perbaiki sistem logistik untuk kelancaran distribusi
3. Akselerasi pertumbuhan investasi	3. Menyediakan dan merawat infrastruktur
4. Menstabilkan harga barang dan jasa serta menjamin ketersediaan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat	4. Menstabilkan harga barang dan jasa serta menjamin ketersediaan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat
5. Perbaiki sistem logistik untuk kelancaran distribusi	5. Peningkatan human capital (termasuk peningkatan sumberdaya manusia yang berkualitas dan peningkatan kesehatan masyarakat)

Analisa:

Menciptakan rasa aman dan tenteram. Tercermin pada komitmen Kepala Daerah beserta seluruh perangkat pemerintah dan komponen masyarakat dalam menjalankan proses percepatan pembangunan daerah. Hal ini direpresentasikan dalam program kerja daerah yang bersifat *bottom-up* dengan menampung aspirasi seluruh strata sosial ekonomi masyarakat dan menjadi dasar kajian dalam pengambilan keputusan. Pelibatan seluruh komponen masyarakat dan *stakeholder* dalam memberikan arah pembangunan melalui *focus group discussion* dan kegiatan pembangunan serta media komunikasi sosial memperhatikan kearifan lokal yang berkembang di masyarakat. Kepemimpinan publik yang transparan, akuntabel, adil, dan bertanggungjawab dalam setiap proses pengambilan kebijakan dan melakukan evaluasi serta rencana tindak lanjut yang bersifat *continual improvement*.

Perbaiki sistem logistik untuk kelancaran distribusi. Kelancaran distribusi sistem logistik utamanya dalam pasokan komoditas pangan merupakan upaya menjaga stabilitas harga. Pemerintah Daerah yang tergabung dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) menjalankan *roadmap* pengendalian inflasi mengacu pada pilar 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, serta Komunikasi Efektif) telah berhasil membantu stabilitas harga di Jawa Timur. Beberapa kegiatan yang dilakukan adalah (1) melakukan pengadaan beras dalam rangka Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di beberapa sentra produksi Jawa Timur yang mulai memasuki musim panen; (2) Memantau penyerapan beras dari sentra produksi Jawa Timur; (3) memastikan ketersediaan Stok CBP; (4) melaksanakan KPSH (Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga) beras medium; (5) menyiapkan program Komando Strategi Penggilingan Padi (Konstraling)





sebagai bentuk antisipasi puncak panen dalam rangka optimalisasi penyerapan padi pasca panen; (6) membentuk satgas khusus pemantauan distribusi minyak goreng; (7) melakukan operasi pasar minyak goreng melalui pabrik, yang dikoordinasikan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur; (8) memperkuat komitmen pabrik untuk penyaluran yang dipantau langsung oleh Kementerian Perdagangan.

Menyediakan dan merawat infrastruktur. Tercermin dalam program kerja Pemerintah dalam bidang infrastruktur publik untuk menunjang kegiatan perekonomian masyarakat. Rencana kerja telah terdokumentasikan dalam perencanaan pengadaan dan peningkatan kualitas termasuk perawatan infrastruktur. Namun beberapa infrastruktur terutama jalan di *remote area* kurang terjangkau baik dari sisi kuantitas dan kualitas. Sementara dalam hal penyediaan infrastruktur digital beberapa wilayah masih mengalami *digital divide* dengan *blank spot* yang juga masih banyak dijumpai di beberapa wilayah.

Menstabilkan harga barang dan jasa serta menjamin ketersediaan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat. Pemerintah Daerah yang tergabung dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) menjalankan roadmap pengendalian inflasi mengacu pada pilar 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, serta Komunikasi Efektif) telah berhasil membantu stabilitas harga di Jawa Timur. Beberapa kegiatan dalam menjaga stabilitas harga tercermin dalam beberapa upaya berikut. (1) pengembangan kluster *volatile food*, (2) *business coaching*, (3) *onboarding* UMKM, (4) *bootcamp*, (5) *business matching*, (6) edukasi keuangan syariah dan inklusif, (7) *digipreneur*. Pamantauan harga melalui sistem informasi Sistem Informasi Ketersediaan dan Perkembangan Harga Bahan Pokok (SISKAPERBAPO) <https://siskaperbapo.jatimprov.go.id/>, dan adanya upaya dalam memperluas elektronifikasi dan digitalisasi transaksi untuk efisiensi perekonomian daerah. Pemerintah Daerah juga menjamin tata kelola stok pangan komoditas strategis yang baik dan menyelenggarakan pasar murah dan kegiatan lainnya dalam menjamin ketersediaan dan keterjangkauan harga bahan pangan. Sementara untuk menjamin ketersediaan bahan pangan maupun jasa, pemerintah daerah melalui program kerjanya terus meningkatkan produktivitas sektoral. Namun untuk mobilitas barang dan jasa masuk dan keluar daerah, masih belum ada dokumentasi neraca ekspor impor sehingga rentan terhadap terjadinya *shock* dalam rantai pasokan.

Peningkatan *human capital*. Komitmen Pemerintah Daerah dalam peningkatan *human capital* tercermin dalam program pengembangan sumberdaya manusia melalui pendidikan, penelitian, pelatihan, dan pengembangan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pendanaan. Kesenjangan produktivitas antar





individu dan antar wilayah menentukan kecepatan ketercapaian pembangunan, yang secara empiris masih terjadi di beberapa wilayah dan kelompok masyarakat. Adaptasi terhadap perubahan lingkungan eksternal dan eksplorasi dalam menggali potensi diri menjadi prasyarat keberhasilan *human capital*. Beberapa upaya yang dilakukan pemerintah dalam mendorong *human capital* adalah: (1) memberdayakan para ahli bidang tertentu yang memiliki sertifikasi nasional dan internasional sebagai pendamping tenaga pengajar SMA maupun SMK. Hal ini bertujuan agar lulusan SMK memiliki daya saing dengan tenaga kerja asing, serta mampu memenuhi standar kebutuhan industri. (2) meningkatkan kompetensi angkatan kerja dengan program pelatihan berbasis kompetensi melalui Balai Latihan Kerja (BLK) di tingkat pusat hingga daerah, serta program Kartu Prakerja. Penurunan Tingkat pengangguran Terbuka (TPT) pada lulusan kelompok SD ke bawah dan SMP didorong oleh peningkatan tenaga kerja pada lapangan usaha Pertanian. Sementara tingginya TPT pada lulusan SMA, SMK, dan DI/DII/DIII disebabkan oleh adanya ketimpangan antara kualifikasi kebutuhan tenaga kerja (*skilled employees*) dengan angkatan kerja SMA dan SMK (khususnya bersifat *unskilled employees*), serta DI/DII/DIII.





Laporan Survei Indikator Survei Ekonomi Indonesia (ISEI)

Index Cabang: Kalimantan Utara

Tim Penyusun :

1. Dr. Syaiful Anwar, S.E.,M.Si.
2. Djuanda Hatta, S.E.,M.Si.
3. Dr. Witri Yulawati. S.E. M.Si
4. Nurjannahtul Hasanah. S.E.,M.M.
5. Widyastuti Cahyaningrum. S.E.,M.SM.

Ringkasan Eksekutif

Perkembangan Ekonomi Makro Daerah

Perekonomian Provinsi Kalimantan Utara didominasi oleh sektor pertanian, Kehutanan dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian; Konstruksi; dan Perdagangan Besar dan Eceran: Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Mereka berkontribusi di atas 10%, sedangkan sektor yang lainnya hanya berkontribusi di bawah 10%. Selain kontribusinya, sektor tersebut juga mengalami pertumbuhan yang pesat dibandingkan sektor yang sama pada tingkat nasional. Pertumbuhan ekonomi lokal berada pada kisaran 4% hingga 5% (yoy) pasca puncak pandemi yang terjadi padatahun 2020 hingga triwulan pertama 2021 yang pertumbuhannya -2% hingga -5% (yoy). Kondisi pasca pandemi juga masih tidak lebih baik dibandingkan dengan pra pandemi di mana mampu tumbuh 5% hingga 8% (yoy). Kini yang menjadi tugas pemerintah daerah adalah lebih melakukan pembangunan sektoral dan dimensional daerah kabupaten kota sehingga pertumbuhan tidak terkonsentrasi di satu atau dua wilayah saja. Meskipun pertumbuhan ekonomi provinsi Kalimantan Utara adalah 4,64 persen masih lebih rendah dari tingkat Nasional 5,01persen pada pada tahun 2022, kondisi ini masih lebih baik karena telah berangsur-angsur terlepas dari tekanan kondisi pandemi. Pada tahun 2022 Perekonomian Kaltara diperkirakan tumbuh dalam range 4,53%-5,33% (yoy). Peningkatan kinerja pada lapangan usaha utama terutama pertambangan dan perdagangan diperkirakan dapat memacu akselerasi kinerja investasi, ekspor dan konsumsi rumah tangga.

Keuangan Pemerintah Daerah

Hal positif dari keuangan pemerintah daerah adalah pemerintah mampu memanfaatkan potensi daerah sehingga realisasi pendapatan tumbuh 5% (yoy). Berbeda dengan realisasi anggaran pemerintah daerah masih perlu percepatan pada triwulan selanjutnya. Komponen Pendapatan asli daerah adalah berkisar 14% hingga 25% dari total pendapatan, sisanya adalah pendapatan transfer. Demikian halnya realisasi belanja kementerian dan Lembaga juga mengalami perlambatan dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang hanya sekitar 12%. Sejalan dengan itu, realisasi belanja APBN Kementerian/Lembaga (K/L) di Kaltara tercatat sebesar 12,56% atau lebih hal tersebut dikarenakan adanya perlambatan mobilisasi kegiatan denagan munculnya varian omicron.





Perkembangan Inflasi Daerah

Provinsi Kalimantan utara mengalami inflasi yang lebih tinggi dari triwulan sebelumnya seiring dengan peningkatan harga komoditas global dan mobilitas masyarakat didukung oleh pelonggaran kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Adanya beberapa kebijakan seperti kenaikan cukai rokok, kenaikan PPN turut mendorong laju inflasi Kalimantan Utara pada triwulan I 2022 menjadi sebesar 4,61% (yoy), lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yaitu 2,73% (yoy). Inflasi pada triwulan I 2022 ini terutama disebabkan oleh peningkatan tekanan inflasi pada komoditas angkutan udara, daging ayam ras, dan minyak goreng. Sejalan dengan meningkatnya harga komoditas akibat dari peningkatan tensi geopolitik global dan mulai meningkatnya domestic demand seiring dengan kasus COVID-19 yang semakin melandai serta penurunan level PPKM, Inflasi Kaltara tahun 2022 diperkirakan lebih tinggi dibandingkan tahun 2021, namun tetap berada dalam sasaran target 3+1. Selain itu, adanya beberapa kebijakan pemerintah dan momen hari besar keagamaan (HBKN) serta perayaan-perayaan seperti HUT Kaltara, festival budaya Iraw turut menjadi pendorong meningkatnya tekanan inflasi pada 2022.

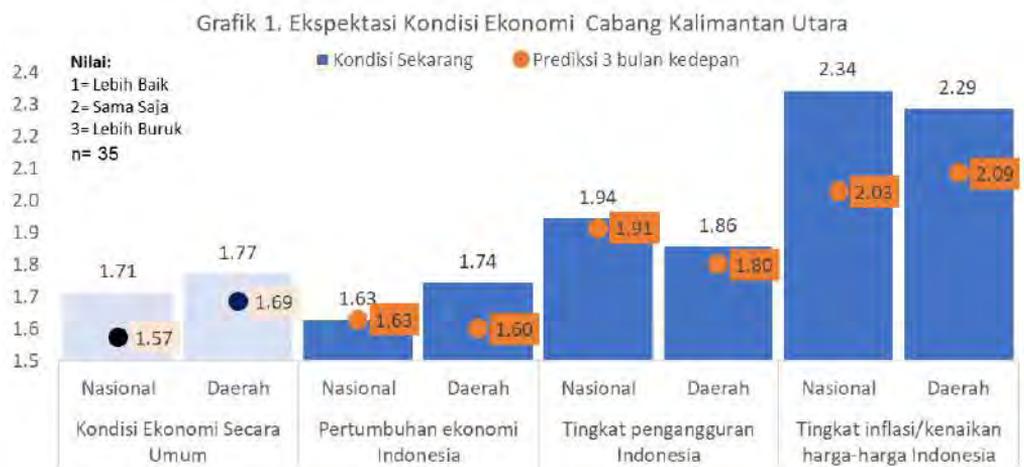
Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan

Hasil Survei Konsumen Bank Indonesia menunjukkan adanya perbaikan signifikan pada Indeks Ketersediaan Lapangan Kerja pada triwulan I-2022. Indeks Ketersediaan Lapangan Kerja meningkat menjadi 78,00 dibanding periode yang sama di tahun sebelumnya yang sebesar 50,67. Hal ini sejalan dengan level indeks persepsi masyarakat terhadap ketersediaan lapangan kerja pada 6 (enam) bulan ke depan berdasarkan Survei Konsumen BI yang telah berada di atas level 100, yaitu 116,39 pada triwulan I 2022. Kondisi ini dipengaruhi oleh perbaikan kinerja di berbagai sektor, khususnya sektor pertambangan dan industri pengolahan. Selain itu, perekonomian yang semakin membaik akibat pandemi Covid-19 juga mendorong semakin meningkatnya ketersediaan lapangan kerja di wilayah Kalimantan Utara pada triwulan IV 2021. Dengan adanya pandemi Covid-19, tidak hanya masalah kesehatan yang melanda masyarakat, namun semua aspek dalam kehidupan ikut terdampak termasuk perekonomian. Perekonomian mulai menurun sejak diberlakukannya pembatasan aktivitas. Penurunan tersebut juga berdampak pada dinamika ketenagakerjaan di Kalimantan Utara. Tidak hanya pengangguran, penduduk usia kerja lainnya juga turut terdampak dengan adanya pandemi Covid-19. Dapat dilihat bahwa penduduk usia kerja yang terdampak Covid-19 pada Februari 2022 sebanyak 20,66 ribu orang, mengalami penurunan sebanyak 32,29 ribu orang dibandingkan dengan Februari 2021 (52,95 ribu orang). Komposisi penduduk usia kerja yang terdampak Covid-19 terdiri dari 3.272 orang pengangguran karena Covid-19; 713 orang Bukan Angkatan Kerja (BAK) karena Covid-19; 1.137 orang sementara tidak bekerja karena Covid-19; dan 15.538 orang penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena Covid-19.





Ekspektasi Ekonomi



Analisa:

Secara umum (kondisi sekarang dan prediksi), kondisi perekonomian di provinsi Kalimantan Utara tampak begitu tergantung pada kondisi perekonomian nasional, kondisi daerah tidak terlalu jauh signifikan berbeda dibandingkan dengan kondisi nasional. Dapat di Analisa berdasarkan grafik, variabel pertumbuhan ekonomi daerah tidak lebih baik daripada kondisi nasional, sedangkan kondisi daerah yang masih lebih baik dari tingkat nasional yaitu tingkat pengangguran dan tingkat inflasi. berdasarkan data badan pusat statistik, pertumbuhan ekonomi setelah puncak pandemi pada tahun 2020 berada pada kisaran 4% sampai 5% atau tidak lebih baik dibandingkan tingkat pertumbuhan nasional. Berdasarkan Laporan Bank Indonesia, indeks ketersediaan lapangan kerja (93,53) dengan jumlah pengangguran 16.343 orang (dengan tingkat sekitar 4%) juga lebih baik dibandingkan tahun lalu (56,67) dengan tingkat pengangguran 16.174 orang. Demikian juga prediksi 6 bulan mendatang akan lebih baik (131,1) dibanding periode saat ini. Tingkat inflasi provinsi Kalimantan Utara saat ini adalah 4.6 persen yang juga lebih tinggi dibanding dengan tahun sebelumnya dan bahkan lebih tinggi dibanding tingkat nasional. Demikian halnya pada regional Kalimantan, Kalimantan Utara adalah yang tertinggi.

Variabel pertumbuhan ekonomi provinsi Kalimantan Utara berdasarkan Analisa kondisinya lebih baik daripada tingkat pengangguran dan tingkat inflasi. Dua





variabel yaitu tingkat pengangguran dan inflasi mesti menjadi perhatian daerah dan juga nasional untuk selanjutnya di atasi. Hal tersebut perlu dilakukan untuk lebih memperbaiki kondisi perekonomian secara umum. Data diatas menunjukkan adanya ketidak merataan dimana dalam kondisi ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang baik terjadi pengangguran dan inflasi yang tinggi.

Prediksi 3 bulan kedepan, rata-rata variabel ekonomi menunjukkan optimisme yaitu akan terjadi kondisi yang lebih baik dibandingkan dengan kondisi sekarang. optimisme yang paling tinggi terjadi pada variabel tingkat inflasi, yang mana kondisi ini akan mempengaruhi kondisi ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Memang nampak bahwa tingkat inflasi merupakan masalah nasional yang mempengaruhi daerah dikarenakan kondisinya sama-sama tidak baik. Hal ini bisa diakibatkan oleh isu nasional berupa kenaikan harga kebutuhan faktor produksi yang terjadi belakangan.

Persepsi Tantangan Ekonomi

Tabel 1. Lima Tantangan Ekonomi Terbesar dari Cabang Kalimantan Utara

Di Tingkat Nasional		Di Tingkat Daerah	
Kondisi Saat ini	Prediksi 3 Bulan Kedepan	Kondisi Saat ini	Prediksi 3 Bulan Kedepan
1. Volatilitas kurs	1. Kenaikan suku bunga kredit	1. Gejala dan kondisi politik dalam negeri	1. Pertumbuhan investasi yang melambat
2. Pertumbuhan investasi yang melambat	2. Volatilitas kurs	2. Kenaikan suku bunga kredit	2. Demand Daya beli masyarakat yang menurun
3. Demand Daya beli masyarakat yang menurun	3. Gejala dan kondisi politik dalam negeri	3. Volatilitas kurs	3. Volatilitas kurs
4. Kenaikan suku bunga kredit	4. Pertumbuhan investasi yang melambat	4. Demand Daya beli masyarakat yang menurun	4. Kenaikan suku bunga kredit
5. Gejala dan kondisi politik dalam negeri	5. Defisit APBN	5. Defisit APBN	5. Gejala dan kondisi politik dalam negeri

Analisa:

Tantangan yang paling tinggi saat ini dan prediksi 3 bulan ke depan antara tingkat nasional dan tingkat daerah provinsi Kalimantan utara menunjukkan adanya keberagaman. Dari hasil survei, terlihat adanya perberbedaan tantangan daerah dan nasional saat ini dan tiga bulan kedepan. Untuk saat ini, tantangan ekonomi provinsi Kalimantan Utara sangat diperhadapkan pada gejala dan kondisi politik dalam negeri dan kenaikan suku bunga kredit, volatilis kurs. sedangkan dampak yang lebih rendah rendah adalah demand Daya beli masyarakat yang menurun dan defisit APBN. Sedangkan untuk prediksi tiga bulan ke depan tantangan ekonomi provinsi Kalimantan Utara terbesar diperhadapkan pada pertumbuhan





investasi yang melambat dan demand Daya beli masyarakat yang menurun. Hal ini disebabkan karna tingkat inflasi Provinsi Kalimantan Utara yang saat ini sedang naik. Dengan tingkat inflasi yang tinggi saat ini juga demand/daya beli masyarakat akan menjadi permasalahan tersendiri jika kondisi ekonomi khususnya pertumbuhan ekonomi yang stagnan. Masih kurang lebih sama untuk prediksi 3 bulan ke depan, volatilitas kurs jg masih menjadi tantangan. Hal ini disebabkan lapangan usaha sektor pertanian kehutanan dan perikanan dan juga sektor pertambangan dan penggalian yang mempengaruhi pendapatan dari fungsi pengeluaran ekspor. Kalimantan Utara merupan salah satu pengekspor perikanan, sawit dan batu bara keberbagai negara sehingga mempengaruhi pendapatan industri hulu.

Di tingkat nasional, kondisi saat ini negara diperhadapkan dengan masalah volatilitas kurs dan pertumbuhan investasi yang melambat. Tingkat nasional memang sangat dipengaruhi oleh perekonomian dan pandemic global. Demikian halnya beberapa tantangan ekonomi yang dihadapi daerah juga sama dengan tantangan pada tingkat nasional, misalnya demand/daya beli masyarakat yang menurun. sedangkan kondisi 3 bulan ke depan akan diperhadapkan pada kenaikan suku bunga kredit dan masih pada volatilitas kurs, gejala dan kondisi politik dalam negeri. Demikian halnya kenaikan suku bunga kredit menyebabkan pertumbuhan investasi yang melambat. Deficit APBN yang kemungkinan besar diakibatkan oleh pembiayaan Utang Luar Negeri dan Bunganya.

Persepsi Kemampuan Pemerintah

Tabel 2. Top-5 Persepsi Kemampuan Pemerintah berdasarkan cabang Kalimantan Utara

Pemerintah Pusat	Pemerintah Daerah
1. Peningkatan human capital (termasuk peningkatan sumberdaya manusia yang berkualitas dan peningkatan kesehatan masyarakat)	1. Menciptakan rasa aman dan tenteram
2. Menyediakan dan merawat infrastruktur	2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan menciptakan lapangan kerja
3. Menciptakan rasa aman dan tenteram	3. Perbaiki sistem logistik untuk kelancaran distribusi
4. Akselerasi pertumbuhan investasi	4. Menciptakan lingkungan hidup hijau, meningkatkan ketahanan bencana, dan meminimalisir dampak perubahan iklim.
5. Perbaiki sistem logistik untuk kelancaran distribusi	5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penurunan tingkat ketimpangan dan kemiskinan





Analisa:

Persepsi ekonomi terkait kemampuan pemerintah daerah provinsi Kalimantan Utara juga berbeda dengan Pemerintah Pusat. Persepsi masyarakat pemerintah daerah lebih mampu menciptakan rasa aman dan tentram, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan menciptakan lapangan kerja. Kemudian disusul oleh perbaikan sistem logistik untuk kelancaran distribusi, menciptakan lingkungan hijau, meningkatkan ketahanan bencana, dan meminimalisir dampak perubahan iklim, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penurunan tingkat ketimpangan dan kemiskinan. Rasa aman di provinsi Kalimantan Utara sangat dibutuhkan untuk menghindari kerentanan terjadinya konflik etnis dikarenakan adanya suku asli dan pendatang yang berada di daerah.

Menciptakan lapangan kerja dilakukan dengan memanfaatkan sumberdaya lokal daerah yang potensial untuk pembangunan. Sektor unggulan di provinsi Kalimantan Utara adalah sektor pertambangan dan Penggalian dan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Dalam kedua sektor ini telah menyerap banyak tenaga kerja lokal. Pada sektor perikanan, provinsi Kalimantan Utara merupakan penghasil perikanan tangkap dan perikanan budidaya/tambak besar. Di sektor pertanian, ada perkebunan sawit yang luas. Sedangkan di sektor pertambangan, ada tambang minyak bumi, batubara dan gas. Keseluruhan sektor ini merupakan unggul dari segi proporsinya terhadap PDRB dan juga dari segi pertumbuhannya dari pada tingkat nasional

Dua kemampuan pemerintah pusat yang juga merupakan kemampuan pemerintah daerah memiliki adalah menciptakan rasa aman dan tentram dan perbaikan sistem logistik untuk kelancaran distribusi. Program nasional juga dijalankan dengan baik oleh pemerintah daerah yaitu menghindari intoleransi dan pembangunan sistem logistik dan distribusi. Hal ini berkat adanya pembangunan pelabuhan yang sangat berperan terhadap pengangkutan logistik antar wilayah di provinsi Kalimantan Utara.

Menciptakan lingkungan hijau adalah wujud nyata dari karakteristik provinsi Kalimantan Utara yang identik dengan kondisi alamiahnya, beberapa bentuk nyata adalah di bangunnya ruang terbuka hijau yang berbentuk taman-taman kota yang tidak lain tujuannya adalah mengkondisikan alam di berbagai tempat. Hal ini tidak terlepas dari pada paradigma pembangunan yang berkelanjutan





yaitu adanya unsur ekonomi, sosial dan lingkungan dan pelaksanaan pembangunan.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat juga terasa sebagai dampak dari pada adanya sektor yang berfungsi sebagai penopang sektor lainnya dengan keunggulan dua sektor yang telah disebutkan di atas juga berdampak pada semakin terdorongnya pertumbuhan sektor-sektor yang lain, misalnya sektor perdagangan besar dan eceran, sektor transportasi dan pergudangan, dan sektor jasa. Hal ini juga disebabkan oleh adanya optimisme masyarakat pada kondisi perekonomian yang menilai kondisi yang lebih baik pada pada 3 bulan ke depan. Dengan upaya pemerintah daerah dalam hal pembangunan ekonomi tentu mengupayakan pada pemerataan pendapatan.





Laporan Survei Indikator Survei Ekonomi Indonesia (ISEI) Index Cabang: Kendari

Tim Penyusun:

1. Dr. Syamsir Nur, SE., M.Si
2. Syamsul Anam, SE., M.Ec.Dev

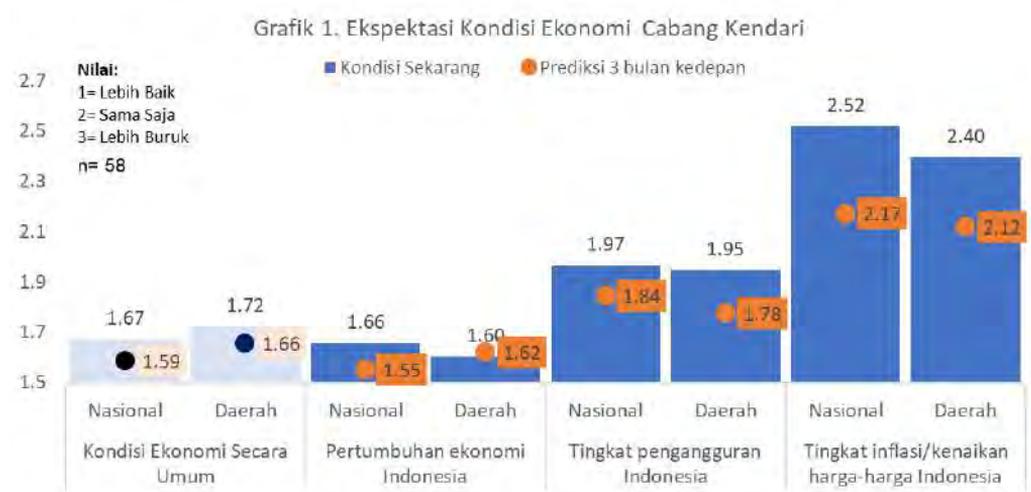
Ringkasan Eksekutif

Kondisi perekonomian Sulawesi Tenggara triwulan II mengalami pertumbuhan yang positif. Capaian ini secara konsisten selalu lebih baik dari capaian pertumbuhan ekonomi nasional. Meskipun demikian, pemulihan ekonomi Sulawesi Tenggara masih menghadapi problem kemiskinan dan pengangguran yang relatif masih tinggi. Selain itu kemampuan recovery kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara yang berbeda-beda juga diperhadapkan pada kemampuan fiskal yang rendah bahkan adanya ancaman inflasi. Namun demikian, kondisi perekonomian Sultra pada 3(tiga) bulan kedepan diprediksi secara konsisten akan mengalami peningkatan. Tantangan ekonomi kedepan diantaranya potensi kenaikan suku bunga kredit, volatilitas kurs, gejolak politik dalam negeri, fiscal gap dan pertumbuhan investasi yang melambat. Kondisi ini mesti harus dijaga agar tidak mengganggu kondisi pemulihan ekonomi di daerah. Capaian pemulihan ekonomi di Sulawesi Tenggara saat ini merupakan kolaborasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah terutama dalam mengakselerasi pertumbuhan investasi, penciptaan rasa aman, peningkatan *human capital* dan penyediaan infrastruktur. Kebijakan ini diharapkan tidak hanya me-recovery tetapi mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tenggara yang inklusif, berkualitas dan berkelanjutan.





Ekspektasi Ekonomi



Analisa:

Kondisi perekonomian Sulawesi Tenggara pada triwulan II secara konsisten mengalami pertumbuhan positif dari triwulan sebelumnya. Demikian pula laju pertumbuhan ekonomi Sultra selalu lebih baik dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi nasional. Secara sektoral, aktivitas sektor pertanian, pertambangan dan penggalian, perdagangan besar dan eceran, konstruksi dan industri pengolahan menjadi penopang utama membaiknya perekonomian Sultra. Disisi permintaan (*demand side*), pulihnya perekonomian Sultra karena dukungan kebijakan pemerintah dalam pemulihan ekonomi dan penanganan Covid-19, membaiknya aktivitas usaha serta terjadi peningkatan permintaan mitra dagang. Namun demikian tingkat pengangguran di Sultra relatif masih tinggi. Melambatnya kinerja pertanian dan perikanan sebagai sektor penyerap tenaga kerja menjadi salah satu faktor terjadinya pengangguran. Kondisi excess supply tenaga kerja dengan karakteristik unskill labour juga menjadi fenomena tingginya pengangguran terdidik di Sultra. Perubahan pola produksi dan bisnis (digitalisasi) berpotensi memicu bertambahnya angka pengangguran. Pada triwulan II, kondisi inflasi Sultra mengalami peningkatan seiring dengan harga terutama kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar RT, kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga, serta kelompok transportasi. Pada triwulan III, inflasi di Sultra berpotensi masih mengalami kenaikan terutama pada kelompok makanan, minuman dan tembakau (*volatile foods*) maupun kelompok transportasi.





Persepsi Tantangan Ekonomi

Tabel 1. Lima Tantangan Ekonomi Terbesar dari Cabang Kendari

Di Tingkat Nasional		Di Tingkat Daerah	
Kondisi Saat ini	Prediksi 3 Bulan Kedepan	Kondisi Saat ini	Prediksi 3 Bulan Kedepan
1. Pertumbuhan investasi yang melambat	1. Kenaikan suku bunga kredit	1. Kenaikan suku bunga kredit	1. Kenaikan suku bunga kredit
2. Kenaikan suku bunga kredit	2. Ketersediaan bahan pokok yang terbatas	2. Volatilitas kurs	2. Volatilitas kurs
3. Volatilitas kurs	3. Pertumbuhan investasi yang melambat	3. Gejala dan kondisi politik dalam negeri	3. Gejala dan kondisi politik dalam negeri
4. Gejala dan kondisi politik dalam negeri	4. Volatilitas kurs	4. Pertumbuhan investasi yang melambat	4. Pertumbuhan investasi yang melambat
5. Defisit APBN	5. Gejala dan kondisi politik dalam negeri	5. Defisit APBN	5. Ketersediaan bahan pokok yang terbatas

Analisa:

Perbaikan kondisi pandemi dan ekonomi daerah di Sultra memerlukan dukungan dengan rendahnya suku bunga kredit. Proporsi penggunaan kredit masyarakat untuk keperluan konsumsi yang relatif tinggi (76,35% pada triwulan I) diprediksi kembali meningkat pada triwulan berikutnya. Faktor membaiknya sektor konsumsi cenderung diikuti peningkatan pemenuhan kebutuhan perumahan dan kendaraan oleh masyarakat Sultra sehingga tantangan perekonomian di daerah adalah kenaikan suku bunga kredit. Demikian pula pulihnya kinerja sektor dunia usaha (pertambangan, industri pengolahan dan UKM), belum diikuti dengan optimisme pelaku usaha terhadap penurunan suku bunga kredit dan volatilitas kurs. Momentum pilkada serentak 2024 masih menjadi kekhawatiran masyarakat maupun pelaku usaha lain berpotensi mengganggu pemulihan ekonomi daerah. Tantangan lainnya kapasitas fiskal yang rendah berimplikasi terhadap minimnya alokasi belanja pembangunan infrastruktur yang diharapkan dapat mengurangi disparitas wilayah antar kabupaten/kota di Sultra. Demikian pula pertumbuhan investasi di Sultra yang didominasi oleh kegiatan sektor pertambangan dan industri pengolahan rentan terhadap kondisi ekonomi mitra dagang maupun perekonomian global kedepan. Pemenuhan kebutuhan pokok juga menjadi tantangan ekonomi Sultra kedepan dikarenakan meningkatnya alih fungsi lahan pertanian, faktor cuaca maupun faktor distribusi/rantai pasok ke wilayah kepulauan.





Persepsi Kemampuan Pemerintah

Tabel 2. Top-5 Persepsi Kemampuan Pemerintah berdasarkan cabang Kendari

Pemerintah Pusat	Pemerintah Daerah
1. Akselerasi pertumbuhan investasi	1. Menciptakan rasa aman dan tenteram
2. Peningkatan human capital (termasuk peningkatan sumberdaya manusia yang berkualitas dan peningkatan kesehatan masyarakat)	2. Akselerasi pertumbuhan investasi
3. Menyediakan dan merawat infrastruktur	3. Perbaikan sistem logistik untuk kelancaran distribusi
4. Menciptakan rasa aman dan tenteram	4. Peningkatan human capital (termasuk peningkatan sumberdaya manusia yang berkualitas dan peningkatan kesehatan masyarakat)
5. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan menciptakan lapangan kerja	5. Menyediakan dan merawat infrastruktur

Analisa:

Dalam situasi pemulihan ekonomi saat ini, pemerintah daerah maupun pemerintah pusat masih diperhadapkan pada berbagai tantangan yang relatif sama. Tantangan tersebut diikuti dengan optimisme masyarakat terhadap kemampuan pemerintah dalam mengatasinya meskipun kemampuan tersebut berbeda-beda terutama di level pemerintah daerah kabupaten/kota. Pertumbuhan investasi, penciptaan rasa aman, perbaikan sistem logistik untuk kelancaran distribusi, peningkatan *human capital* dan penyediaan infrastuktur yang berkualitas diharapkan dapat mengakselerasi perekonomian di daerah. Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tenggara yang inklusif, berkualitas dan sustain memerlukan sinergi percepatan kebijakan dibidang investasi, kualitas SDM dan infrastruktur. Kegiatan investasi di Sultra terutama disektor pertambangan dan industri pengolahan mampu mendrive pertumbuhan, tetapi tentu juga berimplikasi terhadap penciptakan lapangan kerja dan menjadi pengungkit tumbuhnya kegiatan ekonomi masyarakat. Hiliriasi industri sumber daya alam (SDA) di Sultra mesti menjadi perhatian pemerintah agar mampu menstimulan UMKM di daerah. Demikian pula, heterogenitas SDA yang dimiliki kabupaten memerlukan dukungan infrastruktur dan sistem logistik untuk menjamin kelancaran perdagangan antar pulau yang selama ini berkontribusi cukup tinggi dalam neraca transaksi perdagangan di Sulawesi Tenggara.





Laporan Survei Indikator Survei Ekonomi Indonesia (ISEI)

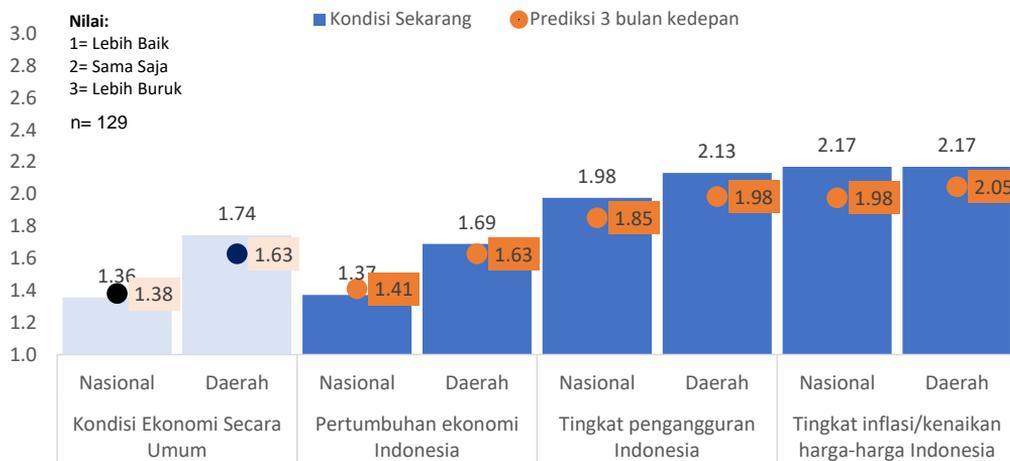
Index Cabang: KOTA KUPANG

Tim Penyusun:

1. DR. ANTHON S.Y. KERIHI. SE.MSI
2. DR. DAMARIS Y. KOLI. SE. MP
3. DR. HENNY A. MANAFE. SE. M.SI
4. HANY BENGU. SE. MM

Ekspektasi Ekonomi

Grafik 1. Ekspektasi Kondisi Ekonomi Cabang Kupang



Analisa:

Kinerja perekonomian NTT pada triwulan II 2022 menunjukkan kinerja yang mulai meningkat setelah terjadinya Covid 19 dapat diatasi/terkendali seiring berbagai upaya pemerintah mengatasi melalui vaksinasi, PPKM, Protokol Kesehatan, dsb. Walaupun inflasi domestik mengalami tekanan dipicu harga komoditas dan faktor musiman serta biaya transportasi yang cukup tinggi. Volatilis dipasar yang memicu capital outflow antara lain diredam dengan resiliensi pasar SBN domestic yang meningkat. Kelompok transportasi mengalami kenaikan indeks harga dan memberikan andil terbesar terhadap tingkat inflasi. Akumulasi neraca perdagangan s.d. Juni 2022 mengalami surplus bila dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Nilai devisa ekspor s.d. Juni 2022 mengalami peningkatan yang di dominasi sektor non migas berupa bahan baku dan bahan penolong. Nilai devisa





impor s.d. Juni 2022 tumbuh negatif 84,65% (yoy), dengan mayoritas impor berasal dari sektor non migas yang didominasi oleh impor barang konsumsi berupa Kopra (share 27,12%), dan biji-bijian (share 10,46%). Kinerja pendapatan mencapai Rp1.387,55 miliar (45,3% dari target pendapatan) mengalami kenaikan secara persentase dibanding periode yang sama tahun 2021 (34,1%). Pendapatan bulan Juni 2022 naik Rp356,04 miliar dibandingkan penerimaan bulan Mei 2022 (35,2%) antara lain disumbang oleh setoran PPh ina dari PPS yang berakhir pada bulan Juni dan kenaikan pendapatan pajak dari PPh Pasal 21 atas THR. Realisasi Belanja Negara sebesar RP14.968,12 miliar (43,8%) mengalami kenaikan persentase dibanding periode yang sama tahun 2021 (42,2%). Beberapa hal yang perlu percepatan adalah penyelesaian blokir di belanja Pemerintah Pusat dan akselerasi TKD yang masuk sebagai bagian APBD. Total pendapatan daerah dari 23 pemerintah daerah s.d Juni 2022 adalah Rp10,73 triliun. Realisasi pendapatan asli daerah (PAD) terbesar adalah dari pajak daerah yaitu pajak rokok dan pajak kendaraan bermotor, dan dari retribusi daerah yang terbesar adalah retribusi pemakaian kekayaan daerah. Mayoritas pendapatan daerah adalah berasal dari pendapatan transfer dari pemerintah pusat. Alokasi belanja daerah TA 2022 menurun 14% jika dibandingkan dengan tahun 2021. Jumlah realisasi terbesar adalah pada Belanja Operasi yang terdiri dari Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah dan Bantuan Sosial. Jumlah realisasi terbesar untuk seluruh jenis belanja yaitu belanja pegawai dengan realisasi Rp3,71 triliun. Realisasi belanja daerah harus dapat lebih diakselerasi dan dioptimalkan.

Persepsi Tantangan Ekonomi

Tabel 1. Lima Tantangan Ekonomi Terbesar dari Cabang Kupang

Di Tingkat Nasional		Di Tingkat Daerah	
Kondisi Saat ini	Prediksi 3 Bulan Kedepan	Kondisi Saat ini	Prediksi 3 Bulan Kedepan
1. Volatilitas kurs	1. Volatilitas kurs	1. Volatilitas kurs	1. Volatilitas kurs
2. Defisit APBN	2. Pertumbuhan investasi yang melambat	2. Gejala dan kondisi politik dalam negeri	2. Kenaikan suku bunga kredit
3. Kenaikan suku bunga kredit	3. Defisit APBN	3. Kenaikan suku bunga kredit	3. Pertumbuhan investasi yang melambat
4. Gejala dan kondisi politik dalam negeri	4. Kenaikan suku bunga kredit	4. Defisit APBN	4. Demand Daya beli masyarakat yang menurun
5. Demand Daya beli masyarakat yang menurun	5. Demand Daya beli masyarakat yang menurun	5. Pertumbuhan investasi yang melambat	5. Defisit APBN





Analisa:

Kota pengukuran inflasi Provinsi NTT memiliki 3 kota pengukuran inflasi yakni Kota Kupang di Pulau Timor, Maumere di pulau flores, dan Waingapu di Pulau Sumba. Kota kupang memiliki share terbesar dalam perhitungan inflasi NTT yakni sebesar 80,4% diikuti oleh Maumere sebesar 10,3% dan Waingapu sebesar 9,3%. Rata-rata tekanan inflasi masing-masing kota mengalami penurunan sejak memasuki periode pandemic COVID-19. Perkembangan harga komoditas terbesar pada minggu pertama Agustus 2022, harga komoditas utama di Kota Kupang, Maumere, dan Waingapu masih cenderung stabil. Harga minyak goreng dan daging ayang ras mulai mengalami tren penurunan dalam beberapa minggu terakhir. Perkembangan harga komoditas strategis pada minggu pertama Agustus 2022, harga komoditas utama di Kota Kupang, Maumere, dan Waingapu masih cenderung stabil. Komoditas bawang merah, cabai merah, dan cabai rawit mulai mengalami tren penurunan harga dalam beberapa minggu terakhir. Ketersediaan pasokan, pasokan komoditas utama di NTT sampai dengan minggu IV Juli 2022 masih cukup terjaga. Ketahanan stok pangan rata-rata mencukupi 2-8 minggu ke depan. Proyeksi Inflasi 2022 pada bulan agustus, inflasi provinsi NTT diperkirakan jatuh pada rentang – 040 s.d 020 (mtm). Prakiraan tersebut didorong oleh komoditas hortilkultura terutama cabai dan bawang yang memasuki masa panen pada bulan Agustus sehingga diharapkan dapat meningkatkan jumlah pasokan. Selain itu, harga minyak goreng juga melanjutkan tren penurunan seiring dengan terjaganya pasokan di masyarakat. Di sisi lain, potensi perpanjangan kebijakan fuel surcharge angkutan udara dapat mendorong laju inflasi di bulan agustus. Sementara itu, inflasi provinsi NTT pada keseluruhan tahun 2022 diperkirakan jatuh pada rentang 4,82 s.d 5,82% (yoy). Kegiatan pengendalian inflasi provinsi NTT, saat ini kantor perwakilan Bank Indonesia NTT telah membina 7 (tujuh) klaster ketahanan pangan yang berlokasi di beberapa wilayah NTT. Melalui pembinaan yang dilakukan, klaster tersebut telah berkontribusi terhadap pengendalian inflasi NTT dengan terus menjaga produksi. Lebih lanjut, Bank Indonesia Provinsi NTT juga melakukan Kerjasama antar daerah (KAD) dalam rangka menjamin 4 K di Provinsi NTT. Upaya pengendalian inflasi provinsi NTT, berbagai upaya telah dilakukan Bank Indonesia bersama TPID, sidak pasar, operasi pasar murah, serta launching gerakan kampung sadar inflasi.





Persepsi Kemampuan Pemerintah

Tabel 2. Top-5 Persepsi Kemampuan Pemerintah berdasarkan cabang Kupang

Pemerintah Pusat	Pemerintah Daerah
1. Menciptakan rasa aman dan tenteram	1. Menciptakan rasa aman dan tenteram
2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan menciptakan lapangan kerja	2. Peningkatan human capital (termasuk peningkatan sumberdaya manusia yang berkualitas dan peningkatan kesehatan masyarakat)
3. Peningkatan human capital (termasuk peningkatan sumberdaya manusia yang berkualitas dan peningkatan kesehatan masyarakat)	3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan menciptakan lapangan kerja
4. Menstabilkan harga barang dan jasa serta menjamin ketersediaan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat	4. Perbaiki sistem logistik untuk kelancaran distribusi
5. Akselerasi pertumbuhan investasi	5. Menegakkan hukum dan memberikan rasa keadilan

Analisa:

Meningkatnya tekanan inflasi yang terjadi terutama oleh kelompok volatile food dan administered prices yang mengalami kenaikan inflasi dibandingkan bulan sebelumnya. Selain itu, tekanan inflasi pada kelompok core inflation juga meningkat dibandingkan bulan sebelumnya. Faktor penyebab perubahan berdasarkan disagregasi:

1. Core, Kelompok core tercatat mengalami inflasi sebesar 0,37% (mtm), meningkat dibandingkan bulan sebelumnya yang mengalami inflasi sebesar 0,11% (mtm). Inflasi terutama didorong oleh kenaikan biaya fotocopy, harga ikan tuna, dan air kemasan. Di sisi lain, penurunan harga kemeja pendek katun pria menjadi faktor penahan inflasi kelompok core. 2. Volatile Food, kelompok volatile food mencatat inflasi sebesar 1,65% (mtm), setelah bulan sebelumnya mengalami deflasi tipis sebesar 0,00% (mtm). Inflasi kelompok volatile food terutama bersumber dari beberapa komoditas ujan seperti ikan kembung, ikan tongkol, ikan selar dan ikan cakalang. Selain itu, kenaikan pada komoditas bawang merah, cabai merah, tomat, dan cabai rawit juga turut menyumbang inflasi kelompok volatile food. 3. Administered Prices, kelompok administered prices mencatat inflasi sebesar 2,09 (mtm). Inflasi kelompok administered prices terutama disebabkan oleh masih tingginya tariff angkutan udara seiring dengan masih tingginya harga avtur serta meningkatnya permintaan terhadap angkutan udara. Ditambah lagi, penerapan kebijakan fuel surcharge dan kenaikan airport tax juga mendorong kenaikan tariff angkutan udara. Adapaun guna menjaga stabilitas harga di provinsi NTT, selama bulan Julid TPID telah melakukan berbagai kegiatan pengendalian inflasi dalam kerangka 4K, antara lain pelaksanaan HLM TPID





Kabupaten Rote Ndao, pelaksanaan kegiatan pasar murah dan sidak pasar di 9 kabupaten/kota, serta penyusunan matriks action plan pengendalian inflasi Provinsi NTT dan Kota Kupang bersama dengan OPD terkait. Selanjutnya, tingkat kemiskinan di NTT tercatat menurun pada Tahun 2022 pada level 20,05%. Selanjutnya, Tenaga Kerja Pertanian dan Perdagangan diperkirakan membaik pada Tw. II. 2022 sejalan dengan hasil SKDU dan SK tenaga kerja yang menunjukkan peningkatan. Disamping itu, menurunnya NTP menjadi faktor bias bawah kondisi kesejahteraan TK. Saat ini Kantor Perwakilan Bank Indonesia NTT telah membina 7 (tujuh) Klaster Ketahanan Pangan yang berlokasi di beberapa wilayah di NTT. Melalui pembinaan yang dilakukan klaster tersebut telah berkontribusi terhadap pengendalian inflasi NTT dengan terus menjaga produksi. Lebih lanjut, Bank Indonesia Provinsi NTT juga melakukan Kerjasama Antar Daerah (KAD) dalam rangka menjamin 4 K di Provinsi NTT. Adapun indikator yakni komoditas beras, komoditas cabe, komoditas sapi potong, komoditas bawang merah, KAD Komoditas Sapi antara NTT dan Kaltim, KAD Komoditas Sapi NTT dengan Jawa Tengah. Berbagai upaya telah dilakukan Bank Indonesia bersama TPID dalam rangka pengendalian inflasi di antaranya HLM TPID, sidak pasar, operasi pasar murah, serta launching Gerakan Kampung Sadar Inflasi.





Laporan Survei Indikator Survei Ekonomi Indonesia (ISEI)

Index Cabang: Lampung

Tim Penyusun:

1. Dr. Usep Syaipudin, S.E., M.S.Ak.
2. Hendra Prastya, S.E., M.Si.
3. Feri Hardani, S.E., M.Si.

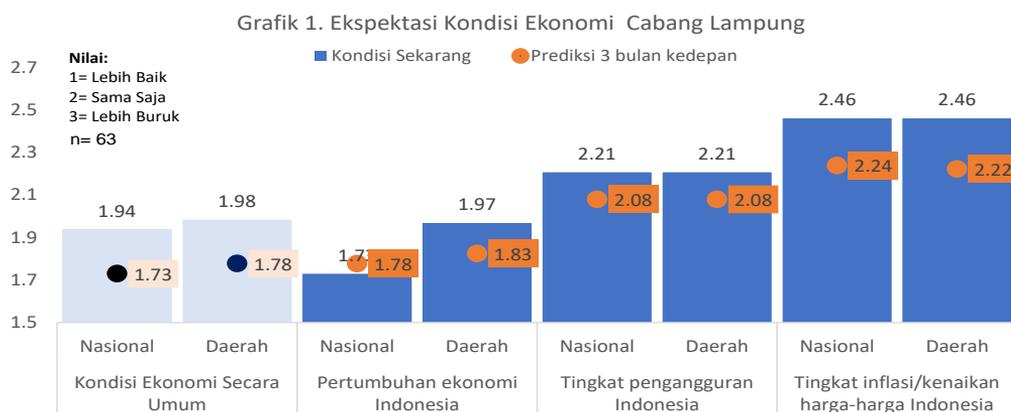
Ringkasan Eksekutif

Masyarakat Lampung menilai kondisi ekonomi secara umum saat ini relatif baik, dengan kondisi ekonomi daerah Lampung sedikit berada di bawah nasional. Persepsi ini didukung oleh membaiknya beberapa indikator makro perekonomian seperti pertumbuhan yang positif, neraca dagang yang masih mencatatkan surplus, investasi yang mulai meningkat, termasuk PMI manufaktur yang berdaya tahan. Persepsi Masyarakat Lampung terhadap tantangan ekonomi nasional dan daerah saat ini dan 3 bulan kedepan didominasi oleh lima tantangan, yaitu pertumbuhan investasi yang melambat, kenaikan suku bunga kredit, volatilitas kurs, defisit APBN, dan gejolak dan kondisi politik dalam negeri. Peningkatan tekanan perekonomian global sebagai akibat perang Rusia-Ukraina yang masih belum selesai, tekanan inflasi global, serta respons pengetatan kebijakan moneter global yang lebih agresif merupakan gambaran dari kondisi perekonomian global yang tidak dalam kondisi baik dan akan berdampak pada perekonomian nasional dan daerah. Masyarakat Lampung menyakini bahwa baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah akan dapat menjaga kinerja perekonomian dalam level yang positif. Pertumbuhan ekonomi nasional yang berada pada tren positif dan kondisi APBN Indonesia yang menunjukkan kondisi surplus dalam 6 bulan terakhir menjadi sinyal optimisme bagi perekonomian nasional. Sementara itu, di level daerah juga diyakini bahwa pertumbuhan ekonomi daerah akan mengalami tren positif dan akan mendorong peningkatan kinerja pembangunan daerah.





Ekspektasi Ekonomi



Analisa:

Masyarakat Lampung menilai kondisi ekonomi secara umum saat ini relative baik, dengan kondisi ekonomi daerah Lampung sedikit berada di bawah nasional. Persepsi ini didukung oleh membaiknya beberapa indikator perekonomian seperti pertumbuhan yang positif, neraca dagang yang masih mencatatkan surplus, investasi yang mulai meningkat, termasuk PMI manufaktur yang berdaya tahan. Di sisi pertumbuhan, secara nasional dalam 3 (tiga) bulan ke depan diprediksi akan mengalami sedikit perlambatan, hal ini terkait dengan kondisi perekonomian global yang mengalami tekanan. Namun untuk daerah, pertumbuhan diprediksi akan membaik untuk tiga bulan ke depan. Untuk tingkat pengangguran, baik nasional maupun daerah, selama tiga bulan ke depan diprediksi akan mengalami penurunan, hal ini disebabkan oleh mulai pulihnya berbagai sector industry yang dapat kembali menyerap tenaga kerja. Sedangkan untuk inflasi diprediksi akan mengalami penurunan dalam kurun waktu tiga bulan ke depan, hal ini didorong oleh ketersediaan stok pangan dan berbagai barang kebutuhan masyarakat yang mencukupi.





Persepsi Tantangan Ekonomi

Tabel 1. Lima Tantangan Ekonomi Terbesar dari Cabang Lampung

Di Tingkat Nasional		Di Tingkat Daerah	
Kondisi Saat ini	Prediksi 3 Bulan Kedepan	Kondisi Saat ini	Prediksi 3 Bulan Kedepan
1. Pertumbuhan investasi yang melambat	1. Volatilitas kurs	1. Volatilitas kurs	1. Volatilitas kurs
2. Kenaikan suku bunga kredit	2. Pertumbuhan investasi yang melambat	2. Kenaikan suku bunga kredit	2. Kenaikan suku bunga kredit
3. Volatilitas kurs	3. Kenaikan suku bunga kredit	3. Pertumbuhan investasi yang melambat	3. Pertumbuhan investasi yang melambat
4. Defisit APBN	4. Defisit APBN	4. Gejala dan kondisi politik dalam negeri	4. Gejala dan kondisi politik dalam negeri
5. Gejala dan kondisi politik dalam negeri	5. Ketersediaan bahan pokok yang terbatas	5. Defisit APBN	5. Defisit APBN

Analisa:

Persepsi Masyarakat Lampung terhadap tantangan ekonomi nasional dan daerah saat ini dan 3 bulan kedepan didominasi oleh lima tantangan, yaitu pertumbuhan investasi yang melambat, kenaikan suku bunga kredit, volatilitas kurs, defisit APBN, dan gejala dan kondisi politik dalam negeri. Peningkatan tekanan perekonomian global sebagai akibat perang Rusia-Ukraina yang masih belum selesai, tekanan inflasi global, serta respons pengetatan kebijakan moneter global yang lebih agresif merupakan gambaran dari kondisi perekonomian global yang tidak dalam kondisi baik dan akan berdampak pada perekonomian nasional dan daerah.

Perang Rusia-Ukraina akan berdampak pada terjadinya krisis pangan dan energi. Rusia termasuk produsen energi terbesar di dunia dan Ukraina-Rusia juga merupakan produsen pangan terbesar di dunia, termasuk pupuk. Kondisi perekonomian Amerika Serikat (AS) dan Cina sebagai mitra dagang dan investasi Indonesia saat ini juga sedang dalam kondisi yang lemah. Pada kuartal I/2022 dan kuartal II/2022 perekonomian AS berkontraksi sebesar minus 1,6 persen (yoy) pada kuartal I dan 0,9 persen (yoy) pada kuartal II-2022 atau resmi mengalami resesi. Sementara itu, ekonomi Cina hanya tumbuh 0,4% kuartal II/2022. Dari sisi ekspor, AS dan Cina adalah salah satu negara tujuan ekspor utama Indonesia. Jika ekonomi AS dan Cina mengalami pelemahan, maka permintaan ekspor turun dan





harga komoditas juga akan turun. Sementara di sisi investasi, AS dan Cina juga memegang peranan yang penting bagi Indonesia. Pada semester I-2022, AS menempati peringkat kelima negara dengan investasi terbesar di Tanah Air. Ketidakpastian ekonomi dunia yang terjadi akan membuat para pemilik modal di seluruh dunia mengalami kepanikan dan memilih mengamankan hartanya dari amukan resesi.

Selain dari sisi perdagangan dan investasi, gejolak ekonomi dunia yang terjadi juga berpotensi melemahkan nilai tukar Rupiah, kenaikan suku bunga secara agresif, dan inflasi di Indonesia. Potensi pelemahan terhadap perekonomian nasional tersebut akan berdampak kepada pendapatan pajak negara serta perhitungan alokasi APBN.

Persepsi Kemampuan Pemerintah

Tabel 2. Top-5 Persepsi Kemampuan Pemerintah dari Cabang Lampung

Pemerintah Pusat	Pemerintah Daerah
1. Perbaikan sistem logistik untuk kelancaran distribusi	1. Menciptakan rasa aman dan tenteram
2. Akselerasi pertumbuhan investasi	2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan menciptakan lapangan kerja
3. Peningkatan human capital (termasuk peningkatan sumberdaya manusia yang berkualitas dan peningkatan kesehatan masyarakat)	3. Perbaikan sistem logistik untuk kelancaran distribusi
4. Menyediakan dan merawat infrastruktur	4. Menciptakan lingkungan hidup hijau, meningkatkan ketahanan bencana, dan meminimalisir dampak perubahan iklim
5. Menciptakan lingkungan hidup hijau, meningkatkan ketahanan bencana, dan meminimalisir dampak perubahan iklim.	5. Akselerasi pertumbuhan investasi

Analisa:

Ditengah tekanan dan ketidak pastian ekonomi global yang dapat mengancam perekonomian nasional saat ini, Masyarakat Lampung menyakini bahwa baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah akan dapat menjaga kinerja perekonomian dalam level yang positif. Pertumbuhan ekonomi nasional yang berada pada tren positif dan kondisi APBN Indonesia yang menunjukkan kondisi





surplus dalam 6 bulan terakhir menjadi sinyal optimisme bagi perekonomian nasional. Masyarakat Lampung menyakini bahwa, dengan kondisi surplus tersebut pemerintah dapat melaksanakan berbagai kebijakan strategis pembangunan. 5 teratas persepsi kemampuan pemerintah pusat dari cabang Lampung ditujukan pada perbaikan sistem logistik untuk kelancaran distribusi, akselerasi pertumbuhan investasi, peningkatan human capital (termasuk peningkatan sumberdaya manusia yang berkualitas dan peningkatan kesehatan masyarakat), menyediakan dan merawat infrastruktur, menciptakan lingkungan hidup hijau, meningkatkan ketahanan bencana, dan meminimalisir dampak perubahan iklim.

Sementara itu, bagi pemerintah daerah Masyarakat Lampung menyakini bahwa pertumbuhan ekonomi daerah yang juga berada pada tren positif dan kondisi APBN Indonesia yang menunjukkan kondisi surplus sebagai potensi pendapatan daerah dari komponen dana transfer pemerintah pusat akan mendorong peningkatan kinerja pembangunan daerah. 5 teratas persepsi kemampuan pemerintah daerah dari cabang Lampung ditujukan pada keyakinan menciptakan rasa aman dan tenteram, meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan menciptakan lapangan kerja, perbaikan sistem logistik untuk kelancaran distribusi, menciptakan lingkungan hidup hijau, meningkatkan ketahanan bencana, dan meminimalisir dampak perubahan iklim, akselerasi pertumbuhan investasi.





Laporan Survei Indikator Survei Ekonomi Indonesia (ISEI) Index Cabang: Langsa

Ringkasan Eksekutif

Menghadapi kondisi sosial dan ekonomi Indonesia saat ini dan masa-masa mendatang menjadi tantangan tersendiri bagi situasi dan kondisi makro ekonomi nasional. Karakteristik perekonomian nasional memberikan reaksi yang beragam di berbagai daerah. Hasil survei Indikator Survei Ekonomi Indonesia yang diselenggarakan oleh Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) khususnya respon dari ISEI Cabang Langsa terhadap beberapa komponen sosial ekonomi nasional dan daerah memberikan temuan bahwa sebagian besar masyarakat menganggap ekspektasi ekonomi nasional tidak lebih baik atau sama saja dalam perubahan kemajuan kondisi secara umum baik nasional maupun daerah.

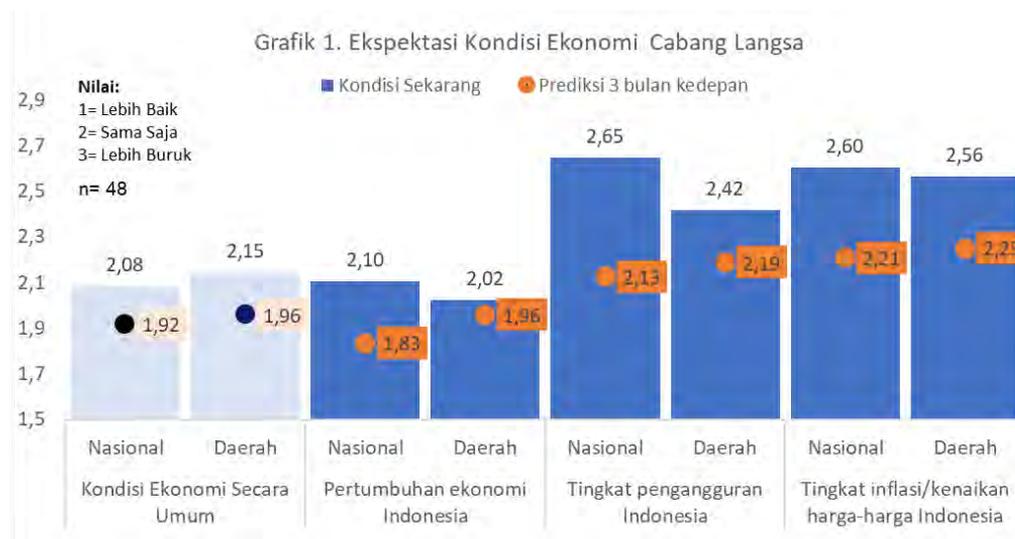
Selanjutnya tantangan ke depan yang akan dihadapi ke depan ditanggapi secara berbeda untuk tingkat nasional maupun daerah, dimana ketersediaan bahan pokok yang terbatas merupakan isu strategis saat ini dan volatilitas kurs menjadi isu penting di 3 bulan ke depan yang disebabkan belum kondusifnya investasi, fluktuasi pasar keuangan, termasuk geopolitik yang sukar diprediksi.

Secara umum adanya kecenderungan keyakinan terhadap pemerintah dalam kemampuan pengelolaan sosial dan ekonomi meskipun masih rendah. Hal ini berdasarkan temuan bahwa 24,07% yakin atas kemampuan ini dan 26,39% tidak yakin atas kemampuan pemerintah pusat. Keyakinan kemampuan pemerintah berada pada kemampuan membangun human capital dan infrastruktur namun tidak didukung dalam menciptakan rasa aman dan ketentraman serta rendahnya upaya menciptakan lapangan kerja.





Ekspektasi Ekonomi



Analisa:

Survei terhadap Survei Indikator Ekonomi Indonesia yang dilakukan terhadap 48 responden pada ISEI Cabang Langsa menemukan sebagian besar masyarakat menganggap ekspektasi ekonomi nasional tidak lebih baik atau sama saja dalam perubahan kemajuan kondisi secara umum baik nasional maupun daerah (50%) meskipun respon daerah sedikit lebih rendah dibandingkan nasional. Selanjutnya harapan bagi pertumbuhan ekonomi tidak jauh berbedda dengan kondisi ekonomi secara umum dimana berada pada kategori 2 atau sama saja namun yang menarik berdasarkan rincian responden ternyata 68% lebih menanggapi dengan lebih buruk untuk kondisi saat maupun 3 bulan mendatang, meskipun adanya harapan yang lebih baik bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Pada tingkat pengangguran ditemukannya tanggapan yang cenderung lebih buruk di tingkat nasional (2,65) dibandingkan tingkat daerah, akan tetapi prediksi 3 bulan ke depan ekspektasi terhadap tingkat pengangguran berada pada kategori sama saja baik nasional maupun daerah (50%) tanggapan responden berada di kategori ini. Kemudian pada tanggapan terhadap inflasi umumnya responden memiliki sentiment negatif baik kondisi sekarang maupun harapan di masa mendatang yang ditunjukkan skor 2,60 nasional, 2,56 daerah dan ekspektasi 3 bulan mendatang lebih tidak lebih baik dari kondisi saat ini.





Persepsi Tantangan Ekonomi

Tabel 2. Top-5 Persepsi Kemampuan Pemerintah berdasarkan cabang Langsa

Pemerintah Pusat	Pemerintah Daerah
1. Peningkatan human capital (termasuk peningkatan sumberdaya manusia yang berkualitas dan peningkatan kesehatan masyarakat)	1. Menciptakan lingkungan hidup hijau, meningkatkan ketahanan bencana, dan meminimalisir dampak perubahan iklim.
2. Perbaiki sistem logistik untuk kelancaran distribusi	2. Perbaiki sistem logistik untuk kelancaran distribusi
3. Menyediakan dan merawat infrastruktur	3. Menciptakan rasa aman dan tenteram
4. Menciptakan rasa aman dan tenteram	4. Peningkatan human capital (termasuk peningkatan sumberdaya manusia yang berkualitas dan peningkatan kesehatan masyarakat)
5. Akselerasi pertumbuhan investasi	5. Menyediakan dan merawat infrastruktur

Analisa:

Secara umum adanya kecenderungan keyakinan terhadap pemerintah dalam kemampuan pengelolaan soisal dan ekonomi meskipun masih rendah. Hal ini berdasarkan temuan bahwa 24,07% yakin atas kemampuan ini dan 26,39% tidak yakin atas kemampuan pemerintah pusat dari 5 komponen yang ada hampir sebahagiannya 49,54% bersifat netral. 2 komponen keyakinan berada pada kemampuan peningkatan human capital dan penyediaan serta perawatan infrastruktur. Sedangkan ketidakyakinan ada pada komponen menciptakan rasa aman dan tenteram.

Untuk tingkat daerah menemukan tingkat keyakinan kemampuan pemerintah daerah sebesar 28,54% dan ketidakyakinan atas kemampuan pemerintah daerah sebesar 21,46% dan 50% responden bersifat netral. Adapun keyakinan utama atas kemampuan pemerintah daerah adalah menciptakan lingkungan hidup hijau, meningkatkan ketahanan bencana dan mengurangi dampak perubahan iklim. Sedangkan ketidakyakinan kemampuan pemerintah daerah ada pada menyediakan dan merawat infrastruktur.





Persepsi Kemampuan Pemerintah

Tabel 2. Top-5 Persepsi Kemampuan Pemerintah berdasarkan cabang Langsa

Pemerintah Pusat	Pemerintah Daerah
1. Peningkatan human capital (termasuk peningkatan sumberdaya manusia yang berkualitas dan peningkatan kesehatan masyarakat)	1. Menciptakan lingkungan hidup hijau, meningkatkan ketahanan bencana, dan meminimalisir dampak perubahan iklim.
2. Perbaikan sistem logistik untuk kelancaran distribusi	2. Perbaikan sistem logistik untuk kelancaran distribusi
3. Menyediakan dan merawat infrastruktur	3. Menciptakan rasa aman dan tenteram
4. Menciptakan rasa aman dan tenteram	4. Peningkatan human capital (termasuk peningkatan sumberdaya manusia yang berkualitas dan peningkatan kesehatan masyarakat)
5. Akselerasi pertumbuhan investasi	5. Menyediakan dan merawat infrastruktur

Analisa:

Secara umum adanya kecenderungan keyakinan terhadap pemerintah dalam kemampuan pengelolaan soial dan ekonomi meskipun masih rendah. Hal ini berdasarkan temuan bahwa 24,07% yakin atas kemampuan ini dan 26,39% tidak yakin atas kemampuan pemerintah pusat dari 5 komponen yang ada hampir sebahagiannya 49,54% bersifat netral. 2 komponen keyakinan berada pada kemampuan peningkatan human capital dan penyediaan serta perawatan infrastruktur. Sedangkan ketidakyakinan ada pada komponen menciptakan rasa aman dan tenteram.

Untuk tingkat daerah menemukan tingkat keyakinan kemampuan pemerintah daerah sebesar 28,54% dan ketidakyakinan atas kemampuan pemerintah daerah sebesar 21,46% dan 50% responden bersifat netral. Adapun keyakinan utama atas kemampuan pemerintah daerah adalah menciptakan lingkungan hidup hijau, meningkatkan ketahanan bencana dan mengurangi dampak perubahan iklim. Sedangkan ketidakyakinan kemampuan pemerintah daerah ada pada menyediakan dan merawat infrastruktur.





Laporan Survei Indikator Survei Ekonomi Indonesia (ISEI) Index Cabang: Madura

Tim Penyusun :

1. Dr. Drs.Ec. GAZALI, M.M.
2. Dr. Rachman Hakim, S.E., M.M.
3. Zef Risal, S.E., M.M.

Ringkasan Eksekutif

Pemerintah telah mengambil berbagai kebijakan extraordinary (luar biasa) untuk mengatasi dampak sosial ekonomi akibat pandemi Covid-19, diantaranya adalah realokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diarahkan sepenuhnya untuk keperluan penanganan pandemi Covid-19. Dari sisi ekonomi program yang sudah dilakukan pemerintah melalui Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan program perlindungan sosial dan langkah-langkah lain yang telah dilakukan pemerintah sampai semester I 2021 menunjukkan perkembangan positif. Namun pemerintah masih melakukan refocusing kembali untuk APBN sebagai anggaran cadangan untuk tambahan pada program PEN dalam mengatasi kondisi perekonomian di dalam negeri.

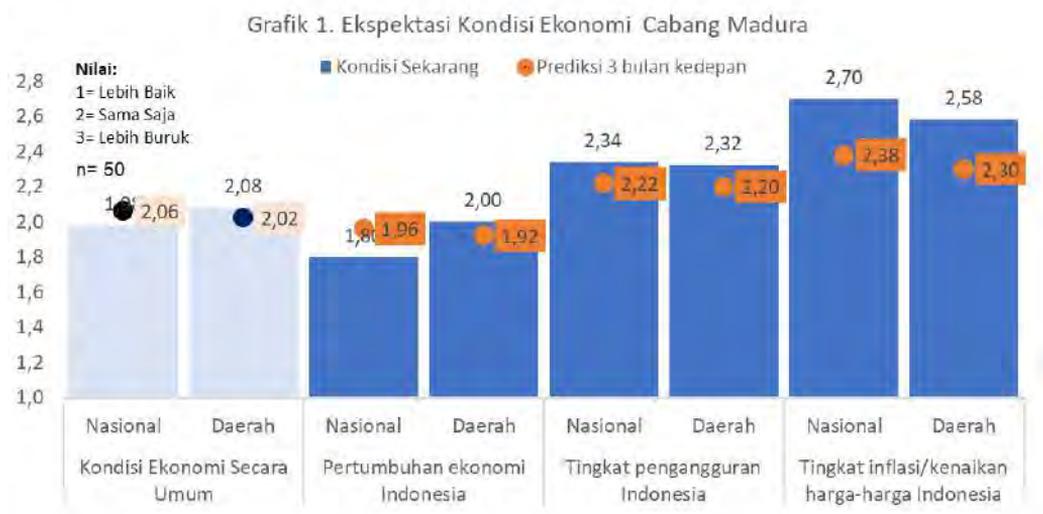
Pemulihan ekonomi nasional direspon sama oleh daerah, terlihat dari perkembangan ekonomi jatim yang positif dan wilayah madura rata-rata mengalami perkembangan ekonomi yang positif. Kinerja ekonomi empat (4) kabupaten di wilayah madura pada tahun 2020 cenderung positif, yaitu 1) struktur ekonomi Kabupaten Bangkalan selalu didominasi oleh kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan pada tahun 2020 mencapai 25,66%. Sedangkan peranan terkecil adalah Pengadaan Listrik dan Gas yang hanya sebesar 0,04%; 2) PDRB kabupaten sampang di dominasi sektor pertanian sebesar 32,70% dilanjut sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 18,03%; 3) struktur ekonomi kabupaten pamekasan masih di dominasi oleh tiga sektor utama, yaitu sektor pertanian sebesar 32,37%, perdagangan besar dan eceran sebesar 20,72%, dan konstruksi sebesar 10,29%; dan 4) struktur ekonomi kabupaten sumenep tahun 2020, di dominasi oleh tiga sektor utama yaitu sektor pertanian sebesar 39,93%, pertambangan sebesar 15,66% dan reparasi kendaraan bermotor sebesar 12,20%.





Masalah pengangguran masih menjadi salah satu titik berat dalam pembangunan Jawa Timur khususnya empat (4) kabupaten di pulau madura. Empat daerah kabupaten di Jawa Timur, yang paling tinggi tingkat pengangguran terbukanya di masa pandemi COVID 19 adalah Kabupaten Bangkalan yaitu sebesar 8.77%, kemudian disusul secara berurutan Kabupaten Sampang sebesar 3,99%, Kabupaten Pameksan sebesar 3.49%, dan yang paling rendah adalah Kabupaten Sumenep sebesar 2.84%. Sedangkan tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur seberapa banyak penduduk usia kerja yang ikut aktif di dalam perekonomian. Indikator ini merupakan perbandingan antara angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. Berdasarkan Undang-undang No.7 tahun 1996 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) No. 68 mengartikan ketahanan pangan rumah tangga adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari ketersediaan pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau. Sedangkan kondisi saat ini, kenaikan harga komoditas juga terjadi untuk pangan serealia. Gandum, misalnya, harga pada pada kuartal I 2022 sudah mencapai 486,3 dolar AS per mt, melonjak 78,05% dari periode 2021 sebesar 273,1 dolar AS per mt. Komoditas lain, yakni kedelai sudah mencapai 720,6 dolar AS per mt, naik 23 persen dari sebelumnya 585,7 dolar AS per mt. Harga pangan pada kuartal I memang sudah terjadi peningkatan cukup signifikan.

Ekspektasi Ekonomi





Analisa

Kondisi Umum Ekonomi Madura bisa dilihat dari masing-masing struktur ekonomi pada tahun 2020, yaitu 1) struktur ekonomi Kabupaten Bangkalan selalu didominasi oleh kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan pada tahun 2020 mencapai 25,66%. Sedangkan peranan terkecil adalah Pengadaan Listrik dan Gas yang hanya sebesar 0,04%; 2) PDRB kabupaten sampang di dominasi sektor pertanian sebesar 32,70% dilanjut sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 18,03%; 3) struktur ekonomi kabupaten pamekasan masih di dominasi oleh tiga sektor utama, yaitu sektor pertanian sebesar 32,37%, perdagangan besar dan eceran sebesar 20,72%, dan konstruksi sebesar 10,29%; dan 4) struktur ekonomi kabupaten sumenep tahun 2020, di dominasi oleh tiga sektor utama yaitu sektor pertanian sebesar 39,93%, pertambangan sebesar 15,66% dan reparasi kendaraan bermotor sebesar 12,20%. Terdapat tiga indikator ekonomi yang akan dianalisis terkait dengan dampak COVID 19 terhadap perekonomian di Madura, yaitu 1) pertumbuhan ekonomi; 2) inflasi; dan 3) pengangguran.

Perbaikan ekonomi Indonesia telah terlihat dari pertumbuhan ekonomi yang positif sejak Triwulan II hingga Triwulan IV 2021. Upaya pengendalian pandemi Covid-19 yang dilakukan Pemerintah telah berhasil mendongkrak pertumbuhan perekonomian nasional sebesar 3,69 tahun 2021, PDB per kapita meningkat menjadi Rp. 62,2 juta (atau setara dengan US\$4.349,5). Pencapaian tersebut juga akan membawa Indonesia masuk kembali dalam klasifikasi negara berpenghasilan menengah atas (Upper Middle-Income Country).

Secara parsial, pertumbuhan ekonomi dari empat Kabupaten yang ada di Madura mengalami perbedaan pada tahun 2021, yaitu 1) kabupaten bangkalan mengalami pertumbuhan ekonomi yang negatif sebesar -2,07%; 2) kabupaten sampang mengalami pertumbuhan 0,22%; 3) kabupaten pamekasan dan sumenep mengalami pertumbuhan yang positif sebesar 3,41% dan 2,61%. Dari 4 wilayah kabupaten yang paling terdampak dari covid-19 adalah kabupaten bangkalan hingga pertumbuhan ekonominya mengalami kontraksi. Sedangkan 3 kabupaten lainnya masih terbilang baik karena bisa mempertahankan pertumbuhan ekonominya tetap tumbuh positif sampai pasca covid-19.

Lebih lanjut, bahwa kabupaten atau daerah yang struktur ekonominya lebih besar pada sektor pertanian atau sektor-sektor primer lainnya, relatif lebih tahan dibanding daerah yang struktur ekonominya didominasi sektor perdagangan dan





industri. Hal ini disebabkan karena sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan, relatif lebih tidak terpengaruh akibat adanya kebijakan pandemi Covid-19 yang diterapkan pemerintah untuk mencegah penyebaran Covid-19. Sedangkan sektor perdagangan dan sektor industri relatif lebih terdampak akibat adanya Covid-19, karena kebijakan tersebut mempengaruhi mobilitas orang dan barang, sehingga kedua sektor tersebut mengalami penurunan yang cukup tajam dan akan berdampak pada total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah.

Selain pertumbuhan ekonomi, indikator makro ekonomi lain yang bisa dianalisis akibat pandemi COVID 19 adalah tingkat inflasi. Inflasi mencerminkan tingkat harga secara umum di suatu daerah. Inflasi bisa disebabkan oleh dua aspek, yaitu aspek permintaan inflasi ini biasanya disebabkan oleh meningkatnya permintaan barang karena peningkatan pendapatan inflasi ini disebut Demand Pull Inflation. Sedangkan aspek kedua adalah aspek dari sisi penawaran, kenaikan harga yang disebabkan karena harga jual per unit barang mengalami kenaikan, biasanya disebabkan oleh kenaikan biaya produksi, inflasi ini biasanya disebut Cost Push Inflation. Berikut ini gambaran inflasi masing-masing kabupaten di Madura.

Dalam 3 tahun terakhir pergerakan barang ber gejolak sangat berfluktuasi, disebabkan karena bahan makanan tertentu harganya sewaktu-waktu dapat melambung tinggi. Usaha yang dilakukan pemerintah dalam menekan agar inflasi barang ber gejolak tidak terlalu tinggi melakukan koordinasi dan penguatan kerjasama dengan dan antar daerah, pemerintah fokus untuk selalu menjaga pasokan bahan makanan sepanjang waktu dan menjaga kelancaran distribusi antar daerah. Pada tahun 2019 komponen inflasi barang ber gejolak mencapai 4,30% dan sumbangannya terhadap inflasi sebesar 0,77% lebih tinggi dibanding tahun 2018 dengan angka inflasi hanya sebesar 3,39%. Covid-19 menjadi tantangan berat bagi pemerintah dalam menangani perekonomian, kesejahteraan masyarakat dan juga kesehatan. Namun pemerintah mampu mengendalikan inflasi bahkan untuk inflasi dengan komponen barang ber gejolak pemerintah mampu menekan hingga mencapai 3,62% dan sharenya sebesar 0,59%.

Empat daerah yang ada di Madura mengalami kecenderungan penurunan inflasi, kecuali Pada kuartal II 2022 dari kota IHK di wilayah Pulau Jawa dan Madura yang berjumlah 26 kota, seluruhnya mengalami inflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Sumenep sebesar 1,04% dengan IHK sebesar 113,34. Dengan kecenderungan





penurunan inflasi ini, meunjukkan bahwa terjadi pelemahan ekonomi di semua kabupaten di Madura yang diakibatkan oleh daya beli masyarakat yang menurun akibat aktivitas ekonomi dibatasi oleh kebijakan sosial distancing untuk mencegah penyebaran COVID 19.

Masalah pengangguran masih menjadi salah satu titik berat dalam pembangunan Jawa Timur khususnya empat (4) kabupaten di pulau madura. Untuk mendukung upaya pemerintah dalam mengendalikan laju pengangguran, diperlukan indikator-indikator sebagai dasar perencanaan, monitoring, maupun evaluasi program. Informasi tersebut akan banyak memberikan manfaat bagi pemerintah daerah dalam membuat perencanaan atau kebijakan strategis dalam rangka perluasan kesempatan kerja yang pada akhirnya dapat mengurangi pengangguran serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Keadaan ketenagakerjaan di wilayah madura dapat diamati dari dua aspek, yaitu aspek ketersediaan (Supply) dan aspek kebutuhan (Demand). Idealnya kedua aspek tersebut berada pada posisi yang seimbang, yang berarti bahwa jumlah kebutuhan tenaga kerja dapat terpenuhi dari jumlah tenaga kerja yang tersedia sehingga tidak ada penganggur. Namun hingga tahun 2021, kondisi normal yang diharapkan tersebut belum tercapai. Faktanya, baik pengangguran maupun setengah pengangguran masih ditemukan. Persoalan menjadi lebih kompleks karena bukan hanya terjadinya ketidakseimbangan dari sisi jumlah, melainkan juga terkait karakteristik ketenagakerjaan lainnya. Karakteristik tersebut antara lain perubahan struktur usia penduduk usia kerja yang ditunjukkan dari angka beban ketergantungan, distribusi tenaga kerja menurut lapangan pekerjaan yang dominan pada kegiatan informal, besarnya rata-rata upah yang diterima buruh belum mencapai standar upah minimum yang ditetapkan dan sebagainya.

Empat daerah kabupaten di Jawa Timur, yang paling tinggi tingkat pengangguran terbukanya di masa pandemi COVID 19 adalah Kabupaten Bangkalan yaitu sebesar 8.77%, kemudian disusul secara berurutan Kabupaten Sampang sebesar 3,99%, Kabupaten Pameksan sebesar 3.49%, dan yang paling rendah adalah Kabupaten Sumenep sebesar 2.84%. Sedangkan tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur seberapa banyak penduduk usia kerja yang ikut aktif di dalam perekonomian. Indikator ini merupakan perbandingan antara angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja.





Pada tahun 2021, TPAK di Jawa Timur tercatat sebesar 70,00 persen, yang berarti terdapat sekitar 70 orang angkatan kerja untuk setiap 100 penduduk usia kerja. Angka ini menurun tipis dibandingkan TPAK pada tahun sebelumnya (70,33%). TPAK tahun 2021 menurut kabupaten/kota di Jawa Timur menunjukkan keragaman yang berkisar antara 64,24% hingga 80,57%. Sektor pertanian sebagai lapangan usaha utama di wilayah madura menjadi salah satu penyebab tingginya penduduk daerah tersebut masuk secara aktif dalam perekonomian. Sektor pertanian berpotensi memberikan ruang lebih masuknya pekerja keluarga dan pekerja bebas di musim-musim tertentu seperti musim panen atau musim tanam. Selain itu, sektor pertanian secara umum masih relatif tidak mensyaratkan keahlian/pendidikan tertentu sehingga memudahkan penduduk tanpa keahlian khusus atau penduduk dengan pendidikan rendah tetap bisa masuk di sektor tersebut.

Persepsi Tantangan Ekonomi

Tabel 1. Lima Tantangan Ekonomi Terbesar dari Cabang Madura

Di Tingkat Nasional		Di Tingkat Daerah	
Kondisi Saat ini	Prediksi 3 Bulan Kedepan	Kondisi Saat ini	Prediksi 3 Bulan Kedepan
1. Pertumbuhan investasi yang melambat	1. Pertumbuhan investasi yang melambat	1. Kenaikan suku bunga kredit	1. Volatilitas kurs
2. Gejala dan kondisi politik dalam negeri	2. Kenaikan suku bunga kredit	2. Defisit APBN	2. Kenaikan suku bunga kredit
3. Volatilitas kurs	3. Gejala dan kondisi politik dalam negeri	3. Volatilitas kurs	3. Pertumbuhan investasi yang melambat
4. Ketersediaan bahan pokok yang terbatas	4. Defisit APBN	4. Gejala dan kondisi politik dalam negeri	4. Gejala dan kondisi politik dalam negeri
5. Defisit APBN	5. Ketersediaan bahan pokok yang terbatas	5. Demand Daya beli masyarakat yang menurun	5. Defisit APBN

Analisa

Sejatinya, Peningkatan investasi akan meningkatkan kapasitas untuk menghasilkan barang dan/atau jasa suatu negara/wilayah, sehingga kebutuhan barang dan/atau jasa tersebut akan dapat dipenuhi dari kemampuan produksi suatu negara/wilayah. Peningkatan investasi juga mendorong perubahan kondisi dari masyarakat pengkonsumsi menjadi masyarakat penghasil barang dan/jasa. Pembangunan infrastruktur oleh pemerintah dan investasi dibidang industri baik swasta maupun pemerintah juga memberi andil tingginya PMTB di daerah. Disamping itu peningkatan pendapatan masyarakat yang semakin baik mampu menghimpun dana investasi yang semakin meningkat.





Ditingkat nasional, dari laporan kegiatan penanaman modal menerangkan bahwa pertumbuhan investasi PMDN pada Triwulan I Tahun 2022 meningkat sebesar 25,1%, dari Rp. 108,0 T di Triwulan I Tahun 2021 menjadi Rp. 135,2 triliun. Investasi sektor Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi menjadi sektor penunjang terbesar realisasi investasi PMDN. Sedangkan investasi PMA pada Triwulan I Tahun 2022 meningkat 31,8% dibanding Triwulan I Tahun 2021 dari Rp 111,7 T menjadi Rp. 147,2 T. Realisasi PMA terbesar pada triwulan I 2022 disumbang oleh sektor Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya. Peningkatan realisasi investasi PMA yang terutama terjadi pada sektor Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya, membuktikan kebijakan Presiden Joko Widodo yakni melarang ekspor bahan mentah telah berhasil mendorong terjadinya hilirisasi investasi di Indonesia, khususnya industri pengolahan nikel serta industri besi dan baja.

Sektor usaha, 5 (lima) besar realisasi investasi (PMDN & PMA) adalah Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya (Rp. 39,7 T, 14,0%); Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi (Rp. 39,5 T, 14,0%); Pertambangan (Rp. 35,2 T, 12,5%); Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran (Rp 24,9 T, 8,8%); serta Listrik, Gas dan Air (Rp. 23,1 T, 8,2 %). Sektor industri pengolahan masih memegang peranan sangat penting dalam peningkatan realisasi investasi dan tetap menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi.

Para ekonom membedakan antara suku bunga nominal dan suku bunga riil. Suku bunga nominal adalah rate yang dapat diamati di pasar, sedangkan suku bunga riil adalah konsep yang mengukur tingkat kembalian setelah dikurangi inflasi. Efek ekspektasi inflasi terhadap suku bunga nominal itu sering disebut efek Fisher (Fisher effect) dan hubungan antara inflasi dengan suku bunga ditunjukkan dengan persamaan Fisher⁴. Dengan demikian, peningkatan ekspektasi inflasi akan cenderung meningkatkan suku bunga nominal. Hal tersebut berarti, pada suku bunga nominal akan cenderung terkandung ekspektasi inflasi untuk memberikan tingkat kembalian riil atas penggunaan uang. Laju inflasi merupakan faktor penting dalam menganalisa dan meramalkan suku bunga. Selisih antara suku bunga nominal dan inflasi adalah ukuran yang sangat penting mengenai beban sesungguhnya dari biaya suku bunga yang dihadapi individu dan perusahaan.





Di tengah peningkatan suku bunga kebijakan global, namun Bank Indonesia (BI) masih menahan suku bunga acuan di level 3,5%. Secara konsep teori, kenaikan BI Rate dapat merespons kenaikan inflasi dan luruhnya nilai tukar rupiah. BI rate sebagai salah satu instrumen kebijakan moneter Bank Indonesia juga memiliki tujuan dasar sebagai kebijakan moneter yakni menjaga kestabilan harga barang. Hal ini dilakukan dengan beberapa pertimbangan. Pertama, dengan output ditentukan kapasitas ekonomi dalam jangka panjang maka segala kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi akan menciptakan inflasi (The Short-Run Phillips-Curve) sehingga tidak akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi riil. Kedua, national economic agent mengerti bahwa tindakan kejutan pembuat kebijakan dalam mendorong inflasi dapat mendorong terjadinya permasalahan time-consistency. Ketiga, kebijakan moneter mempengaruhi variabel ekonomi memakan waktu panjang dan mempunyai lag. Keempat, kestabilan harga dapat mendorong terciptanya iklim ekonomi yang lebih baik karena akan mengurangi biaya yang berasal dari inflasi.

Peran utama anggaran pengeluaran adalah untuk membiayai program-program pemerintah dan mencapai sasaran-sasaran pokok dan pelaksanaan prioritas pembangunan nasional sebagaimana yang direncanakan di dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Pemerintah selalu berharap agar pengeluaran negara dapat seimbang dengan penerimaannya. Namun selama ini APBN masih selalu mengalami defisit, sehingga pembiayaan pembangunan masih tergantung pada utang negara. Sejak pandemi melanda awal tahun 2020, untuk menyelamatkan perekonomian dan kesehatan penduduk dari ancaman virus Covid-19, pemerintah memprioritaskan belanja negara untuk belanja kesehatan, jaring pengaman sosial, dan pemulihan perekonomian.

Pada APBN 2021, selain melakukan optimalisasi pendapatan negara, pemerintah juga melakukan optimalisasi pada belanja negara melalui pendekatan spending better. Pendekatan spending better berupaya memfokuskan belanja negara yang berkualitas untuk pelaksanaan program prioritas yang berbasis hasil dan efisiensi kebutuhan dasar, serta antisipasi terhadap berbagai tekanan (Automatic Stabilizer). Pada APBN 2021, pemerintah merencanakan belanja negara sebesar Rp 2.750,03 triliun. Dari komponennya, pengeluaran negara terdiri dari pengeluaran untuk pemerintah pusat dan pengeluaran untuk daerah. Pengeluaran untuk pemerintah pusat mengambil porsi yang lebih besar di atas





70 persen dibanding pengeluaran untuk daerah. Anggaran untuk pemerintah pusat pada APBN 2021 mencapai Rp 1.954,55 triliun atau sekitar 71,07% dari total anggaran belanja Negara.

Relaksasi APBN mempersiapkan defisit yang dapat melampaui 3 persen dengan tujuan tahun 2023 akan kembali seperti semua ke level maksimal 3 persen. Relaksasi akan berkaitan dengan alokasi belanja antar organisasi, antar fungsi, dan antar program serta mandatory spending. Relaksasi alokasi atau realokasi Belanja Pemerintah Daerah, Pemberian Pinjaman kepada LPS, Penerbitan SUN dan SBSN untuk dapat dibeli oleh Bank Indonesia, BUMN, investor korporasi dan/atau investor ritel. Penggunaan sumber anggaran alternatif antara lain SAL, dana abadi pendidikan, dan dana yang dikelola oleh Badan Layanan Umum.

Kebijakan moneter yang dilakukan Pemerintah yaitu bekerja sama dengan Bank Indonesia (BI) agar ikut serta mengoptimalkan berbagai kebijakan moneter dan makroprudensial akodomatif bertujuan mempercepat digitalisasi sistem pembayaran Indonesia untuk mendukung upaya pemulihan ekonomi. Pemerintah melaksanakan kebijakan moneter sebagai berikut: melanjutkan kebijakan nilai tukar Rupiah untuk menjaga stabilitas nilai tukar yang sejalan dengan fundamental dan mekanisme pasar, melanjutkan penguatan strategi operasi moneter untuk memperkuat efektivitas stance kebijakan moneter akodomatif, memperkuat kebijakan transparansi suku bunga dasar kredit (SBDK) dengan penekanan pada kenaikan suku bunga kredit baru, memperpanjang kebijakan penurunan nilai denda keterlambatan pembayaran kartu kredit 1 persen dari outstanding, mempercepat program pendalaman pasar uang melalui penguatan kerangka peraturan pasar uang dan implementasi Electronic Trading Platform (ETP) Multimatching khususnya pasar uang Rupiah dan valas, serta memfasilitasi penyelenggaraan promosi perdagangan dan investasi dan melanjutkan sosialisasi penggunaan Local Currency Settlement (LCS) bekerja sama dengan instansi terkait.

Kebijakan moneter bertujuan agar kinerja perekonomian dunia terus membaik sesuai prakiraan, ditengah ketidakpastian pasar keuangan global yang menurun. Hal ini diakibatkan adanya pandemi sehingga nilai tukar Indonesia mengalami penurunan yang drastis pada tahun 2020. Akan tetapi, kebijakan moneter yang diberikan pemerintah akan menguatkan nilai tukar Rupiah sejalan dengan





kembalimnya masuk aliran modal asing. Terlihat pada awal kuartal III tahun 2021 nilai tukar Rupiah mengalami penguatan sebesar 0,49% secara rerata dan 0,30%.

Pangan merupakan kebutuhan pokok bagi manusia. Suatu bangsa dapat dikatakan sejahtera apabila kebutuhan pangan tercukupi bagi warganya. Ketersediaan pangan dalam jumlah cukup mampu memenuhi kebutuhan masyarakat untuk melakukan aktivitasnya sehari-hari. Distribusi pangan dan keterjangkauan harga juga akan berpengaruh terhadap pemenuhan kebutuhan pangan.

Berdasarkan Undang-undang No.7 tahun 1996 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) No. 68 mengartikan ketahanan pangan rumah tangga adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari ketersediaan pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau. Tingginya ketersediaan pangan ditingkat nasional belum dapat menjamin ketersediaan pangan tingkat rumah tangga. Masih banyaknya kasus-kasus gizi buruk di Indonesia menunjukkan bahwa masih adanya kesenjangan antara akses pangan dengan ketersediaan pangan.

Ketersediaan pangan tingkat rumah tangga dipengaruhi oleh kemampuan rumah tangga dalam memproduksi pangan, daya beli, dan pemberian. Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi ketersediaan pangan di suatu wilayah antara lain persaingan dalam hal lahan (tanah), sumberdaya manusia dan teknologi, impor dan bantuan pangan, serta pola keberagaman pangan yang tersedia. Dalam jalur mata rantai pangan dan gizi, ketersediaan pangan menempati jalur pertama kemudian ke jalur kemampuan rumah tangga menjangkau pangan yang tersedia, lalu ke jalur kemauan seseorang untuk memperoleh pangan yang tersedia tersebut, pola distribusi pangan dalam keluarga dan berakhir pada status gizi perorangan. Dengan demikian maka ketersediaan pangan merupakan salah satu penentu konsumsi pangan.

Kerawanan pangan sementara, merupakan dampak dari menurunnya ketersediaan pangan secara mendadak dan sementara yang umumnya disebabkan bencana alam. Kerawanan pangan pada tingkat nasional dapat disebabkan oleh ketidakmampuan untuk menghasilkan pangan padi-padian secara cukup atau akibat ketidakmampuan untuk mengimpor pangan yang memadai. Pada tingkat provinsi, kerawanan pangan dapat disebabkan oleh





kurangnya produksi atau distribusi pangan yang memadai ke seluruh pelosok dengan harga yang terjangkau.

Kondisi saat ini, kenaikan harga komoditas juga terjadi untuk pangan sereal. Gandum, misalnya, harga pada pada kuartal I 2022 sudah mencapai 486,3 dolar AS per mt, melonjak 78,05% dari periode 2021 sebesar 273,1 dolar AS per mt. Komoditas lain, yakni kedelai sudah mencapai 720,6 dolar AS per mt, naik 23 persen dari sebelumnya 585,7 dolar AS per mt. Harga pangan pada kuartal I memang sudah terjadi peningkatan cukup signifikan.

Persepsi Kemampuan Pemerintah

Tabel 2. Top-5 Persepsi Kemampuan Pemerintah berdasarkan cabang Madura

Pemerintah Pusat	Pemerintah Daerah
1. Peningkatan human capital (termasuk peningkatan sumberdaya manusia yang berkualitas dan peningkatan kesehatan masyarakat)	1. Menciptakan rasa aman dan tenteram
2. Menyediakan dan merawat infrastruktur	2. Akselerasi pertumbuhan investasi
3. Menciptakan rasa aman dan tenteram	3. Menyediakan dan merawat infrastruktur
4. Perbaiki sistem logistik untuk kelancaran distribusi	4. Peningkatan human capital (termasuk peningkatan sumberdaya manusia yang berkualitas dan peningkatan kesehatan masyarakat)
5. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan menciptakan lapangan kerja	5. Menciptakan lingkungan hidup hijau, meningkatkan ketahanan bencana, dan meminimalisir dampak perubahan iklim.

Analisa

Transformasi dan pembangunan SDM menjadi faktor kunci untuk dapat mewujudkan masyarakat yang sejahtera dengan ekonomi menengah hingga tinggi. pada q1-2022, indonesia berhasil melanjutkan tren pemulihan dengan baik dimana ekonomi berhasil tumbuh 5,01% (Yoy). Tren Pemulihan Tersebut Dicerminkan Juga Dengan Kembalinya Indonesia Ke Dalam Kategori Negara Berpendapatan Menengah Ke Atas (Upper Middle Income) Sejak Akhir Tahun 2021.

Sebagai Salah Satu Modal Utama Dalam Mendorong Pembangunan Nasional, Pemerintah Juga Fokus Pada Peningkatan Kualitas SDM. Di Tahun 2022, Pemerintah Telah Mengalokasikan Anggaran Di Bidang Pendidikan Yang Mencapai Rp. 542,8 T. Dalam RPJMN Kita Untuk Tahun 2020-2024, Berbagai Kebijakan Pemerintah Selalu Mengedepankan Pembangunan SDM Yang Berkualitas.





Lebih Lanjut, Dalam Menyambut Era Industri 4.0 Dan Transformasi Digital, Indonesia Diprediksi Membutuhkan Sebanyak 9 Juta Orang Talenta Digital Hingga Tahun 2030. Pengembangan Keterampilan Digital Juga Diperkirakan Akan Memberikan Kontribusi Senilai Rp. 4.434 Triliun Kepada PDB Di Tahun 2030 Atau Setara Dengan 16% Dari PDB.

Pemerintah Juga Telah Memberikan Dukungan Pengembangan Talenta Digital Melalui Berbagai Program Diantaranya Gerakan Nasional Literasi Digital, Digital Talent Scholarship, Dan Tentunya Program Kartu Prakerja Yang Membantu Pengembangan Keterampilan Digital Dari Level Basic Hingga Advance. Program Kartu Prakerja Sendiri Telah Diberikan Kepada 11,4 Juta Penerima Di Tahun 2020-2021 Dan Di Tahun 2022 Ini Telah Tersalurkan Kepada 1,06 Juta Penerima.

Merespon Dinamika Pada Tingkat Global, Posisi Strategis Indonesia Dalam Pemulihan Ekonomi Dunia. Indonesia Sebagai Tuan Rumah Penyelenggaraan Presidensi G20 Tahun 2022 Berkesempatan Untuk Mengakselerasi Pemulihan Ekonomi Global Secara Inklusif Dengan Menunjukkan Kepemimpinan Indonesia Yang Mampu Menjawab Berbagai Tantangan Internasional. Selaras Dengan Hal tersebut, PBB Juga Telah Menunjuk Presiden Indonesia Sebagai Champions GCRG (Global Crisis Response Group) Bersama 5 Kepala Negara Lainnya.

Pembangunan proyek infrastruktur akan menjadikan Indonesia sebagai negara ekonomi ke-4 di dunia pada 2045. Pentingnya infrastruktur sebagai key instrument untuk mendorong ekonomi Indonesia. Namun Indonesia belum mempunyai data konkrit dan akurat dalam bentuk indeks infrastruktur yang dapat digunakan sebagai perbandingan Indonesia dengan negara lainnya.

Paradigma yang terjadi adalah dari sekian jumlah investasi, diperkirakan hanya 1-3% masuk dalam kategori infrastruktur. Paradigma kedua yang perlu dikembangkan adalah perlu adanya data infrastruktur yang terstandarisasi. Hal ini sangat dibutuhkan untuk dapat membandingkan nilai investasi dengan negara lain. Paradigma ketiga adalah dalam hal kejelasan legalitas. Diperlukan adanya hedging tool untuk memitigasi resiko.

Indonesia infrastructure investment fisik yang kualitasnya kurang baik juga dapat menyebabkan masalah yang lebih buruk lagi. Tidak dapat dipungkiri juga, para investor harus mempertimbangkan kondisi negara Indonesia secara geografisnya. Dikarenakan negara Indonesia yang terletak pada garis khatulistiwa





menjadi penyebab wilayahnya berada di area curah hujan tropis berat dan juga ditambah lokasi negara Indonesia terletak pada cincin api pasifik yang membuat negara Indonesia mudah dan rentan sekali dengan munculnya bencana alam. Hal tersebutlah yang dapat menjadi salah satu gangguan besar dalam arus barang dan jasanya.

Beberapa langkah yang dilakukan BI adalah dengan interest Rate Swap yang dibutuhkan investor sebagai acuan skema investasi jangka panjang, juga menyediakan Foreign Exchange Swap dengan harga rendah. Indonesia memiliki potensi dan harapannya untuk memperkenalkan ke kancah dunia. Tidak hanya besar di jumlah penduduk, namun juga memiliki banyak sekali potensi yang siap digali dan dimanfaatkan. Namun, diperlukan penghubung yang baik secara fisik, ekonomi, dan pembiayaannya. Dengan kata lain, infrastruktur adalah kuncinya

Di level nasional, Ekonomi dan perdagangan dunia pada tahun 2022 ini masih diproyeksikan tumbuh positif, meskipun masih dibayangi dengan risiko dan tantangan seperti krisis energi, disrupsi rantai pasok, kenaikan inflasi, normalisasi kebijakan moneter, ketidakpastian geopolitik, dan perubahan iklim, serta dengan kemunculan varian Omicron.

Selanjutnya, indikator sektor eksternal Indonesia menunjukkan kondisi yang relatif baik dan terkendali, tercermin dari surplus transaksi berjalan, cadangan devisa yang terus meningkat, ekspor impor yang naik signifikan, yield obligasi Pemerintah yang melandai, nilai tukar rupiah dan IHSG yang menguat, dan rasio Utang Luar Negeri Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto masih berada dalam level aman.

Indikator sosial juga mulai menunjukkan perbaikan seiring dengan teratasinya dampak negatif pandemi Covid-19. Berbagai program pemulihan ekonomi telah mendorong penurunan pada tingkat kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan yang sempat meningkat signifikan di tahun 2020.

Melalui APBN 2022, Pemerintah juga terus berkomitmen meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia melalui alokasi anggaran pendidikan sebesar Rp542,8 T. Dari sisi kebijakan ekonomi, Program PEN juga terus dilanjutkan pada tahun 2022 dengan anggaran sebesar Rp455,62 triliun dan akan didorong untuk front-loading pada awal tahun 2022. Sejumlah kebijakan Insentif Fiskal dan





Perlindungan Sosial juga telah dirancang untuk mengakselerasi momentum pemulihan ekonomi nasional di Kuartal I - 2022.

Di level regional, sektor pertanian masih merupakan sektor yang diunggulkan untuk wilayah Pulau Madura karena empat kabupaten yang ada, sektor pertanian merupakan sektor basis dan selama periode analisis sektor tersebut mempunyai kontribusi yang besar terhadap pembentukan PDRB. Dengan kata lain sektor pertanian mempunyai kemampuan terhadap peningkatan perekonomian di tiap kabupaten. Sejalan dengan hal tersebut untuk kedepannya suatu kebijakan yang pro pertanian yang selalu diarahkan pada penerapan sistem agribisnis terpadu dengan memanfaatkan secara optimal sumberdaya pertanian. Dengan adanya kebijakan tersebut diharapkan bisa mengembangkan pertanian yang tangguh dengan meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani melalui peningkatan produktifitas tenaga kerja.





Laporan Survei Indikator Survei Ekonomi Indonesia (ISEI) Index Cabang: Makassar

Tim Penyusun:

Ketua Cabang/Ketua Tim : Dr. Sultan Suhab, SE., MS.

Anggota:

1. Randi Kurniawan, SE., M.Sc.
2. Salman Samir, SE., M.Sc.
3. Rakhmat Nurul Prima Nugraha, SE., M.Sc.
4. Diah Astrini Amir, SE., M.Sc.

Ringkasan Eksekutif

Secara umum anggota ISEI Cabang Makassar mempunyai ekspektasi yang lebih baik terhadap perekonomian nasional dan daerah pada tiga bulan mendatang dibanding kondisi saat ini. Di tingkat nasional, ekspektasi perekonomian akan membaik tercermin pada prediksi terhadap indikator pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, dan tingkat inflasi yang lebih baik pada tiga bulan ke depan dibanding saat ini. Di tingkat daerah, Provinsi Sulawesi Selatan, meskipun perekonomian secara umum diprediksi lebih baik, tetapi indikator pertumbuhan ekonomi dinilai cenderung stagnan. Adapun tingkat pengangguran dan tingkat inflasi diprediksi akan lebih baik sejalan dengan kondisi di tingkat nasional.

Meskipun kondisi perekonomian dinilai semakin membaik, anggota ISEI Cabang Makassar memiliki persepsi terkait tantangan ekonomi terbesar saat ini dan tiga bulan ke depan, baik di tingkat nasional maupun daerah. Lima tantangan utama perekonomian nasional saat ini adalah kenaikan suku bunga kredit, pertumbuhan investasi yang melambat, gejolak dan kondisi politik dalam negeri, volatilitas kurs, serta ketersediaan bahan pokok yang terbatas. Lebih lanjut, prediksi tiga bulan ke depan menunjukkan beberapa tantangan utama, yakni kenaikan suku bunga kredit, gejolak dan kondisi politik dalam negeri, defisit APBN, pertumbuhan investasi yang melambat, dan volatilitas kurs. Dengan demikian, isu kenaikan suku bunga kredit masih merupakan tantangan utama yang dihadapi saat ini dan tiga bulan ke depan di tingkat nasional. Adapun di Provinsi Sulawesi Selatan, lima tantangan utama saat ini masih sama dengan tantangan yang akan dihadapi tiga bulan ke depan, yaitu volatilitas kurs, kenaikan suku bunga kredit, gejolak dan kondisi politik dalam negeri, pertumbuhan investasi yang melambat, dan defisit APBD.

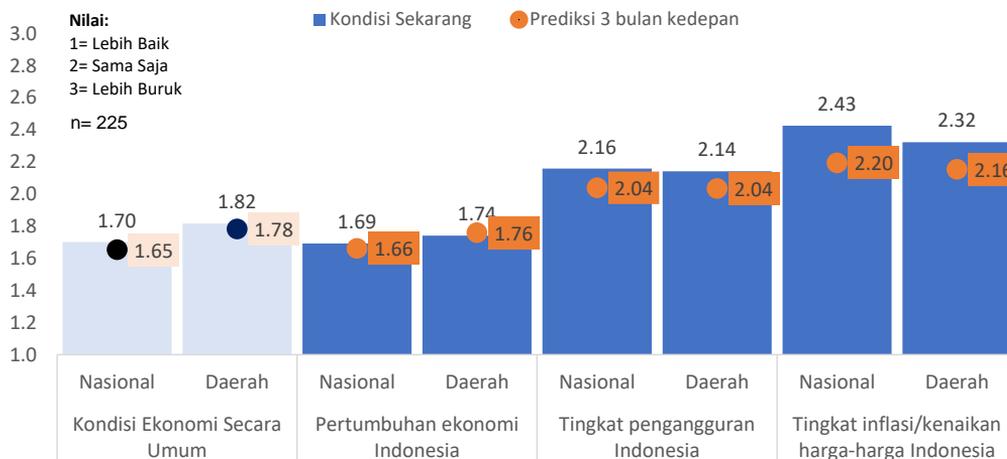
Namun, anggota ISEI Cabang Makassar memiliki persepsi terhadap kemampuan pemerintah pusat dan daerah dalam penanganan sejumlah isu. Di tingkat nasional, pemerintah pusat dinilai mampu menyediakan dan merawat infrastruktur, menciptakan rasa aman dan tenteram, meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan human capital (termasuk peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan peningkatan kesehatan masyarakat), dan memperbaiki sistem logistik untuk kelancaran distribusi. Adapun di tingkat daerah, pemerintah provinsi dinilai mampu menciptakan rasa aman dan tenteram, memperbaiki sistem logistik untuk kelancaran distribusi, menstabilkan harga barang dan jasa serta menjamin ketersediaan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat, meningkatkan human capital (termasuk peningkatan sumberdaya manusia yang berkualitas dan peningkatan kesehatan masyarakat), meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan menciptakan lapangan kerja.





Ekspektasi Ekonomi

Grafik 1. Ekspektasi Kondisi Ekonomi Cabang Makassar



Analisa:

Hasil survei terhadap 225 anggota ISEI Cabang Makassar menunjukkan ekspektasi terhadap kondisi perekonomian secara umum, baik di tingkat nasional maupun daerah akan membaik dalam tiga bulan ke depan dibandingkan dengan kondisi saat ini. Perbaikan kondisi perekonomian secara umum di tingkat nasional erat kaitannya dengan berlanjutnya momentum pemulihan ekonomi yang ditandai dengan relaksasi mobilitas masyarakat dan dunia usaha yang berdampak pada peningkatan konsumsi dan investasi, serta percepatan vaksinasi dan penanganan COVID-19. Momentum pemulihan ekonomi tidak hanya membawa optimisme di tingkat nasional, tapi juga di level pemerintah provinsi, khususnya di Sulawesi Selatan. Perekonomian Sulawesi Selatan juga diprediksi semakin membaik seiring dengan berlanjutnya kebijakan stimulus untuk rumah tangga dan dunia usaha yang diperkirakan bisa meningkatkan konsumsi rumah tangga dan investasi dunia usaha. Relaksasi pembatasan aktivitas masyarakat dan penanganan COVID-19 yang relatif terkendali di daerah juga turut mendorong peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat.

1. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Jika dilihat dari masing-masing indikator utama perekonomian, anggota ISEI Cabang Makassar memprediksi pertumbuhan ekonomi nasional akan membaik dalam tiga bulan ke depan, sedangkan pertumbuhan ekonomi daerah cenderung





stagnan dalam tiga bulan ke depan. Berdasarkan laporan BPS Agustus 2022, pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan II tahun 2022 mencapai 5,44 persen (*y-o-y*) dan 3,72 persen (*q-t-q*). Secara tahunan, pertumbuhan ekonomi dari sisi sektoral didorong oleh lapangan usaha transportasi dan pergudangan yang tumbuh 21,27 persen, sedangkan dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi berasal dari ekspor barang dan jasa yang tumbuh 19,74 persen. Adapun secara triwulanan, pertumbuhan ekonomi sektoral didorong oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan yang tumbuh sebesar 13,15 persen, sedangkan dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi berasal dari konsumsi pemerintah yang tumbuh sebesar 32 persen.

Prediksi pertumbuhan ekonomi nasional yang semakin membaik seiring dengan membaiknya kinerja konsumsi rumah tangga, investasi, dan ekspor. Kondisi ini diperkirakan akan terus berlanjut dalam tiga bulan ke depan seiring dengan momentum pemulihan ekonomi nasional. Konsumsi rumah tangga secara nasional diperkirakan akan terus meningkat sejalan dengan ekspektasi konsumen terhadap perkiraan kondisi ekonomi 6 bulan ke depan yang terpantau tetap kuat. Hal ini tercermin dari Indeks Ekspektasi Kondisi Ekonomi (IEK) Juni 2022 sebesar 141,8 atau masih di atas 100 (level optimis). Menurut Bank Indonesia, ekspektasi konsumen terhadap kondisi ekonomi ke depan yang masih relatif tinggi ditopang terutama oleh peningkatan ekspektasi konsumen terhadap penghasilan ke depan dan ketersediaan lapangan pekerjaan.

Sementara di Sulawesi Selatan, pertumbuhan ekonomi diprediksi cenderung stagnan karena kontraksi belanja pemerintah hingga triwulan III diperkirakan akan berlanjut, serta ancaman perlambatan ekspor daerah seiring dengan pelemahan ekonomi global dan normalisasi harga komoditas. Berdasarkan laporan BPS, perekonomian Sulawesi Selatan tumbuh 5,18 persen (*y-o-y*) dan 8,38 persen (*q-t-q*). Secara tahunan, pertumbuhan ekonomi didorong oleh lapangan usaha transportasi dan pergudangan yang tumbuh 26,42 persen, sedangkan dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi berasal dari komponen ekspor barang dan jasa yang tumbuh sebesar 44,11 persen. Namun persepsi terhadap pertumbuhan ekonomi di masa mendatang relatif tertahan dengan perlambatan kinerja ekspor luar negeri Sulawesi Selatan sejalan dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi global dan volume perdagangan dunia,





yang salah satu penyebabnya bersumber dari ketegangan antara Rusia dengan Ukraina (Bank Indonesia, 2022).

2. Tingkat Pengangguran

Sejalan dengan prediksi kinerja pertumbuhan ekonomi yang semakin membaik di tingkat nasional, anggota ISEI Cabang Makassar memprediksi tingkat pengangguran di level nasional akan menurun. Penurunan tingkat pengangguran ditopang oleh semakin meningkatnya aktivitas ekonomi di berbagai sektor ekonomi, terutama sektor pertanian, kehutanan dan perikanan; sektor industri pengolahan; dan sektor perdagangan, reparasi mobil, dan motor yang masing-masing tumbuh sebesar 1,37 persen, 4,01 persen, dan 4,42 persen (y-o-y) pada triwulan II 2022. Ketiga sektor ini juga memiliki peran dominan terhadap pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) dengan kontribusi masing-masing sebesar 14,29 persen, 19,29 persen, dan 13,08 persen, serta peran terhadap laju pertumbuhan PDB dengan kontribusi masing-masing sebesar 0,19 persen, 0,82 persen, dan 0,58 persen. Lebih lanjut, ketiga sektor ini juga berperan penting dalam penyerapan tenaga kerja dengan kontribusi masing-masing sebesar 29,96 persen, 13,77 persen, dan 19,03 persen. Dengan melihat tren pertumbuhan yang konsisten positif pada ketiga sektor ini pada triwulan I dan II tahun 2022, maka diperkirakan masih terjadi pertumbuhan positif pada triwulan III tahun 2022. Dengan tren pertumbuhan positif tersebut, penyerapan tenaga kerja juga akan semakin meningkat, dan pada akhirnya akan menurunkan tingkat pengangguran.

Lebih lanjut, tingkat pengangguran di Sulawesi Selatan juga diperkirakan akan membaik, meskipun pertumbuhan ekonomi diprediksi cenderung stagnan. Persepsi mengenai kondisi lapangan kerja yang semakin membaik tiga bulan ke depan di daerah erat kaitannya dengan pemulihan sejumlah sektor-sektor ekonomi yang paling terdampak negatif oleh pandemi COVID-19, seperti penyediaan akomodasi dan makanan minuman; transportasi dan pergudangan; dan industri pengolahan. Pada triwulan II tahun 2021, ketiga sektor ini masing-masing tumbuh sebesar 26,42 persen, 14,93 persen, dan 13,26 persen (y-o-y). Pemulihan sektor-sektor ini tentunya akan berpengaruh positif pada penyerapan tenaga kerja, meskipun masih relatif kecil pengaruhnya pada pertumbuhan ekonomi sebab kontribusi dari masing-masing sektor tersebut terhadap pembentukan PDRB juga relatif kecil, terutama penyediaan akomodasi dan makanan minuman (1,25 %) dan transportasi dan pergudangan (3,9 %). Hanya





sektor industri pengolahan yang berkontribusi besar terhadap nilai PDRB, yakni 12,5 persen. Lebih lanjut, peran terhadap pertumbuhan PDRB juga relatif kecil, terutama pada penyediaan akomodasi dan makanan dan minuman (0,18 %) dan transportasi dan pergudangan (0,77 %). Hanya industri pengolahan yang berkontribusi besar terhadap pertumbuhan PDRB, yakni 1,59 persen. Dari sisi penyerapan tenaga kerja, hanya sektor industri pengolahan yang berkontribusi cukup besar, yakni 7,77 persen, sedangkan penyediaan akomodasi dan makanan minuman dan transportasi dan pergudangan masing-masing hanya sebesar 4,08 persen dan 4,88 persen. Walaupun dua sektor terakhir relatif rendah kontribusinya terhadap penyerapan tenaga kerja, tetapi pemulihan yang terjadi pasca terdampak COVID-19 akan memberikan efek signifikan pada penyerapan tenaga kerja. Hal ini pula yang memberikan efek psikologis munculnya persepsi terhadap terjadinya penurunan pengangguran di masa mendatang, meskipun pertumbuhan ekonomi diroyeksikan cenderung stagnan.

3. Tingkat Inflasi

Lebih lanjut, meskipun tingkat inflasi akhir-akhir ini menunjukkan peningkatan, anggota ISEI Cabang Makassar mempunyai ekspektasi terjadinya penurunan inflasi dalam tiga bulan ke depan, baik di tingkat nasional maupun daerah. Secara nasional, data BPS menunjukkan tingkat inflasi tahun kalender (Januari – Juli 2022) sebesar 3,85 persen dan tingkat inflasi tahun ke tahun (Juli 2022 terhadap Juli 2021) sebesar 4,94 persen. Sejak Januari hingga Juli 2022, inflasi tahun ke tahun menunjukkan tren peningkatan. Hal ini sejalan dengan peningkatan aktivitas konsumsi masyarakat yang mendorong tingginya permintaan terhadap komoditas, khususnya pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Selain itu, pengaruh risiko global akibat dari dampak terganggunya rantai pasok global turut berkontribusi terhadap terjadinya inflasi impor (*imported inflation*). Tren peningkatan inflasi ini juga terjadi di Sulawesi Selatan, dimana tingkat inflasi tahun kalender (Januari – Juli 2022) sebesar 4,07 persen dan tingkat inflasi tahun ke tahun (Juli 2022 terhadap Juli 2021) sebesar 4,99 persen. Sejak Januari hingga Juli 2022, inflasi tahun ke tahun menunjukkan tren peningkatan. Sejalan dengan peningkatan inflasi di tingkat nasional, kontribusi dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau juga menduduki urutan kenaikan indeks tertinggi, yakni 1,53 persen.





Namun, ekspektasi anggota ISEI Cabang Makassar terhadap penurunan inflasi ini seiring dengan telah berlalunya Hari Besar Keagamaan dan mulai meningkatnya perhatian pemerintah dan *stakeholders* untuk menjaga stabilitas harga agar tetap berada dalam rentang sasaran inflasi nasional, yakni sebesar 3 ± 1 persen. Bank Indonesia bersama dengan Tim Pengendali Inflasi, baik di tingkat nasional maupun provinsi, diyakini akan terus bersinergi untuk menjaga stabilitas harga dan pengendalian inflasi melalui berbagai instrumen kebijakan.

Persepsi Tantangan Ekonomi

Tabel 1. Lima Tantangan Ekonomi Terbesar dari Cabang Makassar

Di Tingkat Nasional		Di Tingkat Daerah	
Kondisi Saat ini	Prediksi 3 Bulan Kedepan	Kondisi Saat ini	Prediksi 3 Bulan Kedepan
1. Kenaikan suku bunga kredit	1. Kenaikan suku bunga kredit	1. Volatilitas kurs	1. Volatilitas kurs
2. Pertumbuhan investasi yang melambat	2. Gejolak dan kondisi politik dalam negeri	2. Kenaikan suku bunga kredit	2. Kenaikan suku bunga kredit
3. Gejolak dan kondisi politik dalam negeri	3. Defisit APBN	3. Gejolak dan kondisi politik dalam negeri	3. Gejolak dan kondisi politik dalam negeri
4. Volatilitas kurs	4. Pertumbuhan investasi yang melambat	4. Pertumbuhan investasi yang melambat	4. Pertumbuhan investasi yang melambat
5. Ketersediaan bahan pokok yang terbatas	5. Volatilitas kurs	5. Defisit APBN	5. Defisit APBN

Analisa:

1. Persepsi Tantangan Ekonomi di Tingkat Nasional: Kondisi Saat Ini vs Prediksi Tiga Bulan Kedepan

Dari hasil tabulasi data terkait persepsi tantangan ekonomi, anggota ISEI Cabang Makassar melihat bahwa kenaikan suku bunga kredit menjadi tantangan yang paling utama hingga tiga bulan kedepannya bagi perekonomian nasional. Sejumlah isu lainnya terkait tren perlambatan pada pertumbuhan investasi, instabilitas iklim politik nasional, dan volatilitas kurs juga diprediksi masih akan mewarnai tantangan perekonomian nasional hingga satu triwulan kedepan. Namun setidaknya, permasalahan terkait ketersediaan bahan pokok yang sempat melanda di awal tahun 2022 diprediksi akan berakhir di pertengahan tahun ini. Tantangan baru bagi perekonomian nasional untuk tiga bulan berikutnya akan lebih ditekankan pada defisit APBN.

Eksposur dari sektor keuangan masih menjadi tantangan yang paling serius bagi perekonomian nasional. Terkhusus untuk kenaikan suku bunga kredit, hal ini diprediksikan masih akan menjadi tantangan paling utama hingga paling tidak





tiga bulan kedepannya. Belum lama ini, Bank Indonesia berencana untuk menaikkan tingkat Giro Wajib Minimum (GWM) secara ekspansif. Per 1 Juni 2022, kewajiban GWM untuk Bank Umum Konvensional (BUK) dinaikkan menjadi 6,0 persen yang sebelumnya sebesar 5,0 persen. Rencana peningkatan GWM ini menjadi sinyal adanya rencana Bank Indonesia untuk menaikkan tingkat suku bunga kredit untuk menyerap likuiditas yang ada pada sektor perbankan. Hal ini dikhawatirkan akan menimbulkan kontraksi bagi geliat pelaku usaha. Sentimen negatif serupa terhadap perekonomian nasional juga berpotensi ditimbulkan dari aktivitas perdagangan di pasar mata uang. Adanya penguatan secara substansial terhadap perekonomian AS membuat nilai Dollar menjadi semakin kuat, mengakibatkan nilai tukar Rupiah yang semakin tergerus. Pelemahan nilai tukar Rupiah ini akan berakibat pada meningkatnya biaya operasional bagi pelaku usaha di dalam negeri, dan tentu saja akan semakin mengurangi daya saing produk lokal yang diekspor ke luar negeri apabila produksinya memerlukan input yang dihadirkan dari pasar luar negeri. Tantangan yang ditimbulkan oleh volatilitas nilai tukar Rupiah ini diperkirakan akan bertahan hingga tiga bulan kedepan.

Melambatnya laju pertumbuhan investasi di Indonesia juga menjadi salah satu tantangan utama bagi perekonomian nasional. Meskipun data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menunjukkan tren realisasi penanaman modal yang terus memperlihatkan peningkatan dalam kurun lima tahun terakhir, adanya transisi dari masa pandemi di tahun 2022 dikhawatirkan dapat memperlambat laju pembentukan modal tersebut. Hal ini sejalan dengan adaptasi yang masih diberlakukan pada beberapa negara yang kemudian dapat berpotensi menghambat mobilitas penanaman modal asing (PMA).

Selanjutnya, adanya situasi politik nasional dan global yang cukup memanas juga menjadi salah satu poin tantangan bagi perekonomian. Hal ini diperkirakan masih akan bertahan hingga tiga bulan kedepannya. Di level nasional, hal ini ditandai dengan dimulainya manuver yang dilakukan oleh sejumlah partai dan tokoh politik dalam mempersiapkan perhelatan Pemilu serentak di tahun 2024. Pemilu 2024 menjadi Pemilu yang lebih berpotensi memberikan efek *uncertainty* bagi perekonomian dikarenakan pada tahun 2024, seluruh Pilkada dan Pemilu akan dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia, mencakup pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Gubernur dan Wakil Gubernur,





hingga Bupati/Walikota. Konstelasi politik di level nasional akan melibatkan sejumlah kepentingan elite dan pemegang kepentingan dalam jumlah yang tidak sedikit, sehingga akan sangat memungkinkan terjadinya *conflict of interest*, termasuk dalam hal perumusan kebijakan ekonomi. Di level internasional, situasi politik global yang masih memanas disebabkan konflik Rusia-Ukraina juga masih menjadi salah satu tantangan perekonomian. Perang Rusia-Ukraina telah menyebabkan disrupsi bagi kestabilan rantai pasok global, dan pada akhirnya menyebabkan krisis dan naiknya harga sejumlah komoditas pangan.

Tantangan terakhir di level nasional terkait dengan ketersediaan bahan pokok yang terbatas. Isu terkait ketersediaan sejumlah komoditas pokok menjadi suatu isu yang memerlukan penanganan khusus, terlebih ketika krisis minyak goreng melanda Indonesia di awal tahun 2022. Sejumlah faktor menjadi penyebab kelangkaan minyak goreng tersebut, dimulai dari meningkatnya harga minyak nabati di pasar dunia, dugaan praktik mafia/kartel, hingga faktor *force majeure* seperti perang Rusia-Ukraina yang akhirnya berdampak pada kestabilan harga dunia pada sejumlah komoditas. Namun, memasuki pertengahan tahun 2022, suplai minyak goreng telah kembali berada di level yang cukup memadai, dan menurut persepsi anggota ISEI Cabang Makassar, hal ini sudah tidak akan menjadi satu permasalahan lagi untuk tiga bulan yang akan datang.

Tantangan baru bagi perekonomian nasional untuk tiga bulan kedepannya kini terkait dengan defisit APBN. Diketahui bahwa realisasi defisit anggaran di tahun 2021 mencapai sekitar Rp775 Triliun, dan untuk tahun anggaran 2022, diprediksi akan mencapai Rp732,2 Triliun atau sekitar 3,9 persen dari total nilai produk domestik bruto. Tren defisit pada APBN ini dikhawatirkan akan menambah jumlah utang negara, dan berimplikasi pada meningkatnya beban pembayaran utang di masa yang akan datang.

2. Persepsi Tantangan Ekonomi di Tingkat Daerah: Kondisi Saat Ini vs Prediksi Tiga Bulan Kedepan

Sementara itu, pada level perekonomian daerah, anggota ISEI Cabang Makassar menilai bahwa variasi tantangan yang dihadapi saat ini akan cenderung bersifat konstan, paling tidak hingga tiga bulan kedepannya. Terdapat lima tantangan utama bagi perekonomian daerah untuk satu triwulan ke depan. Dua tantangan yang berada pada posisi teratas terkait dengan aktivitas di sektor keuangan, yakni





secara berturut-turut: volatilitas kurs dan peningkatan suku bunga kredit. Setelah itu, kondisi instabilitas politik dan juga iklim investasi yang cenderung melambat berturut-turut menjadi dua tantangan utama lainnya bagi perekonomian daerah, disamping defisit APBD yang kemudian menempati posisi ke-lima.

Pergerakan Rupiah yang semakin fluktuatif akan menyebabkan ketidakstabilan pada aktivitas ekspor dan impor, dan pada akhirnya akan menyebabkan sentimen negatif pada kinerja perekonomian daerah. Pelemahan nilai tukar Rupiah akan menyebabkan naiknya biaya produksi bagi aktivitas perekonomian daerah, sehingga mengurangi *competitiveness* dari produk yang dihasilkan. Diketahui bahwa sejumlah aktivitas ekspor untuk komoditas unggulan Sulawesi Selatan seperti nikel, kakao, biji-bijian berminyak, rumput laut, maupun sejumlah hasil laut dan pertanian lainnya memerlukan input berupa bahan bakar mineral dan pupuk, dimana notabene-nya, kedua komoditas tersebut merupakan komoditas impor utama oleh Sulawesi Selatan. Kinerja perdagangan Rupiah di pasar mata uang masih memperlihatkan adanya indikasi tekanan yang disebabkan oleh tren penguatan mata uang Dollar AS. Tekanan dari sisi volatilitas kurs ini diprediksi akan tetap bertahan hingga tiga bulan kedepan.

Dari sisi suku bunga perbankan, tren kenaikan suku bunga kredit dikhawatirkan akan memperlambat laju pertumbuhan usaha. Peningkatan suku bunga kredit akan menyebabkan naiknya biaya (bunga) pinjaman bagi pelaku usaha, yang pada akhirnya akan menyebabkan lonjakan pada biaya operasional yang harus ditanggung oleh setiap pemilik usaha. Berdasarkan Laporan Perekonomian Sulawesi Selatan yang dirilis oleh Bank Indonesia, kinerja pertumbuhan kredit perbankan di Sulawesi Selatan sempat mengalami perlambatan di Triwulan-IV 2021, sebelum akhirnya kembali menunjukkan performa pertumbuhan yang membaik di Triwulan-I 2022. Untuk menjaga tren perbaikan ini, tingkat suku bunga kredit perlu dijaga pada kisaran yang cukup *fair*, dengan tidak memperlihatkan pola peningkatan yang signifikan.

Adanya situasi perpolitikan regional yang kurang kondusif juga menjadi salah satu tantangan bagi perekonomian. Hal ini ditunjukkan dengan adanya pergerakan yang terlihat cukup terstruktur demi menggalang massa pada suksesi politik yang nantinya akan dilaksanakan di Kota Makassar maupun Sulawesi Selatan dua tahun yang akan datang (2024). Diketahui bahwa sejumlah elite politik telah mempersiapkan manuver politik untuk menyongsong pesta demokrasi tersebut,





dan hal ini juga melibatkan sejumlah petahana, atau pejabat publik yang saat ini masih berstatus aktif. Akibatnya, situasi ini dapat berpotensi menimbulkan ketidakpastian ekonomi, baik di Sulawesi Selatan maupun Makassar secara lebih spesifik. Ekspektasi keadaan ekonomi dan bisnis ke depannya masih sangat sensitif terhadap kondisi pencatutan politik di kedua wilayah.

Tantangan selanjutnya bagi perekonomian daerah menurut persepsi anggota ISEI Cabang Makassar adalah laju pertumbuhan realisasi investasi yang melambat. Meskipun menurut catatan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), realisasi investasi Triwulan-II di Sulawesi Selatan meningkat dua kali lipat dibandingkan Triwulan-I, pertumbuhan realisasi pembentukan modal di Sulawesi Selatan dikhawatirkan akan mengalami perlambatan seiring dengan masih berjalannya sejumlah kebijakan terkait transisi di masa pasca pandemi.

Dari sisi eksposur keuangan daerah, adanya defisit pada realisasi APBD Sulawesi Selatan dan Kota Makassar juga menurut Anggota ISEI Cabang Makassar masih harus menjadi poin perhatian yang cukup serius. Pasalnya, pada tahun 2021, APBD Pemprov Sulsel mencatatkan defisit sebesar Rp157,8 miliar, sedangkan postur APBD Kota Makassar yang disepakati untuk tahun anggaran 2022 juga mencatatkan defisit sebesar kurang lebih Rp500 miliar. Hal ini dapat menjadi salah satu indikasi rendahnya tingkat kemampuan daerah untuk menghasilkan pendapatan asli daerah yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan belanja regional. Selain itu, kondisi ini juga memberikan satu pertanyaan yang cukup serius terkait rasionalisasi dari kebutuhan belanja di setiap daerah dengan mempertimbangkan asas manfaat dari pengelolaan belanja tersebut.

Persepsi Kemampuan Pemerintah

Tabel 2. Top-5 Persepsi Kemampuan Pemerintah berdasarkan cabang Makasar

Pemerintah Pusat	Pemerintah Daerah
1. Menyediakan dan merawat infrastruktur	1. Menciptakan rasa aman dan tenteram
2. Menciptakan rasa aman dan tenteram	2. Perbaiki sistem logistik untuk kelancaran distribusi
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan menciptakan lapangan kerja	3. Menstabilkan harga barang dan jasa serta menjamin ketersediaan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat
4. Peningkatan human capital (termasuk peningkatan sumberdaya manusia yang berkualitas dan peningkatan kesehatan masyarakat)	4. Peningkatan human capital (termasuk peningkatan sumberdaya manusia yang berkualitas dan peningkatan kesehatan masyarakat)
5. Perbaiki sistem logistik untuk kelancaran distribusi	5. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan menciptakan lapangan kerja





Analisa:

1. Persepsi Kemampuan Pemerintah Pusat

Persepsi anggota ISEI Cabang Makassar sebagian besar yakin terhadap kemampuan Pemerintah Pusat antara lain sebagai berikut. Pertama, menyediakan dan merawat infrastruktur. Penyediaan dan kualitas infrastruktur dasar di Indonesia yang menjadi prioritas bagi pembangunan mengalami perbaikan dalam beberapa tahun terakhir. Akses rumah tangga di Indonesia terhadap air bersih dan sanitasi layak terus meningkat. Dalam kurun lima tahun terakhir, akses rumah tangga terhadap air bersih meningkat dari 71,27 persen pada tahun 2017 menjadi 75,98 persen pada tahun 2020. Dalam akses sanitasi layak, juga meningkat dari 92,57 persen menjadi 94,51 persen. Selanjutnya, rasio elektrifikasi (proporsi rumah tangga dengan akses terhadap listrik) meningkat pesat selama 2017-2021 menjadi 99,21 persen. Dalam aspek infrastruktur TIK, keberadaan “Palapa Ring” dapat secara signifikan meningkatkan kondisi infrastruktur TIK. Perbaikan infrastruktur TIK merupakan basis penting bagi pengembangan digital ekonomi. Dukungan Pemerintah Pusat dalam menyediakan infrastruktur tercermin dari realisasi anggaran infrastruktur tahun 2021 mencapai Rp402,8 triliun, tumbuh 31,1 persen dibandingkan tahun 2020.

Kedua, menciptakan rasa aman dan tenteram. Kinerja Pemerintah Pusat dalam menciptakan rasa aman dan tenteram menunjukkan perbaikan berarti. Skor indeks risiko penduduk terkena kejahatan menurun dari 113 per 100.000 penduduk di tahun 2018 menjadi 94 per 100.000 penduduk di tahun 2020. Jumlah kejahatan turun dari 294.281 kasus di tahun 2018 menjadi 247.218 kasus di tahun 2020. Persentase rumah tangga yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya naik dari 53,32 persen di tahun 2017 menjadi 62,80 persen di tahun 2020.

Ketiga, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Kinerja ekonomi Indonesia kembali menunjukkan perbaikan di triwulan II tahun 2022, yakni tumbuh sebesar 5,44 persen (y-o-y), lebih tinggi dibanding triwulan sebelumnya. Situasi ini menunjukkan masih terjaganya sisi permintaan dan penawaran hingga stabilnya inflasi di Indonesia. Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2022 di sekitaran 4,7 -5,5 persen,





dengan asumsi adanya dukungan kuat vaksinasi, pembukaan sektor ekonomi, dan stimulus kebijakan baik fiskal maupun moneter. Perbaikan kinerja ekonomi ini memberi sinyal baik bagi pasar tenaga kerja.

Keempat, peningkatan *human capital* (termasuk peningkatan sumberdaya manusia yang berkualitas dan peningkatan kesehatan masyarakat). Skor Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia tahun 2021 meningkat 0,35 poin dari tahun sebelumnya menjadi 72,29 poin. Dari aspek pendidikan, harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah masing-masing mengalami kenaikan sebesar 0,1 dan 0,06 poin. Selain itu, indeks inovasi global untuk sumberdaya manusia dan penelitian juga menunjukkan kenaikan dari 21,0 poin menjadi 22,4 poin. Situasi ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia dan penelitian mengalami perbaikan untuk mendukung inovasi di Indonesia. Dalam aspek kesehatan, kondisi kesehatan Indonesia mengalami perbaikan. Harapan hidup saat lahir meningkat dari 71,47 tahun di tahun 2020 menjadi 71,57 tahun pada tahun 2021. Kematian bayi telah berkurang. Pada tahun 2020, jumlah kematian bayi mencapai 25.652 orang di Indonesia, turun menjadi 25.256 di tahun 2021. Selain itu, terjadi penurunan yang signifikan angka *stunting* dan *wasting* di Indonesia. Pada tahun 2018, angka *stunting* mencapai 30,8 persen dan merupakan angka tertinggi dalam lima tahun terakhir, turun menjadi 24,4 persen di tahun 2021. Sementara angka *wasting* di tahun 2018 tercatat sebesar 10,2 persen turun menjadi 4,9 persen di tahun 2021. Dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan dan pendidikan saat ini, produktivitas tenaga kerja Indonesia dalam jangka panjang diperkirakan akan mengalami perbaikan.

Kelima, perbaikan sistem logistik untuk kelancaran distribusi. Peringkat logistik Indonesia membaik di 2020 (46) jika dibandingkan tahun 2016 yang berada di peringkat 63. Berbagai kebijakan Kementerian Perhubungan untuk mendorong perbaikan sistem logistik yakni subsidi angkutan penumpang, subsidi angkutan logistik, revitalisasi dan pembangunan infrastruktur transportasi untuk meningkatkan konektivitas transportasi di berbagai wilayah.

2. Persepsi Kemampuan Pemerintah Daerah

Selanjutnya, persepsi anggota ISEI Cabang Makassar sebagian besar yakin terhadap kemampuan Pemerintah Daerah antara lain sebagai berikut. Pertama, menciptakan rasa aman dan tenteram. Komitmen Pemerintah Daerah dalam





menciptakan rasa aman dan tenteram bagi masyarakat di Sulawesi Selatan semakin kuat. Skor risiko penduduk terkena kejahatan penduduk turun dari 255 per 100.000 penduduk di tahun 2018 menjadi 145 per 100.000 penduduk di tahun 2020. Persentase penyelesaian kejahatan meningkat dari 53,59 persen di tahun 2018 menjadi 82,97 persen di tahun 2020. Selain itu, persentase rumah tangga yang merasa aman berjalan sendiri di area tempat tinggalnya meningkat dari 48,28 persen di tahun 2017 menjadi 64,60 persen di tahun 2020.

Kedua, perbaiki sistem logistik untuk kelancaran distribusi. Upaya Pemerintah Daerah untuk memperbaiki sistem logistik terus meningkat. Pada tahun anggaran 2021, alokasi dana dalam penanganan jalan dan jembatan di Sulawesi Selatan sebesar Rp832,50 miliar. Infrastruktur jalan di Sulawesi Selatan mengalami penambahan jalan. Dari tahun 2015-2020 terjadi penambahan panjang jalan sebesar 515 km. Saat ini, Pemerintah Daerah terus melakukan pembangunan jalan terutama di wilayah kategori terisolir untuk meningkatkan kelancaran distribusi barang dan akses penduduk di wilayah tersebut.

Ketiga, menstabilkan harga barang dan jasa serta menjamin ketersediaan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat. Inflasi Sulawesi Selatan pada triwulan I 2022 lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yakni mencapai 2,69% (y-o-y). Penyumbang inflasi utama kelompok makanan, minuman, dan tembakau, Kelompok Transportasi; dan Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga. Komoditi penyumbang utama inflasi adalah minyak goreng dan daging ayam ras. Bank Indonesia memperkirakan inflasi ke depan tetap berada dalam rentang sasaran inflasi nasional sebesar $3,0 \pm 1\%$. Bank Indonesia bersama dengan TPID di Sulawesi Selatan tetap optimis dan terus bersinergi untuk menjaga stabilitas harga dan pengendalian inflasi, baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Keempat, peningkatan *Human Capital* (termasuk peningkatan sumberdaya manusia yang berkualitas dan peningkatan kesehatan masyarakat). IPM Sulawesi Selatan menunjukkan tren kenaikan dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2016, IPM Sulawesi Selatan tercatat sebesar 69,76 poin naik menjadi 71,93 poin. Rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah juga mengalami kenaikan. Angka partisipasi sekolah dari mulai usia 7-12 tahun hingga 19-24 tahun terus mengalami kenaikan. Dari aspek kesehatan, kualitas kesehatan dan gizi anak-anak di Sulawesi Selatan mengalami perbaikan. Angka harapan hidup saat lahir





naik dari 70,57 tahun menjadi 70,66 dari tahun 2020-2021. Pada tahun 2020, sekitar 30,59 persen anak balita yang mengalami *stunting*, lalu turun menjadi 27,40 persen pada tahun 2021. Pemerintah Daerah serius menangani isu *stunting* ini karena menghambat kemampuan anak untuk berprestasi baik di sekolah dan dalam jangka panjang menurunkan produktivitas mereka ketika memasuki pasar tenaga kerja.

Kelima, meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan menciptakan lapangan kerja. Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan pada triwulan II 2022 mencatatkan angka 5,18 persen, lebih tinggi dibanding triwulan sebelumnya. Pertumbuhan ini diperkirakan akan terus terjaga dengan upaya Pemerintah untuk membuka kembali sektor ekonomi, memperkuat vaksinasi, dan stimulus kebijakan fiskal daerah. Dari aspek ketenagakerjaan, melalui pembukaan kembali sektor ekonomi akan menyerap tenaga kerja hingga mengurangi angka pengangguran. Pada Februari 2022, angka pengangguran di Sulawesi Selatan turun 0,04 persen poin dari Februari 2021 menjadi 5,75 persen. Sektor usaha yang menyerap tenaga kerja terbesar yakni sektor transportasi dan perdagangan. Melalui dua indikator ini, anggota ISEI Cabang Makassar yakin Pemerintah Daerah mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan menciptakan lapangan kerja.





Laporan Survei Indikator Survei Ekonomi Indonesia (ISEI) Index Cabang: Manado

Tim Penyusun:

1. Joy Elly Tulung, SE., MSc., PhD
2. Bobby Hamenda, SE., MSi

Ringkasan Eksekutif

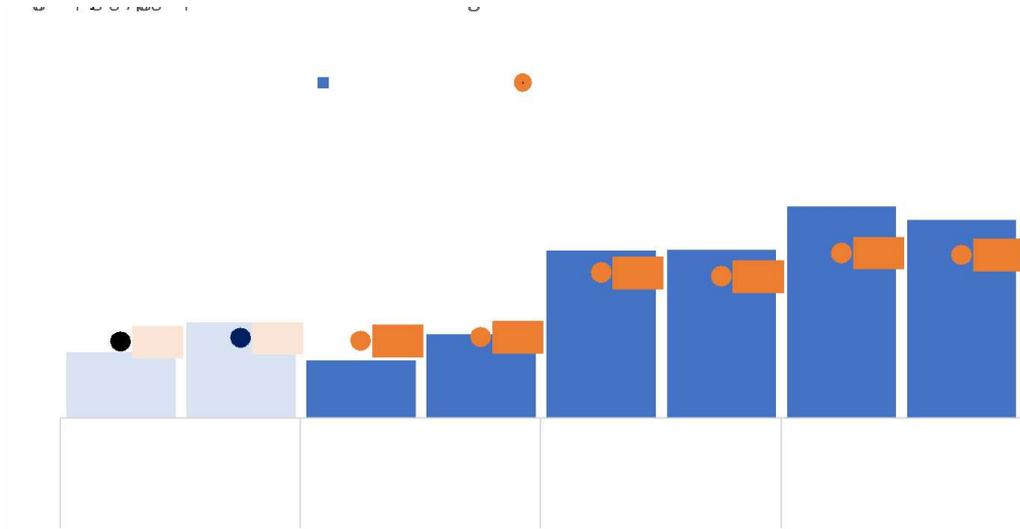
Dalam 3 bulan kedepan, Indonesia harus waspadaai terjadinya pertumbuhan investasi yang melambat, defisit APBN dan volatilitas kurs. Meskipun demikian, ekspektasi kondisi ekonomi Indonesia akan relative membaik 3 bulan mendatang dimana kondisi ekonomi dan pertumbuhan ekonomi meningkat sedangkan disaat yang sama tingkat pengangguran dan tingkat inflasi berangsur-angsur makin menurun.

Selanjutnya para ekonom daerah Manado yakin akan kemampuan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam meningkatkan *human capital* (termasuk peningkatan sumberdaya manusia yang berkualitas dan peningkatan Kesehatan masyarakat).





Ekspektasi Ekonomi



Analisa:

Secara umum, ekspektasi ekonomi 3 bulan kedepan baik yang ada di daerah maupun di tingkat nasional selalu lebih rendah dibandingkan dengan kondisi sekarang ini, kecuali pada kondisi ekonomi secara umum ($1.48 > 1.41$) dan pertumbuhan ekonomi di tingkat nasional mengalami sedikit lebih tinggi ($1.48 > 1.36$) dibandingkan prediksi 3 bulan kedepan.

Kondisi ekonomi secara umum diyakini akan makin membaik dalam 3 bulan kedepan di tingkat nasional dimana indeks saat ini 1.41 menjadi 1.48 di 3 bulan mendatang meskipun di tingkat daerah menurun dari 1.60 ke 1.50 pada 3 bulan kemudian.

Pada grafik 1 diatas, dapat dilihat dengan jelas bahwa penurunan tingkat pengangguran dan tingkat inflasi di 3 bulan kedepan terjadi di tingkat daerah dan tingkat nasional dan ini merupakan hal yang baik. Demikian juga pada pertumbuhan ekonomi dimana meskipun di tingkat daerah perbandingannya relatif sama/konstan, namun pada tingkat nasional lebih tinggi.





Persepsi Tantangan Ekonomi

Tabel 1. Lima Tantangan Ekonomi Terbesar dari Cabang Manado

Di Tingkat Nasional		Di Tingkat Daerah	
Kondisi Saat ini	Prediksi 3 Bulan Kedepan	Kondisi Saat ini	Prediksi 3 Bulan Kedepan
1. Kenaikan suku bunga kredit	1. Pertumbuhan investasi yang melambat	1. Volatilitas kurs	1. Volatilitas kurs
2. Pertumbuhan investasi yang melambat	2. Defisit APBN	2. Pertumbuhan investasi yang melambat	2. Pertumbuhan investasi yang melambat
3. Defisit APBN	3. Volatilitas kurs	3. Kenaikan suku bunga kredit	3. Kenaikan suku bunga kredit
4. Demand Daya beli masyarakat yang menurun	4. Kenaikan suku bunga kredit	4. Defisit APBN	4. Defisit APBN
5. Volatilitas kurs	5. Demand Daya beli masyarakat yang menurun	5. Gejala dan kondisi politik dalam negeri	5. Gejala dan kondisi politik dalam negeri

Analisa:

Menariknya, persepsi mengenai lima tantangan ekonomi terbesar di tingkat daerah Manado Sulawesi Utara secara konsisten tidak berubah baik pada kondisi saat ini maupun pada kondisi 3 bulan kedepan. Hal ini berbeda dengan persepsi serupa di tingkat nasional. Namun demikian, volatilitas kurs dan pertumbuhan investasi yang melambat adalah merupakan 2 tantangan yang perlu mendapatkan perhatian khusus bagi pemerintah karena baik tingkat nasional maupun tingkat daerah (Manado), masuk tantangan utama yang diprediksikan dalam 3 bulan kedepan.

Pada 3 bulan kedepan, tantangan ekonomi di tingkat nasional lebih fokus pada 3 hal yakni pertumbuhan investasi yang melambat, defisit APBN, dan volatilitas kurs. Nampak dengan jelas bahwa ketiga tantangan ini semuanya bergerak naik dari segi persepsi yang ada saat ini ke prediksi 3 bulan kedepan. Mungkin persepsi tersebut terbentuk karena kondisi harga minyak bumi yang terus naik di pasar internasional yang dapat meningkatkan *cost of production* bahkan inflasi sehingga pada gilirannya pertumbuhan investasi bisa melambat. Lebih jauh lagi, harga dari *fossil fuels* yang tinggi membuat subsidi BBM semakin besar dimana keuangan negara makin terbebani sehingga dapat mengakibatkan defisit APBN. Investasi yang melambat dapat saja menimbulkan *shock* pada permintaan dan penawaran domestik sehingga dapat mempengaruhi volatilitas kurs.

Pada kondisi sekarang kenaikan suku bunga kredit adalah merupakan hal yang dianggap paling menantang namun kemudian diprediksikan menjadi tidak begitu dkuatirkan dalam 3 bulan kedepan. Demikian juga mengenai persepsi demand daya beli masyarakat yang menurun.





Persepsi Kemampuan Pemerintah

Tabel 2. Top-5 Persepsi Kemampuan Pemerintah berdasarkan cabang Manado

Pemerintah Pusat	Pemerintah Daerah
1. Peningkatan human capital (termasuk peningkatan sumberdaya manusia yang berkualitas dan peningkatan kesehatan masyarakat)	1. Menciptakan rasa aman dan tenteram
2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan menciptakan lapangan kerja	2. Perbaiki sistem logistik untuk kelancaran distribusi
3. Perbaiki sistem logistik untuk kelancaran distribusi	3. Peningkatan human capital (termasuk peningkatan sumberdaya manusia yang berkualitas dan peningkatan kesehatan masyarakat)
4. Menciptakan rasa aman dan tenteram	4. Akselerasi pertumbuhan investasi
5. Menyediakan dan merawat infrastruktur	5. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan menciptakan lapangan kerja

Analisa:

Persepsi terhadap kemampuan pemerintah yang ada di pusat dan di daerah cukup berbeda.

Meskipun prediksi 3 bulan kedepan pertumbuhan investasi yang melambat di tingkat nasional, persepsi para ekonom Manado yakin pada kemampuan pemerintah pusat dalam peningkatan *human capital* (termasuk peningkatan sumberdaya manusia yang berkualitas dan peningkatan Kesehatan masyarakat) dan kemampuannya dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan menciptakan lapangan kerja.

Pada saat yang sama, pemerintah daerah yang ada di Manado Sulawesi Utara dipandang sangat mampu dalam menciptakan rasa aman dan tentram dan meyakini kemampuannya dalam memperbaiki sistem logistik demi kelancaran distribusi barang.





Laporan Survei Indikator Survei Ekonomi Indonesia (ISEI) Index Cabang: Mataram

Pengurus ISEI Cabang Mataram dalam periode 2020-2021 telah melakukan beberapa kegiatan di antaranya:

1. Pembentukan Komisariat
2. FGD Pengentasan Kemiskinan
3. Mengikuti Kegiatan Webinar
4. Mengikuti Acara Pelantikan PP-ISEI dan PI-ISEI Periode 2021-2024
5. Survei ISEI Index
6. Melakukan Riset (Kajian) Kecil tentang Dampak Covid-19 terhadap Perekonomian Daerah dan Agregasinya
7. Bekerjasama dengan Direktorat Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI

Adapun rincian dari kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pembentukan Komisariat

Pada kurun 2021-2022 telah dilakukan peninjauan untuk pembentukan satu komisariat ISEI di bawah Pengurus Cabang ISEI Mataram yaitu Komisariat Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Bima. Sampai saat ini Surat Keputusan Pengangkatan, Pengesahan, dan Penetapan Masa Jabatan Pengurus Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia Komisariat Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Bima belum dapat diterbitkan karena beberapa persoalan teknis yang harus diselesaikan di antaranya terkait dengan jumlah keanggotaan dan komposisinya.

2. Mengadakan Kegiatan Lokakarya dan Focus Group Discussion (FGD) untuk Pengentasan Kemiskinan

ISEI Cabang Mataram bekerja sama dengan Pemerintah Daerah NTB dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyelenggarakan beberapa kali Lokakarya dan Focus Group Discussion dalam rangka percepatan penurunan kemiskinan di NTB. Beberapa kegiatan FGD tersebut adalah:

- a. 25 Juni 2021: Lokakarya Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pencapaian Target Standar Pelayanan Minimal (SPM).





- b. 26 Agustus 2021: Lokakarya dan FGD Penanggulangan Kemiskinan dan Evaluasi Semester I Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2021.
 - c. 14 Oktober 2021: FGD Perumusan Strategi Pembentukan Gerakan Multipihak Penanggulangan Kemiskinan Provinsi NTB.
 - d. 21 Februari 2022: Lokakarya Evaluasi Capaian Program Penanggulangan Kemiskinan di NTB.
 - e. 30 Mei 2022: FGD Konsolidasi Data, Program/Kegiatan, dan Penguatan Kelompok Kerja Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) NTB Tahun 2022.
 - f. 7 Juli 2022: Rapat Koordinasi dalam rangka mengkoordinasikan dan mensinergikan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan antara Pemerintah Provinsi NTB, Pemerintah Kabupaten/Kota se-NTB dan Stakeholder lainnya.
3. Mengikuti Webinar dengan Pengurus Pusat ISEI dan Institusi Lain
- Pengurus Pusat ISEI bekerjasama dengan beberapa pihak menyelenggarakan Webinar dengan beragam tema. Kegiatan tersebut diikuti juga oleh banyak anggota ISEI Cabang Mataram karena Pengurus Cabang ISEI Mataram melakukan mobilisasi agar anggota menjadi peserta dalam kegiatan tersebut. Beberapa Webinar yang diikuti oleh Pengurus Cabang ISEI Mataram beserta anggota adalah:
- a. 6 Juli 2021: Webinar Diskusi Publik, Penguatan Sinergi Untuk Mengakselerasi Pemulihan Ekonomi Nasional di Era Digital; Sinergi dan Percepatan Pemulihan.
 - b. 28 Juli 2021: Diskusi Publik, Memperkuat Modalitas Dalam Rangka Implementasi Kebijakan Reformasi Struktural Untuk Menjaga Stabilitas Pertumbuhan.





- c. 31 Agustus 2021: Mengikuti Kongres ISEI XXI dan Seminar Nasional 2021, Peran ISEI dalam Penguatan Sinergi untuk Mengakselerasi Pemulihan Ekonomi Nasional di Era Digital.
- d. 31 Oktober 2021: Webinar Masa Depan Bank Digital di Indonesia.
- e. 25-26 Oktober 2021: The 7th International Islamic Monetary Economics and Finance Conference.
- f. 2-3 November 2021: BI Institute International Flagship Webinar dengan tema, “Accelerating Digital Transformation: Shaping Up The New Future”.
- g. 4 November 2021: The 8th East Java Economic Forum dengan tema, “Akselerasi Pemulihan Ekonomi dan Sosial Jawa Timur Pasca Pandemi Covid-19.
- h. 18 November 2021: LPPI Virtual Seminar ke-62: “Seri 3 Menuju Indonesia Emas 2045 Strategi Korporasi Berkelanjutan: Teknologi Informasi sebagai Pencipta Nilai”.
- i. 1 Desember 2021: ISIE, Kadin dan INBreek 2021-Hybrid Webinar dengan tema, “Tingkatkan Daya Saing Ekspor Indonesia; Kopi: Potensi dan Tantangan ke Depan”.
- j. 3 Desember 2021: Webinar Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, ShEFO 2022 Sharia Economic and Finance Outlook 2022.
- k. 6 Desember 2021: Seminar Riset Stabilitas Sistem Keuangan 2021, Dukungan Kebijakan Keuangan Hijau dalam Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan.
- l. 9 Desember 2022: Webinar Diskusi Publik dengan tema, “Menjadikan Jawa Timur sebagai Sentra Produksi Sapi Potong Nasional”.
- m. 9 Desember 2022: Kick Off Seminar High Level Discussion on the Presidency dengan tema, “Recover Together,





- Recover Stronger” dan Konferensi Pers Kick Off Presidensi G20 Indonesia di Jalur Keuangan/Finance Track.
- n. 13 Desember 2021: Book Launching and Research Expo Bank Indonesia; Central Bank Policy Mix: Issues, Challenges, and Policy Responses & Periphery and Small Ones Matter: Interplay of Policy and Social Capital.
 - o. 11 Januari 2022: International Webinar dengan tema, “Building a good-jobs economy through productivity-led structural transformation”.
 - p. 10 Februari 2022: LPPI Virtual Seminar dengan tema’ “Perlindungan Konsumen Terhadap Pinjol dan Investasi Ilegal”.
 - q. 17 Februari 2022: Seminar On Strategis Issues in G20: Exit Strategy and Scarring Effect Post Covid-19.
 - r. 25 Februari 2022: Webinar Nasional dengan tema, “Revitalisasi Jalur Rempah: Perspektif Ekonomi dan Maritim Indonesia”.
 - s. 20 Juni 2022: ISEI Jakarta Webinar Seri 1 dengan topik: “Investasi Berkelanjutan dan Perdagangan Karbon; Peluang dan Tantangan”.
 - t. 8 Juli 2022: Kuliah Umum Gubernur Bank Indonesia dengan topik, “Sinergi Untuk Menjaga Stabilitas dan Momentum Pemulihan Ekonomi yang Inklusif di Era Digital”.
 - u. 13-14 Juli 2022: International Seminar on Central Bank Policy Mix 2022 dengan tema, “Central Bank Policy Mix for Stability and Economic Recovery”.
 - v. 16 Juli 2022: Webinar BI-ISEI-Kafegama dengan topik: “Digital Finance to Support Financial Inclusion”.





4. Mengikuti Acara Pelantikan PP-ISEI dan PI-ISEI Periode 2021-2024

Pengurus ISEI Cabang Mataram dan Anggota mengikuti acara Pelantikan PP-ISEI dan PI-ISEI Periode 2021-2024 pada Jum'at, 29 Oktober 2021. Acara pelantikan dirangkaikan dengan Diskusi Publik dengan tema, "Sinergi Mengakselerasi Pemulihan Ekonomi, Mendukung Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan dan Inklusif.

5. Survei ISEI Index

Pengurus ISEI Cabang Mataram dan anggota telah mengikuti Survei ISEI mengenai ISEI Index: Indikator Survei Ekonomi Indonesia Semester II-2022. Keterlibatan anggota ISEI masih terbatas karena rentang waktu survei yang relatif singkat sehingga luput. Selain itu, pengurus cabang tidak memiliki instrument untuk memonitor perkembangan pengisian kuesioner sehingga kesulitan untuk mengetahui jumlah anggota yang telah mengisi survei tersebut.

Mengikuti Webinar bersama dengan Bappenas dalam rangka pendalaman hasil Evaluasi Pembangunan Daerah pada 24-26 Agustus 2020. Dalam kesempatan webinar ini ketua ISEI Cabang Mataram bertindak selaku narasumber dengan mempresentasikan hasil kajian terkait dengan Evaluasi Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat.

Bersama anggota dan pengurus ISEI Cabang Mataram mengikuti berbagai webinar yang diselenggarakan oleh Pengurus Pusat ISEI, Bank Indonesia, dan Pengurus Cabang ISEI yang bekerjasama dengan Bank Indonesia di berbagai daerah di Indonesia. Selain itu, pengurus cabang dan anggota ISEI juga mengikuti webinar yang diselenggarakan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji.

6. Melakukan Riset (Kajian) Kecil tentang Dampak Covid-19 terhadap Perekonomian Daerah dan Agregasinya

Pengurus Cabang ISEI bekerjasama dengan Bidang I Pengurus Pusat ISEI melakukan Kajian Kecil tentang Dampak COVID-19 terhadap Perekonomian Daerah pada bulan Juli-Agustus 2021. Riset ini ditujukan untuk melihat dampak COVID-19 terhadap perekonomian daerah dan prospek





perekonomian daerah ke depan. Riset ini merupakan kelanjutan dari riset serupa yang dilaksanakan tahun sebelumnya. Kali ini kajian tersebut melibatkan seluruh pengurus cabang ISEI di Indonesia. Hasil riset ini akan diintegrasikan ke level nasional untuk memetakan dampak Covid-19 di Indonesia dalam perspektif kedaerahan.

7. Bekerjasama dengan Direktorat Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI

Dalam rangka sosialisasi peran APBN dalam pembangunan nasional, Kementerian Keuangan Direktorat Perbendaharaan Bekerjasama dengan FEB Universitas Mataram dan ISEI Cabang Mataram bekerjasama menyelenggarakan seminar secara offline. Seminar ini bertema Treasury Goes to Campus dilaksanakan pada 15 September 2021 di Kampus FEB Unram. Dalam kegiatan ini ISEI Cabang Mataram diberikan tugas untuk menyampaikan paparan terkait dengan “Peranan APBN dalam Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi”. Kegiatan ini dihadiri oleh mahasiswa, dosen, dan civitas akademika lainnya.

Kemudian pada 31 Mei 2022, kegiatan dengan tema yang sama dilaksanakan lagi bertempat di Rektorat Universitas Mataram.

Penutup

Demikian beberapa kegiatan yang telah dilakukan oleh Pengurus Cabang ISEI Mataram. Sejalan dengan semakin membaiknya situasi pasca Pandemi Covid-19 Pengurus Cabang ISEI Mataram dapat melakukan berbagai kegiatan secara offline (luring) terutama dengan stakeholders di daerah. Adapun kegiatan di tingkat nasional dapat diikuti secara daring (online) sehingga jumlah kegiatan yang bisa diikuti oleh anggota ISEI di daerah relatif banyak. Pada kesempatan ini ISEI Pengurus Cabang Mataram menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ISEI Pengurus Pusat atas bimbingan, arahan, dan dukungan sumber daya yang telah diberikan kepada ISEI Pengurus Cabang Mataram sehingga semua kegiatan di atas dapat dilaksanakan dengan baik. Semoga Allah, Tuhan Yang Esa memberkahi segala upaya kita dalam berkontribusi membangun masyarakat dan bangsa. Aamiin YRA.





Laporan Survei Indikator Survei Ekonomi Indonesia (ISEI) Index Cabang: Medan

Tim Penyusun:

1. Dr. Fadli, S.E., M.Si
2. Paidi, S.E., M.Si
3. Ishbir Mujahid Adha, S.E., M.Si

Ringkasan Eksekutif

Ekspektasi ekonomi Kota Medan dirasakan saat ini dan 3 bulan ke depan cukup baik. Namun masyarakat menilai bahwa tingkat pengangguran dan inflasi yang terjadi saat ini tergolong memburuk. Meskipun demikian masyarakat tetap optimis kondisi ekonomi akan membaik dan kembali normal dalam tiga bulan kedepan. Tantangan utama yang dihadapi Kota Medan adalah gejolak politik serta volatilitas kurs yang membuat perekonomian sulit diprediksi. Pemerintah Kota Medan dipercaya memiliki kemampuan untuk meningkatkan human capital bahkan mampu menstabilkan harga-harga yang bergejolak dan mengakibatkan inflasi. Indikator survei ekonomi pada semester II 2022 ini menunjukkan banyak tantangan yang harus dihadapi demi meningkatkan perekonomian ke depannya, antara lain kondisi politik dalam negeri dan volatilitas kurs yang tidak stabil. Selanjutnya adalah suku bunga kredit yang cenderung meningkat dan defisit APBN yang semakin membesar serta adanya indikasi pertumbuhan investasi yang melambat.





Ekspektasi Ekonomi



Analisa:

Hasil survei ekonomi Indonesia Semester II tahun 2022 menunjukkan bahwa masyarakat Kota Medan menilai kondisi ekonomi nasional sudah membaik dan diperkirakan 3 bulan kedepan akan semakin baik lagi. Untuk ekspektasi kondisi ekonomi di Kota Medan sendiri secara umum masih di bawah kondisi nasional. Secara lebih spesifik, ekspektasi pertumbuhan ekonomi Kota Medan dirasakan belum sebaik nasional, namun masih berada pada kondisi yang cukup baik. Selama 3 bulan kedepan pertumbuhan ekonomi daerah dipercaya membaik dan mampu menyaingi pertumbuhan secara nasional. Dari sisi tingkat pengangguran, Kota Medan dipercaya lebih baik dari kondisi nasional. Meskipun demikian, tingkat pengangguran dirasakan memburuk dari sebelumnya dan diperkirakan akan lebih baik tiga bulan ke depan. Dari sisi inflasi, baik nasional maupun Kota Medan masih tergolong lebih buruk dari sebelumnya namun diperkirakan akan lebih baik untuk tiga bulan ke depan.

Persepsi Tantangan Ekonomi

Tabel 1. Lima Tantangan Ekonomi Terbesar dari Cabang Medan

Di Tingkat Nasional		Di Tingkat Daerah	
Kondisi Saat ini	Prediksi 3 Bulan Kedepan	Kondisi Saat ini	Prediksi 3 Bulan Kedepan
1. Pertumbuhan investasi yang melambat	1. Defisit APBN	1. Gejolak dan kondisi politik dalam negeri	1. Gejolak dan kondisi politik dalam negeri
2. Defisit APBN	2. Pertumbuhan investasi yang melambat	2. Volatilitas kurs	2. Volatilitas kurs
3. Kenaikan suku bunga kredit			
4. Volatilitas kurs	4. Gejolak dan kondisi politik dalam negeri	4. Defisit APBN	4. Defisit APBN
5. Gejolak dan kondisi politik dalam negeri	5. Volatilitas kurs	5. Pertumbuhan investasi yang melambat	5. Pertumbuhan investasi yang melambat





Analisa:

Di tingkat nasional tantangan terbesar yang dihadapi Indonesia adalah pertumbuhan investasi yang melambat serta defisit APBN yang terjadi akibat berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu kondisi perekonomian harus menghadapi kenaikan suku bunga kredit dan nilai tukar yang tidak stabil. Indonesia juga tengah mengalami gejolak politik dalam negeri. Selama tiga bulan ke depan diprediksi permasalahan utama akan berfokus pada defisit APBN yang semakin besar serta pertumbuhan investasi yang melambat. Sedangkan untuk prediksi 3 bulan kedepan tidak ada pergeseran tantangan yang terjadi secara signifikan dengan kondisi saat ini. Pada tingkat Kota Medan, permasalahan saat ini maupun tiga bulan ke depan tidak mengalami perubahan. Tantangan utama perekonomian Kota Medan untuk saat ini dan prediksi 3 bulan kedepan adalah kondisi politik dalam negeri dan volatilitas kurs yang tidak stabil. Untuk suku bunga kredit akan mengalami kenaikan dan terjadi defisit APBN serta adanya indikasi pertumbuhan investasi yang semakin melambat.

Persepsi Kemampuan Pemerintah

Tabel 2. Top-5 Persepsi Kemampuan Pemerintah berdasarkan cabang Medan

Pemerintah Pusat	Pemerintah Daerah
1. Menciptakan rasa aman dan tenteram	1. Peningkatan human capital (termasuk peningkatan sumberdaya manusia yang berkualitas dan peningkatan kesehatan masyarakat)
2. Perbaikan sistem logistik untuk kelancaran distribusi	2. Perbaikan sistem logistik untuk kelancaran distribusi
3. Menyediakan dan merawat infrastruktur	3. Menciptakan rasa aman dan tenteram
4. Peningkatan human capital (termasuk peningkatan sumberdaya manusia yang berkualitas dan peningkatan kesehatan masyarakat)	4. Menciptakan lingkungan hidup hijau, meningkatkan ketahanan bencana, dan meminimalisir dampak perubahan iklim.
5. Akselerasi pertumbuhan investasi	5. Menstabilkan harga barang dan jasa serta menjamin ketersediaan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat

Analisa:

ISEI Cabang Medan menilai bahwa pemerintah pusat mampu menciptakan rasa aman dan tenteram bagi warganya. Pemerintah juga mampu memperbaiki sistem logistik untuk kelancaran distribusi dan merawat infrastruktur. Selanjutnya adalah kemampuan pemerintah dalam meningkatkan human capital serta akselerasi pertumbuhan investasi untuk menghadapi tantangan penurunan investasi. Di sisi lain ISEI Cabang Medan menilai pemerintah daerah memiliki





komposisi kemampuan yang sedikit berbeda dengan pemerintah pusat, dimana fokus utama kemampuan pemerintah daerah Kota Medan adalah peningkatan human capital. Pada posisi kedua sama-sama berkaitan dengan sistem logistik untuk kelancaran distribusi. Selanjutnya adalah kemampuan untuk menciptakan rasa aman dan tenteram. Selain itu, Pemerintah Kota Medan juga mampu meningkatkan penciptaan lingkungan hidup hijau guna menghadapi perubahan iklim serta menstabilkan harga-harga barang dan jasa yang tidak dimiliki pemerintah pusat. Namun, Pemerintah Kota Medan belum mampu meningkatkan akselerasi pertumbuhan investasi dan infrastruktur seperti pemerintah pusat





Laporan Survei Indikator Survei Ekonomi Indonesia (ISEI) Index Cabang: Padang

Tim Penyusun:

1. Prof. Dr. Werry Dartta Taifur, SE, MA.
2. Dr. Endrizal Ridwan

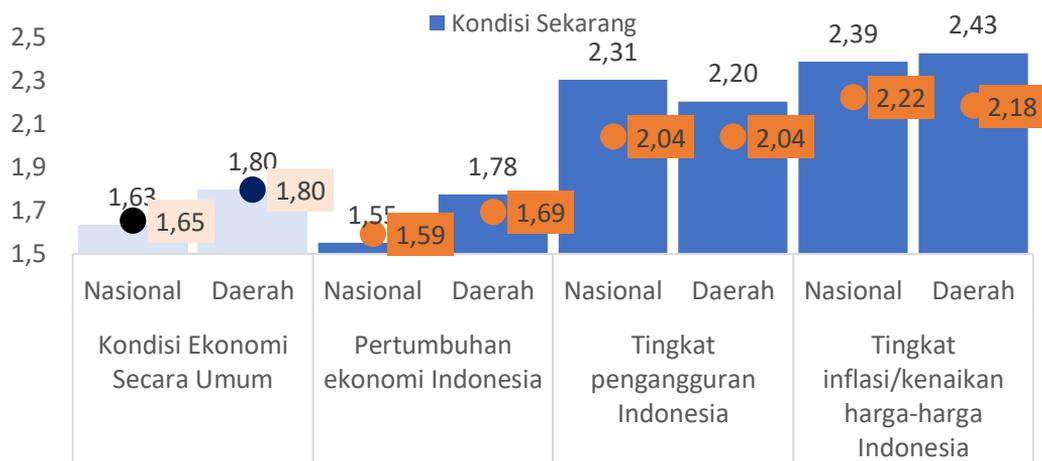
Ringkasan Eksekutif

Responden Cabang Padang merasakan kondisi ekonomi secara umum membaik. Namun pengangguran dan inflasi memburuk: trade-off antara inflasi dan pengangguran tidak terjadi. Ekonomi membaik di saat pengangguran memburuk dapat terjadi jika sumber pertumbuhan ekonomi berakar dari produktifitas tenaga kerja. Responden melihat masalah utama perekonomian adalah akibat kondisi geopolitik eksternal, meliputi volatiliti kurs dan kenaikan suku bunga. Defisit anggaran belanja dan minim investasi menjadi perhatian serius karena berkaitan dengan hutang luar negeri dan peningkatan uang beredar. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerintah pusat untuk lebih berfokus kepada akselerasi pertumbuhan investasi dan pemerintah daerah untuk berfokus pada stabilisasi harga dan ketersediaan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat.





Ekspektasi Ekonomi



Analisa:

Responden Cabang Padang merasakan kondisi ekonomi secara umum dan pertumbuhan ekonomi, baik nasional maupun daerah, pada saat ini relatif lebih baik dibandingkan dengan kondisi 3 bulan lalu, dan memprediksi bahwa untuk 3 bulan ke depan kondisinya juga akan lebih baik dibandingkan saat ini. Namun, untuk tingkat pengangguran dan inflasi, responden Cabang Padang merasakan kondisi saat ini lebih buruk dibandingkan dengan kondisi 3 bulan lalu, dan untuk tiga bulan ke depan kondisinya tetap memburuk. Trade-off yang diharapkan antara inflasi dan pengangguran tidak terjadi, bahkan inflasi dan pengangguran berjalan searah ke arah yang tidak menguntungkan. Bahwa pertumbuhan ekonomi membaik disaat pengangguran memburuk dapat dirasionalkan dengan pertumbuhan ekonomi berakar dari peningkatan produktifitas tenaga kerja.





Persepsi Tantangan Ekonomi

Tabel 1. Lima Tantangan Ekonomi Terbesar dari Cabang Padang

Di Tingkat Nasional		Di Tingkat Daerah	
Kondisi Saat ini	Prediksi 3 Bulan Kedepan	Kondisi Saat ini	Prediksi 3 Bulan Kedepan
1. Volatilitas kurs	1. Gejala dan kondisi politik dalam negeri	1. Gejala dan kondisi politik dalam negeri	1. Volatilitas kurs
2. Kenaikan suku bunga kredit	2. Volatilitas kurs	2. Volatilitas kurs	2. Gejala dan kondisi politik dalam negeri
3. Gejala dan kondisi politik dalam negeri	3. Kenaikan suku bunga kredit	3. Kenaikan suku bunga kredit	3. Kenaikan suku bunga kredit
4. Defisit APBN	4. Pertumbuhan investasi yang melambat	4. Defisit APBN	4. Pertumbuhan investasi yang melambat
5. Pertumbuhan investasi yang melambat	5. Defisit APBN	5. Pertumbuhan investasi yang melambat	5. Defisit APBN

Analisa:

Responden Padang melihat masalah utama perekonomian nasional dan daerah baik saat ini maupun 3 bulan ke depan, yakni volatilitas kurs, kenaikan suku bunga, dan gejala politik. Masalah utama ini kelihatannya dampak dari gejolak ekonomi dan politik eksternal termasuk perang Rusia-Ukraina dan belum pulihnya ekonomi dunia pasca Pandemi. Masalah berikutnya lebih kepada dampak pengelolaan ekonomi internal, yakni defisit anggaran belanja dan lambatnya pertumbuhan investasi. Nampaknya pembiayaan pembangunan dengan hutang dan peningkatan jumlah uang beredar menjadi perhatian serius masyarakat.

Persepsi Kemampuan Pemerintah

Tabel 2. Top-5 Persepsi Kemampuan Pemerintah berdasarkan cabang Padang

Pemerintah Pusat	Pemerintah Daerah
1. Peningkatan human capital (termasuk peningkatan sumberdaya manusia yang berkualitas dan peningkatan kesehatan masyarakat)	1. Menciptakan rasa aman dan tenteram
2. Perbaikan sistem logistik untuk kelancaran distribusi	2. Perbaikan sistem logistik untuk kelancaran distribusi
3. Menyediakan dan merawat infrastruktur	3. Menyediakan dan merawat infrastruktur
4. Menciptakan rasa aman dan tenteram	4. Menstabilkan harga barang dan jasa serta menjamin ketersediaan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat
5. Akselerasi pertumbuhan investasi	5. Peningkatan human capital (termasuk peningkatan sumberdaya manusia yang berkualitas dan peningkatan kesehatan masyarakat)





Analisa:

Meskipun dengan skala prioritas berbeda, responden percaya pada kemampuan pemerintah pusat dan daerah untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, memperbaiki sistem logistik untuk kelancaran distribusi, menyediakan dan merawat infrastruktur, dan menciptakan rasa aman dan tentram untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun untuk akselerasi pertumbuhan investasi, responden lebih yakin kepada kemampuan pemerintah pusat. Mungkin hal ini berkaitan dengan kebijakan investasi lebih bersifat makro. Sedangkan untuk stabilisasi harga dan ketersediaan barang dan jasa, responden lebih yakin kepada kemampuan pemerintah daerah untuk mewujudkannya.





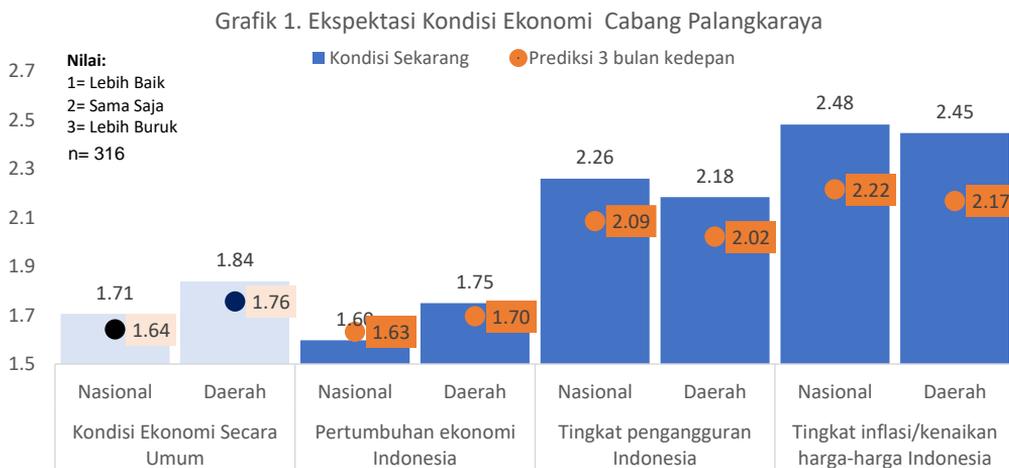
Laporan Survei Indikator Survei Ekonomi Indonesia (ISEI)

Index Cabang: Palangkaraya

Tim Penyusun :

1. Dr. Miara, M.Si.
2. Ahmad Selanorwanda, SE, M.Si
3. Rini Oktavia, SE., M.Si.
4. Isra Misra, SE., M.Si.

Ekspektasi Ekonomi



Analisa:

Dari hasil survei diatas terlihat bahwa kondisi ekonomi nasional sudah menuju perbaikan. Hal tersebut terlihat dari data bahwa rata-rata responden memilih jawaban lebih baik. Hal itu juga terlihat dari kondisi ekonomi daerah yang mengalami perbaikan pasca pandemic. Pertumbuhan ekonomi Indonesia juga terlihat lebih baik, baik secara nasional maupun daerah. Prediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia secara nasional juga cukup baik. Sedangkan data tingkat pengangguran terlihat masih sama saja dibandingkan tahun sebelumnya meskipun prediksi kedepan tingkat pengangguran akan mengalami penurunan. Tingkat inflasi Indonesia juga masih cukup tinggi dikarenakan harga bahan bakar minyak yang mengalami kenaikan. Sehingga perlu adanya kebijakan untuk menurunkan tingkat inflasi baik secara nasional maupun daerah.





Persepsi Tantangan Ekonomi

Tabel 1. Lima Tantangan Ekonomi Terbesar dari Cabang Palangkaraya

Di Tingkat Nasional		Di Tingkat Daerah	
Kondisi Saat ini	Prediksi 3 Bulan Kedepan	Kondisi Saat ini	Prediksi 3 Bulan Kedepan
1. Kenaikan suku bunga kredit	1. Kenaikan suku bunga kredit	1. Volatilitas kurs	1. Volatilitas kurs
#N/A	2. Volatilitas kurs	2. Kenaikan suku bunga kredit	2. Kenaikan suku bunga kredit
3. Volatilitas kurs	3. Defisit APBN	3. Pertumbuhan investasi yang melambat	3. Pertumbuhan investasi yang melambat
4. Pertumbuhan investasi yang melambat	4. Pertumbuhan investasi yang melambat	4. Gejolak dan kondisi politik dalam negeri	4. Defisit APBN
5. Defisit APBN	5. Demand Daya beli masyarakat yang menurun	5. Defisit APBN	5. Gejolak dan kondisi politik dalam negeri

Analisa:

Secara nasional tantangan ekonomi Indonesia adalah kenaikan suku bunga kredit, volatilitas kurs, pertumbuhan investasi yang melamban dan deficit APBN. Sedangkan prediksi 3 bulan kedepan tantangan ekonomi terbesar juga sama hanya ditambah dengan daya beli masyarakat yang menurun. Di tingkat daerah tantangan ekonomi terbesar saat ini adalah sama kenaikan sukubunga kredit, volatilitas kurs, pertumbuhan investasi melambat, gejolak politik dalam negeri dan deficit APBN dan hal itu juga akan terjadi 3 bulan kedepan berdasarkan prediksi responden.

Persepsi Kemampuan Pemerintah

Tabel 2. Top-5 Persepsi Kemampuan Pemerintah berdasarkan cabang Palangkaraya

Pemerintah Pusat	Pemerintah Daerah
1. Menciptakan rasa aman dan tenteram	1. Menciptakan rasa aman dan tenteram
2. Perbaikan sistem logistik untuk kelancaran distribusi	2. Perbaikan sistem logistik untuk kelancaran distribusi
3. Peningkatan human capital (termasuk peningkatan sumberdaya manusia yang berkualitas dan peningkatan kesehatan masyarakat)	3. Peningkatan human capital (termasuk peningkatan sumberdaya manusia yang berkualitas dan peningkatan kesehatan masyarakat)
4. Menyediakan dan merawat infrastruktur	4. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan menciptakan lapangan kerja
5. Akselerasi pertumbuhan investasi	5. Menstabilkan harga barang dan jasa serta menjamin ketersediaan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat

Analisa:

Kemampuan pemerintah pusat menurut responden tingkat nasional adalah menciptakan rasa aman dan tenteram, perbaikan system logistic kelancaran distribusi, peningkatan human capital, menyediakan dan merawat infrastruktur dan akselerasi pertumbuhan ekonomi. Sedangkan kemampuan pemerintah





daerah juga menciptakan rasa aman dan tenteram, perbaikan system logistic kelancaran distribusi, peningkatan human capital, dan ditambah dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah serta terbukanya lapangan pekerjaan serta menstabilkan harga barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat.





Laporan Survei Indikator Survei Ekonomi Indonesia (ISEI)

Index Cabang: Palembang

Tim Penyusun:

1. Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si
2. Marlina Widiyanti, S.E., S.H., M.M., M.H., Ph.D.
3. Dr. Sukanto, S.E., M.Si.
4. Dr. Abdul Bashir, S.E., M.Si.
5. Dr. Mukhlis, S.E., M.Si.

Ringkasan Eksekutif

Survei Indikator Survei Ekonomi Indonesia (ISEI) bertujuan mengukur pandangan, optimisme, serta ekspektasi ekonom, akademisi dan praktisi yang tergabung sebagai anggota ISEI baik di tingkat nasional maupun daerah. Survei ISEI di lakukan Kota Palembang dengan sampel sebanyak 41 responden yang terdiri dari akademisi, praktisi, dan pemerintahan. Hasil indeks ISEI menunjukkan bahwa kondisi ekonomi secara umum masih relatif baik, untuk kondisi ekonomi secara umum di tingkat nasional maupun Kota Palembang masih pada kisaran angka 1, ini menandakan bahwa tidak terdapat perubahan yang berarti dari kondisi ekonomi sekarang maupun 3 bulan ke depan. Ekspektasi terhadap pertumbuhan ekonomi pada kondisi sekarang dan 3 bulan ke depan di tingkat nasional maupun Kota Palembang memperoleh nilai indeks ISEI pada kisaran angka 1, kategori ini menandakan bahwa pertumbuhan ekonomi masih relatif baik, meskipun demikian ekspektasi terhadap pertumbuhan ekonomi untuk 3 bulan ke depan akan mengalami penurunan baik di tingkat nasional maupun Kota Palembang. Ekspektasi terhadap tingkat pengangguran untuk kondisi sekarang dan 3 bulan ke depan baik di tingkat nasional maupun Kota Palembang diperoleh nilai indeks ISEI pada kisaran angka 2, kategori ini menandakan bahwa ekspektasi terhadap tingkat pengangguran tidak mengalami perubahan yang berarti atau sama, meskipun indeks ISEI untuk 3 bulan ke depan mengalami penurunan baik di tingkat nasional maupun Kota Palembang. Demikian pula dengan ekspektasi terhadap kondisi inflasi sekarang dan 3 bulan ke depan baik di tingkat nasional maupun Kota Palembang diperoleh kisaran angka 2, kategori ini menandakan bahwa tidak perubahan yang berarti pada kondisi inflasi sekarang maupun 3 bulan ke depan, meskipun indeks ekspektasi untuk 3 bulan ke depan mengalami penurunan. Hasil persepsi ini perlu di cermati secara serius, terutama dalam pengendalian inflasi secara makro di tingkat nasional maupun daerah. Komoditas dominan yang cukup signifikan menyumbang inflasi adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau pada bulan Juni 2022 terutama komoditas bawang merah, dan cabai. Peningkatan inflasi tersebut diperkirakan adanya tekanan sisi penawaran seiring dengan kenaikan harga komoditas dunia dan gangguan pasokan (disrupsi suplai). Sementara itu, peningkatan inflasi domestik ini terjadi dari sisi produksi yang diperkirakan adanya kenaikan harga Liquefied Petroleum Gas (LPG) kemudian disusul dengan kenaikan tarif dasar listrik, BBM, dan tarif dasar air bersih di berbagai daerah. Tekanan inflasi global dan domestik ini akan direspon oleh setiap negara dengan pengetatan kebijakan moneter yang lebih agresif sehingga memperlambat pertumbuhan ekonomi dan akan meningkatkan resiko stagflasi. Oleh karena itu, pemangku kebijakan baik pemerintah pusat maupun daerah perlu memperkuat kebijakan fiskal dan moneter sebagai langkah pre-emptive dan forward looking untuk memitigasi risiko kenaikan ekspektasi inflasi dan inflasi inti melalui normalisasi tarif pajak dan menekan belanja pemerintah; kenaikan struktur suku bunga di pasar uang; dan penjualan SBN di pasar sekunder. Penguatan sinergi kebijakan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan lembaga dalam menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, serta mendorong kredit/pembiayaan kepada dunia usaha pada sektor-sektor prioritas dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi, ekspor, serta investasi melalui inklusi ekonomi dan keuangan





Ekspektasi Ekonomi



Analisa:

Survei Indikator Survei Ekonomi Indonesia (ISEI) ini telah diikuti oleh 41 sampel responden yang terdiri dari akademisi, praktisi, dan pemerintahan yang berdomisili di Kota Palembang. Pada Grafik 1 melaporkan bahwa hasil survei ekspektasi terhadap kondisi ekonomi secara umum aktivitas perekonomian akan menurun. Pada level nasional aktivitas ekonomi relatif lebih baik di dibandingkan Kota Palembang, yang mana kondisi ekonomi nasional saat ini memiliki indeks ISEI sebesar 1.56, namun prediksi 3 bulan ke depan akan meningkat sebesar 1.68, ini mengindikasikan bahwa kondisi ekonomi secara umum 3 bulan ke depan akan menurun. Hal serupa juga di terjadi pada level daerah, indeks ekspektasi tiga bulan ke depan meningkat 0,10 basis point (meningkat dari 1,63 menjadi 1,73). Hasil survei ini mengisyaratkan bahwa akan terjadi kontraksi ekonomi di Kota Palembang, tercemin dari salah satu indikator makro pertumbuhan ekonomi yang akan mengalami penurunan dala 3 bulan ke depan.

Data menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi di tingkat nasional pada triwulan I-2022 meningkat dari triwulan I-2021 tumbuh sebesar 5,01 persen (y-o-y), akan tetapi pertumbuhan ekonomi triwulan I-2022 terhadap triwulan sebelumnya mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,96 persen (q-o-q). Hasil survei ISEI menemukan bahwa ekspektasi terhadap pertumbuhan ekonomi di tingkat nasional relatif lebih baik dibandingkan Kota Palembang, untuk kondisi sekarang hasil indeks ISEI yang diperoleh untuk nasional adalah 1.51, akan tetapi prediksi 3 bulan ke depan nilai indeks ISEI meningkat sebesar 1.68. Demikian pula dengan





pertumbuhan ekonomi Kota Palembang, nilai indeks ISEI yang peroleh sebesar 1.56 untuk kondisi sekarang, dan hasil indeks ISEI untuk 3 bulan ke depan diprediksi meningkat sebesar 1.73. Hal ini menyiratkan bahwa pertumbuhan ekonomi 3 bulan ke depan diprediksi akan menurun atau tidak lebih baik dari kondisi pertumbuhan ekonomi sekarang untuk tingkat nasional maupun Kota Palembang. Penurunan tersebut diperkirakan sebagai dampak dari perang Ukraina-Rusia yang menyebabkan terganggunya rantai pasok bahan makan (Gandum), dan Gas. Kelangkaan kedua komoditas ini telah mendorong terjadinya inflasi global, dan berimbas pada gejolak harga domestik.

Hasil indeks ISEI terhadap indikator tingkat pengangguran untuk nasional dan Kota Palembang yang diperoleh menunjukkan bahwa ekspektasi terhadap tingkat pengangguran untuk kondisi sekarang adalah sama dengan nilai indeks masing-masing sebesar 2.12. Meskipun demikian nilai indeks ISEI di tingkat nasional untuk 3 bulan ke depan diprediksi akan menurun yaitu sebesar 2.00. Demikian pula dengan tingkat pengangguran di Kota Palembang, nilai indeks ISEI untuk 3 bulan ke depan diprediksi akan menurun yaitu sebesar 2.02. Hasil temuan ini menyiratkan bahwa tingkat pengangguran untuk 3 bulan ke depan diprediksi akan menurun atau lebih baik dari kondisi tingkat pengangguran sekarang baik di tingkat nasional maupun Kota Palembang. Penurunan ini masih belum berarti karena nilai indeks ISEI yang diperoleh masih pada kirasan angka 2, ini menandakan bahwa ekspektasi terhadap tingkat pengangguran ke depan masih sama saja. Laporan Badan Pusat Statistik pada Februari 2022 mencatat bahwa tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,83 persen, angka tersebut turun dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 6,26 persen. Hal ini menyiratkan bahwa tingkat pengangguran terbuka relatif menurun dan terkendali, untuk mensiasati ini diperlukan dukungan penguatan sinergi kebijakan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga, dan stakeholder terkait dalam penciptakan lapangan kerja melalui penguatan kebijakan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan lembaga dalam menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, serta mendorong kredit/pembiayaan kepada dunia usaha pada sektor-sektor prioritas dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi. Hasil indeks ISEI dari survei ini menunjukkan bahwa Inflasi di tingkat nasional relatif lebih baik dibandingkan Kota Palembang, dapat dilihat dari nilai indeks ISEI terhadap inflasi saat ini yang mana untuk tingkat nasional sebesar 2.41, selanjutnya nilai indeks ISEI 3 bulan ke depan diprediksi menurun yaitu sebesar





2.22. Demikian juga hasil yang diperoleh untuk Kota Palembang, yang nilai indeks terhadap inflasi saat ini yaitu sebesar 2.54, sedangkan untuk indeks ISEI 3 bulan ke depan diprediksi akan turun menjadi 2.15. Penurunan tersebut masih belum berarti karena nilai indeks yang diperoleh masih pada kisaran angka 2, ini menandakan bahwa ekspektasi terhadap inflasi ke depan masih sama saja. Laju Inflasi di tingkat nasional mengalami peningkatan pada Juli 2022 tercatat 4,94 persen (y-o-y), meningkat dibandingkan Juni 2022 yang tercatat 4,35 persen (y-o-y) dan akhir triwulan I di level 2,64 persen (y-o-y). Sementara itu, Kota Palembang pada bulan Juni 2022 mengalami inflasi sebesar 0,90 persen, Inflasi kumulatif bulan Januari sampai Juni 2022 sebesar 4,37 persen. Inflasi tahunan pada Juni 2022 terhadap Juni 2021 sebesar 5,42 persen (y-o-y). Komoditas dominan yang menyumbang inflasi pada bulan Juni 2022 di Kota Palembang antara lain: cabai merah, bawang merah, dan telur ayam ras mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan rata-rata harga bulan Mei 2022. Peningkatan tersebut diperkirakan akibat adanya kenaikan harga Liquefied Petroleum Gas (LPG), kemudian disusul dengan kenaikan tarif dasar listrik, BBM, dan tarif dasar air bersih di berbagai daerah termasuk Kota Palembang.

Persepsi Tantangan Ekonomi

Tabel 1. Lima Tantangan Ekonomi Terbesar dari Cabang Palembang

Di Tingkat Nasional		Di Tingkat Daerah	
Kondisi Saat ini	Prediksi 3 Bulan Kedepan	Kondisi Saat ini	Prediksi 3 Bulan Kedepan
1. Kenaikan suku bunga kredit	1. Defisit APBN	1. Kenaikan suku bunga kredit	1. Kenaikan suku bunga kredit
2. Gejala dan kondisi politik dalam negeri	2. Volatilitas kurs	2. Volatilitas kurs	2. Defisit APBN
3. Volatilitas kurs	3. Kenaikan suku bunga kredit	3. Gejala dan kondisi politik dalam negeri	3. Gejala dan kondisi politik dalam negeri
4. Defisit APBN	4. Ketersediaan bahan pokok yang terbatas	4. Defisit APBN	4. Volatilitas kurs
5. Pertumbuhan investasi yang melambat	5. Gejala dan kondisi politik dalam negeri	5. Pertumbuhan investasi yang melambat	5. Pertumbuhan investasi yang melambat

Analisa:

Tabel 1 melaporkan hasil survei terkait tantangan ekonomi yang hadapi oleh pemerintah pusat maupun daerah. Hasil persepsi di tingkat nasional yang diperoleh bahwa yang menjadi tantangan kondisi sekarang terdiri dari 5 tantangan yaitu: (1) kenaikan suku bunga kredit; (2) gejala dan kondisi politik dalam negeri; (3) volatilitas kurs; (4) defisit APBN; dan (5) pertumbuhan investasi yang melambat. Sementara itu, persepsi tantangan ekonomi yang dihadapi 3 bulan kedepan pada tingkat nasional terdiri dari: (1) defisit APBN; (2) volatilitas





kurs; (3) kenaikan suku bunga kredit; (4) ketersediaan bahan pokok yang terbatas; dan (5) gejolak dan kondisi politik dalam negeri. Selain itu, persepsi tantangan ekonomi untuk kondisi sekarang yang dihadapi di tingkat daerah terdiri dari: (1) kenaikan suku bunga kredit; (2) volatilitas kurs; (3) gejolak dan kondisi politik dalam negeri; (4) defisit APBN; dan (5) pertumbuhan investasi yang melambat.

Sementara itu, persepsi tantangan ekonomi untuk 3 bulan kedepan yang dihadapi oleh daerah terdiri dari: (1) kenaikan suku bunga kredit; (2) defisit APBN; (3) gejolak dan kondisi politik dalam negeri; (4) volatilitas kurs; dan (5) pertumbuhan investasi yang melambat. Hasil temuan ini menyiratkan bahwa pengaruh eksternal terutama tekanan inflasi global dan kebijakan peningkatan suku bunga oleh Fed menjadi tantangan utama dalam perekonomian nasional maupun daerah. Pengetatan suku bunga oleh Fed dinilai akan mengerek tingkat suku bunga kredit dalam negeri. Kebijakan moneter yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan meningkatkan suku bunga berimplikasi pada investasi tumbuh melambat yang pada gilirannya akan defisit APBN. Selain itu, di tengah ketidakpastian pasar keuangan global yang masih tinggi dan gejolak politik dalam negeri menyebabkan volatilitas pasar valas yang dapat menekan nilai tukar, yang mana nilai tukar rupiah sampai dengan 20 Juli 2022 terdepresiasi 4,90% (ytd) dibandingkan dengan level akhir 2021.

Persepsi Kemampuan Pemerintah

Tabel 2. Top-5 Persepsi Kemampuan Pemerintah berdasarkan cabang Palembang

Pemerintah Pusat	Pemerintah Daerah
1. Peningkatan human capital (termasuk peningkatan sumberdaya manusia yang berkualitas dan peningkatan kesehatan masyarakat)	1. Menciptakan rasa aman dan tenteram
2. Perbaiki sistem logistik untuk kelancaran distribusi	2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan menciptakan lapangan kerja
3. Menyediakan dan merawat infrastruktur	3. Akselerasi pertumbuhan investasi
4. Menciptakan rasa aman dan tenteram	4. Menstabilkan harga barang dan jasa serta menjamin ketersediaan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat
5. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan menciptakan lapangan kerja	5. Peningkatan human capital (termasuk peningkatan sumberdaya manusia yang berkualitas dan peningkatan kesehatan masyarakat)

Analisa:

Tabel 2 melaporkan hasil persepsi kemampuan pemerintah pusat dan daerah. Hasil survei ISEI ini memperoleh 5 persepsi terhadap kemampuan pemerintah pusat yang terdiri dari (1) Peningkatan human capital (termasuk peningkatan sumberdaya manusia yang berkualitas dan peningkatan kesehatan masyarakat);





(2) perbaikan sistem logistik untuk kelancaran distribusi; (3) menyediakan dan merawat infrastruktur; (4) Menciptakan rasa aman dan tenteram; dan (5) meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan menciptakan lapangan kerja. Selain itu, hasil survei ISEI juga melaporkan 5 persepsi terhadap kemampuan pemerintah Kota Palembang yang terdiri dari (1) menciptakan rasa aman dan tenteram; (2) meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan menciptakan lapangan kerja; (3) akselerasi pertumbuhan investasi; (4) menstabilkan harga barang dan jasa serta menjamin ketersediaan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat; dan (5) peningkatan human capital (termasuk peningkatan sumberdaya manusia yang berkualitas dan peningkatan kesehatan masyarakat).

Hasil temuan ini menandakan bahwa pemerintah pusat dan daerah memiliki kemampuan yang relatif baik untuk meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas, pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan lapangan kerja melalui akselerasi pertumbuhan investasi diberbagai sektor baik sisi pemerintah maupun stakeholder, namun perlu diikuti juga oleh penciptaan rasa aman dan perbaikan sistem logistik untuk kelancaran distribusi, tentunya hal ini harus didukung dengan kualitas regulasi melalui sistem pelayanan publik yang semakin baik dan transparan. Persepsi relatif berbeda terjadi level daerah, dimana sebagian besar responden menyakini pemerintah mampu menciptakan rasa aman. Sementara itu, kemampuan pemerintah dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi masih relatif terbatas. Demikian juga dengan kemampuan pemerintah daerah dalam menstabilkan harga barang dan jasa. Padahal ketiga indikator tersebut menjadi hambatan utama saat ini yang dihadapi perekonomian daerah, oleh karena itu sinergitas kebijakan pusat dan daerah sangat dinantikan oleh para pelaku usaha





Laporan Survei Indikator Survei Ekonomi Indonesia (ISEI) Index Cabang: Palu

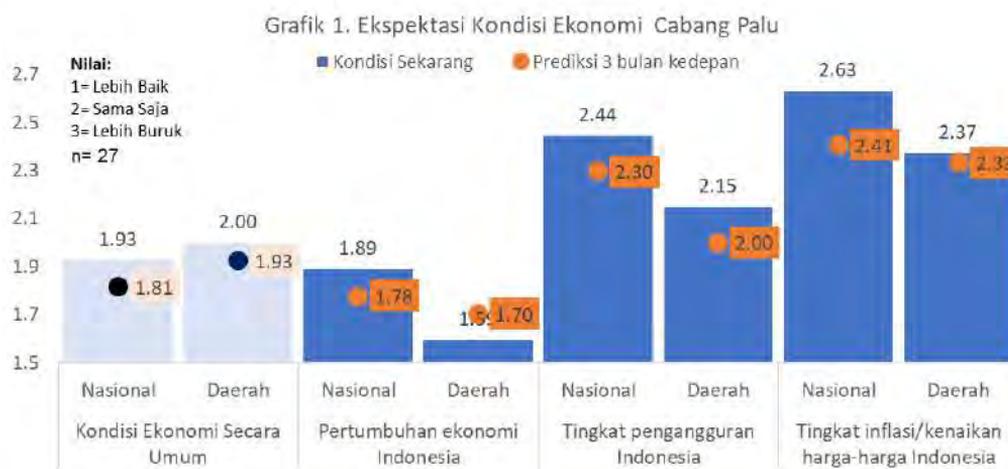
Tim Penyusun: Dr. Suparman, SE, M.Si

Ringkasan Eksekutif

1. Berdasarkan hasil survei ekspektasi kondisi ekonomi menurut ekonom ISEI di Cabang Palu, menunjukkan kondisi ekonomi nasional dan daerah sekarang secara umum lebih baik dari kondisi sebelumnya dan untuk prediksi 3 bulan ke depan kondisi nasional dan daerah dinilai sama saja;
2. Berdasarkan survei persepsi lima tantangan ekonomi terbesar menurut ekonom ISEI di Cabang Palu untuk tingkat nasional mengalami pergeseran saat ini kenaikan suku bunga kredit dan untuk prediksi 3 bulan ke depan memiliki urutan dari pertumbuhan investasi yang melambat; sementara untuk daerah kondisi saat ini kenaikan suku bunga kredit dan untuk prediksi 3 bulan depan menjadi pertumbuhan investasi yang melambat;
3. Berdasarkan hasil survei atas persepsi kemampuan pemerintah menurut ekonom ISEI Cabang Palu untuk Pemerintah Pusat dengan prioritas utama untuk menyediakan dan merawat infrastruktur; dan untuk daerah priotas untuk menciptakan rasa aman dan tenang.



Ekspektasi Ekonomi



Analisa:

Berdasarkan hasil survei ekspektasi kondisi ekonomi menurut ekonom ISEI di Cabang Palu, menunjukkan kondisi ekonomi sekarang secara umum lebih baik dari kondisi sebelumnya. Dimana dari sebelumnya kondisi ekonomi nasional memiliki nilai indeks sebesar 1.93 turun menjadi 1.81, dan ekonomi daerah dari indeks sebesar 2.00 turun menjadi 1.93. Selanjutnya, untuk prediksi 3 bulan ke depan pada pertumbuhan ekonomi secara nasional diprediksi lebih baik dari nilai indeks sebesar 1.89 turun menjadi sebesar 1.78, dan daerah cenderung sama dari indeks 1.59 naik sedikit menjadi sebesar 1.70. Untuk indikator tingkat pengangguran secara nasional sama saja dari nilai indeks sebesar 2.44 turun menjadi 2.30, dan daerah cenderung sama dari indeks 2.15 turun menjadi 2.00. Selanjutnya, untuk tingkat inflasi/kenaikan harga-harga secara nasional sama saja dari indeks sebesar 2.63 turun menjadi 2.41 dan daerah dari indeks 2.37 turun menjadi 2.33.



Persepsi Tantangan Ekonomi

Tabel 1. Lima Tantangan Ekonomi Terbesar dari Cabang Palu

Di Tingkat Nasional		Di Tingkat Daerah	
Kondisi Saat ini	Prediksi 3 Bulan Kedepan	Kondisi Saat ini	Prediksi 3 Bulan Kedepan
1. Kenaikan suku bunga kredit	1. Pertumbuhan investasi yang melambat	1. Kenaikan suku bunga kredit	1. Pertumbuhan investasi yang melambat
2. Pertumbuhan investasi yang melambat	2. Ketersediaan bahan pokok yang terbatas	2. Gejala dan kondisi politik dalam negeri	2. Volatilitas kurs
3. Gejala dan kondisi politik dalam negeri	3. Kenaikan suku bunga kredit	3. Pertumbuhan investasi yang melambat	3. Defisit APBN
4. Volatilitas kurs	4. Volatilitas kurs	4. Volatilitas kurs	4. Kenaikan suku bunga kredit
5. Defisit APBN	5. Defisit APBN	5. Defisit APBN	5. Ketersediaan bahan pokok yang terbatas

Analisa:

Berdasarkan survei persepsi lima tantangan ekonomi terbesar menurut ekonom ISEI di Cabang Palu untuk tingkat nasional mengalami pergeseran saat ini untuk prediksi 3 bulan ke depan memiliki urutan dari pertumbuhan investasi yang melambat, ketersediaan bahan pokok yang terbatas, kenaikan suku bunga kredit, volatilitas kurs dan defisit APBN. Di tingkat daerah, prediksi 3 bulan ke depan mengalami pergeseran dari kondisi saat ini menjadi urutan dari pertumbuhan investasi yang melambat, volatilitas kurs, defisit APBN, kenaikan suku bunga kredit, dan ketersediaan bahan pokok yang terbatas.

Persepsi Kemampuan Pemerintah

Tabel 2. Top-5 Persepsi Kemampuan Pemerintah berdasarkan cabang Palu

Pemerintah Pusat	Pemerintah Daerah
1. Menyediakan dan merawat infrastruktur	1. Menciptakan rasa aman dan tenteram
2. Peningkatan human capital (termasuk peningkatan sumberdaya manusia yang berkualitas dan peningkatan kesehatan masyarakat)	2. Akselerasi pertumbuhan investasi
3. Akselerasi pertumbuhan investasi	3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan menciptakan lapangan kerja
4. Perbaikan sistem logistik untuk kelancaran distribusi	4. Menstabilkan harga barang dan jasa serta menjamin ketersediaan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat
5. Menciptakan lingkungan hidup hijau, meningkatkan ketahanan bencana, dan meminimalisir dampak perubahan iklim.	5. Menciptakan lingkungan hidup hijau, meningkatkan ketahanan bencana, dan meminimalisir dampak perubahan iklim.

Analisa:

Berdasarkan hasil survei atas persepsi kemampuan pemerintah menurut ekonom ISEI Cabang Palu untuk Pemerintah Pusat yakni sebagai berikut: 1. Menyediakan dan merawat infrastruktur; 2. Peningkatan human capital (termasuk peningkatan





sumber daya manusia yang berkualitas dan peningkatan Kesehatan masyarakat); 3. Akselerasi pertumbuhan investasi; 4. Perbaikan sistem logistic untuk kelancaran distribusi; 5. Menciptakan lingkungan hidup hijau, meningkatkan ketahanan bencana, dan meminimalisir dampak perubahan iklim. Sementara itu, pada pemerintah daerah yakni 1. Menciptakan rasa aman dan tenang; 2. Akselerasi pertumbuhan investasi; 3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan menciptakan lapangan kerja; 4. Menstabilkan harga barang dan jasa serta menjamin ketersediaan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat; 5. Menciptakan lingkungan hidup hijau, meningkatkan ketahanan bencana, dan meminimalisir dampak perubahan iklim.





Laporan Survei Indikator Survei Ekonomi Indonesia (ISEI)

Index **Cabang: Papua Barat**

Tim Penyusun :

1. Dr. Rully N. Wurarah
2. Sarce B. Awom, SE, M.Sc
3. Sarah Usman, SE, M.Si

Ringkasan Eksekutif

Kondisi perekonomian secara nasional saat ini lebih baik walaupun kondisi Papua Barat cenderung sama saja dengan kondisi pada waktu sebelumnya, hanya tingkat pengangguran yang menunjukkan lebih baik untuk tingkat daerah Papua Barat dibandingkan secara nasional begitu juga untuk 3 bulan kedepan. Secara nasional kenaikan suku bunga kredit menjadi tantangan utama sedangkan pada tingkat daerah Papua Barat tantangan utamanya adalah pertumbuhan investasi yang melambat begitu pula kondisi pada 3 bulan mendatang bahkan secara nasional juga pertumbuhan investasi yang melambat menjadi tantangan. Kemampuan pemerintah pusat lebih kearah perbaikan sistem logistik untuk kelancaran distribusi sedangkan pemerintah daerah melalui penciptaan lingkungan hidup hijau, peningkatan ketahan bencana dan meminimalisir dampak perubahan iklim.



Ekspektasi Ekonomi



Analisa:

Data ekspektasi untuk kondisi ekonomi secara umum pada tingkat Nasional berada di bawah provinsi Papua Barat. Pertumbuhan ekonomi saat ini masih lebih baik secara Nasional dibandingkan Provinsi Papua Barat, bahkan prediksi 3 bulan kedepan secara nasional akan lebih baik dibandingkan kondisi pertumbuhan ekonomi Papua Barat. Untuk tingkat pengangguran secara nasional lebih baik dibandingkan daerah Papua Barat, walaupun kondisinya pada 3 bulan kedepan terjadi sebaliknya. Tingkat inflasi akan lebih baik tingkat daerah Papua Barat dibandingkan secara nasional dan hal serupa juga pada ekspektasi tiga bulan kedepan. Data BPS menunjukkan bahwa Perekonomian Papua Barat pada 2022 diperkirakan tumbuh lebih tinggi dibanding 2021, perkiraan ini sejalan dengan ekspektasi ekonom di Provinsi Papua Barat, juga secara nasional, pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh tinggi 5,44 persen pada kuartal II-2022. Pertumbuhan ini cukup menggembirakan, di tengah risiko pelemahan ekonomi global dan tekanan inflasi yang meningkat. Tingkat pengangguran ekspektasinya masih lebih baik secara Nasional dibandingkan wilayah Papua Barat begitu pula ekspektasi 3 bulan kedepan. Kesimpulannya bahwa kondisi perekonomian secara nasional saat ini lebih baik walaupun kondisi Papua Barat cenderung sama saja dengan kondisi pada waktu sebelumnya, hanya tingkat pengangguran yang menunjukkan lebih baik untuk tingkat daerah Papua Barat dibandingkan secara nasional begitu juga untuk 3 bulan kedepan.



Persepsi Tantangan Ekonomi

Tabel 1. Lima Tantangan Ekonomi Terbesar dari Cabang Papua Barat

Di Tingkat Nasional		Di Tingkat Daerah	
Kondisi Saat ini	Prediksi 3 Bulan Kedepan	Kondisi Saat ini	Prediksi 3 Bulan Kedepan
1. Kenaikan suku bunga kredit	1. Pertumbuhan investasi yang melambat	1. Pertumbuhan investasi yang melambat	1. Pertumbuhan investasi yang melambat
2. Pertumbuhan investasi yang melambat	2. Defisit APBN	2. Defisit APBN	2. Kenaikan suku bunga kredit
3. Defisit APBN	3. Kenaikan suku bunga kredit	3. Volatilitas kurs	3. Gejala dan kondisi politik dalam negeri
4. Ketersediaan bahan pokok yang terbatas	4. Ketersediaan bahan pokok yang terbatas	4. Ketersediaan bahan pokok yang terbatas	4. Volatilitas kurs
5. Demand Daya beli masyarakat yang menurun	5. Volatilitas kurs	5. Kenaikan suku bunga kredit	5. Defisit APBN

Analisa:

Tantangan ekonomi saat ini secara nasional lebih dominan disebabkan oleh kenaikan suku bunga kredit, juga pertumbuhan investasi yang melambat, defisit APBN, ketersediaan bahan pokok yang terbatas dan demand daya beli masyarakat yang menurun namun prediksi pada 3 bulan kedepan yang menjadi tantangan utama adalah pertumbuhan investasi yang melambat kemudian diikuti oleh defisit APBN, kenaikan suku bunga kredit ketersediaan bahan pokok yang terbatas dan volatilitas kurs. Untuk tingkat daerah Papua Barat, tantangan yang dihadapi saat ini adalah pertumbuhan investasi yang melambat kemudian diikuti oleh defisit APBN, volatilitas kurs, ketersediaan bahan pokok yang terbatas dan kenaikan suku bunga kredit, sedangkan prediksi untuk 3 bulan kedepan papua Barat masih diperhadapkan dengan pertumbuhan investasi yang melambat kemudian diikuti dengan kenaikan suku bunga kredit, gejala dan kondisi politik dalam negeri, volatilitas kurs dan defisit APBN. Kesimpulan menunjukkan bahwa secara nasional kenaikan suku bunga kredit menjadi tantangan utama sedangkan pada tingkat daerah Papua Barat tantangan utamanya adalah pertumbuhan investasi yang melambat begitu pula kondisi pada 3 bulan mendatang bahkan secara nasional juga pertumbuhan investasi yang melambat menjadi tantangan.





Persepsi Kemampuan Pemerintah

Tabel 2. Top-5 Persepsi Kemampuan Pemerintah berdasarkan cabang Papua Barat

Pemerintah Pusat	Pemerintah Daerah
1. Perbaikan sistem logistik untuk kelancaran distribusi	1. Menciptakan lingkungan hidup hijau, meningkatkan ketahanan bencana, dan meminimalisir dampak perubahan iklim.
2. Menciptakan rasa aman dan tenteram	2. Perbaikan sistem logistik untuk kelancaran distribusi
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan menciptakan lapangan kerja	3. Menciptakan rasa aman dan tenteram
4. Peningkatan human capital (termasuk peningkatan sumberdaya manusia yang berkualitas dan peningkatan kesehatan masyarakat)	4. Menstabilkan harga barang dan jasa serta menjamin ketersediaan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat
5. Menstabilkan harga barang dan jasa serta menjamin ketersediaan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat	5. Peningkatan human capital (termasuk peningkatan sumberdaya manusia yang berkualitas dan peningkatan kesehatan masyarakat)

Analisa:

Persepsi Kemampuan pemerintah secara nasional terfokus pada perbaikan sistem logistik untuk kelancaran distribusi, disamping itu perlu memperhatikan penciptaan rasa aman dan tenteram, peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan penciptaan lapangan kerja, peningkatan human capital melalui peningkatan sumberdaya manusia yang berkualitas dan peningkatan kesehatan masyarakat serta penstabilan harga barang dan jasa serta menjamin ketersediaan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat. Kemampuan pemerintah daerah lebih terfokus pada penciptaan lingkungan hidup hijau, peningkatan ketahanan bencana dan meminimalisir dampak perubahan iklim. Di samping itu kemampuan pemerintah daerah melalui perbaikan sistem logistik untuk kelancaran distribusi, penciptaan rasa aman dan tenteram, penstabilan harga barang dan jasa serta ketersediaannya untuk kebutuhan masyarakat, dan peningkatan human capital melalui peningkatan sumberdaya manusia yang berkualitas dan peningkatan kesehatan masyarakat. Kesimpulan menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah pusat lebih kearah perbaikan sistem logistik untuk kelancaran distribusi sedangkan pemerintah daerah melalui penciptaan lingkungan hidup hijau, peningkatan ketahanan bencana dan meminimalisir dampak perubahan iklim sedangkan perbaikan sistem logistik untuk kelancaran distribusi menjadi kemampuan berikutnya.





Laporan Survei Indikator Survei Ekonomi Indonesia (ISEI) Index Cabang: Pontianak

Tim Penyusun:

1. Dr Nella Yantiana, SE, MM, ak, CA, CMA, CPA
2. Sari Rusmita, SE, MM
3. Dr. Rosyadi HMY, SE, MSi

Ringkasan Eksekutif

Berdasarkan hasil survei di wilayah Kalimantan Barat untuk 3 bulan kedepan sangat optimis dilihat dari skor hasil survei terhadap kondisi ekonomi, pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran serta tingkat inflasi/kenaikan harga-harga bahan pokok. Dengan semakin pulihnya perekonomian dari pandemic covid 19 akan sekaligus dapat menopang pertumbuhan ekonomi daerah sehingga defisit APBD dapat ditekan dikarenakan adanya peningkatan pendapatan asli daerah dan pendapatan lainnya. Indikator survei ekonomi pada semester II 2022 menunjukkan banyak tantangan yang harus dihadapi, pengaruh kondisi politik dalam negeri dan luar negeri dapat berdampak terhadap volatilitas kurs. Diharapkan Bank Sentral Indonesia dapat menurunkan suku bunga agar perekonomian dapat tumbuh dan pelaku UMKM dapat meningkatkan kapasitas penjualannya.



Ekspektasi Ekonomi



Analisa:

Berdasarkan hasil survei ekonomi Semester II tahun 2022 menunjukkan bahwa masyarakat di Wilayah Kalimantan Barat menilai kondisi ekonomi secara nasional sudah membaik serta diperkirakan 3 bulan kedepan akan semakin baik lagi. Untuk ekspektasi kondisi ekonomi di Kota Pontianak secara umum dibawah kondisi nasional. Pertumbuhan ekonomi di Kota Pontianak masih dibawah rata-rata pertumbuhan ekonomi secara nasional. Jika dilihat dari tingkat pengangguran masih dibawah dari rata-rata nasional, kondisi pasca pandemic covid 19 membuat sektor perdagangan dan keuangan mengalami peningkatan yang signifikan sejalan dengan daya serap tenaga kerja juga meningkat. Dilihat dari tingkat inflasi, wilayah Kalimantan Barat masih dibawah rata-rata nasional, dikarenakan pemerintah daerah melakukan manajemen persediaan serta melakukan strategi pengamanan ketersediaan bahan-bahan pokok. Namun hasil prediksi selama 3 bulan kedepan menunjukkan optimism terhadap perbaikan ekonomi baik secara nasional maupun ditingkat daerah.



Persepsi Tantangan Ekonomi

Tabel 1. Lima Tantangan Ekonomi Terbesar dari Cabang Pontianak

Di Tingkat Nasional		Di Tingkat Daerah	
Kondisi Saat ini	Prediksi 3 Bulan Kedepan	Kondisi Saat ini	Prediksi 3 Bulan Kedepan
1. Pertumbuhan investasi yang melambat	1. Volatilitas kurs	1. Volatilitas kurs	1. Kenaikan suku bunga kredit
2. Volatilitas kurs	2. Defisit APBN	2. Kenaikan suku bunga kredit	2. Volatilitas kurs
3. Demand Daya beli masyarakat yang menurun	3. Pertumbuhan investasi yang melambat	3. Pertumbuhan investasi yang melambat	3. Pertumbuhan investasi yang melambat
4. Kenaikan suku bunga kredit	4. Kenaikan suku bunga kredit	4. Gejolak dan kondisi politik dalam negeri	4. Defisit APBN
5. Defisit APBN	5. Demand Daya beli masyarakat yang menurun	5. Defisit APBN	5. Demand Daya beli masyarakat yang menurun

Analisa:

Merupakan sebuah tantangan yang besar secara nasional disaat pertumbuhan investasi yang melambat, nilai kurs mata uang rupiah terhadap dolar yang terus bergejolak seiring dengan memanasnya geopolitik saat ini, selama pandemic membawa dampak yang signifikan terhadap pendapatan masyarakat sehingga berdampak kepada penurunan daya beli, iklim usaha mengalami kelesuan ditopang oleh tingginya suku bunga kredit saat ini. Namun bila dilihat dari proyeksi 3 bulan kedepan wilayah Kalimantan barat tidak ada pergeseran tantangan yang terjadi secara signifikan dengan kondisi saat ini. Tantangan wilayah Kalimantan Barat 3 bulan kedepan akan lebih optimis dikarenakan komitmen dari pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas UMKM dengan bekerjasama dengan Bank Kalbar melalui penyaluran dana PEN dengan bunga yang murah. Komitmen pemerintah terhadap realisasi APBN akan surplus dikarenakan saat ini kondisi perekonomian di Kalbar sudah mulai tumbuh dan ini merupakan indicator adanya kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan PNBPN.



Persepsi Kemampuan Pemerintah

Tabel 2. Top-5 Persepsi Kemampuan Pemerintah berdasarkan cabang Pontianak

Pemerintah Pusat	Pemerintah Daerah
1. Akselerasi pertumbuhan investasi	1. Menciptakan rasa aman dan tenteram
2. Peningkatan human capital (termasuk peningkatan sumberdaya manusia yang berkualitas dan peningkatan kesehatan masyarakat)	2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan menciptakan lapangan kerja
3. Menciptakan lingkungan hidup hijau, meningkatkan ketahanan bencana, dan meminimalisir dampak perubahan iklim.	3. Perbaiki sistem logistik untuk kelancaran distribusi
4. Perbaiki sistem logistik untuk kelancaran distribusi	4. Peningkatan human capital (termasuk peningkatan sumberdaya manusia yang berkualitas dan peningkatan kesehatan masyarakat)
5. Menyediakan dan merawat infrastruktur	5. Menciptakan lingkungan hidup hijau, meningkatkan ketahanan bencana, dan meminimalisir dampak perubahan iklim.

Analisa:

Pemerintah Pusat telah menciptakan iklim investasi yang kondusif sehingga harapannya terjadi akselerasi pertumbuhan investasi, hal ini akan berdampak kepada para pelaku usaha yang akan mendapatkan rasa aman dan tentram dalam berinvestasi maupun berusaha. Beberapa program pemerintah daerah dengan cara menjalin relationship dengan dinas terkait untuk memfasilitasi para pelaku usaha agar mendapatkan kemudahan serta kenyamanan dalam dunia usaha. Dengan demikian maka pertumbuhan ekonomi daerah akan meningkat. Pemerintah Daerah dalam menjaga stabilitas harga-harga bahan pokok telah melakukan strategi ketahanan pangan serta pengamanan harga bahan pokok dan dilakukan pemantauan secara berkala agar tingkat inflasi terkendali. Pemerintah Daerah Kalbar juga telah menciptakan lingkungan hidup hijau, meningkatkan ketahanan bencana salah satunya dengan memperbaiki drainase di dalam kota agar terhindar dari genangan air dan banjir.



Laporan Survei Indikator Survei Ekonomi Indonesia (ISEI)

Index Cabang: Salatiga

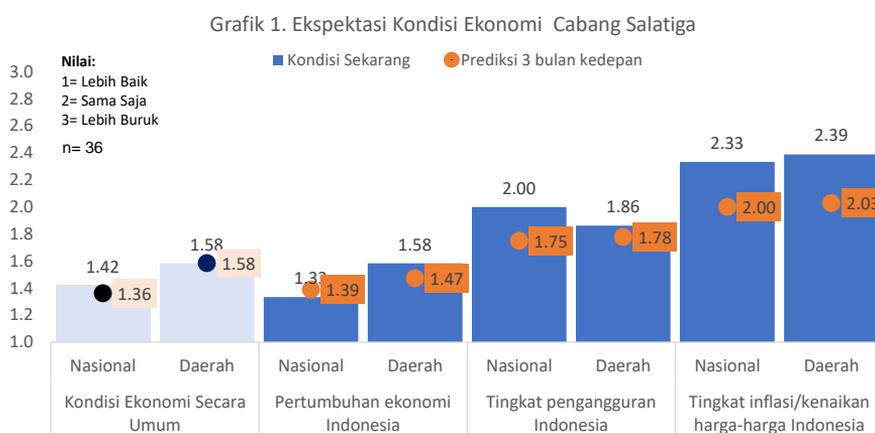
Tim Penyusun:

1. Prof Apriani Dorkas Rambu Atahau, SE, MCom, PhD
2. Dr Yefta Andi Kous Noegroho
3. Eranus Yoga Kundhani, SE, M.Si.

Ringkasan Eksekutif

Laporan Survei ISEI Index Cabang Salatiga disusun berdasarkan kuesioner yang dirumuskan oleh PP Bidang I dan diisi oleh 36 anggota cabang. Penyebaran kuesioner dilakukan secara daring selama kurang lebih satu minggu (23-30 Juli 2022). Adapun substansi Index meliputi ekspektasi ekonomi, persepsi tantangan ekonomi, persepsi kemampuan pemerintah, baik terhadap pemerintah pusat dan daerah (Kota Salatiga). Hasil survei menunjukkan bahwa secara umum terdapat perbedaan persepsi terhadap kondisi pemerintah dan daerah untuk semua variable yang disurvei

Ekspektasi Ekonomi





Analisa:

Ekspektasi ekonomi secara umum menunjukkan kondisi yang membaik pada tingkat nasional maupun tingkat Kota Salatiga. Meskipun demikian, optimisme responden nampak lebih tinggi terhadap perbaikan kondisi ekonomi di Kota Salatiga dibandingkan dengan tingkat nasional. Diantara 3 variabel utama pembentuk kondisi ekonomi umum yang meliputi pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran dan inflasi, nampak bahwa kondisi inflasi pusat maupun daerah dianggap menjadi ancaman karena memiliki skor melebihi 2. Sementara itu pertumbuhan ekonomi dianggap lebih baik, dengan skor lebih tinggi pada level Kota Salatiga. Namun demikian pengangguran di tingkat nasional dipersepsi lebih buruk dibandingkan Kota Salatiga.

Prediksi 3 bulan ke depan secara umum menunjukkan penurunan skor, artinya optimisme meningkat terhadap kondisi ekonomi secara umum, maupun untuk setiap indikator ekonomi makro pembentuknya. Keadaan ini tidak lepas dari karakteristik kondisi ekonomi Kota Salatiga. Cakupan wilayah yang tidak terlalu luas yang dikelilingi oleh masyarakat pedesaan mempengaruhi pandangan masyarakat terkait dengan pemenuhan kebutuhan hidup. Masyarakat dengan kondisi seperti ini dapat memenuhi kebutuhannya melalui hal-hal yang tersedia di sekitarnya. Seiring dengan pemulihan ekonomi pasca pandemi, meskipun perbaikan keadaan ekonomi belum terlalu terlalu signifikan namun dapat memicu munculnya harapan masyarakat akan kondisi yang lebih baik. Karakteristik penduduk dengan dominasi masyarakat pedesaan yang telah terbiasa memenuhi kebutuhannya melalui apa yang ada di sekitarnya ketika berhadapan dengan dinamika pasar yang cenderung mengalami inflasi akan mempengaruhi psikologis masyarakat dalam melihat kecenderungan peningkatan harga komoditi. Tidak mengherankan jika di satu sisi harapan akan perbaikan itu meningkat lebih tinggi dibanding rata-rata nasional, namun pandangan terhadap tingkat inflasi juga lebih tinggi dilihat dari daya beli masyarakat yang didominasi karakteristik masyarakat pedesaan.





Persepsi Tantangan Ekonomi

Tabel 1. Lima Tantangan Ekonomi Terbesar dari Cabang Salatiga

Di Tingkat Nasional		Di Tingkat Daerah	
Kondisi Saat ini	Prediksi 3 Bulan Kedepan	Kondisi Saat ini	Prediksi 3 Bulan Kedepan
1. Gejala dan kondisi politik dalam negeri	1. Defisit APBN	1. Volatilitas kurs	1. Volatilitas kurs
2. Pertumbuhan investasi yang melambat	2. Pertumbuhan investasi yang melambat	2. Gejala dan kondisi politik dalam negeri	2. Defisit APBN
3. Kenaikan suku bunga kredit	3. Volatilitas kurs	3. Defisit APBN	3. Kenaikan suku bunga kredit
4. Volatilitas kurs	4. Gejala dan kondisi politik dalam negeri	4. Kenaikan suku bunga kredit	4. Pertumbuhan investasi yang melambat
5. Defisit APBN	5. Ketersediaan bahan pokok yang terbatas	5. Pertumbuhan investasi yang melambat	5. Gejala dan kondisi politik dalam negeri

Analisa:

Terdapat perbedaan urutan 5 tantangan ekonomi terbesar pada tingkat nasional dan daerah, baik pada saat ini maupun prediksi 3 bulan ke depan. Responden menilai gejala dan kondisi politik dalam negeri sebagai tantangan utama pada tingkat nasional sementara volatilitas kurs adalah tantangan utama pada tingkat Kota Salatiga. Sementara itu, prediksi 3 bulan mendatang menunjukkan bahwa defisit APBN menjadi tantangan utama di tingkat nasional sedangkan volatilitas kurs adalah tantangan utama di Kota Salatiga. Perbedaan ini menunjukkan bahwa responden menilai tantangan berdasarkan karakteristik daerah yang berbeda dengan tingkat nasional. Kesederhanaan masyarakat kota Salatiga menyebabkan masyarakat cenderung hanya melihat hal-hal yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Masyarakat kota Salatiga nampaknya melihat tantangan ekonomi dimulai dengan apa yang paling dekat dan relevan dengan dirinya. Setelah itu baru melihat hal-hal lain yang lebih makro dan umum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Persepsi Kemampuan Pemerintah

Tabel 2. Top-5 Persepsi Kemampuan Pemerintah berdasarkan cabang Salatiga

Pemerintah Pusat	Pemerintah Daerah
1. Menyediakan dan merawat infrastruktur	1. Menciptakan rasa aman dan tenteram
2. Peningkatan human capital (termasuk peningkatan sumberdaya manusia yang berkualitas dan peningkatan kesehatan masyarakat)	2. Peningkatan human capital (termasuk peningkatan sumberdaya manusia yang berkualitas dan peningkatan kesehatan masyarakat)
3. Menciptakan rasa aman dan tenteram	3. Menstabilkan harga barang dan jasa serta menjamin ketersediaan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat
4. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan menciptakan lapangan kerja	4. Menyediakan dan merawat infrastruktur
5. Menstabilkan harga barang dan jasa serta menjamin ketersediaan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat	5. Perbaikan sistem logistik untuk kelancaran distribusi





Analisa:

Perbedaan persepsi responden juga nampak dalam menilai kemampuan pemerintah pusat dan daerah, di mana urutan pertama kemampuan pemerintah pusat adalah dalam menyediakan dan merawat infrastruktur sedangkan menciptakan rasa aman dan tenteram kemampuan pemerintah daerah yang berada pada urutan teratas. Hal ini dapat dipahami mengingat prestasi kota Salatiga sebagai kota paling toleran se Indonesia menjadi prestasi pemerintah Kota sehingga dianggap mampu menciptakan rasa aman dan tenteram meskipun masyarakat Kota Salatiga relatif majemuk. Sedangkan pemerintah pusat dianggap berhasil dalam menyediakan dan merawat infratsruktur, yang sejalan dengan fokus pemerintahan kabinet Presiden Jokowi. Karakteristik masyarakat kota salatiga yang didominasi karakteristik masyarakat pedesaan masih memiliki sudut pandang yang lebih mengutamakan hal-hal yang humanis dibanding dengan hal-hal yang bersifat fisik. Hubungan dengan sesama di Kota Salatiga masih dilihat sebagai hal baik dalam kehidupan bermasyarakat. Sementara terkait dengan pembangunan fisik, pembangunan kota Salatiga dalam beberapa tahun terakhir ini kurangmemperlihatkan perkembangan yang signifikan. Meskipun proyek pembangunan nasional melalui jalan TOL melewati Kota Salatiga, namun pengadaan jalan tol dekat kota Salatiga lebih dimaknai sebagai kebutuhan masyarakat nasional dan bukan masyarakat kota Salatiga.





Laporan Survei Indikator Survei Ekonomi Indonesia (ISEI)

Index Cabang: Samarinda

Tim Peneliti/penulis :

1. Dr.Aji Sofyan Effendi,SE,MSi
2. Musa Ibrahim,SE,MM
3. M.Ikbal, SE, MSA, CSRA

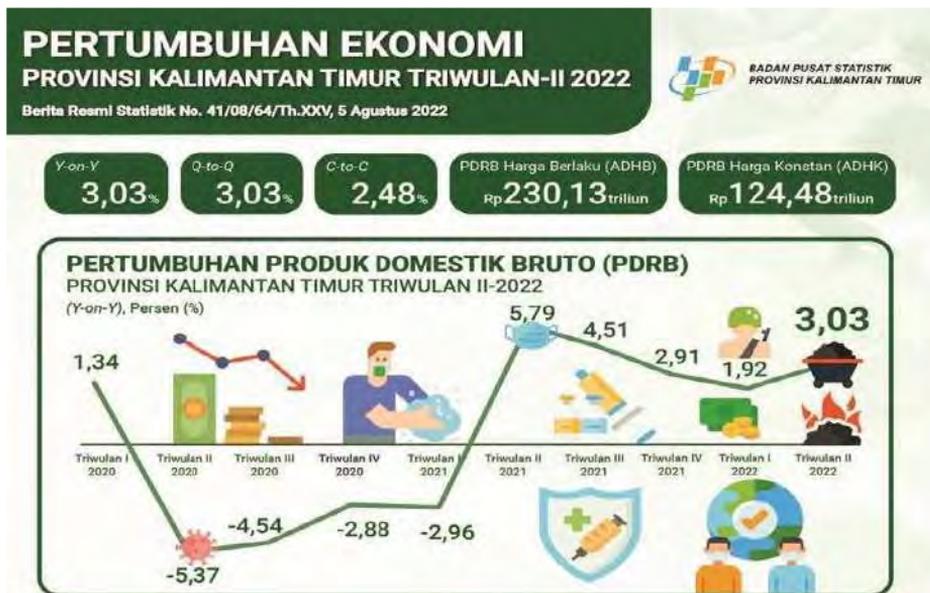
GAMBARAN UMUM PEREKONOMIAN KALIMANTAN TIMUR.

Propinsi Kalimantan Timur, merupakan daerah yang kaya akan sumber daya alam, seperti minyak dan gas bumi serta penggalian secara umum, 2 leading sector inilah yang menjadi mesin penggerak perekonomian Kalimantan timur secara umum, namun demikian pada awal tahun 2022 diwarnai dengan gelombang baru kasus Covid-19 akibat penyebaran Varian Omicron. pemerintah mencatat perekonomian Regional Kaltim Triwulan IV 2021 tumbuh sebesar 2,91 persen (yoy). Dari sisi produksi, pertumbuhan terjadi pada lapangan usaha konstruksi, sementara dari sisi pengeluaran terjadi pada komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). Kontribusi Kalimantan Timur cukup dominan dari total PDRB Kalimantan, yaitu sebesar 49,66 persen. dalam perkembangan selanjutnya perekonomian kalimantan timur tahun 2022 mengalami kondisi yang lebih baik yaitu positif sebesar 3,03 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) pada kuartal II/2022. Pertumbuhan ini seiring dengan target Pemerintah Provinsi Kaltim yang sudah ditentukan Bappenas yaitu sebesar 3,5 persen \pm 1 pada akhir tahun. Triwulan II-2022 terhadap Triwulan I-2022 mengalami pertumbuhan sebesar 3,03 persen (q-to-q). Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi secara q-to-q pada Triwulan II-2022 dicapai oleh Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib yang tumbuh sebesar 8,32 persen, Pertumbuhan ekonomi Triwulan II-2022 (y-on-y) yang bernilai positif terjadi di semua provinsi di Pulau Kalimantan. Provinsi Kaltim memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB Pulau Kalimantan, yaitu mencapai 53,47 persen. Perekonomian Provinsi Kaltim Triwulan II-2022 berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp230,13 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp124,48 triliun.



Secara grafis gambaran makro perekonomian Kalimantan Timur dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 1. Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Timur Triwulan II-2022



INFLASI

Pada bulan Juli 2022 ini, ada release Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur (BPS Kaltim) mencatat inflasi sebesar 0,26 persen sepanjang Juli 2022. apabila dilihat secara tahun kalender, inflasi di Kaltim sebesar 4,15 persen (year-to-date/ytd) dan tahun ke tahun mencapai 5,05 persen (year-on-year/yooy). Nilai inflasi dari tahun ke tahun ini menjadi inflasi yang tertinggi sejak tahun 2020, inflasi terjadi karena adanya peningkatan harga pada sembilan kelompok pengeluaran.

Kelompok pengeluaran yang mengalami peningkatan indeks tertinggi secara berturut-turut adalah kelompok pendidikan sebesar 1,31 persen; diikuti oleh kelompok transportasi sebesar 1,20 persen; kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 1,06 persen; kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,49 persen. Kemudian, kelompok rekreasi, olahraga dan budaya sebesar 0,41 persen; kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,34 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,18 persen; kelompok



penyediaan makanan dan minuman/ restoran dengan inflasi sebesar 0,03 persen dan kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,02 persen.

Sedangkan, kelompok yang mengalami penurunan indeks pada Bulan Juli 2022, yaitu kelompok pakaian dan alas kaki sebesar -0,06 persen; dan kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar -0,05 persen. Pada Juli 2022 dari 11 kelompok pengeluaran, 9 kelompok memberikan andil/sumbangan inflasi dan 2 kelompok memberikan andil/sumbangan deflasi, perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari waktu ke waktu menunjukkan pergerakan harga dari paket komoditas yang dikonsumsi oleh rumah tangga.



Adanya external shock seperti perang Rusia vs Ukraina, yang melibatkan negara-negara Eropa juga telah memberikan andil dalam pembentukan inflasi secara global, diawali dengan adanya embargo energi minyak dan gas bumi Rusia, yang mengakibatkan kegoncangan pada penawaran dan permintaan energi BBM global, termasuk di Indonesia, sebagai salah satu negara importir energi BBM, issue kenaikan BBM secara nasional, memberikan dampak derivative berbagai sector lainnya, baik di pasar barang maupun jasa, termasuk Propinsi Kalimantan Timur, sebagai daerah penghasil Migas terbesar di Indonesia.





KENDALA DALAM PEREKONOMIAN KALIMANTAN TIMUR.

1. Sumber pertumbuhan dari sumber daya alam (SDA)

Kelemahan mendasar Kalimantan timur dalam perekonomian adalah hanya mengandalkan pada Sumber Daya Alam (SDA) khususnya 2 leading sector, yaitu minyak/gas bumi dan penggalian secara umum, khususnya batubara, kita memahami bahwa kelebihan sumber daya ala ini sejatinya adalah non renewable resources, sumber daya yang tidak dapat diperbaharui, given dari alam yang sebenarnya juga terbatas jika dieksploitasi terus menerus, sampai pada titik tertentu akan terjadi “ decreasing return “ selama ini kaltim terus menerus mengandalkan pertumbuhannya dari sector ini, dan hanya berharap dari dana perimbangan DBH SDA dalam memperkuat posisi fiscal dalam batang tubuh APBN, sebagai sumber penerimaan utama, baik di tingkat propinsi maupun di 10 kabupaten/kota yang ada di Kalimantan timur. padahal resistensi dari sector SDA ini sangat tinggi, bukan saja resiko atas habisnya SDA tapi juga resiko atas pergeseran dan kejadian perubahan politik global, politik dalam negeri maupun politik di daerah.

Oleh sebab itulah, kedepan propinsi kaltim, harus sudah menjadikan Industri hilir SDA sebagai prioritas kebijakan dalam pembangunan, agar mampu memperkuat struktur pertumbuhan perekonomian maupun keuangan daerah.

2. Kendala Infrastruktur.

Salah satu kendala dalam tumbuh kembangnya perekonomian kaltim, adalah persoalan infrastruktur yang masih sangat buruk, terutama insfrastruktur jalan baik di tingkat propinsi maupun antar kabupaten/kota, 60 % infrastruktur kaltim, berada pada kondisi rusak sedang dan rusak berat, hal ini mengakibatkan terhambatnya arus transportasi manusia, barang maupun jasa, hambatan atas arus transportasi ini mengakibatkan naiknya biaya produksi barang dan jasa yang pada akhirnya mengakibatkan kenaikan terhadap harga. sehingga potensi inflasi di kaltim ini sangat sensitive dan memiliki resiko tinggi.





3. Kendala sumber daya modal daerah

Selama ini Kaltim bertumpu pada sumber daya modal asing dan swasta nasional dalam proses produksi barang/jasa, mayoritas perusahaan-perusahaan besar kelas dunia yang beroperasi di Kaltim adalah berbentuk FDI dan swasta nasional dengan basis entitas bisnisnya tidak berada di Kaltim, namun locus usahanya di Kaltim, seperti perusahaan raksasa batubara, kelapa sawit, dll, tentunya sebagai entitas bisnis yang berorientasi profit murni, maka efek menetes kebawah tidak terjadi, Sebagian besar perusahaan yang mengeruk SDA Kaltim, terjadi “ capital flight “ riset yang kami lakukan tahun 2019 lalu, derajat penghisapan sumber daya alam dan ekonomi Kaltim mencapai 78,3 %, ini artinya dari seluruh proses keuntungan bisnis tersebut yang menetes ke daerah Kaltim hanya tersisa 22,7 %, sementara Kaltim menanggung beban kerusakan sumber daya alam yang sangat massive, social cost nya sangat tinggi.

4. Kinerja Pemerintah daerah

Kami perlu menggarisbawahi bahwa salah satu factor penentu dalam tumbuh kembangnya perekonomian Kaltim adalah kinerja pemerintah daerah, Sebagian besar OPD terperangkan pada tupoksi yang minim akan kreatifitas, sumber daya alam Kaltim, seakan-akan menjadi hak milik penuh entitas bisnis murni, sampai saat ini PERUSDA di Kaltim, masih belum memberikan PAD yang memadai dalam memperkuat posisi APBD di Kaltim, masih dibawah 10 %, bahkan ada Perusda yang sudah puluhan tahun beroperasi di bidang sumber daya alam penggalian batubara, malah tidak memiliki IUP, konsesi wilayahnya semua diserahkan pada swasta murni diluar Kaltim, akar permasalahan ini adalah karena buruknya kinerja pemerintah daerah yang memiliki tupoksi pengawasan dan evaluasi tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Selain itu juga, koordinasi dan harmonisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota juga belum optimal, sehingga banyak keputusan-keputusan yang terkait dengan perekonomian daerah berjalan sectoral dan tidak comprehensive.





Laporan Survei Indikator Survei Ekonomi Indonesia (ISEI)

Index Cabang: Semarang

Tim Penyusun:

1. Prof. Dr. Suharnomo, S.E., M.Si
2. Firmansyah, S.E., M.Si., Ph.D.
3. Fadel Nugraha

Ringkasan Eksekutif

Secara umum persepsi anggota ISEI Cabang Semarang tentang kondisi perekonomian baik nasional dan daerah cenderung membaik dan optimis akan semakin membaik pada 3 bulan ke depan. Nilai ekspektasi setiap indikator baik nasional dan daerah juga tidak terlalu berbeda, meskipun untuk indikator pertumbuhan ekonomi nasional diekspektasikan sedikit menurun pada 3 bulan ke depan sedangkan indikator lainnya optimis membaik. Khusus untuk indikator tingkat pengangguran dan inflasi baik nasional dan daerah diekspektasikan sedikit lebih buruk namun akan membaik pada 3 bulan ke depan.

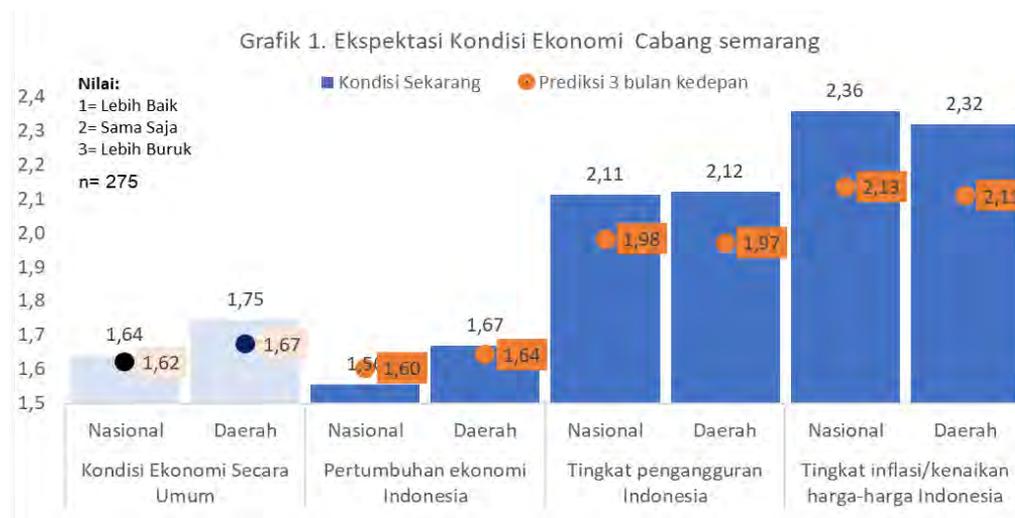
Persepsi anggota ISEI Semarang mengenai tantangan ekonomi saat ini dan prediksi 3 bulan kedepan seluruhnya konsisten sama, artinya diperkirakan tidak akan ada perubahan signifikan dalam tantangan ekonomi antara kondisi saat ini dengan 3 bulan ke depan baik tingkat nasional maupun daerah. Isu tantangan ekonomi urutan 1 sampai 3 baik tingkat nasional dan daerah adalah sama yaitu kenaikan harga komoditas, daya beli masyarakat yang menurun dan ketersediaan bahan pokok yang terbatas, hal ini menandakan bahwa memang ketiga isu inilah yang menjadi fokus utama kondisi ekonomi Indonesia saat ini.

Persepsi anggota ISEI Semarang terhadap kemampuan pemerintah baik di tingkat nasional maupun daerah adalah sama, namun terdapat sedikit perbedaan pada urutannya. Urutan 1 dan 2 persepsi kemampuan pemerintah baik nasional maupun daerah adalah sama, yaitu menegakkan hukum dan memberikan rasa keadilan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penurunan tingkat ketimpangan, hal ini sesuai dengan data indeks gini yang menunjukkan tren penurunan baik Indonesia maupun Jawa Tengah.





Ekspektasi Ekonomi



Analisis:

Secara umum persepsi anggota ISEI Cabang Semarang tentang kondisi perekonomian baik nasional dan daerah cenderung membaik dan optimis akan semakin membaik pada 3 bulan ke depan. Namun untuk indikator pertumbuhan ekonomi nasional diekspektasikan akan sedikit menurun pada 3 bulan ke depan sedangkan indikator lainnya optimis membaik.

Nilai persepsi setiap indikator baik nasional dan daerah tidak terlalu jauh berbeda, sedikit perbedaan terjadi pada nilai indikator kondisi ekonomi secara umum dan indikator pertumbuhan ekonomi. Nilai persepsi indikator kondisi ekonomi secara umum dan indikator pertumbuhan ekonomi pada tingkat nasional lebih baik dibandingkan dengan daerah sehingga dapat diartikan kondisi perekonomian nasional dianggap lebih baik dibandingkan dengan kondisi perekonomian daerah.

Indikator tingkat pengangguran dan inflasi baik nasional dan daerah kondisinya dianggap lebih buruk dibandingkan dengan indikator kondisi ekonomi secara umum dan indikator pertumbuhan ekonomi, khususnya pada indikator tingkat inflasi yang mencapai nilai persepsi 2,36 pada tingkat nasional dan 2,32 pada tingkat daerah, namun demikian kondisi ini diekspektasikan akan lebih baik pada 3 bulan ke depan.

Gambaran persepsi ini sesuai dengan kondisi ekonomi nasional dan daerah di mana pada triwulan II-2022 ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan





sebesar 5,44 persen dibanding triwulan II-2021 (y-on-y), pertumbuhan tersebut lebih tinggi daripada triwulan sebelumnya yang hanya sebesar 5,01 persen (BPS, 2022). Selaras dengan pertumbuhan ekonomi nasional, perekonomian Jawa Tengah Triwulan II-2022 (y-on-y) juga tercatat mengalami pertumbuhan positif yaitu sebesar 5,66 persen, nilai tersebut lebih tinggi daripada pertumbuhan ekonomi nasional dan lebih tinggi daripada pertumbuhan triwulan sebelumnya (BPS Jateng, 2022). Pertumbuhan ekonomi Kota Semarang biasanya tidak terlalu berbeda dengan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi masih belum dapat mengembalikan jumlah pengangguran seperti sebelum pandemi Covid-19. Jumlah pengangguran pada bulan Februari tahun 2022 adalah sebanyak 8,4 juta orang, masih lebih banyak jika dibandingkan dengan kondisi sebelum pandemi pada bulan Februari tahun 2020 sebanyak 6,9 juta orang. Namun demikian jumlah pengangguran pada bulan Februari 2022 lebih rendah jika dibandingkan dengan jumlah pengangguran bulan Februari tahun 2021 sebanyak 8,7 juta orang (BPS, 2022). Berbeda dengan nasional, pengangguran di Jawa Tengah meningkat dibandingkan tahun sebelumnya di mana pada bulan Februari tahun 2022 jumlah pengangguran Jawa Tengah sebesar 1,19 juta orang dan pada bulan Februari tahun 2021 hanya sebesar 1,12 juta orang (BPS Jateng, 2022).

Persepsi terhadap indikator tingkat inflasi adalah lebih buruk dibandingkan dengan indikator lain. Inflasi Indonesia sebesar 0,64 persen (m-to-m) pada bulan Juli tahun 2022 dan naik 2,76 persen dari 2,18 persen menjadi 4,94 persen (y-on-y) mulai dari bulan Januari tahun 2022 sampai dengan bulan Juli 2022 (BPS, 2022). Tidak berbeda jauh dengan Indonesia, inflasi Jawa Tengah pada bulan Juli 2022 sebesar 0,51 persen (m-to-m), sedangkan jika dibandingkan pada tahun sebelumnya inflasi Jawa Tengah sebesar 5,45 persen atau naik 3,54 persen dari bulan Januari 2022. Kota Semarang sendiri mengalami Inflasi sebesar 0,59 persen (m-to-m) dengan inflasi y-on-y sebesar 4,87 persen naik 3,21 persen dari bulan Januari 2022 (BPS Jateng, 2022). Data Inflasi tersebut dapat mendukung persepsi buruk terhadap indikator inflasi dan sekaligus dapat menggambarkan kondisi perekonomian yang sebenarnya terjadi di masyarakat.





Persepsi Kemampuan Pemerintah

Tabel 1. Lima Tantangan Ekonomi Terbesar dari Cabang Semarang

Di Tingkat Nasional		Di Tingkat Daerah	
Kondisi Saat ini	Prediksi 3 Bulan Kedepan	Kondisi Saat ini	Prediksi 3 Bulan Kedepan
1. Kenaikan harga komoditas			
2. Demand Daya beli masyarakat yang menurun			
3. Ketersediaan bahan pokok yang terbatas			
4. Gejala dan kondisi politik dalam negeri	4. Gejala dan kondisi politik dalam negeri	4. Pertumbuhan investasi yang melambat	4. Pertumbuhan investasi yang melambat
5. Defisit APBN	5. Defisit APBN	5. Kenaikan suku bunga kredit	5. Kenaikan suku bunga kredit

Analisa:

Persepsi anggota ISEI Semarang mengenai tantangan ekonomi saat ini dan prediksi 3 bulan ke depan seluruhnya konsisten sama, artinya diperkirakan tidak akan ada perubahan signifikan dalam tantangan ekonomi antara kondisi saat ini dengan 3 bulan ke depan baik tingkat nasional maupun daerah. Isu tantangan ekonomi urutan 1 sampai 3 baik tingkat nasional dan daerah adalah sama yaitu kenaikan harga komoditas, demand daya beli masyarakat yang menurun dan ketersediaan bahan pokok yang terbatas, hal ini menandakan bahwa memang ketiga isu inilah yang menjadi fokus utama kondisi ekonomi Indonesia saat ini. Ketiga isu utama ini juga mendukung grafik sebelumnya, dimana kondisi inflasi cenderung memburuk. Kelangkaan bahan pokok dapat menyebabkan kenaikan harga komoditas (inflasi) dan kenaikan harga komoditas yang tak terkendali dapat menyebabkan penurunan daya beli masyarakat.

Perbedaan ditemukan pada urutan ke 3 dan 4 tantangan ekonomi terbesar. Urutan tantangan ke-3 dan 4 pada tingkat nasional adalah gejala dan kondisi politik dalam negeri dan defisit APBN, hal ini dikarenakan sebentar lagi Indonesia akan memasuki tahun pemilihan umum dimana situasi politik akan semakin memanas dan berpotensi mengganggu stabilitas kondisi perekonomian. Berkaitan dengan isu tantangan defisit APBN, defisit APBN Indonesia pada tahun 2022 ditargetkan sebesar Rp840,23 triliun atau sebesar 4,50 persen dari PDB, masih lebih rendah daripada tahun sebelumnya yang sebesar Rp1.006,38 triliun atau sebesar 5,70 persed dari PDB. Sedikit berbeda pada tahun sebelumnya, posisi APBN kuartal I tahun 2022 mengalami surplus sebesar Rp73,59 triliun atau





sebesar 0,39 persen dari PDB. Meskipun target defisit APBN yang lebih rendah daripada tahun sebelumnya dan kondisi kuarta I yang masih surplus, APBN Indonesia masih akan terbebani oleh beberapa proyek strategis diantaranya adalah pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru dan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, hal tersebut menjadikan isu defisit APBN menjadi salah satu prioritas isu tantangan ekonomi Indonesia.

Urutan ke 3 dan 4 tantangan ekonomi terbesar pada tingkatan daerah adalah pertumbuhan investasi yang melambat dan kenaikan suku bunga kredit, hal ini sesuai dengan data pertumbuhan investasi Jawa Tengah sebesar -0,66 persen (y-on-y) yang merupakan pertumbuhan terendah sejak kuartal II tahun 2021, pada kuartal II tahun 2021 pertumbuhan investasi mencapai 11,02 persen namun kemudian terus menurun sampai dengan saat ini dan belum menunjukkan tanda peningkatan (BPS Jateng, 2022). Berkaitan dengan suku bunga kredit sebetulnya mengalami penurunan, menurut data Bank Jateng per 30 Juni 2022 suku bunga kredit untuk korporasi, retail dan mikro masing-masing adalah 6,76 persen, 6,8 persen dan 8,37 persen, angka ini lebih rendah jika dibandingkan dengan suku bunga kredit Bank Jateng per 30 Maret 2022 adalah 7,42 persen untuk korporasi, 8,16 persen untuk retail dan 8,34 persen untuk mikro (Bank Jateng, 2022). Suku bunga saat ini mungkin masih dirasa terlalu tinggi meskipun telah terjadi penurunan.

Persepsi Kemampuan Pemerintah

Tabel 2. Top-5 Persepsi Kemampuan Pemerintah berdasarkan cabang Semarang

Pemerintah Pusat	Pemerintah Daerah
1. Menegakkan hukum dan memberikan rasa keadilan	1. Menegakkan hukum dan memberikan rasa keadilan
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penurunan tingkat ketimpangan dan kemiskinan	2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penurunan tingkat ketimpangan dan kemiskinan
3. Menstabilkan harga barang dan jasa serta menjamin ketersediaan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat	3. Akselerasi pertumbuhan investasi
4. Menciptakan lingkungan hidup hijau, meningkatkan ketahanan bencana, dan meminimalisir dampak perubahan iklim.	4. Menstabilkan harga barang dan jasa serta menjamin ketersediaan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat
5. Akselerasi pertumbuhan investasi	5. Menciptakan lingkungan hidup hijau, meningkatkan ketahanan bencana, dan meminimalisir dampak perubahan iklim.





Analisa:

Secara umum persepsi anggota ISEI Semarang terhadap kemampuan pemerintah baik di tingkat nasional maupun daerah adalah sama, namun terdapat sedikit perbedaan pada urutannya. Urutan 1 dan 2 persepsi kemampuan pemerintah baik nasional maupun daerah adalah sama, yaitu menegakkan hukum dan memberikan rasa keadilan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penurunan tingkat ketimpangan, hal ini sesuai dengan data indeks gini yang menunjukkan tren penurunan baik Indonesia maupun Jawa Tengah, nilai indeks gini Indonesia tahun 2022 adalah 0,384, nilai itu telah turun 0,029 poin dari tahun 2013 yang sebesar 0,413 namun penurunan ini masih lebih tinggi jika dibandingkan tahun 2009 dimana indeks gini Indonesia pada tahun tersebut adalah 0,367. Jawa Tengah memiliki nilai indeks gini yang sedikit lebih rendah daripada Indonesia yaitu sebesar 0,374 atau telah turun 0,013 poin dari tahun 2013 yang sebesar 0,387 namun demikian nilai ini juga masih tidak lebih rendah dibandingkan tahun 2009 yang hanya sebesar 0,319 (BPS, 2022). Nilai indeks gini baik di nasional maupun di daerah memang terhitung belum pernah lebih rendah dibandingkan tahun 2009 namun tren penurunan ini sudah cukup menandakan bahwa ketimpangan pendapatan baik di nasional dan daerah sudah mulai membaik dan menuju kesetaraan.

Perbedaan urutan persepsi kemampuan pemerintah terdapat pada urutan ke 3 sampai dengan 5. Kemampuan pemerintah untuk menstabilkan harga barang dan jasa serta menjamin ketersediaan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat merupakan urutan ke-3 pada tingkatan nasional sedangkan pada tingkatan daerah menjadi urutan ke-4, hal ini dikarenakan kenaikan inflasi Indonesia meskipun cukup signifikan meningkat dari awal tahun namun masih cukup terkendali jika dibandingkan dengan negara lain. Inflasi Indonesia tercatat sebesar 4,4 persen (y-on-y), angka ini masih lebih rendah jika dibandingkan dengan Korea (6,1 persen), Inggris (8,2 persen), Amerika (9,1 persen) dan Uni Eropa (9,6 persen) (BPS, 2022).

Persepsi kemampuan pemerintah dalam menciptakan lingkungan hidup hijau, meningkatkan ketahanan bencana dan meminimalisir dampak perubahan iklim menjadi urutan ke-4 pada tingkatan nasional dan pada tingkatan daerah menjadi urutan ke-5, hal ini dikarenakan proyek untuk menciptakan lingkungan hidup hijau melalui *net-zero emission* dengan cara mengurangi Pembangkit Listrik





Tenaga Uap (PLTU) merupakan prioritas pemerintah pusat dibandingkan dengan pemerintah daerah, namun demikian pemerintah daerah juga tetap memiliki andil dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi hijau demi menciptakan lingkungan hidup hijau yang baik.

Persepsi kemampuan pemerintah dalam mengakselerasi pertumbuhan investasi pada tingkatan nasional menempati urutan ke-5 sedangkan pada tingkatan daerah menempati urutan ke-3, hal ini menunjukkan bahwa secara persepsi pemerintah daerah dianggap lebih baik dalam mengakselerasi pertumbuhan investasi dibandingkan dengan pemerintah pusat atau nasional. Namun data menunjukkan bahwa pertumbuhan investasi kuartal II Indonesia adalah 3,07 persen (y-on-y) sedangkan pertumbuhan investasi Jawa Tengah pada kuartal yang sama adalah -0,66 persen (y-on-y) (BPS, 2022). Hal ini dapat terjadi kemungkinan dikarenakan dalam hal ini responden memersepsikan investasi di daerah adalah investasi asing dimana menurut BPS Jawa Tengah, penanaman modal asing Jawa Tengah pada tahun 2021 naik 33,4 persen atau sekitar Rp456,6 triliun sedangkan penanaman modal asing Indonesia hanya naik sebesar 10,35 persen atau sekitar Rp28.755 triliun (USD 1=Rp 14.946) (Bank Indonesia, 2022). Jika investasi ini yang dipersepsikan oleh responden maka dapat diartikan bahwa memang pemerintah daerah dianggap lebih baik dalam mengakselerasi pertumbuhan investasi daripada pemerintah pusat.





Laporan Survei Indikator Survei Ekonomi Indonesia (ISEI)

Index Cabang: Serang

Tim Penyusun:

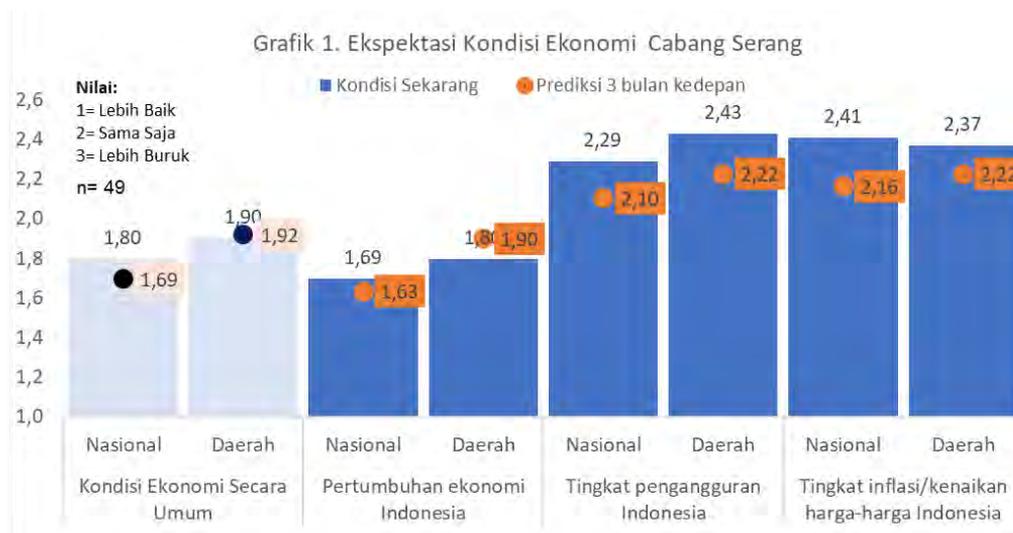
1. Rah Adi Fahmi Ginanjar, SE.,MT
2. Dr. *Indra Suhendra*, SE, M.Si.
3. Mira Maulani Utami, SE., MM
4. Widya Nur Bhakti Pertiwi, SMB., MM

Ringkasan Eksekutif

Ekspektasi ekonomi para ekonom Anggota ISEI Cabang Serang menilai kondisi ekonomi secara umum pada saat ini di tingkat Nasional maupun Provinsi Banten cenderung lebih baik, serta memprediksi 3 bulan ke depan akan menjadi lebih baik dari pada saat ini. Namun, jika dilihat dari masing-masing indikator, terdapat dua dari tiga indikator yang dinilai cenderung sama saja kondisinya, yaitu kondisi tingkat pengangguran dan inflasi baik di tingkat Nasional maupun Provinsi Banten. Meskipun demikian kedua indikator tersebut diprediksi akan menjadi lebih baik untuk 3 bulan ke depan. Berbeda dengan ekspektasi pertumbuhan ekonomi baik di tingkat Nasional maupun Provinsi Banten yang dinilai cenderung lebih baik, meskipun diprediksi pada 3 bulan ke depan akan sedikit lebih lambat dibandingkan kondisi saat ini. Kemudian untuk persepsi tantangan ekonomi dinilai bahwa pertumbuhan investasi yang melambat baik di tingkat nasional maupun provinsi saat ini merupakan suatu tantangan utama, serta diprediksi untuk 3 bulan ke depan yang akan menjadi tantangan utama ekonomi masih pada pertumbuhan investasi yang melambat ditambah volatilitas kurs. Kemudian peningkatan human capital (termasuk sumber daya manusia yang berkualitas dan peningkatan kesehatan masyarakat) dinilai merupakan kemampuan pemerintah pusat yang paling diyakini, sedangkan untuk pemerintah daerah Provinsi Banten adalah menciptakan rasa aman dan tenteram.



Ekspektasi Ekonomi



Analisa:

Kondisi ekonomi secara umum berdasarkan hasil survei terhadap responden anggota ISEI Cabang Serang menunjukkan penilaian yang lebih baik untuk tingkat Nasional dibandingkan Provinsi Banten dan pada kedua tingkatan tersebut menggambarkan prediksi yang lebih baik dalam 3 bulan ke depan dibandingkan kondisi saat ini.

Jika dilihat dari pertumbuhan ekonomi, para anggota ISEI Cabang Serang menilai pertumbuhan ekonomi Nasional saat ini lebih baik dibandingkan provinsi Banten sejalan dengan data BPS yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi triwulan II-2022 terhadap triwulan sebelumnya (q-to-q) Provinsi Banten sebesar 0,95 persen jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Nasional yang mencapai 3,72 persen. Meskipun pertumbuhan ekonomi triwulan II-2022 terhadap triwulan II-2021 (y-on-y) Provinsi Banten sebesar 5,70 persen lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi Nasional 5,44 persen. Lebih lanjut, para anggota memprediksi pertumbuhan ekonomi Nasional akan berada lebih tinggi kembali dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten. Menariknya para anggota memprediksi pertumbuhan ekonomi Nasional untuk 3 bulan ke depan akan lebih baik dibandingkan kondisi saat ini, sedangkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten untuk 3 bulan ke depan tidak akan lebih baik dibandingkan kondisi saat ini. Hal ini dimungkinkan karena berdasarkan data



BPS bahwa beberapa indikator kinerja perekonomian di Provinsi Banten mengalami perkembangan yang semakin menurun, di antaranya:

1. Perkembangan kinerja pertumbuhan ekonomi sektor yang mendominasi struktur perekonomian Provinsi Banten terus mengalami penurunan baik dari sisi produksi maupun pengeluaran, yaitu:
 - a. Pertumbuhan ekonomi Sektor Industri Pengolahan sebesar 10,21 persen pada Q2-2021 turun menjadi 4,26 persen pada Q2-2022
 - b. Pertumbuhan ekonomi Sektor Industri Perdagangan sebesar 4,26 persen pada Q2-2021 turun menjadi 3,99 persen pada Q2-2022
 - c. Pertumbuhan ekonomi Sektor Konstruksi sebesar 14,36 persen pada Q2-2021 turun menjadi 6,25 persen pada Q2-2022
 - d. Pertumbuhan ekonomi Sektor Transportasi dan Pergudangan sebesar 43,05 persen pada Q2-2021 turun menjadi 28,73 persen pada Q2-2022
 - e. Pertumbuhan ekonomi Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga sebesar 5,85 persen pada Q2-2021 turun menjadi 4,82 persen pada Q2-2022
 - f. Pertumbuhan ekonomi Pembentukan Modal Tetap Bruto sebesar 6,38 persen pada Q2-2021 turun menjadi 2,28 persen pada Q2-2022
 - g. Pertumbuhan ekonomi Ekspor sebesar 13,78 persen pada Q2-2021 turun menjadi 8,96 persen pada Q2-2022
 - h. Pertumbuhan ekonomi Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar 0,03 persen pada Q2-2021 turun menjadi -0,64 persen pada Q2-2022

2. Perkembangan kinerja sektor sumber pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten terus mengalami penurunan baik dari sisi produksi maupun pengeluaran, yaitu:
 - a. Sumber pertumbuhan ekonomi dari Sektor Industri Pengolahan sebesar 3,40 persen pada Q2-2021 turun menjadi 1,43 persen pada Q2-2022
 - b. Sumber pertumbuhan ekonomi dari Sektor Transportasi Pergudangan sebesar 1,57 persen pada Q2-2021 turun menjadi 1,37 persen pada Q2-2022





- c. Sumber pertumbuhan ekonomi dari Sektor Konstruksi sebesar 1,42 persen pada Q2-2021 turun menjadi 0,65 persen pada Q2-2022
- d. Sumber pertumbuhan ekonomi dari Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga sebesar 3,43 persen pada Q2-2021 turun menjadi 2,75 persen pada Q2-2022
- e. Sumber pertumbuhan ekonomi dari Total Net Ekspor sebesar 3,38 persen pada Q2-2021 turun menjadi 2,24 persen pada Q2-2022
- f. Sumber pertumbuhan ekonomi dari Pembentukan Modal Tetap Bruto sebesar 2,11 persen pada Q2-2021 turun menjadi 0,73 persen pada Q2-2022.

Kemudian jika dilihat dari tingkat pengangguran, para anggota ISEI Cabang Serang menilai tingkat pengangguran Nasional saat ini cenderung sama saja dibandingkan provinsi Banten, namun dinilai kondisi pengangguran tersebut lebih baik pada tingkat Nasional dibandingkan Provinsi Banten sejalan dengan data BPS Februari 2022 yang menyatakan bahwa tingkat pengangguran Provinsi Banten sebesar 9,01 persen lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Nasional sebesar 5,83 persen. Lebih lanjut, para anggota memrediksi tingkat pengangguran Provinsi Banten masih akan berada lebih tinggi kembali dibandingkan dengan tingkat pengangguran Nasional. Selanjutnya para anggota memrediksi tingkat pengangguran Nasional maupun Provinsi Banten untuk 3 bulan ke depan akan lebih baik dibandingkan kondisi saat ini.

Kondisi tenaga kerja di Provinsi Banten pada tahun 2022 kembali mengalami perbaikan seiring dengan pemulihan ekonomi Banten yang semakin menguat. Pemulihan kinerja korporasi menjadi pendorong peningkatan penduduk bekerja walaupun secara keseluruhan status pekerjaan utama masih didominasi oleh wirausahawan. Perkembangan pemulihan ekonomi Banten terus menunjukkan perbaikan, pertumbuhan ekonomi Banten pada triwulan I 2022 mengalami pertumbuhan sebesar 4,97% (y-on-y). Pemulihan ekonomi Banten juga ditandai dengan membaiknya Tingkat Pengangguran Terbuka, walaupun jumlah penduduk bekerja masih belum meningkat seperti sebelum pandemi. BPS Provinsi Banten mencatat jumlah angkatan kerja pada Februari 2022 sebanyak 5,91 juta orang atau turun sebesar 5,45 persen secara y-on-y. Penurunan jumlah





angkatan kerja pada Februari 2022 dibandingkan periode yang sama tahun lalu tercatat lebih rendah jika dibandingkan penurunan pengangguran. Pengangguran tercatat turun sejumlah 10,4% dibandingkan Februari 2021 yang mencapai 562.000 orang. Hal ini mendorong Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang tinggi di Provinsi Banten yakni 8,53 persen pada Februari 2022. Meskipun demikian, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja naik sebesar 0,80% dibandingkan periode yang sama. Apabila dibandingkan dengan periode sebelumnya, khususnya periode selama pandemi Covid-19, TPT menunjukkan penurunan sebesar 0,48%. Pengangguran yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 pada Februari 2021 sebesar 104,31 ribu orang dan pada Februari 2022 menurun menjadi 51,38 ribu orang sehingga secara total Penduduk Usia Kerja (PUK) yang terdampak Covid-19 turun sebesar 53,09% dibandingkan Februari 2021. Apabila dibandingkan dengan TPT Nasional dan kawasan regional lainnya, TPT Provinsi Banten tetap masih lebih tinggi. Pada periode Februari 2022, angka TPT Provinsi Banten masih lebih tinggi dibandingkan dengan TPT Nasional yang tercatat sebesar 5,83 persen. Oleh karena itu, guna melanjutkan trend penurunan TPT maka dibutuhkan upaya bersama untuk memastikan ketersediaan lapangan kerja dan investasi di Provinsi Banten. Disisi lain, perlu juga adanya penyesuaian (matching) antara kebutuhan Industri dengan kurikulum pendidikan atau pelatihan SDM sehingga mendorong tingkat penyerapan tenaga kerja di berbagai sektor usaha, terutama di sektor industri pengolahan, perdagangan, konstruksi, real estate serta transportasi dan pergudangan yang menjadi penopang perekonomian Provinsi Banten.

Terakhir jika dilihat dari inflasi, para anggota ISEI Cabang Serang menilai inflasi cenderung sama saja di mana tingkat Nasional saat ini lebih baik dibandingkan provinsi Banten. Namun para anggota memprediksi tingkat inflasi Provinsi Banten akan berada lebih baik dibandingkan dengan tingkat inflasi Nasional. Selanjutnya para anggota memprediksi tingkat inflasi Nasional maupun Provinsi Banten untuk 3 bulan ke depan akan lebih baik dibandingkan kondisi saat ini.

Indeks Harga Konsumen (IHK) Provinsi Banten pada triwulan I-2022 tercatat sebesar 3,00 persen (y-on-y), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 1,91 persen (y-on-y). Laju inflasi tersebut lebih tinggi dibandingkan historis 3 tahun terakhir yaitu sebesar 2,41 persen (y-on-y) serta realisasi inflasi Nasional dan regional Jawa yang masing-masing tercatat sebesar 2,64 persen (y-





on-y) dan 2,49 persen (y-on-y). Berdasarkan kelompok pengeluarannya, kenaikan tekanan inflasi tahunan pada triwulan I-2022 disebabkan oleh kenaikan andil pada hampir seluruh kelompok pengeluaran, yakni 10 (sepuluh) dari 11 (sebelas) kelompok. Adapun kenaikan terutama terjadi pada Kelompok Makanan, Minuman, dan tembakau serta Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga serta Kelompok Transportasi. Apabila dilihat dari komoditasnya, minyak goreng, mobil, daging ayam ras, sewa rumah dan rokok kretek filter menjadi penyumbang inflasi tertinggi pada triwulan ini. Secara spasial, pada triwulan I-2022 meningkatnya inflasi tahunan Banten didorong oleh kenaikan harga yang terjadi di seluruh kota pantauan IHK, yakni Kota Serang, Kota Tangerang dan Kota Cilegon.

Persepsi Tantangan Ekonomi

Tabel 1. Lima Tantangan Ekonomi Terbesar dari Cabang Serang

Di Tingkat Nasional		Di Tingkat Daerah	
Kondisi Saat ini	Prediksi 3 Bulan Kedepan	Kondisi Saat ini	Prediksi 3 Bulan Kedepan
1. Pertumbuhan investasi yang melambat	1. Pertumbuhan investasi yang melambat	1. Pertumbuhan investasi yang melambat	1. Volatilitas kurs
2. Gejala dan kondisi politik dalam negeri	2. Defisit APBN	2. Volatilitas kurs	2. Pertumbuhan investasi yang melambat
3. Volatilitas kurs	3. Volatilitas kurs	3. Kenaikan suku bunga kredit	3. Defisit APBN
4. Ketersediaan bahan pokok yang terbatas	4. Demand Daya beli masyarakat yang menurun	4. Gejala dan kondisi politik dalam negeri	4. Gejala dan kondisi politik dalam negeri
5. Defisit APBN	5. Ketersediaan bahan pokok yang terbatas	5. Defisit APBN	5. Kenaikan suku bunga kredit

Analisa:

Persepsi terhadap tantangan ekonomi yang utama untuk kondisi saat ini, baik di tingkat Nasional maupun Provinsi Banten adalah sama, yaitu pertumbuhan investasi yang melambat. Hal ini dimungkinkan karena adanya tantangan ketidakpastian global yang terjadi. Kemudian untuk 3 bulan ke depan yang akan menjadi tantangan ekonomi utama, yaitu pertumbuhan investasi yang melambat yang berkorelasi dengan volatilitas kurs dan tentunya dapat berdampak pada tantangan ekonomi lainnya.

Kenaikan harga komoditas dunia yang berpengaruh kepada kenaikan harga bahan makanan pokok, seperti kenaikan harga minyak goreng, kedelai dan gandum. Kemudian kenaikan harga bahan bakar rumah tangga yakni LPG non subsidi serta BBM berpotensi menekan daya beli masyarakat. Ditambah invasi





Rusia ke Ukraina yang menyebabkan tekanan geopolitik sehingga meningkatkan tekanan pada harga emas dunia dan harga minyak dunia yang merupakan sumber bahan baku bagi penopang struktur ekonomi di Provinsi Banten.

Sumber kerentanan juga berasal dari karakteristik impor Provinsi Banten didominasi oleh bahan baku serta barang modal untuk sektor Industri Pengolahan. Secara umum, impor bahan baku tersebut digunakan untuk produksi sub sektor industri unggulan. Sementara impor barang modal umumnya berupa mesin produksi dan peralatan sejalan dengan masih berlanjutnya pembangunan proyek infrastruktur dan pembangunan investasi petrokimia. Dominasi bahan baku impor juga membuat sektor industri akan rentan terhadap pergerakan harga secara global. Selain itu, kondisi geopolitik di negara kawasan konsumen dan produsen juga dapat mempengaruhi fluktuasi harga. Harga Naphtha sebagai bahan baku utama industri petrokimia tercatat mengalami tren meningkat di mana pada triwulan I 2022 tercatat sebesar USD777/MT, meningkat 68.5% (yoy) dibandingkan triwulan I 2021. Hal ini didorong oleh harga minyak mentah Brent yang tetap tinggi. Secara tahunan harga minyak mentah Brent tercatat USD104,4/MT, meningkat 68.8% (yoy) dibandingkan USD61,9/MT pada triwulan I 2021.

Untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk wilayah Banten di tahun 2022 dari sisi pendapatan sedikit mengalami peningkatan, sementara dari sisi belanja mengalami penurunan. Total pagu pendapatan Pemerintah Provinsi Banten dan 8 (delapan) Kabupaten/kota pada tahun 2022 mencapai Rp35,69 triliun, meningkat sebesar 0,2% (yoy) dibandingkan tahun 2021 yang tercatat senilai Rp35,63 triliun. Sementara pagu Belanja pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 7,7% (yoy) dari Rp41,50 triliun pada tahun 2021 menjadi sebesar Rp38,31 triliun pada tahun 2022. Hingga triwulan I 2022, realisasi Pendapatan APBD Pemerintah Provinsi Banten dan 8 (delapan) Kabupaten/Kota di Provinsi Banten mencapai Rp5,96 triliun atau lebih rendah dibandingkan realisasi tahun 2021 senilai Rp6,27 triliun. Kondisi yang relatif sama juga terjadi pada pos belanja di mana persentase realisasi belanja APBD Pemda se-Provinsi Banten baru mencapai 16,7%, lebih rendah dari 17,6% pada triwulan I 2021. Secara nominal realisasi belanja tersebut tercatat senilai Rp4,29 triliun, atau tumbuh 13,3% (yoy) dibandingkan tahun 2021 senilai Rp3,79 triliun, dengan





persentase realisasi belanja triwulan I 2022 sebesar 11,2% dari APBD. Di sisi lain, Pagu Alokasi Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Provinsi Banten tahun 2022 sebesar Rp13,91 triliun atau turun 9,74% (yoy) dibandingkan tahun 2021 yang tercatat sebesar Rp15,41 triliun. Selanjutnya Persentase realisasi APBN triwulan I 2022 di Provinsi Banten terpantau meningkat menjadi 16,0% dibandingkan triwulan I 2021 yang tercatat sebesar 14,4%. Persentase realisasi didorong pada jenis Dana Alokasi Khusus (DAK) dan belanja pegawai.

Intermediasi perbankan dan stabilitas keuangan di Provinsi Banten harus tetap dijaga karena menjadi salah satu pendorong pemulihan ekonomi. Penyaluran kredit dan Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya. Penyaluran kredit yang lebih tinggi ditopang kredit konsumsi yang meningkat seiring bertambahnya keyakinan masyarakat akan perbaikan perekonomian dan kebijakan pelonggaran mobilitas.

Persepsi Kemampuan Pemerintah

Tabel 2. Top-5 Persepsi Kemampuan Pemerintah berdasarkan cabang Serang

Pemerintah Pusat	Pemerintah Daerah
1. Peningkatan human capital (termasuk peningkatan sumberdaya manusia yang berkualitas dan peningkatan kesehatan masyarakat)	1. Menciptakan rasa aman dan tenteram
2. Menyediakan dan merawat infrastruktur	2. Akselerasi pertumbuhan investasi
3. Menciptakan rasa aman dan tenteram	3. Perbaiki sistem logistik untuk kelancaran distribusi
4. Perbaiki sistem logistik untuk kelancaran distribusi	4. Menciptakan lingkungan hidup hijau, meningkatkan ketahanan bencana, dan meminimalisir dampak perubahan iklim.
5. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan menciptakan lapangan kerja	5. Peningkatan human capital (termasuk peningkatan sumberdaya manusia yang berkualitas dan peningkatan kesehatan masyarakat)

Analisa:

Persepsi kemampuan pemerintah di tingkat pusat maupun daerah yang utama terkait peningkatan *human capital* maupun yang lainnya dapat dijaga melalui berbagai kebijakan, di antaranya *mandatory spending* pada bidang pendidikan dan kesehatan yang perlu terus dikawal implementasinya di pusat maupun daerah. Kesenjangan kualitas hidup masyarakat wilayah Banten Utara dengan Banten Selatan masih menjadi permasalahan struktural Provinsi Banten. Hal ini ditunjukkan oleh perbedaan yang signifikan antara Indeks Pembangunan





Manusia (IPM) di kedua wilayah tersebut. Oleh karena itu upaya bersama antar pemangku kebijakan guna mengatasi masalah struktural tersebut menjadi hal yang sangat penting. Hal ini membutuhkan solusi kebijakan struktural untuk meningkatkan pemerataan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Banten.

Pengawasan atas kelancaran lalu lintas logistik impor, kondisi negara asal dan alternatif sumber bahan baku perlu terus dijaga untuk mendukung kinerja korporasi secara berkelanjutan. Pengawasan atas kelancaran lalu lintas logistik impor, kondisi negara asal dan alternatif sumber bahan baku perlu terus dijaga untuk mendukung kinerja korporasi secara berkelanjutan.

Dari sisi investasi, investasi swasta masih akan menjadi motor penggerak pertumbuhan di samping pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN). Mengingat letak geografis yang strategis, menjadikan Provinsi Banten salah satu provinsi tujuan penanaman modal terbesar di Indonesia. Saat ini investasi swasta yang masih berjalan merupakan proyek investasi yang bersifat *multiyears*, seperti pembangunan pabrik di sektor petrokimia, kimia, alas kaki, baja, otomotif, makanan minuman, dan sebagainya. Di sisi investasi pemerintah, proyek pembangunan Pembangkit listrik 9-10 Suralaya dan PLTU Jawa 7 unit 2, diperkirakan masih akan terus berlangsung pada tahun 2022. Demikian juga dengan proyek infrastruktur pemerintah yang termasuk sebagai PSN yang masih dalam proses penyelesaian, antara lain Tol Serpong-Balaraja Seksi II (Legok–Tigaraksa Selatan) dan Seksi III (Tigaraksa Selatan–Balaraja) dengan total nilai investasi sebesar Rp14,37 triliun dan biaya konstruksi sebesar Rp6,17 triliun, pembangunan Bendungan Karian, dan Sarana dan Prasarana Air Baku Karian serta pembangunan Kota Baru Maja.

Pemerintah perlu menciptakan lapangan pekerjaan yang bersifat padat karya, baik industri pengolahan maupun industri lainnya, tanpa mengabaikan industri padat modal. Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah diharapkan dapat mendorong perkembangan dan masuknya investasi dengan memberikan berbagai insentif ataupun kemudahan perizinan maupun fasilitas pendukung lainnya. Selain itu, upaya peningkatan kualitas dan penyesuaian kualifikasi pendidikan menjadi hal yang harus terus menjadi fokus perhatian pemerintah,





terutama pada sekolah kejuruan. Program *Link and Match* yang dilakukan Kementerian Perindustrian, yaitu penandatanganan MoU kerja sama antara SMK dengan dunia usaha dan industri di Provinsi Banten untuk memberikan keterampilan bagi lulusan SMK sesuai kebutuhan industri perlu didorong dan diawasi sehingga mampu mencetak lulusan-lulusan yang siap kerja. Terkait dengan pengembangan SDM di Banten, pemerintah daerah tengah mengencangkan pemanfaatan skema insentif *Super Tax Deduction (STD)*. Fasilitasi oleh pemerintah daerah melalui pembentukan klinik STD sehingga mempermudah bagi industri yang akan memanfaatkan insentif dimaksud dan selaras dengan program kampus merdeka yang telah diinisiasi sebelumnya. Selain itu, guna meningkatkan eksistensi peran sektor pertanian agar produktivitas dan pendapatan sektor pertanian dapat bersaing dengan sektor-sektor lainnya, maka dibutuhkan suatu inovasi di bidang pertanian seperti program tani *milenial* yang memberikan fasilitas kepada petani muda terpilih berupa pemberian pinjaman lahan untuk bertani.

Namun sebelum hal di atas terwujud maka pemerintah perlu membangun koordinasi dengan semua *stakeholder* terkait guna menjaga keamanan di berbagai lini agar kemampuan pemerintah di atas dapat diimplementasikan dengan baik.





Laporan Survei Indikator Survei Ekonomi Indonesia (ISEI)

Index Cabang: Surabaya

Tim Penyusun :

1. Dr. Eko Purwanto

Ringkasan Eksekutif

Pemulihan ekonomi domestik, ditopang oleh peningkatan konsumsi dan investasi nonbangunan serta kinerja ekspor yang lebih tinggi dari proyeksi awal. Dari sisi eksternal, kinerja ekspor lebih tinggi dari prakiraan sebelumnya, khususnya pada komoditas batu bara, bijih logam, dan besi baja didukung oleh permintaan ekspor yang tetap kuat dan harga komoditas global yang masih tinggi. Pertumbuhan ekonomi juga ditopang oleh perbaikan berbagai lapangan usaha, seperti Industri Pengolahan, Perdagangan, serta Transportasi dan Pergudangan. Sementara itu, secara spasial, perbaikan ekonomi ditopang oleh seluruh wilayah terutama Jawa, Sumatera, dan Sulawesi-Maluku-Papua (Sulampua). Ke depan, perbaikan perekonomian domestik didukung oleh peningkatan mobilitas, sumber pembiayaan, dan aktivitas dunia usaha. Namun demikian, perlambatan ekonomi global dapat berpengaruh pada kinerja ekspor, sementara kenaikan inflasi dapat menahan konsumsi swasta.

Pemulihan ekonomi semakin pesat meski dengan level pertumbuhan yang berbeda-beda setiap wilayah. Struktur ekonomi nasional masih di dominasi oleh Pulau Jawa dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 56,55%; Pulau Sumatera sebesar 22,03%; Pulau Kalimantan sebesar 9,09%; Pulau Sulawesi sebesar 7,09%; Pulau Bali dan Nusa Tenggara sebesar 2,73%; Pulau Maluku dan Papua sebesar 2,51%. Perekonomian Pulau Jawa, terbesar adalah Provinsi DKI Jakarta dengan kontribusi 29,46%; diikuti Provinsi Jawa Timur sebesar 25,30%; dan Provinsi Jawa Barat sebesar 22,48%. Provinsi Jawa Timur mengalami pertumbuhan (y-on-y) tertinggi sebesar 5,74%; diikuti Banten sebesar 5,70%; dan Jawa Barat sebesar 5,68%. Perekonomian Jawa Timur tahun 2022, diperkirakan mengalami akselerasi dikisaran 5,0% - 5,8% (yoy) dibandingkan tahun 2021 yang tumbuh sebesar 3,6% (yoy) sejalan dengan tren perbaikan ekonomi global dan domestik.

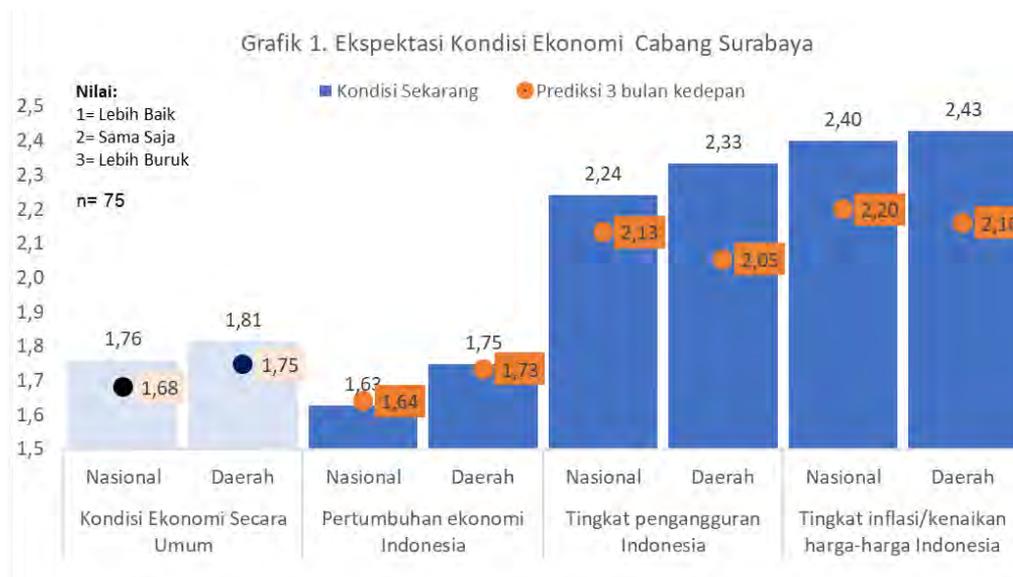
Provinsi Jawa Timur, seiring dengan penanganan kesehatan dari Pemerintah diperkirakan dapat menjaga pemulihan perekonomian terus meningkat. Ekonomi Jawa Timur pada Triwulan II-2022 meningkat sebesar 5,49% (c-to-c). Kinerja pertumbuhan ekonomi Jawa Timur masih didominasi oleh Komponen PK-RT yang mencakup lebih dari separuh PDRB Jawa Timur yaitu sebesar 60,09%; diikuti oleh komponen PMTB sebesar 26,59%; Komponen Ekspor Luar Negeri sebesar 13,49%; Komponen PK-P sebesar 4,75%; Komponen PK-LNPRT sebesar 1,19%; dan Komponen Perubahan Inventori sebesar 1,01 persen. Sementara itu, Komponen Impor Luar Negeri sebagai faktor pengurang dalam PDRB memiliki peran sebesar 19,47 persen. Kenaikan inflasi ini sejalan dengan kinerja ekonomi Jawa Timur pada triwulan I 2022 yang tumbuh lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya.

Optimisme tersebut di dorong oleh mobilitas yang terus meningkat sejalan dengan akselerasi vaksinasi Covid-19, kinerja ekspor yang tetap kuat, pembukaan sektor-sektor prioritas yang semakin luas, stimulus kebijakan yang berlanjut, serta masih berlanjutnya penyelesaian proyek-proyek yang terdapat dalam Proyek Strategis Nasional (PSN). Kondisi eksternal, pemulihan ekonomi dunia mendorong volume perdagangan seiring masih tingginya harga komoditas utama, sehingga berdampak pada perbaikan ekspor. Dari domestik, aktivitas ekonomi yang mengadaptasi kenormalan baru, berlanjutnya stimulus Pemerintah dan arah kebijakan fiskal serta moneter yang tetap akomodatif mampu mendorong pemulihan pada permintaan domestik. Namun, pemulihan ekonomi Jawa Timur juga masih dibayangi tantangan ketidakpastian pemulihan global termasuk akibat dari tidak meratanya pemulihan antara negara berkembang dan negara maju.





Ekspektasi Ekonomi



Analisa Ekspektasi Ekonomi

Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi global akan melambat hingga tahun 2023, di tengah ancaman dari varian baru Covid-19 serta kenaikan inflasi, tingkat utang, dan ketimpangan pendapatan. Menurut laporan Global Economic Prospects terbaru Bank Dunia, pertumbuhan ekonomi global diperkirakan melambat menjadi 4,1 persen pada tahun 2022 dari level 5,5 persen pada 2021. Pada tahun 2023, Bank Dunia kembali memangkas prospek pertumbuhan ekonomi global menjadi 3,2 persen karena dukungan fiskal dan moneter di seluruh dunia mulai dicabut. Hal tersebut juga sejalan dengan perkiraan dari Dana Moneter Internasional (IMF) pada bulan lalu yang memperkirakan pertumbuhan global akan menjadi 5,9% persen pada tahun 2021 lalu melambat menjadi 4,4% pada tahun 2022, atau lebih rendah 0,5% dari perkiraan pada Oktober 2021 lalu sebagai efek antisipasi pembatasan mobilitas, penutupan perbatasan, dan dampak kesehatan dari penyebaran varian Omicron.

Bank Dunia lebih lanjut menyatakan bahwa Perlambatan tersebut sejalan dengan kesenjangan tingkat pertumbuhan ekonomi antara negara-negara maju dan negara-negara berkembang. Pertumbuhan di negara-negara maju diperkirakan akan turun dari 5 persen pada 2021 menjadi 3,8 persen pada 2022 dan 2,3 persen pada 2023. Lalu sebagai catatan bahwa perkiraan dari lembaga-lembaga





tersebut belum memperkirakan dampak perang Ukraina vs Rusia yang memanas di awal tahun 2022 ini.

Bertolak dari kondisi eksternal, pekonomi domestik berfokus pada pemulihan ekonominya. Berlanjutnya perbaikan tersebut ditopang oleh peningkatan permintaan domestik seiring terkendalinya penyebaran kasus COVID-19 yang mendorong perbaikan mobilitas. Perkembangan ini didukung berlanjutnya vaksinasi dosis 2 dan booster serta stimulus kebijakan. Kinerja konsumsi maupun investasi diprakirakan terus membaik di tengah prospek ekspor yang tetap positif ditopang tingginya harga komoditas, meski lebih terbatas karena tekanan global. Konflik Rusia-Ukraina yang disertai pengenaan sanksi yang lebih luas, serta kebijakan zero COVID-19 di Tiongkok telah memicu gangguan rantai suplai. Kondisi tersebut terjadi di tengah meluasnya kebijakan proteksionisme sehingga mendorong kenaikan harga komoditas global yang berdampak pada peningkatan tekanan inflasi di sejumlah negara. Hal ini direspons sebagian bank sentral dengan menempuh pengetatan kebijakan moneter yang lebih akseleratif melalui kenaikan suku bunga kebijakan dan pengetatan likuiditas untuk meredam tekanan inflasi dan ketidakpastian di pasar keuangan, yang berpotensi menahan pemulihan perekonomian global. Kenaikan inflasi global di tengah prospek pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah berpotensi memberikan risiko terjadinya stagflasi. Permintaan global terindikasi melemah, tercermin dari penurunan proyeksi world trade volume (WTV) yang dapat memengaruhi kinerja ekspor daerah. Tekanan eksternal tersebut mewarnai dinamika perekonomian domestik sepanjang triwulan II 2022.

Optimisme terhadap prospek permintaan domestik mendukung proses perbaikan kinerja Lapangan Usaha utama daerah meski dibayangi potensi kenaikan biaya input. Hasil survei resiliensi korporasi di Lapangan Usaha Utama mengindikasikan sebagian korporasi terutama di sektor non-tradable masih merasakan dampak dari pandemi COVID-19. Hal ini memengaruhi serapan tenaga kerja dan utilisasi dari kapasitas produksi. Meskipun demikian, pelaku usaha tetap optimis memandang prospek 2022 terutama dari pasar domestik di tengah tantangan permintaan global terutama pada korporasi berorientasi ekspor. Prospek peningkatan permintaan domestik ini tidak terlepas dari relatif terkendalinya kasus COVID-19 di seluruh wilayah dan peningkatan mobilitas sejak akhir triwulan I 2022. Kondisi tersebut diprakirakan mendukung kinerja Lapangan





Usaha Perdagangan dan Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (Akmamin). Tetap kuatnya penjualan ritel seiring kenaikan kunjungan ke pusat perbelanjaan dan peningkatan target penjualan kendaraan bermotor menjadi indikator dari prospek kinerja di kedua sektor tersier ini.

Pertumbuhan ekonomi, struktur perekonomian Indonesia pada triwulan II-2022 dipimpin oleh provinsi di Pulau Jawa dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 56,55%; diikuti Pulau Sumatera sebesar 22,03%; Pulau Kalimantan sebesar 9,09%; Pulau Sulawesi sebesar 7,09%; Pulau Bali dan Nusa Tenggara sebesar 2,73%; serta Pulau Maluku dan Papua sebesar 2,51%. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan II-2022 tumbuh positif sebesar 3,72%. Pertumbuhan terjadi pada hampir semua lapangan usaha, kecuali Konstruksi yang berkontraksi sebesar 6,05 persen. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 13,15% dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 9,28%. Sementara itu, Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; serta Industri Pengolahan yang memiliki peran dominan juga mengalami pertumbuhan masing-masing sebesar 3,56%; 2,17%; dan 0,04%. Sementara itu, beberapa lapangan usaha lainnya yang tumbuh tinggi di antaranya Jasa Pendidikan sebesar 7,43%; Transportasi dan Pergudangan sebesar 6,78%; dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 4,94%. Peningkatan terutama didorong oleh peran pemerintah yang lebih kuat, baik dalam bentuk konsumsi maupun investasi pemerintah. Konsumsi rumah tangga juga masih cukup kuat yang tercermin dari daya beli yang membaik. Di sisi eksternal, masih rendahnya harga komoditas dan masih lemahnya pertumbuhan ekonomi negara mitra dagang, seperti Amerika Serikat, Tiongkok, dan Singapura menyebabkan ekspor masih berkontraksi lebih dalam.

Kinerja ekonomi Jawa Timur sebagai lokomotif makro ekonomi nasional tercermin dari capaian peningkatan pertumbuhan ekonomi di atas nasional yaitu sebesar 5,74% pada triwulan II-2022. Perekonomian Jawa Timur masih ditopang oleh sektor utama yaitu sektor Industri Pengolahan dan sektor Penyediaan Akomodasi, Makanan dan Minuman mengalami peningkatan. Sementara untuk sektor Perdagangan, Pertanian, dan Konstruksi masih tumbuh positif, walaupun melambat pada triwulan I 2022. Faktor pendorong utama yaitu Kenaikan permintaan domestik dan global sebagai implikasi dari dibukanya





kembali sektor-sektor ekonomi produktif sejalan dengan percepatan vaksinasi Covid-19, penurunan kasus Covid-19 varian Omicron pada akhir triwulan I 2022 serta pelonggaran kebijakan PPKM. Peningkatan pertumbuhan pada sektor ekonomi di Jawa Timur didorong oleh berlanjutnya aktivitas sektor-sektor ekonomi yang semakin membaik. Percepatan vaksinasi Covid-19 serta masih berlanjutnya stimulus kebijakan seperti insentif pembiayaan pada UMKM dan korporasi, serta fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) yang dapat meringankan pembiayaan bagi pelaku industri, turut mendorong perbaikan kinerja sektor ekonomi utama di Jawa Timur. Perlambatan kinerja sektor Perdagangan terutama disebabkan oleh normalisasi permintaan pasca Nataru dan normalisasi perdagangan antar daerah pasca tumbuh tinggi pada tahun 2021, disebabkan musim penghujan (cuaca ekstrim) menghambat produktivitas sektor Pertanian.

Inflasi melalui pengukuran Indeks Harga Konsumen (IHK) sering divonis berkontribusi negatif dalam menggerakkan capaian dan target pembangunan ekonomi. Memahami inilah maka sampai hampir di setiap daerah dibentuk Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID). Masyarakat biasanya merespon negatif juga kata inflasi, jika mendengar sedikit saja rencana kenaikan harga, pada tahapan berikut “inflasi” selalu disebut-sebut dan dijadikan sasaran kekecewaan. Kenaikan harga memang meruntuhkan daya beli, membuat masyarakat lebih miskin meskipun nilai uang yang dipegangnya tetap. Jika tidak terdapat kenaikan harga sejatinya berat juga bagi masyarakat karena tidak akan mengalami episode kenaikan pendapatan. Dunia usaha sejatinya memerlukan kenaikan harga yang pada gilirannya akan sampai pada kenaikan gaji karyawan. Sesederhana inilah sebenarnya lingkaran itu terjadi, namun nasib variabel inflasi memang tak semujur variabel yang lain, yang masih terus saja dianggap salah setiap terjadi kenaikan harga. Memang, inflasi memiliki tingkatan, pada tahapan inflasi yang sangat tinggilah yang harus dicegah jangan sampai terjadi. Sejarah mencatat bahwa republik pernah babak belur di angka 600% inflasinya (hiperinflasi) di tahun 1963-1965. Sementara catatan pertengahan tahun lalu, Zimbabwe merasakan beratnya dengan hiperinflasi 785%. Tentu barang-barang tak akan terbeli dan daya beli seakan mati. Kelas inflasi inilah yang harus dilawan, dihadang jangan sampai terjadi. Lebih tepatnya, dikendalikan.





Nasional, Inflasi meningkat karena tingginya tekanan sisi penawaran seiring dengan kenaikan harga komoditas dunia dan gangguan pasokan. Indeks Harga Konsumen (IHK) pada triwulan-2022 sebesar 4,35% (yoy). Inflasi inti tetap terjaga sebesar 2,63% (yoy) didukung oleh konsistensi kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga ekspektasi inflasi. Sementara itu, inflasi kelompok volatile food meningkat, terutama dipengaruhi oleh kenaikan harga pangan global dan terganggunya pasokan akibat cuaca. Inflasi kelompok administered prices juga masih tercatat tinggi dipengaruhi oleh inflasi angkutan udara dan energi. Ke depan, tekanan inflasi IHK diperkirakan meningkat, didorong oleh kenaikan harga energi dan pangan global.

Jawa timur, Inflasi IHK Jawa pada triwulan II-2022 tercatat cukup tinggi sebesar 4,01% (yoy). Peningkatan inflasi terutama disebabkan oleh kelompok Transportasi, kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau, dan kelompok Penyediaan Makanan Minuman/Restoran. Kelompok utama yang memiliki andil terbesar terhadap kenaikan yaitu kelompok Transportasi sejalan dengan meningkatnya harga komoditas bensin non subsidi. Kenaikan inflasi kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau disebabkan oleh kenaikan harga minyak goreng domestik yang dipengaruhi oleh kenaikan harga kelapa sawit (CPO) internasional yang merupakan bahan baku utama minyak goreng serta berlanjutnya penyesuaian tarif cukai rokok, menggeliatnya sektor-sektor usaha yang menawarkan jasa dan produk layanan kecantikan, peningkatan permintaan didorong oleh kembali beroperasinya layanan dine in pada restoran, rumah makan, dan kafe dengan protokol kesehatan yang ketat, serta pemberlakuan jam operasional pasca menurunnya level PPKM di berbagai Kabupaten/Kota di Jawa Timur.

Terjaganya stok bahan pangan strategis, penyelenggaraan pasar murah, serta potensi penurunan inflasi pada kelompok Kesehatan diperkirakan menjadi faktor penahan tekanan inflasi yang lebih tinggi pada triwulan II 2022. Penatausahaan stok pangan komoditas strategis Jawa Timur yang baik diperkirakan menahan potensi peningkatan inflasi kelompok bahan makanan yang lebih tinggi. Ketersediaan dan keterjangkauan harga bahan pangan melalui penyelenggaraan pasar murah turut menjaga kestabilan harga pangan di Jawa Timur. Di samping terjaganya ketersediaan stok bahan pangan dan penyelenggaraan pasar murah, potensi penurunan inflasi juga diperkirakan terjadi pada kelompok Kesehatan.





Pengangguran sebagai salah satu indikator pembangunan ekonomi suatu negara. Berdasarkan tingkat pengangguran dapat dilihat kondisi suatu negara, apakah perekonomiannya berkembang atau lambat dan atau bahkan mengalami kemunduran. Selain itu dengan tingkat pengangguran, dapat dilihat pula ketimpangan atau kesenjangan distribusi pendapatan yang diterima suatu masyarakat negara tersebut. Pengangguran dapat terjadi sebagai akibat dari tingginya tingkat perubahan angkatan kerja yang tidak diimbangi dengan adanya lapangan pekerjaan yang cukup luas serta penyerapan tenaga kerja yang cenderung kecil persentasenya, Hal ini disebabkan rendahnya tingkat pertumbuhan penciptaan lapangan kerja untuk menampung tenaga kerja yang siap bekerja. Kondisi pengangguran yang tinggi merupakan pemborosan sumber daya dan potensi yang ada, menjadi beban keluarga dan masyarakat, sumber utama kemiskinan, dapat mendorong peningkatan keresahan sosial dan kriminal yang dapat menghambat pembangunan dalam jangka panjang.

Setidaknya terdapat tiga masalah pokok ketenaga kerjaan di Indonesia yaitu unskill labor, miss match labor dan kurangnya lapangan pekerjaan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan jumlah pengangguran di Indonesia ada sebanyak 8,40 juta orang per Februari 2022. Jumlah itu turun sekitar 350.000 orang dari posisi per Februari 2021 yang mencapai 8,75 juta orang. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. TPT hasil Sakernas Februari 2022 sebesar 5,83 persen. Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar enam orang penganggur.

Kondisi ketenagakerjaan Jawa Timur pada triwulan I-2022 juga menunjukkan peningkatan yang tercermin dari penurunan tingkat pengangguran terbuka (TPT) dan peningkatan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK). Peningkatan tersebut ditopang oleh perbaikan ekonomi Jawa Timur seiring percepatan vaksinasi Covid-19 dan aktivitas sektor ekonomi produktif yang melanjutkan perbaikan di triwulan I 2022. Peningkatan kondisi ketenagakerjaan tersebut tercermin dari dari penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dari 5,73% pada Agustus 2021 menjadi 4,82%, dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) meningkat dari 69,99% menjadi 70,98%. Berdasarkan tingkat pendidikannya, terdapat peningkatan jumlah tenaga kerja pada tingkat pendidikan yang ditamatkan mulai





dari SD, SMP, dan Universitas, sementara tingkat pendidikan yang ditamatkan SMK dan Diploma I/II/III cenderung stabil, serta tingkat pendidikan yang ditamatkan SMA mengalami penurunan tenaga kerja dibandingkan Agustus 2021.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jawa Timur menurun pada Februari 2022, dan diiringi dengan perbaikan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dibandingkan Agustus 2021. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurun dari 5,73% pada Agustus 2021 menjadi 4,82% pada Februari 2022 sejalan dengan perbaikan kinerja LU utama dan didukung percepatan vaksinasi Covid-19 dan aktivitas sektor ekonomi produktif yang melanjutkan perbaikan pada triwulan I 2022. Penurunan TPT juga didukung oleh peningkatan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) ditengah peningkatan jumlah angkatan kerja. TPAK meningkat dari 69,99% menjadi 70,98% dari 23,04 juta orang angkatan kerja pada Februari 2022, meningkat dari 22,32 juta orang angkatan kerja pada Agustus 2021.

Persepsi Tantangan Ekonomi

Tabel 1. Lima Tantangan Ekonomi Terbesar dari Cabang Surabaya

Di Tingkat Nasional		Di Tingkat Daerah	
Kondisi Saat ini	Prediksi 3 Bulan Kedepan	Kondisi Saat ini	Prediksi 3 Bulan Kedepan
1. Kenaikan suku bunga kredit	1. Gejala dan kondisi politik dalam negeri	1. Volatilitas kurs	1. Volatilitas kurs
2. Volatilitas kurs	2. Pertumbuhan investasi yang melambat	2. Gejala dan kondisi politik dalam negeri	2. Gejala dan kondisi politik dalam negeri
3. Gejala dan kondisi politik dalam negeri	3. Volatilitas kurs	3. Kenaikan suku bunga kredit	3. Defisit APBN
4. Defisit APBN	4. Defisit APBN	4. Pertumbuhan investasi yang melambat	4. Pertumbuhan investasi yang melambat
5. Pertumbuhan investasi yang melambat	5. Kenaikan suku bunga kredit	5. Defisit APBN	5. Kenaikan suku bunga kredit

Analisis Tantangan Ekonomi

Volatilitas kurs, liberalisasi dan globalisasi yang melanda dunia dewasa ini telah merubah perekonomian di berbagai negara menjadi semakin terbuka. Dalam perkembangannya, arus liberalisasi dan globalisasi dunia dewasa ini telah menyebabkan kekawatiran tersendiri bagi setiap negara. Untuk mensikapi dinamika yang terjadi, setiap negara merumuskan suatu kerangka kerjasama multisektor. Salah satu dampak dari adanya liberalisasi dan globalisasi tersebut adalah semakin transparannya perekonomian setiap negara. Melalui interaksi ekonomi yang ada, setiap negara mampu melaksanakan kegiatan ekonominya





sesuai dengan endowment factor yang dimilikinya. Kemampuan suatu negara dalam memberdayakan endowment factor tersebut akan berdampak pada kemampuannya dalam meningkatkan kapasitas perekonomiannya.

Pada sisi lain juga dapat dijelaskan bahwa liberalisasi dan globalisasi yang ada membawa konsekuensi pada fundamental perekonomian masing-masing negara. Ketidakmampuan negara dalam menjaga fundamental perekonomian ini dapat berdampak pada kestabilan ekonomi makro. Salah satu indikator ekonomi makro yang sensitif terhadap gejolak perekonomian eksternal adalah nilai tukar mata uang (kurs mata uang). Dalam hal ini nilai tukar mata uang mencerminkan kekuatan perekonomian sebagai akibat dari penetrasi dan efek dari perekonomian global. Semakin stabil nilai tukar mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lain, semakin menunjukkan kekuatan fundamental perekonomian negara tersebut. Dengan kata lain, pemerintah (otoritas moneter) mampu melakukan kebijakan moneter dan dari nilai tukar mata uang yang dapat mendorong peningkatan daya saing perekonomian suatu negara. Naik turunnya nilai tukar mata uang di pasar uang (apresiasi dan depresiasi) menunjukkan besarnya volatilitas yang terjadi pada mata uang suatu negara dengan mata uang negara lain.

Meningkatnya risiko global terkait normalisasi kebijakan moneter di negara maju serta tensi geopolitik Rusia-Ukraina akan menjadi tantangan bagi pengelolaan kebijakan moneter domestik. Kenaikan suku bunga acuan Bank Sentral AS serta sejumlah negara maju telah membuat volatilitas di pasar keuangan global meningkat. Selain itu, eskalasi konflik Rusia-Ukraina yang diikuti dengan pengenaan sanksi ekonomi berbagai negara terhadap Rusia turut memberi tekanan pada pasar keuangan global. Meski demikian, dari sisi domestik, seiring masih rendahnya inflasi, stabilnya nilai tukar Rupiah, serta besaran cadangan devisa yang memadai, kelanjutan kebijakan suku bunga rendah masih dapat berlangsung untuk mendukung pemulihan.

Memasuki awal tahun 2022, tekanan di pasar keuangan global cenderung meningkat turut memberikan dampak pada pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS. Langkah pengetatan kebijakan moneter the Fed pada FOMC bulan Januari dinilai cukup agresif sehingga mendorong kenaikan volatilitas di pasar keuangan global. Untuk menekan laju inflasi AS yang meningkat secara persisten, terdapat indikasi yang cukup kuat bahwa the Fed akan menaikkan suku





bunga acuannya setelah berakhirnya program tapering off pada bulan Maret 2022 dan sesegera mungkin akan diikuti dengan program pengurangan balance sheet. Selain itu, adanya akselerasi tensi geopolitik antara Rusia dan Ukraina di bulan Januari serta masih adanya sentimen peningkatan kasus Covid-19 akibat penyebaran virus Omicron turut menambah ketidakpastian di pasar keuangan global. Ketiga faktor tersebut telah mendorong investor untuk cenderung beralih ke instrumen aset yang lebih aman seperti Dolar AS sebagai safe haven sehingga turut menekan pergerakan mata uang di negara emerging market, termasuk Rupiah. Meski demikian, tekanan terhadap nilai tukar Rupiah di bulan Januari masih relatif kecil, terutama ditopang oleh kembali masuknya aliran modal asing sejalan dengan perekonomian domestik yang semakin solid, sebagaimana terlihat dari tren PMI yang terus dalam level ekspansif, peningkatan kinerja neraca perdagangan, serta respon kebijakan moneter Bank Indonesia melalui pengaturan likuiditas lewat kebijakan kenaikan GWM Rupiah. Pada akhir bulan Januari, nilai tukar Rupiah ditutup pada level Rp. 14.381 per Dolar AS atau hanya melemah 0,80 persen (ytd dan mtm) dengan rata-rata di sepanjang bulan Januari berada pada level Rp14.335 per Dolar AS.

Pergerakan nilai tukar Rupiah mulai terapresiasi hingga di pertengahan bulan Februari 2022 namun kembali tertekan akibat sentimen invasi Rusia menjelang akhir bulan. Penguatan nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS terutama didukung oleh sentimen dari fundamental perekonomian domestik yang terus membaik, yang terlihat dari membaiknya pertumbuhan ekonomi Indonesia di triwulan IV 2021 dan kinerja transaksi berjalan yang mencatatkan surplus pada tahun 2021, pertama kalinya sejak tahun 2012. Selain itu, afirmasi positif dari Lembaga Rating Moody's di tanggal 10 Februari 2022 yang mempertahankan peringkat utang Indonesia berada satu tingkat di atas investment grade (Baa2) dengan outlook stabil turut mampu meningkatkan kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia. Dampak positif dari afirmasi Moody's tersebut terlihat dari aliran modal investor asing yang kembali meningkat di bulan Februari 2022 terutama di pasar obligasi Pemerintah, sehingga mampu menopang penguatan nilai tukar Rupiah. Bahkan, nilai tukar Rupiah sempat terapresiasi pada level Rp14.278 per Dolar AS di tanggal 17 Februari 2022 sebelum akhirnya kembali mengalami pelemahan akibat dampak dari faktor ketidakpastian perekonomian global. Laju apresiasi Rupiah tertahan akibat ketidakpastian yang dipicu oleh memuncaknya





tensi geopolitik antara Rusia dan Ukraina hingga akhirnya Rusia memulai invasi ke Ukraina.

Investasi, yang meningkat diyakini ikut andil dalam mendorong pembangunan ekonomi suatu bangsa. Dalam ekonomi makro, investasi juga berperan sebagai salah satu komponen dari pendapatan nasional, Produk Domestik Bruto (PDB) atau *Gross Domestic Product* (GDP). Investasi memiliki hubungan positif dengan PDB atau pendapatan nasional, jika investasi naik, maka PDB akan naik, begitu juga sebaliknya, saat investasi turun maka PDB akan ikut turun.

Dalam konteks yang sama, Harrod-Domar mengemukakan teori yang sangat melegenda bahwa untuk menumbuhkan suatu perekonomian dibutuhkan pembentukan modal sebagai tambahan stok modal. Pembentukan modal tersebut dipandang sebagai pengeluaran yang akan menambah kesanggupan suatu perekonomian untuk menghasilkan barang-barang maupun sebagai pengeluaran yang akan menambah permintaan efektif seluruh masyarakat. Hal tersebut menuntut adanya investasi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa yang dibutuhkan dalam perekonomian sebagai "*engine of growth*". Oleh karena itu, tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkesinambungan pada umumnya didukung oleh peningkatan ekspor dan investasi.

Ketidakpastian dan kerapuhan ekonomi dunia akibat pandemi covid-19 dan perang rusia-ukraina. Dengan kondisi tersebut, investor besar diperkirakan akan mempertimbangkan tempat yang menjadi basis produksi, diantaranya Indonesia, peluang ini harus dapat dimanfaatkan, dengan menjadikan Indonesia agar menarik bagi investor, nilai tambah yang telah kita miliki adalah persepsi investor yang melihat adanya keberlanjutan fokus kebijakan ekonomi dan pembangunan dalam pemerintahan mendatang.

Investasi (PMTB) melanjutkan tren perbaikan. PMTB mampu tumbuh 4,5 persen (yoy) di triwulan IV 2021. Secara keseluruhan 2021, PMTB kembali tumbuh positif sebesar 3,8 persen setelah berkontraksi 5,0 persen di tahun sebelumnya. Realisasi investasi selama periode Januari hingga Desember 2021 mencapai Rp901,02 triliun atau 100,1 persen dari target sebesar Rp900 triliun yang ditargetkan Presiden Jokowi. Persentase PMA dan PMDN dalam capaian realisasi investasi baik pada triwulan VI tahun 2021 maupun secara keseluruhan tahun 2021 masih berimbang. Kontribusi investasi baik asing maupun domestik terus





tumbuh di Indonesia dan diiringi dengan kemampuan investor domestik yang terus berkembang. Berdasarkan sebaran wilayah, realisasi investasi triwulan IV di luar pulau Jawa (Rp 127,5 triliun atau 52,8 persen dari total investasi) masih lebih besar dibandingkan dengan di pulau Jawa sebesar Rp114,1 triliun (47,2 persen).

Menguatnya investasi juga turut didorong oleh realisasi proyek strategis nasional (PSN) sepanjang tahun 2021 yang berhasil menyelesaikan 24 PSN dengan nilai investasi mencapai Rp125,9 triliun. Dari sisi asal negara investasi, Singapura menjadi investor dengan nilai investasi tertinggi yaitu sebesar USD2,1 miliar atau 25,3 persen dari capaian realisasi investasi pada triwulan IV tahun 2021, diikuti oleh Hong Kong, Republik Rakyat Tiongkok, dan Amerika Serikat. Berdasarkan sektor investasi didominasi oleh investasi pada industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya sebesar Rp34,8 triliun (14,4 persen). Diikuti oleh sektor perumahan, Kawasan industri dan perkantoran sebesar Rp28,6 triliun (11,8 persen), dan sektor pertambangan sebesar Rp 28,0 triliun (11,6 persen).

Upaya memberikan kemudahan investasi, kepastian hukum dan jaminan keamanan, melalui perbaikan berbagai regulasi yang telah akan dikeluarkan, diharapkan dapat menciptakan iklim investasi yang kondusif, sekaligus menciptakan keterbukaan investasi. Dukungan investor dalam pembangunan ekonomi Indonesia, ditengah keterbatasan APBN, menjadi pilihan strategi yang tepat dalam membalikkan pelambatan ekonomi melalui, optimalisasi dukungan investasi dalam mempercepat berbagai program pembangunan ekonomi produktif sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mengantarkan Indonesia menjadi Negara Maju.

Defisit APBN salah satu bentuk kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal yang sering dilakukan adalah kebijakan fiskal ekspansif. Penerapan kebijakan defisit anggaran tentunya mempunyai alasan. Menurut Mankiw (2003), defisit anggaran dilakukan dengan tiga alasan yaitu untuk menstabilisasi perekonomian, tax smoothing, dan redistribusi intergenerasi. pada dasarnya kebijakan fiskal yang ekspansif dimaksudkan untuk memberikan lebih banyak kelonggaran dana ke dalam masyarakat untuk mendorong perekonomian. Namun, kebijakan fiskal seringkali menjadi kurang efektif jika tidak didukung oleh situasi atau kondisi yang tepat dan kebijakan lain yang konsisten, bahkan tidak mustahil kebijakan stimulus fiskal justru dapat menghambat laju perekonomian.





Penjelasan mengenai defisit anggaran pemerintah dan dampaknya terhadap perekonomian merupakan isu yang masih menimbulkan kontroversi secara teori. Termasuk pula dampak defisit anggaran terhadap inflasi, jumlah uang beredar, dan suku bunga. Defisit anggaran dapat memengaruhi inflasi melalui pencetakan uang untuk membiayai utang dan melalui peningkatan belanja pemerintah yang berujung pada peningkatan harga (demand pull inflation). Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya korelasi positif antara tingginya defisit anggaran dan tingginya inflasi. Namun, dibalik itu semua ada pula pendapat yang menyangkal hal tersebut yang disebut sebagai kaum monetaris. Mereka menyatakan besar kecilnya defisit anggaran tidak berujung pada inflasi yang tinggi pula. Inflasi terjadi ketika penawaran uang (money supply) lebih tinggi daripada penawaran barang. Hal ini terjadi ketika bank sentral terlalu banyak membeli obligasi pemerintah.

Peran APBN krusial dalam mendukung akselerasi pemulihan ekonomi. Pada triwulan IV 2021 komponen konsumsi pemerintah tumbuh 5,25 persen (yoy) atau 33 persen lebih tinggi dari triwulan III 2021. Peningkatan belanja bantuan sosial utamanya di tengah penyebaran varian Delta berandil besar dalam menjaga stabilitas perekonomian di semester II 2021. Melalui berbagai program pemerintah, termasuk program perlindungan sosial, daya beli serta optimisme masyarakat dapat terjaga dengan baik. Sementara intervensi di sektor kesehatan, seperti biaya penanganan pasien Covid-19, program dan pengadaan vaksin, serta pemberian insentif kepada tenaga kesehatan yang berjuang menangani badai Covid-19 juga menjadi indikasi pentingnya APBN dalam mengawal pemulihan ekonomi, melalui komponen konsumsi pemerintah.

Kenaikan suku bunga kerdit, Memasuki paruh kedua 2022, potensi kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia kiranya makin tidak bisa dihindari. Tingkat inflasi yang beranjak naik telah mendorong Bank Sentral di beberapa negara untuk menerapkan stance moneter yang kontraktif dengan menaikkan suku bunga acuan dan mengurangi likuiditas. The Fed dalam FOMC Mei 2022 menaikkan suku bunga acuan (Fed Fund Rate) menjadi 0,75%-1,0%. Sementara itu, Bank of England (BoE) sudah menaikkan suku bunga acuan sebesar 90bps sehingga menjadi 1%. Tren kenaikan suku bunga tidak hanya terjadi di negara maju, tetapi juga di emerging market, seperti India, Brasil, Argentina, Malaysia, Arab Saudi, hingga Afrika Selatan.





Bank Indonesia (BI) sudah mengerek BI Rate menjadi 7,25%. Kenaikan BI Rate tersebut untuk merespons kenaikan inflasi dan luruhnya nilai tukar rupiah. BI rate sebagai salah satu instrumen kebijakan moneter Bank Indonesia juga memiliki tujuan dasar sebagai kebijakan moneter yakni menjaga kestabilan harga barang. Hal ini dilakukan dengan beberapa pertimbangan; 1) dengan output ditentukan kapasitas ekonomi dalam jangka panjang maka segala kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi akan menciptakan inflasi (the short-run Phillips-curve) sehingga tidak akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi riil; 2) national economic agent mengerti bahwa tindakan kejutan pembuat kebijakan dalam mendorong inflasi dapat mendorong terjadinya permasalahan time-consistency; dan 3) kebijakan moneter mempengaruhi variabel ekonomi memakan waktu panjang dan mempunyai lag. Keempat, kestabilan harga dapat mendorong terciptanya iklim ekonomi yang lebih baik karena akan mengurangi biaya yang berasal dari inflasi.

Arah kebijakan moneter sepanjang tahun 2021 tetap dipertahankan akomodatif untuk mendukung keberlanjutan pemulihan ekonomi. Kebijakan suku bunga acuan yang rendah terus dipertahankan ditopang oleh tingkat inflasi yang rendah dan stabilitas nilai tukar Rupiah yang terjaga. Sebelumnya, selama tahun 2020 suku bunga acuan BI 7-day Reverse Repo Rate (7DRR) telah diturunkan sebesar 125 bps. Selanjutnya, pada Februari 2021, BI 7DRR kembali diturunkan sebesar 25 bps menjadi 3,5 persen. Level ini merupakan rekor terendah sepanjang sejarah. Tingkat suku bunga ini tetap dipertahankan hingga akhir 2021 sebagai langkah untuk memperkuat pemulihan ekonomi nasional.

Kebijakan moneter yang dipertahankan akomodatif mendukung perbaikan kinerja intermediasi perbankan. Suku bunga di pasar keuangan, seperti PUAB dan JIBOR, berada di level rendah dan relatif bergerak stabil sejalan dengan BI 7DRR. Suku bunga deposito dan kredit tercatat masih dalam tren menurun. Namun, penurunan suku bunga kredit yang jauh lebih lambat daripada penurunan suku bunga deposito perbankan menyebabkan spread antara suku bunga kredit dan deposito meningkat. Sementara itu, laju pertumbuhan uang beredar yang menjadi indikator aktivitas perekonomian berada dalam tren meningkat di triwulan terakhir 2021. Perkembangan M2 tersebut didorong oleh pertumbuhan M1 dan uang kuasi, sejalan dengan tren simpanan masyarakat/Dana Pihak Ketiga (DPK) yang tumbuh tinggi. Kondisi likuiditas yang longgar dan melimpah pada





gilirannya mampu turut mendorong perbaikan kinerja intermediasi perbankan meski terbatas, yang tercermin dari tren positif penyaluran kredit sejak pertengahan tahun 2021. Meski demikian, Loan to Deposit Ratio (LDR) terus menurun hingga akhir tahun 2021 dan mencapai level terendahnya. Hal ini menunjukkan masih belum optimalnya penyaluran dana masyarakat sehingga diperlukan upaya mendorong intermediasi perbankan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

Meningkatnya risiko global terkait normalisasi kebijakan moneter di negara maju serta tensi geopolitik Rusia-Ukraina akan menjadi tantangan bagi pengelolaan kebijakan moneter domestik. Kenaikan suku bunga acuan Bank Sentral AS serta sejumlah negara maju telah membuat volatilitas di pasar keuangan global meningkat. Selain itu, eskalasi konflik Rusia-Ukraina yang diikuti dengan pengenaan sanksi ekonomi berbagai negara terhadap Rusia turut memberi tekanan pada pasar keuangan global. Meski demikian, dari sisi domestik, seiring masih rendahnya inflasi, stabilnya nilai tukar Rupiah, serta besaran cadangan devisa yang memadai, kelanjutan kebijakan suku bunga rendah masih dapat berlangsung untuk mendukung pemulihan. Hingga Maret BI 7DRR masih dipertahankan pada tingkat 3,5 persen. Kondisi likuiditas di pasar keuangan juga terpantau masih longgar dan memadai. Hal ini terlihat dari tren kenaikan pertumbuhan uang beredar (M2) di Februari 2022 yang masih cukup tinggi. Intermediasi perbankan secara bertahap terus melanjutkan perbaikan, dengan pertumbuhan kredit perbankan yang konsisten berada dalam tren meningkat, sementara simpanan masyarakat mulai melambat meski masih tumbuh double digit. Di sisi lain, BI telah memulai kebijakan normalisasi likuiditas dengan menaikkan tingkat Giro Wajib Minimum (GWM) secara progresif sejak Maret 2022, merespon perkembangan pengetatan moneter global, khususnya the Fed AS.





Persepsi Kemampuan Pemerintah

Tabel 2. Top-5 Persepsi Kemampuan Pemerintah berdasarkan cabang Surabaya

Pemerintah Pusat	Pemerintah Daerah
1. Menyediakan dan merawat infrastruktur	1. Menciptakan rasa aman dan tenteram
2. Menstabilkan harga barang dan jasa serta menjamin ketersediaan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat	2. Menciptakan lingkungan hidup hijau, meningkatkan ketahanan bencana, dan meminimalisir dampak perubahan iklim.
3. Akselerasi pertumbuhan investasi	3. Menyediakan dan merawat infrastruktur
4. Peningkatan human capital (termasuk peningkatan sumberdaya manusia yang berkualitas dan peningkatan kesehatan masyarakat)	4. Menstabilkan harga barang dan jasa serta menjamin ketersediaan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat
5. Menciptakan rasa aman dan tenteram	5. Perbaikan sistem logistik untuk kelancaran distribusi

Analisa Kemampuan Pemerintah

Stabilisasi Harga, salah satu peran strategis dari Bank sentral dalam pengelolaan perekonomian suatu negara. Namun, terlalu fokusnya bank sentral pada kebijakan moneter yang bertujuan menjaga stabilitas harga, menjadikan bank sentral kurang memperhatikan risiko yang timbul dari keterkaitan makroekonomi dengan sistem keuangan. Pengalaman atas krisis keuangan yang pernah terjadi menunjukkan bahwa keterkaitan sistem keuangan dengan makroekonomi (macro-financial linkages) sangat erat dan bahkan ketidakstabilan macro-financial tersebut yang menyebabkan timbulnya krisis.

Bank Indonesia memberikan tiga alasan pentingnya kestabilan harga, sebagai berikut: 1) inflasi yang tinggi akan menyebabkan pendapatan riil masyarakat akan terus turun sehingga standar hidup dari masyarakat turun dan akhirnya menjadikan semua orang, terutama orang miskin bertambah miskin; 2) inflasi yang tidak stabil akan menciptakan ketidakpastian bagi pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan. Pengalaman empiris menunjukkan bahwa inflasi yang tidak stabil akan menyulitkan keputusan masyarakat dalam melakukan konsumsi, investasi dan produk yang akhirnya menurunkan pertumbuhan ekonomi; dan 3) tingkat inflasi domestik yang lebih tinggi dibanding dengan tingkat inflasi di negara tetangga menjadikan tingkat bunga domestik riil menjadi tidak kompetitif sehingga dapat memberikan tekanan pada nilai rupiah.

Pentingnya pengendalian inflasi didasarkan pada pertimbangan bahwa inflasi yang tinggi dan tidak stabil berdampak negatif terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat. Jadi, dalam menciptakan kestabilan inflasi adalah dengan menjaga





tingkat pertumbuhan jumlah penawaran uang. Peningkatan jumlah uang beredar yang berlebihan dapat mendorong peningkatan harga melebihi tingkat yang diharapkan sehingga dalam jangka panjang dapat merubah pertumbuhan perekonomian. Begitu juga sebaliknya, apabila jumlah uang beredar mengalami penurunan maka tingkat harga-harga juga akan menurun.

Jumlah uang beredar, M2 pada kuartal II-2022 tercatat sebesar Rp7.888,6 triliun, atau tumbuh 10,6% (yoy), tetap kuat dibandingkan pertumbuhan pada Mei 2022 yang tercatat sebesar 12,1% (yoy). Perkembangan tersebut didorong oleh pertumbuhan pada seluruh komponen M2. Uang kuasi, dengan pangsa 42,6% dari M2, tercatat Rp3.356,9 triliun pada Juni 2022, atau tumbuh 3,3% (yoy), lebih rendah dari pertumbuhan bulan sebelumnya (4,6%, yoy). Perlambatan uang kuasi terutama disebabkan oleh komponen simpanan berjangka dan giro valas, masing-masing menjadi sebesar -1,0% (yoy) dan 21,1% (yoy). Kontraksi pertumbuhan simpanan berjangka sejalan dengan perkembangan suku bunga yang ditawarkan.

Berdasarkan faktor yang memengaruhinya, pertumbuhan M2 pada Juni 2022 terutama dipengaruhi oleh akselerasi pertumbuhan penyaluran kredit⁴ dan perkembangan keuangan pemerintah. Pada Juni 2022, penyaluran kredit tumbuh 10,3% (yoy), meningkat dibandingkan pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 8,7% (yoy) sejalan dengan penguatan penyaluran kredit, baik kredit produktif maupun konsumtif. Sementara itu keuangan Pemerintah tercatat mengalami kontraksi, tercermin dari pertumbuhan negatif tagihan bersih sistem moneter kepada Pemerintah Pusat sebesar 14,0%, dari pertumbuhan positif sebesar 3,9% (yoy) pada Mei 2022. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya kewajiban sistem moneter kepada Pempus sebesar 24,4% (yoy), terutama berupa simpanan Pempus.

Perkembangan DPK terutama disebabkan oleh perlambatan seluruh jenis simpanan, yakni giro, tabungan, serta deposito. Berdasarkan golongan nasabah, perlambatan simpanan terjadi baik pada golongan nasabah perorangan maupun korporasi, khususnya pada giro. Pada Juni 2022, giro tercatat tumbuh 20,1% (yoy), lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 23,6% (yoy), terutama di DKI Jakarta dan Jawa Barat. Sementara itu, tabungan tercatat tumbuh 12,1% (yoy), melambat dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 13,1% (yoy), terutama di Jawa Timur dan Jawa Tengah.





Infrastruktur yang baik juga dapat meningkatkan produktivitas dan mengurangi biaya produksi. Pembangunan infrastruktur baik berupa jalan raya, rel kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan udara, jaringan listrik, komunikasi dan jaringan Air Bersih sangatlah penting dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat di suatu wilayah. Infrastruktur yang kurang memadai juga mempengaruhi daya tarik iklim investasi di Indonesia. Investor asing penuh kekhawatiran untuk berinvestasi di, misalnya, fasilitas manufaktur di Indonesia kalau pasokan listrik tidak pasti atau biaya transportasi sangat tinggi. Kenyataannya, Indonesia sering diganggu pemadaman listrik, meskipun negeri ini dinyatakan berkelimpahan sumber daya energi. Kasus pemadaman listrik cukup lumrah terjadi di daerah-daerah selain Jawa dan Bali.

Menurut data yang diterbitkan oleh Kamar Dagang Indonesia dan Industri (Kadin Indonesia), dari total pengeluaran perusahaan di Indonesia, sekitar 17 persen diserap oleh biaya logistik. Padahal dalam ekonomi negara-negara tetangga, angka ini hanya di bawah sepuluh persen. membuat para investor berpikir dua kali sebelum memutuskan untuk berinvestasi di Indonesia. Sementara itu, masalah logistik yang tidak efisien (yang mencakup bidang transportasi, pergudangan, konsolidasi kargo, *clearance* perbatasan, distribusi dan sistem pembayaran) menghambat peluang para pengusaha untuk memperluas bisnis mereka.

Pemerintah Indonesia sadar akan pentingnya untuk memperbaiki keadaan infrastruktur sehingga iklim investasi dan bisnis menjadi lebih menarik. Dalam konteks kompleks ini Presiden Joko Widodo mencari pendekatan baru untuk mencapai terobosan yang sangat dibutuhkan dalam rangka meningkatkan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Misalnya, anggaran pemerintah untuk pembangunan infrastruktur telah meningkat tajam sejak Widodo memimpin negara ini (ini juga dimungkinkan karena pemerintah telah memotong subsidi energi).

Selain masalah pendanaan, kendala terbesar terkait pembangunan infrastruktur di Indonesia tampaknya pembebasan lahan. Proses pembebasan lahan itu adalah proses yang sangat rumit (makan waktu lama dan membawa ongkos mahal) karena banyak pemilik tanah menolak untuk menjual tanah mereka kepada pengembang proyek infrastruktur (misalnya banyak petani Indonesia enggan menjual tanah mereka kepada pengembang pembangkit listrik atau jalan) atau





pemilik tanah ini minta harga yang sangat tinggi untuk tanah mereka. Karena kesusahan pembebasan tanah banyak proyek infrastruktur di Indonesia ditunda bertahun-tahun atau dibatalkan sama sekali.

Guna menanggulangi hambatan-hambatan tersebut, Pemerintah telah mengambil langkah-langkah dari sisi regulasi, fiskal dan kelembagaan. Sejak tahun 2014 Pemerintah telah membentuk Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) untuk memimpin koordinasi percepatan infrastruktur prioritas dan mendorong peningkatan kualitas penyiapan proyek melalui Panduan OBC. Langkah perbaikan ditunjang dengan berkembangnya kapasitas Kementerian PPN / Bappenas dalam memberikan fasilitas penyiapan proyek, serta dilanjutkan oleh PPP Unit di Kementerian Keuangan dengan memberikan *Project Development Fund* (PDF) dan *Transaction Advisory* untuk proyek KPBU, sehingga diharapkan agar investor tertarik untuk mendanai proyek. Sedangkan untuk menangani kendala pengadaan tanah, telah diterbitkan Undang-Undang No. 2 tahun 2012 untuk percepatan proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Peraturan tersebut dilengkapi dengan peraturan turunan yang telah direvisi sesuai kebutuhan.

Menciptakan rasa aman dan tentram, Indonesia sebagai negara hukum memiliki wewenang untuk mengatur dan melindungi pelaksanaan perlindungan Hak Asasi Manusia. Dalam hal ini, peran Pemerintah tentu sangat dibutuhkan. Pada Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Kemudian, pada Pasal 71 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga menegaskan bahwa, Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan Hak Asasi Manusia yang diatur dalam undang-undang tersebut, peraturan perundangundangan lain, dan Hukum Internasional. Penegakan HAM di Indonesia dapat terbilang belum memuaskan karena banyak faktor-faktor seperti kepentingan nasional, perkembangan politik, pembangunan, pandangan dari dunia internasional dan lain sebagainya yang turut mempengaruhi upaya pemajuan dan perlindungan HAM di Indonesia. Selain itu disebabkan karena adanya sifat egois yang mementingkan diri sendiri, sikap tidak toleran, dan rendahnya kesadaran mengenai HAM dapat membuat seseorang melakukan perbuatan pelanggaran HAM.





Sepanjang tahun 2021 sampai dengan 15 Desember, Komnas HAM di kantor pusat di Jakarta telah menerima 2.516 pengaduan. Sedangkan sebanyak 205 pengaduan diterima di enam kantor perwakilan di Papua, Sulteng, Aceh, Kalbar, Sumbar, dan Maluku.

Pada tengah tahun 2021, korban dan kematian akibat pandemi Covid-19 di Indonesia termasuk tertinggi di dunia. Jumlah kematian tenaga kesehatan juga sangat tinggi. Hal ini menjadi catatan penting dan keprihatinan karena begitu banyaknya jiwa yang meninggal oleh Covid-19. Komnas HAM menyerukan agar tata kelola kesehatan nasional dibenahi secara mendasar dengan berbasis pada pemenuhan dan perlindungan hak atas kesehatan bagi setiap orang di Indonesia.

Wilayah pengaduan (tempat kejadian peristiwa) paling banyak terjadi di wilayah DKI Jakarta (368), Jawa Barat (286), Sumatera Utara (228), Jawa Timur (218), dan Sulawesi Selatan 127. Pihak yang paling banyak diadukan adalah kepolisian (661), korporasi swasta (379), pemerintah pusat (236), pemerintah daerah (229), lembaga peradilan (132), kejaksaan (84), dan TNI (73). Sedangkan klasifikasi hak yang paling banyak diadukan adalah hak atas kesejahteraan (945), hak memperoleh keadilan (820), dan hak atas rasa aman (162).

Perbaikan sistem logistik untuk kelancaran distribusi, Logistics Performance Index (LPI). LPI mengukur efisiensi on-the-ground rantai suplai perdagangan atau kinerja logistic. LPI merupakan indeks kinerja logistik dari 160 negara yang dirilis oleh World Bank setiap dua tahun sekali. LPI terdiri dari 6 komponen, yaitu bea dan cukai (customs), infrastruktur, international shipments, logistic quality and competence, tracking and tracing, dan timelines. (World Bank, 2014)

Daya saing logistik Indonesia harus diakui masih ketinggalan dibandingkan negara tetangga. Berdasarkan logistic performance index (LPI) 2020 yang dirilis Bank Dunia, Indonesia ada di peringkat 46, sedangkan Malaysia 41, Vietnam 39, Thailand 32, dan Singapura peringkat 7. Berarti proses kepabeanaan dalam logistik Indonesia belum membaik. Nilai tertinggi dicapai oleh komponen timelines. Perbaikan peringkat ini terutama didorong oleh peningkatan nilai komponen international shipments dan infrastruktur secara signifikan. Kenaikan nilai komponen LPI menunjukkan dampak positif yang dihasilkan dari pembangunan infrastruktur dan transportasi selama ini. Kenaikan peringkat Indonesia dalam LPI diharapkan memperlancar kegiatan distribusi barang, sehingga mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Namun, kenaikan peringkat ini belumlah





diiringi dengan penurunan biaya logistik. Berdasarkan data Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), biaya logistik Indonesia mencapai 25% terhadap produk domestic bruto, lebih tinggi dibandingkan negaranegara lain di ASEAN. (Bank Mandiri, 2018).

Dalam membahas logistik nasional, sangat terkait dengan dwelling time, yaitu berapa lama waktu ditimbunnya petikemas di tempat penimbunan sementara (TPS) di pelabuhan, dibongkar dari kapal sampai dengan barang keluar dari TPS. Dari pola selama ini, menunjukkan proses yang tidak efektif dan efisien. Sehingga fakta fakta yang terjadi biaya logistik di Indonesia lebih tinggi di banding negara lain. Jika tetap menggunakan pola lama ini biaya logistik akan tetap tinggi, investor akan lebih suka datang ke negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura karena biaya logistiknya lebih rendah. Dwelling time di kedua negara-negara tersebut juga sangat rendah di bandingkan dengan Indonesia.

Selanjutnya, pemerintah terus berusaha menyempurnakan National Logistics Ecosystem (NLE) di Indonesia agar lebih kompetitif dapat mengejar ketertinggalan dari negara lain. Ruang lingkup kerja sama tersebut adalah pemanfaatan layanan perbankan secara elektronik pada portal NLE sesuai ketentuan yang berlaku, meliputi pemenuhan kewajiban keuangan negara berupa pembayaran penerimaan negara, pembayaran biaya logistik yang telah diberitahukan dan diberlakukan dalam portal NLE, serta pemberian kemudahan/fasilitas pembiayaan dan/atau penjaminan pembayaran terkait layanan yang akan diatur lebih lanjut sesuai kesepakatan, untuk dapat digunakan pihak lain yang terkait.





Laporan Survei Indikator Survei Ekonomi Indonesia (ISEI) Index Cabang: Tasikmalaya

Tim Penyusun :

1. Prof. Dr. H. Deden Mulyana, SE., M.Si
2. Prof. Dr. H. Dedi Kusmayadi, SE., M.Si, Ak, CA
3. Dr. Apip Supriadi, SE., M.Si
4. Dr. Yusuf Abdullah, SE., MM
5. Adil Ridlo Fadillah, SE., M.Si, Ak,.CA

Ringkasan Eksekutif

Hasil survei menunjukkan bahwa tantangan terbesar di Cabang Tasikmalaya, yakni masih terjadinya volatilitas kurs, adanya gejolak dan kondisi politik dalam negeri, terjadinya kenaikan suku bunga kredit, juga mengalami defisit APBN serta pertumbuhan investasi yang melambat. Sedangkan terkait kemampuan Pemerintah Daerah di Cabang Tasikmalaya menunjukkan bahwa perlu adanya penciptaan rasa aman dan tenteram, harus mampu meningkatkan human capital (termasuk peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan peningkatan Kesehatan masyarakat), harus dapat menciptakan lingkungan hidup hijau, dan perlu meningkatkan ketahanan bencana, serta harus mampu meminimalisir dampak perubahan, termasuk perbaikan sistem logistik untuk kelancaran distribusi, dan akselerasi pertumbuhan investasi yang dilakukan secara terus menerus (continuous improvement).





Ekspektasi Ekonomi



Analisa:

Berdasarkan hasil survei dengan menggunakan kuesioner terhadap 203 responden diperoleh hasil sebagai berikut:

- Kondisi ekonomi secara umum, menunjukkan bahwa kondisi ekonomi daerah lebih baik dibanding kondisi ekonomi nasional, hal ini dilihat dari indikator pertumbuhan ekonomi daerah yang berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional dan tingkat inflasi daerah lebih rendah dibandingkan tingkat inflasi nasional. Ini mengindikasikan bahwa telah terjadi peningkatan pembangunan daerah dan peningkatan daya beli masyarakat di daerah.
- Akan tetapi, jika dilihat dari indikator tingkat pengangguran, kondisi di daerah lebih buruk dibanding tingkat nasional. Hal ini terjadi antara lain disebabkan oleh tidak meratanya kompetensi maupun skill yang dimiliki penduduk setiap daerah. Dengan demikian, tugas pemerintah untuk lebih intensif dalam program pemerataan pembangunan, terutama dalam peningkatan kemampuan kompetensi masyarakat Indonesia.





Persepsi Tantangan Ekonomi

Tabel 1. Lima Tantangan Ekonomi Terbesar dari Cabang Tasikmalaya

Di Tingkat Nasional		Di Tingkat Daerah	
Kondisi Saat ini	Prediksi 3 Bulan Kedepan	Kondisi Saat ini	Prediksi 3 Bulan Kedepan
1. Kenaikan suku bunga kredit	1. Defisit APBN	1. Volatilitas kurs	1. Volatilitas kurs
2. Volatilitas kurs	2. Volatilitas kurs	2. Gejolak dan kondisi politik dalam negeri	2. Pertumbuhan investasi yang melambat
3. Defisit APBN	3. Pertumbuhan investasi yang melambat	3. Kenaikan suku bunga kredit	3. Kenaikan suku bunga kredit
4. Pertumbuhan investasi yang melambat	4. Ketersediaan bahan pokok yang terbatas	4. Defisit APBN	4. Defisit APBN
5. Gejolak dan kondisi politik dalam negeri	5. Gejolak dan kondisi politik dalam negeri	5. Pertumbuhan investasi yang melambat	5. Gejolak dan kondisi politik dalam negeri

Analisis:

Tantangan pembangunan yang dihadapi daerah adalah menciptakan iklim ekonomi yang kondusif dan mendukung terhadap program pembangunan daerah dengan mengantisipasi beberapa tantangan yang akan dihadapi, meliputi: Volatilitas kurs merupakan fluktuasi kurs mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lain. Upaya yang dapat dilakukan, antara lain:

- Fokus kebijakan pada stabilitas nilai tukar mata uang Rp/US\$ dengan memperhatikan faktor ekspektasi masyarakat terhadap kondisi perekonomian. Hal ini dapat dilakukan dengan mencermati pola kegiatan ekonomi masyarakat yang terjadi, sehingga dapat lebih terkendali transaksi ekonominya.
- Diperlukan instrumen keuangan lain dalam rangka untuk memperbanyak pilihan masyarakat dalam mengalokasikan dana yang dimilikinya. Hal ini tentunya juga dibarengi dengan memberikan insentif yang ada yang lebih menarik, sehingga dapat mengurangi konsentrasi terhadap salah satu instrumen keuangan yang ada. Gejolak dan kondisi politik dalam negeri merupakan perubahan pada suatu kebijakan politik pada suatu negara atau daerah akan dapat menyebabkan dampak akbar pada sektor keuangan, bisnis dan perekonomian negara atau daerah tadi. Risiko politik umumnya berkaitan erat dengan pemerintahan dan situasi politik dan keamanan di suatu negara atau wilayah. Upaya yang dapat dilakukan adalah menciptakan sinergi antara pemangku kepentingan meliputi pemerintah, pengusaha, akademisi, komunitas, dan media (pentahelix) Kenaikan suku bunga kredit. Ada beberapa hal yang harus diwaspadai terkait kebijakan menaikkan dan menurunkan suku bunga. Tujuannya sebenarnya bagus yaitu demi kesejahteraan rakyat dalam negeri. Oleh karena itu





setiap pergerakan suku bunga perlu dipertimbangkan dampak ekonomi yang menyertainya. Defisit APBN merupakan kondisi di mana penerimaan negara lebih kecil dibandingkan pengeluaran negara. Upaya yang dapat dilakukan antara lain:

1. Mencatat Transaksi. Agar bisa terus memantau pengeluaran dan pemasukan, selalu catat transaksi
2. Melejitkan Omzet. Bagaimana pun juga budget deficit harus segera diatasi atau dibayarkan
3. Sediakan Dana Darurat

Analisis: Pertumbuhan investasi yang melambat

Peran investasi dalam pemulihan ekonomi secara mendetail. Pertama, investasi ini memiliki korelasi positif terhadap pembangunan infrastruktur negara. PDB yang naik akan mendukung upaya pembangunan dari pemerintah, sementara pemerintah pun akan lebih giat membangun infrastruktur guna menyokong dan menarik investor.

Kedua, investasi ini juga akan menumbuhkan iklim bisnis. Semakin banyak investasi atau penanaman modal yang dilakukan, maka akan semakin banyak pula bisnis-bisnis baru yang bermunculan. Seperti UMKM, alat kesehatan, dan perumahan yang menjadi beberapa sektor bisnis yang tumbuh di masa pandemi ini. Ketiga, banyaknya bisnis yang bermunculan akan membuka lebih banyak lapangan pekerjaan, yang mana secara jelas akan mendukung pertumbuhan daya beli konsumen serta konsumsi rumah tangga.

Upaya yang sudah dilakukan pemerintah

Sebenarnya ada begitu banyak upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia guna mendorong pertumbuhan ekonomi, terlebih mendorong peran investasi dalam pemulihan ekonomi Indonesia. Salah satunya adalah dikeluarkannya Perpres No. 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jabar Bagian Selatan, yang akan semakin menyuburkan prospek investasi serta pariwisata di wilayah Kota/Kabupaten Cirebon dan daerah penyangga seperti Majalengka, Subang, Sumedang, Indramayu dan Kuningan serta wilayah Jabar Selatan.

Kemudian, pemerintah juga telah memberikan berbagai kebijakan yang semakin memudahkan jalannya investasi di Indonesia, seperti pemberian insentif pajak,





bantuan perihal kredit dan penjaminan, pengesahan UU Cipta Kerja (Omnibus Law), pembentukan satgas khusus investasi luar negeri, serta kemudahan proses pengajuan izin usaha dan investasi oleh BKPM.

Harapannya adalah Indonesia mampu mengoptimalkan peran investasi dalam pemulihan ekonomi dengan rekonstruksi investasi padat karya serta bermitra dengan para pelaku bisnis, termasuk UMKM. Dapat dikatakan bahwa fokus pemerintah Indonesia sendiri bukan hanya memulihkan ekonomi Indonesia, namun juga memastikan ekonomi Indonesia tetap maju di tahun-tahun mendatang melalui kuatnya fondasi investasi.

Persepsi Kemampuan Pemerintah

Tabel 2. Top-5 Persepsi Kemampuan Pemerintah berdasarkan cabang Tasikmalaya

Pemerintah Pusat	Pemerintah Daerah
1. Peningkatan human capital (termasuk peningkatan sumberdaya manusia yang berkualitas dan peningkatan kesehatan masyarakat)	1. Menciptakan rasa aman dan tenteram
2. Perbaiki sistem logistik untuk kelancaran distribusi	2. Peningkatan human capital (termasuk peningkatan sumberdaya manusia yang berkualitas dan peningkatan kesehatan masyarakat)
3. Menyediakan dan merawat infrastruktur	3. Menciptakan lingkungan hidup hijau, meningkatkan ketahanan bencana, dan meminimalisir dampak perubahan iklim.
4. Menciptakan rasa aman dan tenteram	4. Perbaiki sistem logistik untuk kelancaran distribusi
5. Akselerasi pertumbuhan investasi	5. Akselerasi pertumbuhan investasi

Analisis:

Persepsi kemampuan daerah akan tercipta apabila:

Menciptakan rasa aman dan tenteram. Untuk menciptakan lingkungan yang aman dan tenteram tidak bisa dilakukan oleh beberapa instansi saja. Tetapi butuh pula kesadaran warga. Upaya yang dapat dilakukan adalah Dengan dibuatnya peraturan atau tata tertib yang sesuai dengan lingkungan masyarakat itu sendiri, yang lebih penting aturan tersebut harus dipatuhi demi terciptanya masyarakat yang aman dan tenteram.

Peningkatan human capital (termasuk peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan peningkatan Kesehatan masyarakat). Peningkatan kualitas SDM perlu segera dilakukan untuk mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi dan investasi agar dapat berada setingkat dengan negara-negara maju. Kini Indonesia telah memasuki masa bonus demografi hingga 16 tahun ke depan. Melalui dukungan kebijakan pemerintah, kesempatan ini tentu harus





dimanfaatkan dengan sangat optimal untuk membangun kesiapan menuju era Indonesia Emas 2045.

Menciptakan lingkungan hidup hijau, meningkatkan ketahanan bencana, dan meminimalisir dampak perubahan. Keseimbangan alam dalam pembangunan dapat diwujudkan dengan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam, energi, material, hutan dan pangan merupakan upaya melindungi dan memperbaiki ekosistem dan keanekaragaman hayati untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan manusia atau penduduk saat ini tanpa mengurangi potensinya untuk memenuhi kebutuhan di masa mendatang. Selain itu pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam perlu dikelola agar tidak melampaui daya dukung lingkungan. Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan dapat dilakukan dengan beberapa kegiatan, yaitu perlindungan dan perbaikan ekosistem dan jasa lingkungan hidup serta konservasi dan pemanfaatan air secara;

Analisis: Perbaiki sistem logistik untuk kelancaran distribusi. Konektivitas transportasi yang memadai menjadi prasyarat bagi kemajuan dan kualitas bangsa dan negara untuk bisa bersaing dengan negara dan bangsa lain. Sistem dan konektivitas transportasi yang memadai juga dapat meningkatkan devisa dan pendapatan negara, mempermudah alur distribusi barang dan jasa sehingga mempermudah masyarakat dan pelaku usaha dapat mendistribusikan barang dan jasa lebih efektif dan efisien. Meski tertinggal dari negara-negara lain yang sudah lebih dulu maju di dunia, bahkan di Asia, langkah Indonesia untuk kembali memperbaiki dan menata infrastrukturnya patut dibanggakan. Dalam satu dekade terakhir upaya pembangunan dan pengembangan infrastruktur transportasi dilakukan secara masif untuk menopang tumbuh dan berkembangnya kebutuhan masyarakat Indonesia. Upaya mengintegrasikan sektor transportasi yang efektif dan efisien terus dilakukan, demikian juga konektivitas transportasi dari satu titik ke titik yang lain, dari satu wilayah ke wilayah yang lain. Di tengah keterbatasan anggaran yang dimiliki negara dan luasnya jangkauan wilayah Indonesia, strategi disain konektivitas transportasi diarahkan pada prioritas konektivitas transportasi yang mendukung pengembangan potensi ekonomi wilayah dan kelancaran logistik. Akselerasi pertumbuhan investasi. Upaya pemerintah Indonesia dalam menggenjot laju





investasi untuk pertumbuhan ekonomi nasional selaras dengan argumen Hermes & Lensink (2003) yang menyatakan bahwa Foreign Direct Investment (FDI) memiliki dampak positif dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi terhadap negara penerima di mayoritas negara–negara Amerika Latin dan Asia. Sebagai negara berkembang dengan mayoritas penduduk usia produktif, peran investasi dalam menyediakan lapangan kerja untuk mendorong sektor – sektor produktif menjadi fokus yang perlu mendapat perhatian. Dalam publikasi World Bank pada September 2019 dengan judul ‘Global Economic Risks and Implications for Indonesia’, kunci dari pertumbuhan ekonomi terletak pada seberapa besar Penanaman Modal Asing (PMA). Skema Omnibus Law diharapkan menjadi terobosan yang inovatif dalam upaya debirokratisasi dan deregulasi serta menjadi momentum krusial dalam mendobrak laju investasi nasional karena penerapan Omnibus Law akan dapat mengarahkan pada cipta lapangan kerja yang substansinya menciptakan ekosistem investasi yang kondusif untuk penguatan perekonomian dengan penciptaan dan perluasan lapangan kerja, peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan serta perlindungan UMKM. Muatan dalam Omnibus Law mencakup penyederhanaan perijinan berusaha, persyaratan investasi, ketenagakerjaan, kemudahan dan perlindungan UMKM, kemudahan berusaha, dukungan riset dan inovasi, penataan administrasi pemerintahan, aturan pengenaan sanksi, aturan tata ruang dan pengadaan lahan, kemudahan proyek pemerintah serta pemberian fasilitas kawasan ekonomi. Pemerintah daerah juga diharapkan bisa melakukan hal serupa untuk memangkas peraturan daerah yang menghambat dan membebani, merombak aturan yang tumpang tindih agar bisa fleksibel menghadapi perubahan dunia, dengan menjadikan visi besar dan framework yang harus memiliki fokus yang jelas sinkron dan terpadu dengan mengedepankan konsistensi.





Laporan Survei Indikator Survei Ekonomi Indonesia (ISEI) Index Cabang: Yogyakarta

Tim Penyusun :

1. Dr. Y. Sri Susilo
2. Eko Suwardi, Ph.D
3. Dr. D. Wahyu Ariani

Ringkasan Eksekutif

Sebanyak 133 responden terdiri pengurus dan anggota ISEI Cabang Yogyakarta. Profesi responden terdiri dari dosen, pengusaha, aparatur sipil negara (ASN), pimpinan/staf perbankan/lembaga keuangan, dan pimpinan/staf lembaga non-pemerintah.

Responden berpendapat bahwa kondisi ekonomi secara umum dan pertumbuhan ekonomi baik tingkat nasional dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tidak berbeda dengan nyata atau sama saja. Hal tersebut berlaku untuk kondisi saat ini (saat survei dilakukan) dengan kondisi 3 bulan ke depan. Untuk kondisi pengangguran dan inflasi juga tidak berbeda atau sama saja. Hal tersebut berlaku baik tingkat nasional dan DIY, baik untuk kondisi saat ini dan 3 bulan mendatang. Namun untuk pengangguran dan inflasi, dilihat dari rata-rata nilai skor yang lebih rendah untuk kondisi 3 bulan ke depan, maka dapat diartikan ada kecenderungan responden cenderung memprediksi kondisi pengangguran dan inflasi ke depan semakin membaik.

Tantangan ekonomi di tingkat nasional dan DIY menurut responden berbeda, Untuk tingkat nasional tantangan yang dihadapi untuk kondisi saat ini adalah kenaikan suku bunga. Untuk 3 bulan ke depan adalah defisit APBN. Tantangan ekonomi di tingkat daerah pada saat ini adalah gejolak dan kondisi politik dalam negeri. Selanjutnya untuk 3 bulan ke depan tantangan oleh pemerintah DIY adalah volatilitas kurs.

Responden mempunyai persepsi bahwa pemerintah pusat mempunyai kemampuan terutama dalam peningkatan *human capital* (termasuk peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan peningkatan kesehatan masyarakat) serta perbaikan sistem logistik. Dalam hal kemampuan pemerintah DIY, responden mempunyai persepsi bahwa kemampuan tersebut terutama dalam hal menciptakan rasa aman dan tenteram serta peningkatan *human capital*.



Ekspektasi Ekonomi



Analisa:

- Dalam melihat kondisi ekonomi nasional secara umum, responden melihat kemungkinan tidak perubahan atau sedikit ada perubahan dalam tiga bulan depan. Hal tersebut dapat dipotret dari nilai rata-rata 1,54 dalam interval lebih baik dan sama saja. Artinya responden melihat dalam 3 bulan ke depan perekonomian nasional tidak menjadi lebih buruk (nilai rata-rata = 3). Untuk kondisi ekonomi daerah secara umum, responden melihat kondisi ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tidak berbeda dengan ekonomi nasional pada saat ini dan dalam 3 bulan mendatang.
- Responden juga melihat pertumbuhan ekonomi nasional dan DIY, baik kondisi saat ini maupun 3 bulan mendatang, tidak berbeda signifikan/nyata. Hal tersebut dapat dilihat dari angka rata-rata nasional sebesar 1,52 (antara lebih baik dan sama saja) dan angka rata-rata untuk DIY sebesar 1,54/1,57 (antara lebih baik dan sama saja).
- Dalam hal pengangguran, untuk level nasional responden menyatakan untuk 3 bulan mendatang sama saja/tidak ada perubahan (nilai rata-rata saat ini 2,04 dan nilai rata-rata 3 bulan mendatang 1,95 masih dalam kisaran sama saja). Selanjutnya untuk level DIY, responden menyatakan hal yang sama (nilai rata-rata saat ini 1,98 dan nilai rata-rata 3 bulan mendatang 1,87). Hal ini dapat diartikan bahwa dalam 3 bulan



mendatang kondisi pengangguran di tingkat nasional dan DIY dalam kondisi sama saja/tidak ada perubahan yang nyata.

- Untuk inflasi diperkirakan dalam 3 bulan mendatang akan sedikit lebih baik namun tidak berbeda nyata jika dibandingkan kondisi inflasi saat ini, baik secara nasional maupun di DIY (nilai rata-rata pada saat ini dibandingkan dengan nilai rata-rata 3 bulan ke depan mengalami penurunan namun masih di kisaran nilai rata-rata 2 atau sama saja/tidak berubah)
- Pandangan responden dapat diduga tidak terlepas kondisi saat ini di mana pertumbuhan ekonomi Triwulan I/2022 nasional sebesar (5,01%-yoy) dan DIY (2,91%-yoy), pengangguran nasional (5,83% -yoy) dan DIY (3,73%-yoy) per Februari 2022. Besarnya inflasi nasional (4,35%-yoy) dan DIY (5,33%-yoy).

Persepsi Tantangan Ekonomi

Tabel 1. Lima Tantangan Ekonomi Terbesar dari Cabang Yogyakarta

Di Tingkat Nasional		Di Tingkat Daerah	
Kondisi Saat ini	Prediksi 3 Bulan Kedepan	Kondisi Saat ini	Prediksi 3 Bulan Kedepan
1. Kenaikan suku bunga kredit	1. Defisit APBN	1. Gejala dan kondisi politik dalam negeri	1. Volatilitas kurs
2. Gejala dan kondisi politik dalam negeri	2. Volatilitas kurs	2. Volatilitas kurs	2. Pertumbuhan investasi yang melambat
3. Defisit APBN	3. Pertumbuhan investasi yang melambat	3. Kenaikan suku bunga kredit	3. Defisit APBN
4. Volatilitas kurs	4. Ketersediaan bahan pokok yang terbatas	4. Defisit APBN	4. Kenaikan suku bunga kredit
5. Pertumbuhan investasi yang melambat	5. Gejala dan kondisi politik dalam negeri	5. Pertumbuhan investasi yang melambat	5. Gejala dan kondisi politik dalam negeri

Analisa:

Responden mencoba memotret 5 (lima) tantangan ekonomi terbesar baik di level nasional dan daerah (DIY). Dalam kondisi saat ini (saat survei dilakukan), tantangan ekonomi nasional terbesar secara berurutan adalah: (1) kenaikan suku bunga, (2) gejala dan kondisi sosial politik dalam negeri, (3) defisit APBN, (4) volatilitas kurs, dan (5) pertumbuhan investasi yang melambat. Jika dicermati untuk kondisi saat ini, pilihan kenaikan suku Bunga sebagai tantangan ekonomi terbesar merupakan pilihan yang rasional. Hal ini terkait dengan kondisi saat ini dimana inflasi cenderung meningkat, namun Bank Indonesia belum menaikkan suku bunga acuan (*BI-7 Day Reverse Repo Rate*/(*BI7DRR*)).

Untuk prediksi 3 bulan ke depan, terjadi pergeseran tantangan di mata responden. Tantangan ekonomi: terberat masing-masing adalah (1) defisit





APBN, (2) volatilitas kurs, (3) pertumbuhan investasi yang melambat, (4) ketersediaan bahan pokok yang terbatas, dan (5) gejolak dan kondisi politik dalam negeri. Pilihan tantangan paling berat defisit APBN dapat dipahami, hal ini sejalan beban pemerintah dalam membiayai pemulihan ekonomi yang terdampak pandemi. Seperti diketahui, tahun 2021 realisasi defisit APBN mengalami penurunan sesuai seperti yang telah diproyeksikan, yaitu sebesar 783 triliun atau sekitar 4,65 persen dari GDP. Untuk tahun 2022 defisit APBN masih tetap diatas 3 persen dengan proyeksi sebesar 4,85 persen dari GDP.

Di tingkat DIY, tantangan ekonomi terbesar saat adalah gejolak dan kondisi politik dalam negeri. Pilihan responden mungkin saja didasari subyektivitas, namun variable terbesar memang dapat memengaruhi perekonomian. Jika dicermati maka sebenarnya kondisi politik dalam negeri termasuk di DIY relatif kondusif untuk kegiatan ekonomi.

Untuk kondisi 3 bulan ke depan, terjadi pergeseran pilihan oleh responden. Tantangan ekonomi terbesar adalah: (1) volatilitas kurs, (2) pertumbuhan ekonomi yang melambat, (3) defisit APBN, (4) kenaikan suku Bunga kredit, dan (5) gejolak dan kondisi politik dalam negeri. Pilihan tantangan terbesar volatilitas kurs dapat dimegerti, hal ini terkait dengan belum berakhirnya perang Rusia dengan Ukraina, serta cenderung meningkatnya harga pangan dunia. Hal tersebut daapt memengauhi stabilitas nilai tukar mata uang rupiah (Rp) terhadap mata uang asing kuat (*hard currencies*), midalnya dolar AS. Pilihan melambatnya pertumbuhan investasi juga dipahami, hal ini dapat dikaitykan melambatnya investasi global yang dikarenakan pemulihan ekonomio pascapandemi. Argumentasi tersebut diperkuat dengan pernyataan Meneteri keuangan RI bahwa ada sekitar 60 persen negara miskin terancam bangkrut.





Persepsi Kemampuan Pemerintah

Tabel 2. Top-5 Persepsi Kemampuan Pemerintah berdasarkan cabang Yogyakarta

Pemerintah Pusat	Pemerintah Daerah
1. Peningkatan <i>human capital</i> (termasuk peningkatan sumberdaya manusia yang berkualitas dan peningkatan kesehatan masyarakat)	1. Menciptakan rasa aman dan tenteram
2. Perbaikan sistem logistik untuk kelancaran distribusi	2. Peningkatan <i>human capital</i> (termasuk peningkatan sumberdaya manusia yang berkualitas dan peningkatan kesehatan masyarakat)
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan menciptakan lapangan kerja	3. Menciptakan lingkungan hidup hijau, meningkatkan ketahanan bencana, dan meminimalisir dampak perubahan iklim.
4. Menciptakan rasa aman dan tenteram	4. Menyediakan dan merawat infrastruktur
5. Akselerasi pertumbuhan investasi	5. Perbaikan sistem logistik untuk kelancaran distribusi

Analisa:

Sebanyak 133 responden pengurus dan anggota ISEI Cabang Yogyakarta mempunyai persepsi terhadap kemampuan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menangani permasalahan ekonomi dan sosial. Responden mempunyai keyakinan bahwa pemerintah pusat mempunyai kemampuan untuk menangani permasalahan: (1) peningkatan *human capital* (termasuk peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan peningkatan kesehatan masyarakat). (2) Perbaikan sistem logistik untuk kelancaran distribusi. (3) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan menciptakan lapangan kerja. (4) Menciptakan rasa aman dan tenteram. (5) Akselerasi pertumbuhan ekonomi.

Pilihan responden bahwa pemerintah pusat mempunyai kemampuan dalam meningkatkan *human capital*. Pilihan tersebut dapat dipahami karena pemerintah pusat telah membangun sejumlah infrastruktur Pendidikan dan Kesehatan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Untuk masyarakat miskin juga dapat menikmati fasilitas tersebut melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Pilihan kemampuan bahwa pemerintah mempunyai kemampuan dalam memperbaiki sistem logistik dan kelancaran distribusi juga masuk akal. Hal ini terkait dengan pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah seperti jalan tol, pelabuhan dan bandara.

Dalam hal kemampuan pemerintah daerah (DIY), responden mempunyai persepsi bahwa kemampuan tersebut terutama dalam hal: (1) menciptakan rasa aman dan tenteram. (2) Peningkatan *human capital* (termasuk peningkatan





sumber daya manusia yang berkualitas dan peningkatan kesehatan masyarakat). (3) Menciptakan lingkungan hidup yang baik, meningkatkan ketahanan bencana, dan meminimalisir dampak perubahan iklim. (4) Menyediakan dan merawat infrastruktur. (5) Perbaiki sistem logistik untuk kelancaran distribusi.

Pilihan terhadap menciptakan rasa aman dan tenteram dimaklumi, karena DIY dikenal dengan daerah yang “ayem tentrem”. Dengan isu kecil saja, misalnya “klithik” menjadi faktor timbulnya ketidaknyamanan masyarakat DIY. Pilihan kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan *human capital* juga hal yang logis. Hal ini terkait dengan ketersediaan infrastruktur pendidikan dan kesehatan yang memadai, salah satunya indikator angka IPM DIY yang tinggi. IPM DIY tahun 2021 sebesar 80,22, sedangkan IPM Indonesia sebesar 72,29.

